



# **POLA KEBIJAKAN POLITIK INDONESIA DARI MASA KE MASA**

**Dr. Hj. Siti Marwiyah, M.Si.**



## **KATA PENGANTAR**

Kebijakan publik pada hakikatnya adalah intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mengubah kondisi yang ada atau mempengaruhi arah dan kecepatan dari perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat guna mewujudkan kondisi yang diinginkan . Intervensi itu dilakukan melalui suatu atau serangkaian strategi kebijakan dengan menggunakan berbagai peralatan / instrumen / kebijakan. Dalam hal ini, kondisi yang ada dan perubahan yang berlangsung yang ingin dipengaruhi serta kemungkinan perubahan dari kecenderungan perubahan yang ada itu, sangat bersifat spesifik. Artinya, sangat tergantung pada waktu dan lingkungan tertentu dalam masyarakat yang hanya dapat dipahami dan dihayati secara tepat oleh mereka yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan . Oleh sebab itu, masukan dan kritik membangun dari segala pihak untuk kesempurnaan tulisan ini selalu kami harapkan.

Akhirnya pada tempatnya di sini kami menyampaikan terima kasih kepada banyak pihak yang telah ikut memberi dorongan kepada kami di dalam penulisan buku ini. Di antara mereka yang dapat kami sebutkan di sini adalah teman teman dan juga Khusus kepada Mahasiswa Semester 7, Saya menyampaikan rasa terimakasih kepada mereka atas kerjasama dan koordinasi yang baik dalam menyelesaikan buku ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Marwiyah, M. Siyang mewakili Penerbit telah bersedia untuk menerbitkan buku edisi kedua ini. Semoga Allah selalu melindungi dan membimbing kita sekalian pada jalan yang benar. Amin .

Wassalam

Probolinggo, 29 November 2022

## DAFTAR ISI

Cover.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii

### BAB I

#### TEORI DAN RUANG LINGKUP1

Definisi1

Tujuan Kebijakan Publik4

Prinsip-Prinsip Kebijakan Publik6

Konsep Kebijakan Publik7

### BAB II

#### PARADIGMA14

Paradigma Menurut Para Ahli15

Paradigma Administrasi Publik18

Proses Perubahan Paradigma Dalam Administrasi21

Hubungan Paradigma Administrasi Negara Dengan Kebijakan Publik25

### BAB III

#### KEBIJAKAN PUBLIK26

Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Publik26

Dimensi Pelaksanaan Kebijakan Publik28

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Publik30

### BAB IV

#### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK31

Pengertian Kebijakan Publik33

## **BAB V**

### **ASAL USUL NEGARA46**

**Pengertian Negara46**

**Asal Usul Negara Yang Berpancasila51**

## **BAB VI**

### **PEMERINTAHAN54**

**Pengertian Pemerintah54**

**Tujuan Pemerintahan57**

**Macam – Macam Bentuk Pemerintahan58**

**Sejarah pemerintahan Di Indonesia**

## **BAB VII**

### **GOOD GOVERNANCE63**

**Pengertian Good Governance63**

**Konsep Dan Prinsip Good Governance 65**

**Penerapan Good Governance Di Indonesia67**

## **BAB VIII**

### **KEBIJAKAN PUBLIK PRESIDEN INDONESIA PADA MASA PRESIDEN SOEKARNO70**

**Biografi70**

**Teori Yang Berkaitan Dengan Soekarno78**

**Kebijakan Publik Soekarno84**

**Kelebihan Dan Kekurangan Kepemimpinan Soekarno92**

## **BAB IX**

### **KEBIJAKAN PUBLIK PRESIDEN INDONESIA PADA MASA PRESIDEN SOEHARTO95**

**Biografi95**

**Teori Kepemimpinan Soeharto112**

**Kebijakan Publik Soeharto117**

**Kelebihan Dan Kekurangan Kepemimpinan Soeharto124**

**BAB X**

**KEBIJAKAN PUBLIK PRESIDEN INDONESIA PADA MASA PRESIDEN  
BJ HABIBIE125**

**Biografi125**

**Teori Kepemimpinan BJ Habibie127**

**Kebijakan Publik BJ Habibie134**

**Kelebihan Dan Kekurangan Kepemimpinan BJ. Habibie140**

**BAB XI**

**KEBIJAKAN PUBLIK PRESIDEN INDONESIA PADA MASA PRESIDEN  
K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur)143**

**Biografi143**

**Teori Kepemimpinan K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur)145**

**Kebijakan Publik K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur)148**

**Kelebihan Dan Kekurangan KepemimpinaK.H Abdurrahman Wahid (Gus  
Dur)155**

**BAB XII**

**KEBIJAKAN PUBLIK PRESIDEN INDONESIA PADA MASA PRESIDEN  
MEGAWATI SOEKARNO PUTRI159**

**Biografi159**

**Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri161**

**Kebijakan Publik Megawati Soekarno Putri 163**

**Kelebihan Dan Kekurangan Kepemimpinan Megawati Soekarno Putri169**

**BAB XII**

**KEBIJAKAN PUBLIK PRESIDEN INDONESIA PADA MASA PRESIDEN  
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO171**

**Biografi171**

**Teori Kepemimpinan SBY175**

**Kebijakan Publik SBY176**

**Kelebihan Dan Kekurangan Kepemimpinan SBY181**

**BAB XIII**

**KEBIJAKAN PUBLIK PRESIDEN INDONESIA PADA MASA PRESIDEN  
JOKO WIDODO183**

**Biografi183**

**Teori Kepemimpinan Joko Widodo187**

**Kebijakan Publik Joko Widodo197**

**Kesimpulan.....208**

**DAFTAR PUSTAKA.....210**

# BAB I

## TEORI DAN RUANG LINGKUP

### Definisi

Adapun pada dasarnya mengenai definisi kebijakan publik (*public policy*) terdapat batasan holo referensi studi ilmu politik sehingga pengertian ini memberikan penekanan yang berbeda-beda akan tetapi timbulnya perbedaan dari pendapat ahli yang memiliki sisi perbedaan pada latar belakang tersebut<sup>1</sup>. Di sisi lain didirikan serta model yang digunakan bagaimana kebijakan publik ini dapat diartikan sebagai contoh kebijakan publik individu sebagai pada susunan keputusan yang dibuat pemerintah atau tindakan mungkin diperkirakan.

Berdasarkan definisi dari Carl J Federick<sup>2</sup> mengidentifikasi kebijakan sebagai rangkaian tindakan ataupun kegiatan yang diusulkan seseorang atau kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan atau pun kesulitan dan juga kesempatan terdapat pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. dari pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan juga tujuan merupakan suatu bagian yang penting dalam mendefinisikan kebijakan, karena bagaimana kebijakan ini juga harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah tersebut.

Dan juga definisi dari Robert Eyestone<sup>3</sup> kebijakan publik sebagai suatu hubungan pada unit serta pasti kurang karena dapat mencakup banyak hal. Meskipun dari batasan tersebut belum cukup memberikan disparitas yang jelas dengan apa yang dibutuhkan oleh pemerintah yang juga dilaksanakan oleh pemerintah serta apa yang sebenarnya pemerintah laksanakan.

---

<sup>1</sup> (Leo, 2012)

<sup>2</sup> (Agustino, 2016)

<sup>3</sup> Sigit Hermawan and Amirullah, 'Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif', *Metode Penelitian Bisnis Bandung*, 2021, 264.

Richard Rose<sup>4</sup>, politik berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sedikit berhubungan serta konsekuensi dengan mereka yang bersangkutan daripada suatu keputusan itu sendiri. terdapat sifatnya lebih kuat tetapi berguna pada sisi kebijakan yang dipahami pada sisi bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Pada suatu definisi dari Friedrich bahwa kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang kelompok dan pemerintah pada lingkungan tertentu yang bisa memberikan hambatan dan juga peluang dalam rangka mencapai suatu tujuan ataupun merealisasikan sesuatu sasaran yang dimaksud tertentu. akan tetapi definisi ini juga adanya dimensi yang luas dengan alasan kebijakannya tidak saja dipahami akan tetapi sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah serta kelompok maupun individu.

Kebijakan publik yang selalu dikaitkan pada pemerintah dengan alasan bahwa peran pemerintah mempunyai kekuasaan tertinggi untuk melakukan keputusan, mengendalikan, dan bertanggung jawab untuk rakyat ataupun kepentingan umum. Selanjutnya, banyak orang percaya masalah kebijakan adalah suatu proses kondisi objektif yang keberadaannya secara sederhana dan juga dapat ditentukan dari "fakta" apa yang ada di balik suatu kasus<sup>5</sup>. Dari pandangan yang naif mengenai sifat masalah kebijakan ini gagal dalam memahami bahwa fakta-fakta yang sama misalnya, statistik pemerintah yang menunjukkan bahwa kriminalitas polusi dan inflasi meningkatkan cenderung diinterpretasikan secara berbeda dan dalam setiap pelaku kebijakan. Karena, dari informasi yang sama dapat dan juga selalu menghasilkan konflik definisi maupun penjelasan terhadap suatu masalah. Hal ini juga karena terdapat fakta-fakta yang mengenai suatu hal tidak konsisten, tetapi karena analisis kebijakan, mengambil keputusan dan juga pelaku-pelaku kebijakan lainnya perdagangan pada asumsi-asumsi yang berbeda mengenai sifat manusia, pemerintah komandan kesempatan melakukan perubahan sosial melalui tindakan publik bagaimana dengan kata lain masalah kebijakan terletak di mata para pelakunya tersebut.

---

<sup>4</sup> B A B li, A Kebijakan Publik, and Pengertian Kebijakan, 'Amri Marzali, Antropologi Dan Kebijakan Publik (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 20. 13', 13–57.

<sup>5</sup> Muhamad Ridha Suaib, 'Pengantar Kebijakan Publik', 2016.

Dengan demikian, kebijakan publik ini juga memiliki beberapa langkah. ada beberapa pendapat hal yang merumuskan terkait beberapa langkah kebijakan publik yang berbeda-beda, akan tetapi jika dalam proses kajian selanjutnya, maka proses kebijakan publik meliputi langkah-langkah perumusan masalah formulasi, pelaksanaan, serta evaluasi<sup>6</sup>. kebijakan adalah suatu instrumen pemerintah, rumah lagi dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara melainkan pula government yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik kebijakan dan tujuan merupakan suatu keputusan-keputusan dan juga pemilihan tindakannya secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, Yani rakyat banyak, penduduk masyarakat maupun warga negara. Kebijakan juga merupakan suatu hasil dari adanya sinergi ataupun bahkan kompetisi antara berbagai gagasan bahwa teori ideologi dan kepentingan-kepentingan yang memiliki di suatu sistem politik suatu negara.

Kebijakan publik itu sendiri dapat menyangkut pencapaian publik yang artinya kebijakan publik adalah sesuatu serangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh pabrik sebagai konstituen pemerintah. Sebutkan kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal itu juga suatu tindakan bersifat legal ataupun otoriter karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan<sup>7</sup>. Dan keputusan itu juga mengikuti para pegawai negeri untuk bertindak ataupun mengarah kepentingan tindakan atau kegiatan seperti menyimpan rancangan undang-undang dan peraturan pemerintah untuk pertimbangan oleh parlemen ataupun pengalokasian anggaran guna mengimplementasikan program tertentu.

Pemerintah sebagai yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga harus bertanggung jawab dan juga berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi meningkatkan pelayanan publik dan juga suatu hal kepuasan masyarakat adalah tolak ukur dari keberhasilan pelayanan publik yang diberikan oleh

---

<sup>6</sup> Nuryanti Mustari, 'Pemahaman Kebijakan Publik( Formulasi,Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik)', *Kebijakan Publik Deliberatif*, 1 (2015), 286.

<sup>7</sup> Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik, Kebijakan Publik*, 2020.

penyediaan layanan publik, masyarakat secara maksimal baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya<sup>8</sup>. Kebijakan dibuat berdasarkan teori yaitu modal dari hipotesis mengenai sebab akibat dan juga kebijakan-kebijakan yang senantiasa berdasarkan pada asumsi-asumsi mengenai perilaku dan juga kebijakan ini selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Dalam kebijakan itu juga selalu memuat disinsentif yang mendorong orang untuk tidak melakukan sesuatu. Kebijakan orang juga mampu menyatukan perkiraan-perkiraan mengenai keberhasilan yang akan mencapai dan juga mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi.

Dalam hal ini juga berkaitan dengan definisi tersebut yang mana dapat disebut beberapa karakteristik utama dalam suatu definisi kebijakan publik (konsep) Pertama, pada umumnya bujang publik perhatiannya ditujukan pada tingkat yang mempunyai maksud dan tujuan tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah ataupun acak. Kedua, kebijakan publik pada dasarnya juga mengandung suatu bagian atau berpola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang di mana keputusan yang terpisah-pisah. Ketiga, kebijakan publik juga merupakan ada yang sesungguhnya diajarkan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan mengontrol inflasi, ataupun menawarkan perumahan rakyat dan juga bukan apa yang dimaksud dikerjakan atau akan dikerjakan. Keempat, kebijakan publik dapat juga berbentuk positif maupun negatif. Secara positif yaitu kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam mengenai suatu permasalahan, siaran dulu juga kebijakan publik dapat menyebabkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam suatu konteks tersebut keterlibatan pemerintahan amat sangat diperlukan. Kelima, Kebijakan Publik ini paling tidak secara positif yang didasarkan pada hukum dan juga merupakan tindakan yang bersifat memerintah<sup>9</sup>.

### **Tujuan Kebijakan Publik**

---

<sup>8</sup> Rukayat Yayat, 'Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Gamping', *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)*, 2, 2017, 56–65.

<sup>9</sup> (Jatmiko et al., 2012)

Suatu kebijakan dibuat berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Kebijakan ini juga yang pasti baik memiliki tujuan yang baik pula dan tujuan yang baik memiliki sekurang-kurangnya tiga kriteria yaitu diinginkan untuk dicapai, rasional atau realistis, dan berorientasi kedepannya. Tujuan ini juga diinginkan berarti tujuan tersebut dapat diterima oleh banyak pihak karena kandungan dari isinya juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh banyak pihak ataupun mewakili kepentingan mayoritas atau didukung oleh golongan kuat (dominan) yaitu seperti masyarakat<sup>10</sup>. Kebijakan publik yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat yaitu mengantisipasi ataupun mengurangi dan juga mengatasi masalah-masa sosial yang terjadi di masyarakat yang di mana memenuhi kebutuhan individu keluarga kelompok dan juga masyarakat yang tidak dapat melalui tindakan kolektif. Dan juga mendengarkan suatu hubungan internasional manusia dengan mengurangi disfungsi sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor-faktor internal atau personal maupun eksternal dan juga struktural.

Di dalam meningkatkan situasi ditunjukkan lingkungan sosial ekonomi dan kondusif bagi upaya pelaksanaan peranan-peranan sosial yang pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak-hak, dan martabat kemanusiaan yang di mana menggali dan juga mengeluarkan sikap dan mengembangkan sumber-sumber kemasyarakatan demi tercapainya suatu kesejahteraan rakyat dan juga keadilan sosial. Yang baik juga harus memiliki sifat rasional yang artinya merupakan suatu pilihan terbaik dari berbagai alternatif yang diperhitungkan juga berdasarkan pada kriteria dan juga relevan ataupun masuk dalam akal. Tujuan yang baik juga masuk akal yang memiliki gambaran yang jelas pola pikir yang runtut dan juga mudah dipahami oleh langkah-langkah yang dapat dicapai. Tunjukkan tujuan yang baik berorientasi ke depan, Seperti dalam arti (1) tujuan kebijakan menghasilkan kemajuan ke arah yang diinginkan, yang dapat diukur baik dari aspek kuantitatif maupun kualitatif, (2) tujuan yang ingin dicapai pada masa depan terletak pada suatu jangka waktu tertentu, sehingga dari masa tersebut terlewati dapat dilakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan kebijakan tersebut<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Engel, *Gabungan Teori Administrasi, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2014.

<sup>11</sup> Suaib.

Kebijakan publik itu sendiri yaitu mewujudkan ketertiban dalam masyarakat tujuan masyarakat dan juga kebijakan publik adalah suatu mewujudkan ketentraman dan juga kedamaian dalam masyarakat dan kemudian kebijakan publik mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat. dari Suatu kebijakan yang mengatur kehidupan penduduk dan juga berada di dalam suatu negara tertentu agar tercipta ketertiban kenyamanan dan juga keamanan bersama. Kebijakan publik ini sendiri yang merupakan suatu komponen yang dihasilkan oleh suatu pemerintahan disebut negara yang di mana aku selalu melekat dengan keberagaman suatu pemerintahan di bawah kekuasaan sedang berlangsung. Adapun komponen pemerintahan yang satu ini dapat dilepaskan dari kehidupan berbangsa dan bernegara karena akan membentuk suatu kebijakan publik, dan juga pemerintah tertentu menentukan banyak pihak yang adil di dalamnya oleh sebab itu suatu kebijakan yang dilakukan semakin berkualitas apabila semakin banyak stockholder yang turut menyumbangkan peran di dalamnya bersama dengan para pemerintah melewati tahapan tertentu saat hendak merumuskan suatu kebijakan public itu sendiri<sup>12</sup>

### **Prinsip-prinsip Kebijakan Publik**

Adapun prinsip-prinsip administrasi negara yang dikembangkan pada paradigma kedua yaitu prinsip-prinsip administrasi dan juga merasa sebagai warga negara ataupun bagian ilmu politik para sarjana administrasi negara juga mulai mencari alternatif yang lainnya yaitu ilmu administrasi. Dan juga paradigma ini pada ilmu administrasi negara mencari induk baru yaitu ilmu administrasi. Dari ilmu administrasi itu sendiri merupakan suatu studi gabungan teori organisasi dan juga ilmu manajemen. Teori organisasi (*organization theory*), yang mana menggunakan bantuan dari ilmu jiwa sosial, administrasi niaga, administrasi negara dan juga sosiologi untuk mempelajari tingkah laku organisasi itu sendiri, sedangkan ilmu manajemen (*management service*) menggunakan bantuan ilmu statistik, komputer, analisa sistem, ekonomi, dalam mempelajari perilaku organisasi<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Mutia Anggraini, 'Tujuan Kebijakan Publik Hingga Tahapan Pembentukannya, Ketahui Secara Lengkap', *Merdaka.Com*, 2020.

<sup>13</sup> (Sutapa, 2008)

Prinsip-prinsip ilmu administrasi negara pun tidak dapat melepaskan dari bantuan ilmu-ilmu tersebut. Pada tahun 1960-an munculah Negara ini pun tidak dapat melepaskan dari bantuan ilmu-ilmu tersebut pada tahun “pengembangan organisasi” (organization development) dalam ilmu administrasi, ilmu administrasi negara juga segera mengikutinya. Prinsip-prinsip administrasi berlaku universal, di mana-mana, maka munculah keinginan memisahkan antara prinsip-prinsip dalam organisasi “public” dan private atau bisnis. (“public” administration dan “private administration”). Locus ilmu administrasi negara berada pada organisasi publik<sup>14</sup>.

### **Konsep Kebijakan Publik**

Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu dan juga sejalan dengan hal tersebut yang di mana digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor atau sejumlah aktor yang mana dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Dari kebijakan dan juga hakikatnya yaitu suatu keputusan atas sejumlah maupun serangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain yang di mana mencapai suatu tujuan dan juga lingkungan kebijakan yaitu suatu keadaan yang melatarbelakangi maupun peristiwa yang menyebabkan timbulnya suatu "isu" (masalah) kebijakan, yang di mana mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan oleh kebijakan itu sendiri<sup>15</sup>. Dengan demikian suatu yang dihasilkan oleh pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan juga dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat itu sendiri kebijakan itu juga suatu peristiwa yang ditimbulkan baik untuk mendamaikan klaim dari pihak-pihak yang konflik ataupun untuk menciptakan intensif terhadap suatu tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menciptakan tujuan yang di mana akan mendapatkan suatu perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut<sup>16</sup>. Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian suatu program aktivitas suatu aksi keputusan sikap untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak kebijakan tertentu.

---

<sup>14</sup> (Pasolong, 2019)

<sup>15</sup> Suaib.

<sup>16</sup> Iwan Apriandi, 'Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Syariat Islam Di Kota Langsa', *Implementasi Kebijakan; Sosialisasi; Kepatuhan Masyarakat*, 2017, 11–35.

Sebagai tahapan yang di mana suatu penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi juga dikemukakan telepon diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Berbentuk peraturan pemerintah secara tertulis maupun konvensi konvensi yang merupakan perwujudan kerjasama dari badan legislatif dan juga badan eksekutif. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan dan juga tindakan-tindakan pemerintah yang di mana kebijakan tersebut tidak cukup, akan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata <sup>17</sup>. Kebijakan publik ini juga baik untuk melakukan sesuatu ataupun melakukan suatu landasi maksud dan juga tujuan di dalam kebijakan publik yang pada dasarnya harus senantiasa ditunjukkan kepada kepentingan seluruh anggota masyarakat atas kecuali. Maka dapat dikatakan bahwa kebijakan publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk aktivitas ataupun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam konteks tunjukkan pemerintah ini juga tidak memproses suatu permasalahan yang ada dalam bentuk kebijakan publik di mana mengatur suatu tujuan kehidupan masyarakat agar dapat sesuai dengan yang dikerjakan.

Ketertiban umum adalah keputusan yang mengikat bagi banyak orang di tingkat strategis atau kotor, yang dibuat oleh otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat bagi masyarakat, kebijakan publik harus diadopsi oleh badan-badan politik, yang mana dari mereka yang diperintahkan oleh publik atau mafia, umumnya melalui proses pemilihan dan untuk bertindak atas nama publik. Selain itu, kebijakan negara dilakukan oleh administrasi negara yang dikelola oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik di negara modern adalah pelayanan publik, yaitu segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi; dan menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai dalam suatu konstitusi dan juga konstitusi. Secara empiris, permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan publik cukup kompleks. Fenomena kebijakan publik tidak hanya pada proses formulasi dilakukan atau cara substansi kebijakan publik dituangkan dan

---

<sup>17</sup> B A B li and A Kebijakan Publik, 'Bab II Landasan Teori Kebijakan Publik (Evaluasi Kaki Lima Di Kabupaten Kampar)', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2017, 9–35.

diimplementasikan, tetapi juga menyangkut dampak atau implikasi yang ditimbulkan dari sebuah kebijakan publik. Kebijakan publik tidak hanya memberikan suatu tata peraturan ataupun norma-norma yang harus ditaati akan tetapi juga perlu diimbangi dengan kemampuan untuk mengantisipasi dampak dan implikasinya, termasuk kapabilitas responsif dari sebuah kebijakan publik<sup>18</sup>.

Tatanan sosial harus memperhitungkan kepentingan yang berbeda. Kebijakan publik juga harus mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan tersebut ke dalam produk kebijakan yang diprioritaskan, mendesak dan mengarah pada upaya penataan kepentingan yang lebih luas. Penelitian kebijakan publik untuk mengawasi pertukaran teori dan proses yang terkait dengan kebijakan publik. Dapat dikatakan bahwa kebijakan negara tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan kebijakan<sup>19</sup>. Oleh karena itu, salah satu tujuan kajian kebijakan publik adalah untuk menganalisis secara bertahap proses pembentukan Kebijakan Publik dalam rangka mengimplementasikan suatu kebijakan publik tertentu. Tahapan ini diringkas sebagai proses dari siklus kebijakan publik. Setiap tahap pembentukan kebijakan publik mencakup dalam suatu tahapan yang berbeda dan metode yang terperinci. Tahapan-tahapan yang terlibat dalam pembentukan kebijakan publik memiliki keuntungan dan konsekuensi yang berbeda bagi keberadaan proses tersebut, terutama bagi para pelaku kebijakan publik.

## **Ruang Lingkup**

### **1. Jenis-jenis Ruang Lingkup**

James E. Anderson (1970) mengklasifikasikan, jenis kebijakan publik sebagai berikut:

#### **a. Kebijakan Substantif dan Prosedural**

Kebijakan substantif adalah kebijakan yang membahas substansi permasalahan yang dihadapi pemerintah. Misalnya kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi, dll. Kebijakan prosedural adalah kebijakan yang dilihat oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunannya (politisi). Misalnya UU

---

<sup>18</sup> (Mustari, 2015)

<sup>19</sup> (Ramdhani & Ramdhani, 2016)

Pendidikan yang memiliki kewenangan Departemen Pendidikan Umum. Namun, banyak instansi/organisasi lain yang terlibat dalam pelaksanaan suatu lembaga, baik lembaga pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, antara lain DPR, Kementerian Hukum, Kementerian Tenaga Kerja, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam pelaksanaan institusi. ) dan juga Presiden, yang mengesahkan undang-undang, pamit Pihak berwenang/organisasi yang terkait dengan kelompok kepentingan politik dipanggil.

b. Distribusi, redistribusi dan kebijakan regulasi

Kebijakan distribusi adalah kebijakan yang mengatur pemberian jasa/manfaat kepada perorangan, kelompok atau perusahaan. Misalnya kebijakan tax holiday. Kebijakan redistribusi adalah kebijakan yang mengatur transfer distribusi kekayaan, properti, atau hak. Misalnya, kebijakan untuk pembelian real estate untuk kepentingan umum. Kebijakan regulasi adalah kebijakan yang mengatur pembatasan/larangan atas tindakan/operasi. Misalnya, Kebijakan melarang kepemilikan dan penggunaan senjata api.

c. Kebijakan material

Kebijakan material adalah kebijakan yang mengatur distribusi/penyediaan sumber daya material kepada penerima. Misalnya, kebijakan membangun rumah sederhana.

d. Kebijakan barang publik dan barang pribadi

Kebijakan barang publik adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang/jasa oleh pemerintah untuk kepentingan banyak orang. Misalnya, instruksi tentang perlindungan keselamatan dan penyediaan jalan umum. Kebijakan Barang Swasta adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang/jasa oleh perorangan

untuk kepentingan perseorangan (individu) di pasar bebas dengan biaya tertentu. Contoh tempat hiburan, hotel, dll.

### **Ciri - Ciri kebijakan Publik**

Menurut Suharno (2010: 22-2), kekhususan di dalam kebijakan publik disebabkan karena kebijakan itu dirumuskan<sup>20</sup>. Karakteristik kebijakan publik meliputi:

- a. Kebijakan umum adalah tindakan yang mengarah pada tujuan daripada perilaku atau tindakan acak dan serampangan. Kebijakan publik dalam sistem politik modern adalah kegiatan yang direncanakan.
- a. Politik pada hakikatnya terdiri dari kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan dan berpola yang mengarah pada tujuan-tujuan tertentu yang dikejar oleh pejabat publik dan bukan merupakan keputusan yang diskrit. Kebijakan tidak cukup dengan memasukkan keputusan tentang undang-undang di bidang tertentu, tetapi diikuti oleh keputusan tentang implementasi dan penegakannya.
- b. Kebijakan ini juga bersangkutan pautkan dengan apa yang telah dilakukan pemerintah dalam suatu bidang tertentu dan suatu kegiatan yang telah dilakukannya.
- c. Kebijakan publik bisa positif, bisa negatif, ada kemungkinan penguasa memutuskan untuk tidak bertindak atau tidak melakukan apa-apa dalam hal-hal yang memerlukan intervensi negara.

### **0. Analisis Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan suatu nasehat ataupun bahan pertimbangan pembuatan kebijakan publik yang di mana berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas dan dinasti dilakukan oleh suatu organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut dan juga banyak berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya kerusakan tujuan kebijakan. Di dalam analisis kebijakan

---

<sup>20</sup> Apriandi.

publik itu sendiri juga bertujuan memberikan rekomendasi ataupun membantu para pembuatan kebijakan dalam upaya untuk memecahkan masalah-masalah di dalam publik itu sendiri <sup>21</sup>. Dalam suatu analisis kebijakan publik juga terdapat banyak informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebut mana bahan pertimbangan ataupun masukan kepada pihak membuat kebijakan itu sendiri.

Berbagai alasan kebijakan publik berdasarkan kajian kebijakan yang dapat dibedakan antara analisis suatu Kebijakan sebelum adanya kebijakan publik tertentu dan sesudah adanya kebijakan publik tertentu itu juga yang di mana analisis kebijakan sebelumnya banyak kebijakan publik yang berpijak pada permasalahan suatu pabrik yang semata sehingga hasilnya benar-benar sebuah rekomendasi kebijakan publik yang baru. Dalam keduanya itu sendiri baik analisis maupun kebijakan sebelumnya mau pun juga sesudah adanya kebijakan mempunyai banyak tujuan yang sama yaitu memberikan rekomendasi kebijakan kepada penentu kebijakan agar didapat suatu kebijakan yang lebih berkualitas dan juga lebih efisien<sup>22</sup>. Ada tiga bentuk utama analisis kebijakan publik yaitu :

1. Analisis Kebijakan prospektif

Analisis prospektif yang berupa produksi dan juga transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan juga diimplementasikan yang di mana suatu analisis kebijakan di sini juga merupakan suatu alat untuk mensintesis informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif adalah referensi kebijakan yang menyatakan secara komparatif dalam bahasa kuantitatif atau penentu dalam pengambilan keputusan kebijakan.

0. Analisis kebijakan Retrospektif

Analisis kebijakan restoratif adalah sebagai penciptaan dan juga transformasi-informasi sesudah akses kebijakan yang dilakukan

---

<sup>21</sup> Mutia Anggraini.

<sup>22</sup> Adm.fisip.unpatti, 'Bahan Ajar Kebijakan Pemerintah Dikonversi BAB I PENGERTIAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN -', *Article*, 2019 (2019), 1–88.

terdapat tiga tipe analisis berdasarkan kegiatan dikembangkan oleh kelompok analisis ini dan alasan yang berorientasi pada disiplin analisis berorientasi pada masalah dan juga harus diberi orientasi pada aplikasi. Tentu ada ketiga analisis retrospektif ini terdapat kelebihan dan kekurangan

0. Analisis kebijakan yang Terintegrasi

Kebijakan terorganisasi merupakan suatu bentuk analisis yang kombinasikan gaya operasi yang mana menaruh perhatian pada penciptaan dan jasa transformasi informasi sebagai adanya sesudah tindakan kebijakan yang diambil. Analisis kebijakan menteri koperasi tidak hanya mengharuskan para penelitian retrospektif dan perspektif akan tetapi juga menutup para analisis untuk terus-menerus menghasilkan dan juga mentransformasikan informasi setiap saat.

## BAB II

### PARADIGMA KEBIJAKAN

#### A. Definisi Paradigma

Terdapat banyak definisi paradigma. Masing-masing dengan konsep tersendiri. Tetapi daripada semua ini bolehlah disimpulkan bahawa ia secara amnya adalah perspektif tentang sesuatu yang mengandungi satu set andaian, teori, model dan penyelesaian khusus yang berkaitan dengan subjek, matlamat dan sifat bahan kajian. Paradigma mengandungi beberapa pendekatan, pendekatan mengandungi beberapa kaedah, kaedah mengandungi beberapa teknik, manakala dalam teknik terdapat beberapa kaedah dan alat. Menurut Newman (1997: 62), terdapat tiga paradigma kajian iaitu: (1) paradigma positivis (positivist paradigm), (2) interpretive paradigm (interpretative paradigm), dan (3) reflexive paradigm. Lazimnya, paradigma positivis dibandingkan dengan pendekatan kuantitatif yang digunakan oleh sains semula jadi secara umum, walaupun kebelakangan ini beberapa sains sosial juga menggunakan paradigma positivis<sup>23</sup>.

Paradigma positivisme biasanya hanya melihat "permukaan" yang muncul tanpa memahami makna yang lebih mendalam. Tujuan paradigma ini adalah untuk mencapai generalisasi di mana memang terdapat perkara seperti tingkah laku manusia yang tidak boleh digeneralisasikan dan masih akan wujud unsur subjektivitasnya<sup>24</sup>.

Paradigma tafsiran lahir sebagai respons kepada paradigma positivis yang dilihat kurang menyeluruh dalam menjelaskan realiti. Paradigma interpretif memandang realiti sosial sebagai holistik, tidak dapat dipisahkan, kompleks, dinamik, penuh makna, dan hubungan antara gejala adalah timbal balik, bukan sebab akibat. Paradigma interpretif juga memandang realiti sosial sebagai sesuatu yang dinamik, diproses, dan penuh dengan makna subjektif. Realiti sosial tidak lain hanyalah pembinaan sosial. Berkaitan dengan kedudukan manusia, paradigma tafsir memandang manusia sebagai makhluk yang sedar dan bertindak dengan sengaja (intentional human being). Manusia adalah makhluk yang mencipta dunia,

---

<sup>23</sup>Mudjia Rahardjo, "Paradigma Interpretif," 2018.

<sup>24</sup>Rahardjo.

memberi makna kepada dunia, tidak terkekang oleh undang-undang di luar diri mereka, dan merupakan pencipta pelbagai makna<sup>25</sup>.

Paradigma Pedagogi Reflektif (PPR) adalah pendekatan pembelajaran yang menitikberatkan pada mata pelajaran untuk menemukan makna dari pengalaman berdasarkan nilai-nilai yang dikembangkan oleh nilai-nilai kemanusiaan. Praktisnya, PPR membutuhkan komitmen yang konsisten dari setiap elemen pendidik dan tenaga kependidikan<sup>26</sup>.

## **B. Paradigma menurut para ahli**

### 1. Setelah Fritjof Capra (1991)

Capra dalam bukunya yang berjudul *The Tao of Physics* menyatakan bahwa paradigma adalah asumsi dasar yang memerlukan pembuktian. Pendukung asumsi yang dikemukakannya dalam menafsirkan realitas sejarah ilmu pengetahuan<sup>27</sup>.

### 2. Setelah Thomas Kuhn (1962)

Sedangkan dalam bukunya *The Structure of Scientific Revolution*, Kuhn menunjukkan bahwa paradigma merupakan hasil dari beberapa kajian yang digabungkan menjadi satu. Di dalamnya, terdiri dari seperangkat konsep, nilai, dan teknik yang digunakan secara bersamaan oleh suatu komunitas untuk menentukan validitas suatu masalah dan solusinya<sup>28</sup>.

### 3. Menurut Roy Bhaskar (1989)

Paradigma adalah seperangkat asumsi yang dianggap benar ketika seseorang melakukan pengamatan yang dapat dipahami dan diyakini serta diterima<sup>29</sup>.

### 4. Menurut George Ritzer (1981)

Seorang sosiolog terkenal, George Ritzer, berpendapat bahwa paradigma adalah pandangan fundamental para ilmuwan. Atau peneliti tentang apa

---

<sup>25</sup>Rahardjo.

<sup>26</sup>Rahardjo.

<sup>27</sup>"Pengertian Paradigma Menurut 11 Para Ahli - Sosiologi Info," t.t.

<sup>28</sup>"Pengertian Paradigma Menurut 11 Para Ahli - Sosiologi Info."

<sup>29</sup>"Pengertian Paradigma Menurut 11 Para Ahli - Sosiologi Info."

yang seharusnya menjadi subjek kajian dalam sains, pertanyaan apa yang diajukan dan bagaimana menjawab pertanyaan tersebut. Paradigma juga dipandang sebagai konsensus ilmiah yang diharapkan dapat menghasilkan komunitas atau sub komunitas yang berbeda dari yang lain<sup>30</sup>.

#### 5. Menurut Robert Friedrichs (1970)

Sementara itu, Friedrichs mengungkapkan pandangannya bahwa paradigma adalah dasar dari pandangan suatu disiplin ilmu tentang suatu subjek yang perlu dipahami<sup>31</sup>.

#### 6. Menurut Patton (1975)

Patton menjelaskan bahwa paradigma adalah pandangan dunia, cara umum melihatnya, dan cara menggambarkan kompleksitas dunia nyata<sup>32</sup>.

#### 7. Menurut Robert Cohen

Menurut Cohen, pengertian paradigma adalah acuan atau landasan filosofis untuk pelaksanaan tujuan tertentu<sup>33</sup>.

#### 8. Menurut Egon G. Guba

Guba mengungkapkan bahwa paradigma adalah seperangkat keyakinan dasar yang memandu tindakan manusia dalam hidupnya<sup>34</sup>.

#### 9. Menurut Harmoni

Paradigma adalah metode dasar untuk memahami, berpikir, mengevaluasi, dan mengenali yang terkait dengan realitas tertentu<sup>35</sup>.

#### 10. Menurut Baker

---

<sup>30</sup>"Pengertian Paradigma Menurut 11 Para Ahli - Sosiologi Info."

<sup>31</sup>"Pengertian Paradigma Menurut 11 Para Ahli - Sosiologi Info."

<sup>32</sup>"Pengertian Paradigma Menurut 11 Para Ahli - Sosiologi Info."

<sup>33</sup>"Pengertian Paradigma Menurut 11 Para Ahli - Sosiologi Info."

<sup>34</sup>"Pengertian Paradigma Menurut 11 Para Ahli - Sosiologi Info."

<sup>35</sup>"Pengertian Paradigma Menurut 11 Para Ahli - Sosiologi Info."

Paradigma adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan atau mendefinisikan batas-batas. Paradigma juga menjelaskan bagaimana hal-hal harus dilakukan dalam batas-batas itu untuk menjadi sukses<sup>36</sup>.

#### 11. Menurut Bogdan

Bogdan mendefinisikan paradigma sebagai kombinasi dari beberapa asumsi logis terkait, konsep atau proposisi yang memandu cara berpikir dan penelitian<sup>37</sup>.

---

<sup>36</sup>“Pengertian Paradigma Menurut 11 Para Ahli - Sosiologi Info.”

<sup>37</sup>“Pengertian Paradigma Menurut 11 Para Ahli - Sosiologi Info.”

## **C. Paradigma Administrasi Publik**

### ***Old Public Administration***

Paradigma *Old Public Administration* (OPA), juga dikenal sebagai administrasi publik klasik atau administrasi publik lama, dimulai dengan gerakan perubahan yang diprakarsai oleh seorang tokoh dikotomi politik-administrasi bernama Woodrow Wilson, yang percaya bahwa administrasi publik harus dipisahkan dari dunia administrasi public politik. (Ahmad, 2012)<sup>38</sup>.

Fokus administrasi publik terbatas pada persoalan organisasi, personalia dan anggaran dalam birokrasi dan pemerintahan. Politik dan politik adalah bagian dari ilmu politik. Lokus paradigma ini adalah di mana seharusnya administrasi publik berada. Pada waktu itu ada perbedaan yang jelas antara administrasi dan politik negara. Fase ini ditandai dengan sebuah buku karya Frank J. Goodnow dan Leonard D. White berjudul *Politics and Administration*, yang mengemukakan bahwa ada dua fungsi utama pemerintahan yang berbeda satu sama lain yaitu politik dan administrasi. Ia menambahkan, menurut Goodnow, administrasi publik harus fokus pada birokrasi pemerintah.

### ***New Public Administration***

Fokus Administrasi Negara Baru atau *New Public Administration* mencakup upaya untuk mengatur, menjelaskan, membentuk atau memungkinkan organisasi menuju dan melalui perwujudan nilai-nilai kemanusiaan secara utuh, yang dilakukan melalui penjabaran sistem desentralisasi dan organisasi demokrasi yang responsif dan mengundang partisipasi serta dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat secara adil. Menurut Fredericson dalam Anggraini, munculnya administrasi publik baru dimulai dengan krisis yang melanda dunia, krisis tersebut tentu melanda negara-negara di dunia dengan buruk, termasuk

---

<sup>38</sup>"Jurnal Sospol, Vol 2 No. 2 (Januari-Juni 2017), Hlm 1-20," t.t.

- 1) Adanya dukungan pemerintah untuk urbanisasi yang menyebabkan krisis perkotaan.
- 2) Krisis urbanisasi dalam urbanisasi telah menimbulkan krisis baru yaitu krisis rasial.
- 3) Terjadi krisis besar terkait dengan krisis energi, yang diikuti oleh krisis lingkungan, kesehatan, transportasi dan lain-lain yang mempengaruhi administrasi publik saat itu (Alamsyah, 2016)<sup>39</sup>.

Dimana fokus administrasi publik adalah pada administrasi yang efisien, penghematan dalam penyediaan layanan dan menjaga kualitas layanan tersebut, Administrasi Publik Baru (NPA) menambahkan penekanan pada layanan yang dapat meningkatkan keadilan sosial<sup>40</sup>.

### ***New Public Management***

Paradigma *New Public Management* (NPM) dikenal sebagai paradigma reformatif yaitu *Reinventing Government* yang dicetuskan oleh David Osborne dan T. Gaebler kemudian dilanjutkan oleh David Osborne dan Plastrik (Pasolong), 2016. Memang paradigma ini dimulai dengan serangkaian krisis seperti yang digambarkan oleh Osborne dan Gaebler di Angriani<sup>41</sup>.

- 1) Ketidak mampuan pemerintah dalam menangani berbagai persoalan masyarakat.
- 2) Birokrasi, yang dianggap hebat ketika informasi dapat diakses dengan cepat, namun masyarakat merasa hal tersebut tidak sebanding dengan penyelesaian masalah yang muncul di masyarakat.
- 3) Sistem birokrasi yang dianggap kuno menyebabkan birokrat tidak mampu mewujudkan potensi dirinya dalam bekerja sehingga semakin mengurangi kreativitas pegawai.

---

<sup>39</sup>"Jurnal Sospol, Vol 2 No. 2 (Januari-Juni 2017), Hlm 1-20."

<sup>40</sup>"Jurnal Sospol, Vol 2 No. 2 (Januari-Juni 2017), Hlm 1-20."

<sup>41</sup>"Jurnal Sospol, Vol 2 No. 2 (Januari-Juni 2017), Hlm 1-20."

4) Banyak pemerintahan di Amerika yang dianggap bodoh dan tidak mampu melayani rakyat. hingga terjadi krisis kepercayaan pada pemerintah Amerika saat itu<sup>42</sup>.

### ***New Publik Service***

Paradigma *New Public Service* merupakan antitesis dari *New Public Management* yang mengkritik dan mengingkari adanya unsur-unsur bisnis dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat. Denhardt dalam Pasolong (2016) mengatakan bahwa *New Public Service (NPS)* diarahkan pada demokrasi, kebanggaan dan rakyat daripada pasar, persaingan dan pelanggan seperti sektor swasta. Pegawai negeri tidak memberikan layanan pelanggan, mereka memberikan demokrasi (Denhardt dalam Pasolong, 2016). Sesuai dengan pendapat Hadari yang memaparkan rangkuman administrasi publik dan perannya, dimana administrasi publik adalah suatu upaya administrasi yang dilakukan dalam rangka kegiatan pembangunan berdasarkan nilai-nilai untuk kemaslahatan rakyat dan bukan untuk mencari keuntungan (Ibrahim , 2013)<sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup>"Jurnal Sospol, Vol 2 No. 2 (Januari-Juni 2017), Hlm 1-20."

<sup>43</sup>"Jurnal Sospol, Vol 2 No. 2 (Januari-Juni 2017), Hlm 1-20."

#### **D. Proses perubahan paradigma dalam administrasi**

1. Paradigma Politik Administratif (1900-1926) Berawal dari tulisan Frank J. Goodnow dan Lenald D. White dalam buku Politik dan Administrasi, menjadi awal dari nuansa administrasi administrasi yang merupakan dikotomi politik. Goodnow berpendapat bahwa ada dua fungsi utama pemerintahan yang sangat berbeda satu sama lain. Fungsi politik dan administrasi seperti yang dijelaskan dalam buku. Menurut Goodnow, politik harus memuat pedoman atau menghasilkan kehendak negara, sedangkan administrasi diartikan sebagai hal-hal yang harus berkaitan dengan pelaksanaan pedoman tersebut. Penekanan dari paradigma pertama ini lebih pada lokasi yang menjadi permasalahan dimana seharusnya manajemen berada<sup>44</sup>.

Posisi administrasi harus difokuskan pada birokrasi pemerintah. Meskipun badan eksekutif dan legislatif memiliki kegiatan administrasi sendiri, fungsi dan tanggung jawab utama mereka harus memenuhi kebutuhan negara, paradigma pertama telah mendapat perhatian yang cukup besar dari akademisi dan praktisi terkait dikotomi politik administrasi, terutama gerakan pelayanan publik. Pada 1920-an, administrasi mulai mendapatkan legitimasi akademis pada tahun 1926, seperti yang ditulis Leonald White dalam bukunya Pengantar Studi Administrasi Publik. Buku Leonard, menurut Dwight Waldo, adalah tokoh sentral dalam administrasi Amerika yang memajukan perbedaan antara administrasi dan politik, termasuk:

- a. Sebuah Politik tidak perlu lagi mencampuri administrasi
- b. Manajemen memberikan kontribusi analisis ilmiah untuk administrasi.

---

<sup>44</sup>Nur Fathin Luaylik, S Hum, dan M Kp, "Dari Negara menjadi Publik Sentris: Kajian Historis Pelaksanaan Administrasi Indoensia Tahun 1900-an," *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities* 1, no. 1 (Desember 2020): 63–73, <https://doi.org/10.22515/ISNAD.V1I1.3239>.

- c. Administrasi negara dapat mengubah dirinya menjadi ilmu yang "bebas nilai".
  - d. Misi ilmu administrasi adalah ekonomi dan efisiensi (White dalam Thoha, 2008:20)<sup>45</sup>.
2. Paradigma Prinsip-prinsip administrasi (1927-1937) Tahun 1927 W.F. Willoughby menerbitkan Prinsip-prinsip Administrasi Publik, di mana ia membahas ruang lingkup penuh administrasi publik. Prinsip-prinsip manajemen Willoughby menunjukkan tren baru di lapangan dan membuktikan bahwa prinsip-prinsip ini ada dan dapat dipelajari<sup>46</sup>.

Paradigma kedua penyelenggaraan negara ini mencapai puncak harkat dan martabatnya. Pada tahun 1930-an manajemen banyak mendapat masukan dari pemerintah dan industri, kemudian pengaruh manajemen mempengaruhi munculnya prinsip-prinsip manajemen, sehingga paradigma ini lebih bersifat place-focused. Prinsip administrasi negara mengacu pada kenyataan bahwa administrasi negara dapat terjadi di semua lingkungan administrasi, terlepas dari budaya, fungsi, lingkungan, misi atau kerangka kelembagaan, dan dapat digunakan di area mana pun tanpa kecuali. Ini mengamanatkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola dapat digunakan dan disepakati oleh negara-negara dengan budaya, lingkungan, fungsi, misi dan/atau kerangka kelembagaan yang berbeda<sup>47</sup>.

3. Paradigma Ilmu Politik Administrasi (1950-1970) Akibat kritik keras terhadap konsep administrasi negara pada waktu itu, paradigma ini akhirnya melompat kembali ke induk disiplin ilmu ini, yaitu ilmu politik. Akibat lonjakan ini terjadi perubahan dan pembaharuan definisi tempat yaitu birokrasi pemerintahan dan kurangnya keterkaitan dengan fokusnya. Artinya, pada tingkat

---

<sup>45</sup>Luaylik, Hum, dan Kp.

<sup>46</sup>Luaylik, Hum, dan Kp.

<sup>47</sup>Luaylik, Hum, dan Kp.

paradigma ketiga ini kita mencoba kembali hubungan konseptual antara pemerintah dan ilmu politik. Begitu banyak referensi yang lahir dengan nuansa menarik atau erat kaitannya dengan ilmu politik. Di sisi lain, meskipun ada upaya untuk kembali ke ilmu politik sebagai pengantar administrasi nasional dalam paradigma ini, ilmu politik mulai melupakannya. Pada tahun 1962 administrasi tidak dianggap sebagai bagian dari ilmu politik, terbukti dengan laporan Komisi Ilmu Politik sebagai disiplin ilmu APSA (American Political Science Association), sampai tahun 1967 administrasi pemerintahan benar-benar dihapus dari pertemuan tahunan APSA. Melihat gejala ini, Dwight Waldo memprotes situasi seperti itu. Hal ini mempengaruhi jumlah publikasi jurnal ilmiah, antara tahun 1960 dan 1970 hanya ditemukan empat persen jurnal administrasi nasional. Pada saat ini terjadi pemisahan antara studi administrasi negara dan studi ilmu politik. Namun, ada dua perkembangan baru dalam periode paradigma ini, yaitu (1) meningkatnya penggunaan studi kasus sebagai alat epistemologis, (2) munculnya studi banding dan pengembangan manajemen sebagai bagian dari administrasi pemerintahan<sup>48</sup>.

4. Paradigma administrasi sebagai ilmu administrasi (1956-1970)  
Selama periode ini, status ilmuwan administrasi adalah tahun kedua lulusan ilmu politik, dan sarjana dan praktisi administrasi memutuskan untuk kembali dari administrasi publik ke administrasi nasional. Istilah ilmu manajemen digunakan untuk menunjukkan pembahasan isi dan fokus, termasuk pembahasan teori organisasi dan ilmu manajemen<sup>49</sup>.

Pada tahap ini, ilmu manajemen berfokus pada humor, tetapi tidak padanya. Pada awal 1960-an, ilmu organisasi berkembang pesat sebagai bagian dari disiplin ilmu administrasi. Sebagai

---

<sup>48</sup>Luaylik, Hum, dan Kp.

<sup>49</sup>Luaylik, Hum, dan Kp.

landasan kajian ilmiah pengembangan organisasi berdasarkan nilai-nilai psikologi sosial dan demokratisasi, dalam kaitannya dengan birokrasi, baik negara maupun swasta, dan kesadaran diri setiap anggota organisasi. Penggunaan istilah publik (negara) tidak lagi dibicarakan, karena tidak ada lagi prinsip-prinsip umum pemerintahan, yang digantikan oleh prinsip-prinsip khusus organisasi dan pemerintahan<sup>50</sup>.

5. Paradigma Administrasi Negara (1970) Pergolakan intelektual berlanjut pada fase kelima dari paradigma prinsip administrasi dan penggunaan istilah ilmiah. Pada titik ini, manajemen negara terbukti tidak hanya ilmu manajemen murni, tetapi juga jelas dalam teori organisasi. Teori organisasi telah memperhatikan bagaimana organisasi berfungsi dan membuat keputusan selama dua dekade terakhir. Dalam banyak hal, masalah teori organisasi dipahami sebagai penghubung antara titik fokus administrasi negara dan lokasinya. Tentu, fokus administrasi pemerintahan adalah pada teori organisasi dan penerapannya dalam analisis kebijakan publik<sup>51</sup>.

---

<sup>50</sup>Luaylik, Hum, dan Kp.

<sup>51</sup>Luaylik, Hum, dan Kp.

## **E. Hubungan Paradigma Administrasi Negara dengan Kebijakan Publik**

Hubungan paradigma Administrasi Negara dengan Kebijakan public adalah Administrasi Negara merupakan studi yang mempelajari bagaimana cara menjalankan serta mengelola kegiatan pemerintahan pada suatu negara, yang dituntut menjadi motor dalam pelayanan kepada masyarakat yang melibatkan beberapa elemen didalamnya,serta menjadi solusi pada setiap permasalahan yang muncul ditengah tengah masyarakat dalam suatu negara.

Masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat di suatu negara tentu terus berkembang sesuai dengan pertumbuhan dan dinamika yang terus terjadi sehingga masalah menjadi kompleks dan menuntut penyelesaian yang sangat mendesak. Sehingga dimensi kebijakan publik ini ditujukan untuk menganalisis proses pembentukam masalah yang muncul pada tatanan pemerintah dan juga masyarakat,menetapkan solusi, implementasi kebijakan,serta evaluasi.

## BAB III

### KEBIJAKAN PUBLIK

#### A. Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Publik

Menurut Edwards III, pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (output, outcome)<sup>52</sup>. Lebih lanjut, Edward III mengidentifikasi aspek-aspek yang diduga kuat berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, dan masing-masing aspek saling berpengaruh terhadap aspek lainnya<sup>53</sup>

##### □ Kewenangan/ Struktur Birokrasi

Kewenangan merupakan otoritas/ legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik (Afandi & Warjio, 2015). Kewenangan ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat pada posisi/ strata kelembagaan atau individu sebagai pelaksana kebijakan. Karakteristik utama dari birokrasi umumnya tertuang dalam prosedur kerja atau Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi organisasi<sup>54</sup>.

---

<sup>52</sup> Abdullah Ramdhani and Muhammad Ali Ramdhani, 'Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik', 2016, 1–12.

<sup>53</sup> 'Kebijakan Publik - Ravyansah, Sukarman Purba, Bambang Irawan, Alfansyah Fathur, Putu Eka Purnamaningsih, Kadek Wiwin Dwi Wismayanti, Ni Wayan Ari Sudiartini, Abd Haris, Suwardi, M Doddy SA, Dian Sari - Google Buku'  
<[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=eC93EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA23&dq=%09Kewenangan/+Struktur+Birokrasi++Kewenangan+merupakan+otoritas/+legitimasi+bagi+para+pelaksana+dalam+melaksanakan+kebijakan+yang+ditetapkan+secara+politik+\(Afandi+%26+Warjio,+2015\).+Kewenangan+ini+berkaitan+dengan+struktur+birokrasi+yang+melekat+pada+posisi&ots=sqNMAvL3yi&sig=K59JnyNFbCqXGke40hLqZSZezy&redir\\_esc=y#v=onepage&q=%09Kewenangan%2F+Struktur+Birokrasi+Kewenangan+merupakan+otoritas%2F+legitimasi+bagi+para+pelaksana+dalam+melaksanakan+kebijakan+yang+ditetapkan+secara+politik+\(Afandi+%26+Warjio%2C+2015\).+Kewenangan+ini+berkaitan+dengan+struktur+birokrasi+yang+melekat+pada+posisi&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=eC93EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA23&dq=%09Kewenangan/+Struktur+Birokrasi++Kewenangan+merupakan+otoritas/+legitimasi+bagi+para+pelaksana+dalam+melaksanakan+kebijakan+yang+ditetapkan+secara+politik+(Afandi+%26+Warjio,+2015).+Kewenangan+ini+berkaitan+dengan+struktur+birokrasi+yang+melekat+pada+posisi&ots=sqNMAvL3yi&sig=K59JnyNFbCqXGke40hLqZSZezy&redir_esc=y#v=onepage&q=%09Kewenangan%2F+Struktur+Birokrasi+Kewenangan+merupakan+otoritas%2F+legitimasi+bagi+para+pelaksana+dalam+melaksanakan+kebijakan+yang+ditetapkan+secara+politik+(Afandi+%26+Warjio%2C+2015).+Kewenangan+ini+berkaitan+dengan+struktur+birokrasi+yang+melekat+pada+posisi&f=false)> [accessed 30 November 2022].

<sup>54</sup> Asep Kusdiman Jauhari dan Afifah Latip Rasyid Jauhari, "ANALISIS ASPEK-ASPEK, IMPLIKASI DAN PENANGANAN MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK PENERBITAN REKOMENDASI PERIJINAN

□ Komunikasi

Komunikasi adalah aktivitas yang mengakibatkan orang lain menginterpretasikan suatu ide/ gagasan, terutama yang dimaksudkan oleh pembicara atau penulis melalui sesuatu sistem yang biasa (lazim) baik dengan simbol-simbol, signal-signal, maupun perilaku (Wardhani, Hasiolan, & Minarsih, 2016). Komunikasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, dimana komunikasi yang tidak baik dapat menimbulkan dampak-dampak buruk bagi pelaksanaan kebijakan. Dimensi komunikasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: transmisi, konsistensi, dan kejelasan (Winarno, 2012). Pencapaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik mensyaratkan pelaksana untuk mengetahui yang harus dilakukan secara jelas; tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan kebijakan. Apabila penyampaian informasi tentang tujuan dan sasaran suatu kebijakan kepada kelompok sasaran tidak jelas, dimungkinkan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Kemampuan komunikasi diarahkan agar pelaksana kegiatan dapat berunding satu sama lain dan menemukan titik kesepahaman/ konsensus yang saling menguntungkan. Konsensus yang terbagun dapat meningkatkan kinerja personal dalam bekerja dengan menemukan kondisi win-win solution pada setiap permasalahan<sup>55</sup>.

□ Sumberdaya

Pelaksanaan kebijakan harus ditunjang oleh ketersediaan sumberdaya (manusia, materi, dan metoda). Pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumberdaya yang diperlukan, maka

---

REHABILITASI PASAR BANJARAN KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT," *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi* 12, no. 1 (18 Januari 2021): 38–56, <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v12i1.3431>.

<sup>55</sup> Jumria Mansur, 'Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik', *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6.2 (2021), 324–34 <<https://doi.org/10.30829/AJEI.V6i2.7713>>.

pelaksanaan kebijakan akan cenderung tidak dapat memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat, atau upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Dengan demikian, sumberdaya merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: staf yang memadai, informasi, pendanaan, wewenang, dan fasilitas pendukung lainnya (Afandi & Warjio, 2015).

□ Disposisi atau sikap dari pelaksana

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, disiplin, kejujuran, kecerdasan, dan sifat demokratis (Wahab, 2010). Apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka dia diduga kuat akan menjalankan kebijakan dengan baik, sebaliknya apabila pelaksana kebijakan memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda dengan maksud dan arah dari kebijakan, maka dimungkinkan proses pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan efektif dan efisien. Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan dukungan atau hambatan terhadap pelaksanaan kebijakan tergantung dari kesesuaian kompetensi dan sikap dari pelaksana. Karena itu, pemilihan dan penetapan personalia pelaksana kebijakan dipersyaratkan individu-individu yang memiliki kompetensi dan dedikasi yang tepat pada kebijakan yang telah ditetapkan (Afandi & Warjio, 2015). dilaksanakan secara efektif. Tanpa dukungan sumberdaya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen yang tidak diwujudkan untuk

## **B. Dimensi Pelaksanaan Kebijakan Publik**

Berdasarkan beberapa konsep dan sifat tindakan yang berkenaan dengan pelaksanaan Good Governance, menurut pemahaman penulis maka pelaksanaan kebijakan dapat diukur/ dievaluasi berdasarkan dimensi-dimensi: konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi<sup>56</sup>.

---

<sup>56</sup> Ramdhani and Ramdhani.

- **Konsistensi**  
Pelaksanaan kebijakan berlangsung dengan baik apabila pelaksanaan kebijakan dilakukan secara konsisten dengan berpegang teguh pada prosedur dan norma yang berlaku (Mutiasari, Yamin, & Alam, 2016).
- **Transparansi**  
Transparansi merupakan kebebasan akses atas informasi yang patut diketahui oleh publik dan/ atau pihak-pihak yang berkepentingan (Coryanata, 2012). Informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan, dan disediakan secara memadai, serta mudah dimengerti<sup>57</sup>.
- **Akuntabilitas**  
Setiap aktivitas pelaksanaan kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun substantif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Rohman, 2016).
- **Keadilan**  
Keadilan secara umum dapat dipahami sebagai kebaikan, kebajikan, dan kebenaran, yang mengikat antara anggota masyarakat dalam mewujudkan keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban (Nasution, 2016). Keadilan dalam kebijakan publik diwujudkan pada aktivitas pelayanan yang tidak diskriminatif. Pelaksanaan kebijakan publik tidak membedakan kualitas pelayanan pada kelompok sasaran berdasarkan pertimbangan suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain (Rohman, 2016).

---

<sup>57</sup> Rina Trisnawati, 'Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada DPRD Provinsi Jawa Tengah Dan DPRD Kabupaten Karanganyar)', *Seminar Nasional Dan Call For Paper*, October, 2014, 27–32  
<<http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/4600>> [accessed 30 November 2022].

□ Partisipatif

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Partisipasi masyarakat disamping menopang pencetapan pelaksanaan kebijakan, pada sisi lain akan berdampak pada proses evaluasi/ kontrol atas kinerja pemerintah dan dapat mampu menimalisir penyalahgunaan wewenang. Partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan kebijakan publik karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud di sini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif (Coryanata, 2012). Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan kebijakan sebaiknya bersifat partisipatif, yaitu pelaksanaan kebijakan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, kepentingan, dan harapan masyarakat (Rohman, 2016)

□ Efektivitas

Efektifitas berkenaan dengan pencapaian hasil yang telah ditetapkan, atau pencapaian tujuan dari dilaksanakannya tindakan, yang berhubungan dengan aspek rasionalitas teknis, dan selalu diukur dari unit produk atau layanan (Dunn, 2003). Dalam pelaksanaan kebijakan publik, efektifitas diukur dari keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada kebijakan publik.

□ Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah penggunaan sumberdaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektivitas dan penggunaan sumberdaya (Dunn, 2003). Indikator ukuran yang dapat digunakan pada dimensi efisiensi adalah penggunaan sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yang bisa diukur dengan tingkat penggunaan waktu, biaya, manusia, peralatan, dan sumberdaya lainnya.

### C. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Publik

Keberhasilan implementasi kebijakan membutuhkan keterlibatan stakeholders secara demokratis dan partisipatif. Stakeholders dan pembuat kebijakan harus terus menerus terlibat dalam dialog untuk menganalisis konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, evaluasi pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan untuk melihat akuntabilitas dan peningkatan kinerja suatu kebijakan publik. Model Helmut Wollman menguraikan evaluasi pelaksanaan kebijakan pada tiga tipe utama, yaitu: *ex-ante evaluation*, *on-going evaluation*, dan *ex-post evaluation*<sup>58</sup>.

#### 1. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*)

Evaluasi *ex-ante* adalah evaluasi kebijakan yang dilakukan sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya (Diansari, 2016). Secara hipotetik, tipe evaluasi *ex-ante* ditujukan untuk mengantisipasi dan memberikan penilaian awal atas perkiraan pengaruh, dampak, atau konsekuensi dari kebijakan yang direncanakan atau yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah memberikan informasi yang relevan dengan kebijakan atau dengan proses pembuatan kebijakan yang sedang berjalan. Tipe evaluasi *ex-ante* juga memberikan analisa dampak terhadap lingkungan kebijakan (Lintjewas, Tulus, & Egetan, 2016).

#### 2. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*)

Evaluasi *on-going* yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan kebijakan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan kebijakan dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Diansari, 2016). Evaluasi *on-going* secara

---

<sup>58</sup> Nur Rohim Yunus, 'Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19'  
<[https://www.researchgate.net/profile/Nur-Yunus/publication/340103987\\_Kebijakan\\_Pemberlakuan\\_Lock\\_Down\\_Sebagai\\_Antisipasi\\_Penyebaran\\_Corona\\_Virus\\_Covid-19/links/5e8734ce4585150839ba0cce/Kebijakan-Pemberlakuan-Lock-Down-Sebagai-Antisipasi-Penyebaran-Corona-Virus-Covid-19.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Nur-Yunus/publication/340103987_Kebijakan_Pemberlakuan_Lock_Down_Sebagai_Antisipasi_Penyebaran_Corona_Virus_Covid-19/links/5e8734ce4585150839ba0cce/Kebijakan-Pemberlakuan-Lock-Down-Sebagai-Antisipasi-Penyebaran-Corona-Virus-Covid-19.pdf)> [accessed 30 November 2022].

umum dimaksudkan untuk menjamin agar tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, bukan dimaksudkan untuk evaluasi penilaian akhir capaian kinerja pelaksanaan kebijakan. Dengan dilakukan evaluasi on-going, jika terjadi penyimpangan, diharapkan akan dapat dilakukan langkah perbaikan sedini mungkin melalui sejumlah rancangan/rekomendasi, sehingga hasil akhir pelaksanaan kebijakan akan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Christiyanto, Nurfitriyah, & Sutadji, 2016). Esensi dari evaluasi on-going adalah untuk memberikan informasi yang relevan yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki proses pelaksanaan kebijakan ke arah yang ingin dicapai (Lintjeras, Tulus, & Egetan, 2016).

### 3. Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post)

Ex-post evaluation merupakan model evaluasi klasik dari evaluasi pelaksanaan kebijakan. Evaluasi ex-post dimaksudkan untuk memberikan penilaian terhadap tingkat pencapaian tujuan serta dampak dari kebijakan yang telah dilaksanakan (Lintjeras, Tulus, & Egetan, 2016). Evaluasi ex-post adalah evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan kebijakan berakhir, yang ditujukan untuk menganalisa tingkat pencapaian (keluaran/ hasil/ dampak) pelaksanaan kebijakan. Evaluasi ex-post digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (pencapaian tujuan dan sasaran), ataupun manfaat (dampak pelaksanaan kebijakan terhadap penyelesaian masalah<sup>59</sup>).

---

<sup>59</sup> 'Kebijakan Publik - Ravyansah, Sukarman Purba, Bambang Irawan, Alfansyah Fathur, Putu Eka Purnamaningsih, Kadek Wiwin Dwi Wismayanti, Ni Wayan Ari Sudiartini, Abd Haris, Suwardi, M Doddy SA, Dian Sari - Google Buku'.

## **BAB IV**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK**

#### **A. Pengertian Kebijakan Publik**

Implementasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu (*implementasi*), yang berarti implementasi. Implementasi adalah menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh sesuatu. Tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi atau mengakibatkan berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan kebijakan instansi pemerintah dalam kehidupan masyarakat. tentunya hal ini dipandang sebagai untuk kewajiban sebagai dampak dari ilmu pengetahuan yang terus mengalami suatu perkembangan dan perubahan menuju arah yang lebih baik daripada sebelumnya.

Pada masanya sebelumnya sempat disinggung mengenai perbedaan banyak ahli dalam memberikan batasan atau definisi terhadap suatu hal. Hal ini dimentang sebagai suatu kewajiban ataupun sebagai dampak dari ilmu pengetahuan yang terus mengalami perkembangan dan juga perubahan menuju arah yang lebih baik daripada. Di sisi lain juga perbedaan juga dipengaruhi oleh putar berpikir atau cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang akan didefinisikan. Banyak hal dengan beraneka ragam cara berpikir ataupun cara pandang ilmu pendidikan gambaran bahwa dalam suatu persoalan saja bisa jadi akan mengalami banyak perbedaan . Dan juga dalam konteks memberikan batasan atau pun definisi pada implementasi kebijakan publik.

Istilah implementasi mengacu pada serangkaian kegiatan yang mengikuti pernyataan niat pejabat publik tentang tujuan program dan hasil yang diinginkan. Ini mencakup kegiatan implementasi oleh berbagai pemangku kepentingan, terutama birokrat, yang bertujuan untuk memprakarsai program. Dari lembaga pelaksana kebijakan, implementasi kebijakan mencakup empat jenis kegiatan dari Pertama, pelaksanaan

program (*Accountability Act*) harus mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan implementasi yang lancar<sup>60</sup>. Kedua, organisasi pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi instruksi, peraturan, dan rencana program serta konsep yang spesifik. Ketiga, organisasi pelaksana harus mengatur kegiatannya dengan membentuk unit birokrasi dan prosedur untuk mengelola beban kerja. Keempat, otoritas eksekutif memberikan hak istimewa atau pembatasan kepada klien atau kelompok sasaran. Implementasi kebijakan sebagai tindakan oleh individu atau kelompok pemerintah dan swasta bertujuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. tindakan tersebut mencakup upaya untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional selama periode waktu tertentu, serta upaya berkelanjutan untuk menerapkan perubahan besar dan kecil yang diperlukan oleh keputusan kebijakan.

Sejak saat itulah yang berminasi mulai marah diperpanjangkan dalam berbagai kesempatan dalam studi yang dibahas kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena faktor di lapangan menunjukkan bahwa penyelesaian masalah-masalah sosial yang banyak diinterpretasi pemerintah, tidak berjalan efektif. Dengan kata lain bahwa seiring perkembangannya pengetahuan masyarakat pemerintah secara penampilan sejatinya dapat menarik dari diri permasalahan-permasalahan yang ada. Namun demikian, Pemerintah harus mampu membuat kebijakan publik yang *excellent* kebijakan publik yang membangun dan juga sehingga masyarakat dapat mengambil peran dan berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mendasarkan pada kebijakan publik yang telah diundangkan. Oleh karena itu, yang menjadi catatan dari apa yang disampaikan Anggaran, bahwa keterpautan berbagai proses kebijakan publik menjadi hal perlu diperhatikan termasuk tahap implementasinya, dan bukan hanya berfokus pada pembuatan dan evaluasi dampak kebijakan publik tersebut<sup>61</sup>.

---

<sup>60</sup> Agus Subianto, *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan< Implementasi Dan Evaluasi, Brilliant an Imprint of MIC Publishing COPYRIGHT, 2020.*

<sup>61</sup> (Haniza et al., 2019)

Implementasi, ini adalah dari kata “to implement”, dari kata kerja “to implement”, kata implement berasal dari bahasa Latin “implementation” dari akar kata “impere” berarti “to fill”, "mengisi". ", to berarti penuh, penuh, sedangkan "plere" berarti "mengisi", artinya mengisi. Selanjutnya, kata "melaksanakan" berarti "(1) untuk melaksanakan, melaksanakan, melakukan. (2) untuk menyediakan sarana untuk melaksanakan atau melaksanakan, yang memiliki efek praktis pada. (3) untuk menyediakan atau melengkapi peralatan. Menerapkan berarti "membawa hasil (efek), membawa efek penuh dan lengkap." Kedua ke Implementasi adalah “menyediakan sarana (alat) untuk melakukan sesuatu, untuk mencapai hasil praktis untuk sesuatu”. Ketiga, terapkan untuk menyediakan atau melengkapi alat.

Implementasi mengacu pada tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan<sup>62</sup>. Praktik ini mencoba mengubah keputusan ini menjadi pola operasional dan mencoba mencapai perubahan besar atau kecil terhadap apa yang telah diputuskan sebelumnya. Eksekusi pada dasarnya mencoba mencari tahu apa yang harus terjadi setelah program dijalankan.

Implementasi mengacu pada tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan. Praktik ini mencoba mengubah keputusan ini menjadi pola operasional dan mencoba mencapai perubahan besar atau kecil terhadap apa yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi juga pada hakekatnya berusaha memahami apa yang seharusnya terjadi setelah program diimplementasikan.

Melintasi merupakan tahapan penting yang harus ada dalam surat proses kebijakan publik. Terutama wacana molekuler formal telah dianggap selesai, yang berupa undang-undang, peraturan, ketepatan, atau bentuk-bentuk produk hukum lainnya. Oleh karena itu, teori siklikal ini menetapkan implementasi sebagai aktivitas lanjutan setelah diberlakukannya undang-undang atau ketentuan perundangan. Sehingga dalam konteks ini, ia merumuskan bahwa implementasi kebijakan publik

---

<sup>62</sup> (Fio & Yulianto, 2018)

merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan, keputusan peradilan pemerintah eksekutif, atau dekrit presiden. Implementasi adalah suatu proses yang membutuhkan berbagai sumber daya, termasuk sumber daya manusia, keuangan dan operasional dari program publik dan swasta (individu atau kelompok) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Implementasi kebijakan menekankan pada tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun individu (atau kelompok) yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya<sup>63</sup>. Pada saat aksi ini, cobalah untuk mengubah keputusan menjadi model operasional dan melanjutkan upaya ini untuk mencapai perubahan kecil dan besar yang ditentukan oleh keputusan politik tertentu. Implementasi kebijakan publik tidak lain harus kembali pada pabrik yang dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Boleh minta sih gue jangan publik bukan dipandang sebagai upaya pemerintah untuk mengekang dan juga menundukkan rakyat agar senantiasa dapat dikuasai sepenuhnya. Dari kesejahteraannya yang berlandaskan pada keadilan dan juga pemerataan tentunya harus memiliki acuan sehingga terdapat berbagai tugas dan tanggung jawab pasti yang harus ditunaikan oleh pihak-pihak bersangkutan. Dan juga dapat adanya ketertiban dan juga menjalankan tugas yang dimaksud dan pada akhirnya akan mengantarkan warga dalam suatu sistem politik (negara) mencapai suatu kesejahteraan tersebut.

Langkah implementasi kebijakan publik terlihat jelas, pertama kebijakan publik dapat dimulai dari program, kemudian proyek, dan langkah terakhir adalah kegiatan yang dapat secara langsung memberikan pemanfaatan (beneficiaries) kepada warga negara. Selain itu, juga terlalu kebijakan publik yang masih membutuhkan penjelasan sebelum dilanjutkan keputusan, proyek dan juga kemudian di kegiatan selanjutnya<sup>64</sup>. Kebijakan publik yang masih perlu penjelasan adalah

---

<sup>63</sup> (Fio & Yulianto, 2018)

<sup>64</sup> Haedar Akib, 'Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa Bagimana', *Jurnal Adminstrasi Publik*, 1.1 (2010), 1–100.

kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah (Perda). Peraturan penjabar merupakan sebagai turunan dari keduanya yang dimana disebut sebagai peraturan pelaksanaan dan sedangkan kebijakan publik yang dapat diimplementasikan secara langsung, sudah dapat langsung operasional antara lain adalah Kepres, Inpres, Kepmen, Keputusan kepala daerah maupun keputusan Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll.

Model implementasi kebijakan publik tersebut sebenarnya mengadopsi dari mekanisme manajemen yang lazim digunakan selama ini dan khususnya manajemen yang bergerak pada sektor publik. Misi merupakan *raison d'etre* atau alasan kenapa sebuah organisasi hadir atau eksis yang dalam mana misi tidak akan berubah selama organisasi berkat ketakutan ada kecuali organisasi tersebut mengalami reformasi ataupun dirombak. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa misi adalah suatu yang melekat pada organisasi yang akan menentukan kemana akan pergi atau pembelajaran disebut dengan visi, Pada urutan kedua adalah visi di mana visi ini yang senantiasa melekat pada individu yang memimpin sebuah organisasi.

Dengan visi seorang pemimpin pabrik dapat melihat hukuman sebuah organisasi akan dibawa selama kepemimpinannya. Visi merupakan rencana yang dimiliki oleh seorang pemimpin sebuah organisasi. Apabila visi pemimpin sebuah organisasi baik profesional (sesuai kapasitasnya) dan rasional (dapat dicapai), Makassar tersebut cenderung pada keberhasilan dalam mencapai cita-citanya. Sebaliknya apabila visi seorang pemimpin tidak mencerminkan suatu proporsional dan rasional maka kemungkinan besar yang akan terjadi adalah suatu kegagalan pada organisasi bersangkutan<sup>65</sup>.

Visi merupakan rumusan umum pedoman sebagai pedoman pada akhir periode, sedangkan misi diartikan sebagai penjabaran lebih dari pada visi. Penjelasan tersebut mendasarkan pada UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu "visi adalah

---

<sup>65</sup> MA Drs. Hery Noer Aly, 'Bab II Landasan Teori', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2018), 1689–99.

rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (Pasal 1:11), dan misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan untuk visi (Pasal 1:12) Selanjutnya juga dikemukakan bahwa strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi (Pasal 1:13).

Berpendapat bahwa pemaknaan istilah visi seperti paparan di atas sudah benar , namun yang dimaksud misi pada UU tersebut adalah misi , dan yang dimaksud misi adalah strategi . Argumentasi ini dapat diperlebar bahwa di Indonesia , khususnya Bappenas ( Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ) , terbalik dalam memberikan batasan terhadap istilah visi dan misi , sehingga tidak cukup memadai untuk dijadikan keinginan lebih lanjut . Sebagai tambahan bahan referensi , juga dikemukakan pendapat Peter Drucker sebagai Guru Manajemen dalam *Managing for Nonprofit Organization* (1994), bahwa pada organisasi nirlaba, utamanya non pemerintah, yang hanya ada misi. Setelah misi yang ada kemudian strategi untuk menerjemahkan aksi - aksi Sedangkan posisi visi melekat pada strategi itu sendiri yang kemudian terbagi dalam tahapan - tahapan<sup>66</sup>.

penulis tidak cukup argumentasi untuk sebaliknya , namun penulis sendiri lebih cenderung pada pendapat mengatakan apakah visi merupakan penjabaran dari misi atau yang dikemukakan Nugroho , bahwa visi merupakan penjabaran dari misi . Misi merupakan gambaran umum tentang apa yang akan dicapai pada akhir aksi - aksi yang dilakukan , sedangkan visi upaya upaya - upaya atau langkah - langkah yang dilakukan untuk mencapai misi yang ada . Kegamangan dalam memberikan batasan terhadap istilah misi dan visi tersebut , sebenarnya sudah lama bergulir . Namun beberapa referensi yang penulis temukan menegaskan bahwa misi merupakan penjabaran dari visi sebagaimana yang dirumuskan Bappenas . Kegamangan pemaknaan misi dan visi ini muncul setelah dikonfrontir dengan pengalaman penulis . Sekali penulis mendengar dalam berbagai adegan baik di dunia nyata maupun dunia

---

<sup>66</sup> Nawawi, 'Pearch. Robinson, Manajemen Startegik: Formulasi, Impilmentasi, Dan Pengendalian. Binarupa Aksara: Jakarta. 1997. Hal 47-48 1', *Strategic Management*, 1997.

perfilm - an , khususnya yang menyajikan alur cerita yang pernah terjadi , lebih menggunakan kata misi untuk menggambarkan tujuan umum yang akan dicapai pada akhir sesi . Tidak pernah penulis pernah mendengar istilah visi sebagai tujuan besar yang akan dicapai pada akhir sesi . Sering juga penulis dengar istilah misionaris sebagai julukan orang yang mengemban tujuan atau menyebarkan tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan . Jarang sekali bahkan tidak pernah , penulis istilah visioner digunakan untuk mereka yang mengemban amanah khusus untuk ditunaikan dalam jangka waktu tertentu . Agar lebih dekat pada pemahaman secara sistematis , tentunya perlu dikemukakan satu kesatuan secara pemahaman dan misi sudah banyak dipaparkan di atas , selain penjelasannya juga perlu diketengahkan pengertian strategi . Minimal dari tiga istilah ( misi , visi , strategi ) tersebut dapat dijangkau dengan baik sehingga memudahkan memosisikan ketiganya apabila berada dalam satu hubungan yang saling berkaitan . Nugroho ( 2009 : 622 memberikan gambaran mengenai strategi , yaitu arah makro atau politik dari pilihan tujuan. Strategi kemudian dieksekusi dalam bentuk kebijakan - kebijakan , baik yang bersifat publik maupun non - publik . Sehingga kebijakan publik dapat dikatakan sebagai keputusan politik terhadap atas . strategi Selanjutnya kebijakan publik dioperasionalkan dalam bentuk program nya yang lebih teknis<sup>67</sup>.

Program - program di detailkan dalam proyek - proyek dan diimplementasikan dalam bentuk produk , baik berupa pelayanan maupun barang Dalam kebijakan kontek publik , Nugroho berpendapat , memang tidak menggunakan " produk " , tetapi lebih menggunakan kata " kegiatan Hal ini disebabkan karena luaran ( output ) dari proyek - yang telah dilakukan bukan hanya sesuatu yang berwujud (tangible intangible product), yaitu berupa jasa produk), yaitu proyek berupa barang, melainkan juga yang tidak berwujud yaitu berupa jasa.

---

<sup>67</sup> Arifin Tahir, 'Kebijakan Publik Dan Good Governancy', 2018, 1-174.

Dalam buku ini sebenarnya , penulis tidak akan berpolemik dengan posisi visi dan misi , namun yang perlu jelas adalah kedudukan keduanya apakah visi merupakan penjabaran dari misi , atau sebaliknya misi merupakan penjabaran dari visi . Sehingga dalam pembahasan selanjutnya tidak terjadi bias pemahaman antara kedua istilah tersebut . Bukan juga kerumitan pembahasan , namun bahasan mengenai langkah implementasi kebijakan publik yang diadopsi dari model mekanisme manajemen sektor publik diatas , hanya ingin mempertegas bahwa langkah - langkah yang dipaparkan sebenarnya bukan murni hasil pergulatan pemikiran dari kebijakan publik , melainkan hasil cangkakan dari manajemen sektor . demikian , paparan Nugroho mengenai hal tersebut dapat memberikan konklusi yang jelas, misi yang melekat pada organisasi merupakan acuan pokok bagi para pemimpin organisasi untuk merumuskan visi sesuai dengan kapasitasnya<sup>68</sup>. Perumusan visi oleh pemimpin organisasi tersebut tentunya bertujuan untuk mewujudkan misi atau ditunaikannya misi yang diemban melalui kemampuan dan keunggulannya . Visi yang baik adalah visi yang proporsional dan rasional , dan dapat dicapai sesuai dengan masa kepemimpinannya . Dengan demikian , visi merupakan sesuatu yang melekat pada pemimpin ( leader ) dan dirumuskan selama kurun waktu ia bekerja. Selanjutnya gabungan dari misi (organisasi) dan visi ( pemimpin ) tertuang dalam bentuk strategi . Visi Penjabaran adalah strategi atau rencana , selanjutnya dilaksanakan dalam bentuk kebijakan kebijakan , selanjutnya dioperasionalkan dalam program - program , selanjutnya di detailkan dalam bentuk proyek - proyek , dan menghasilkan luaran kegiatan. Untuk lebih memahami tentang implementasi kebijakan publik , juga dipelajari mengenai berbagai faktor yang mempengaruhinya , baik yang dapat mendukung implementasi kebijakan publik itu sendiri maupun sebaliknya , yaitu faktor - faktor yang dapat menghambat implementasi kebijakan publik , bahkan menjadi penyebab gagalnya implementasi kebijakan publik tersebut.

#### 0. Materi Kebijakan Publik

---

<sup>68</sup> Idris Sudin, 'Jurnal Implementasi Kebijakan Idris Sudin', 2008.

Materi kebijakan publik menurut Jones (PKP2A ILAN , 2011) merupakan aspek penting tentang muatan pokok yang berupa kepentingan para pihak kebijakan publik . Materi kebijakan publik tidak akan pernah lepas dari pengaruh kepentingan para pihak yang terlibat atau terlibat didalamnya. Sederhananya adalah materi kebijakan publik yang tersusun atas urusan urusan / kepentingan publik. Sehingga materi kebijakan publik perlu diuraikan secara jelas , termasuk latar belakang dan permasalahan yang mendorong perlunya digagas kebijakan publik tersebut<sup>69</sup> . Pendefinisian yang jelas , agar tidak menimbulkan multi persepsi masing - masing individu terhadap substansi kebijakan publik tersebut ( lihat Anggara , 2014 : 48-49 ) . Makmur dan Thahier ( 2016 : 36-37 ) mengatakan bahwa sunan materi kebijakan publik harus jelas dengan menggunakan bahasa yang tidak memiliki makna atau arti ganda , mulai dari kata , kalimat , alinea , dan seterusnya . Dengan menggunakan bahasa yang jelas , implementasi kebijakan publik akan memiliki kekuatan yang utuh , yang tidak dapat dimaknai dan diartikan sesuai dengan masing - masing orang yang ada dalam cakupan kebijakan publik tersebut . Harus diakui bahwa masyarakat pola pikir yang cenderung berbeda sesuai dengan pengaruh lingkungan sekitarnya . Sehingga dengan penggunaan bahasa yang jelas dan tidak memiliki makna atau arti ganda dalam materi kebijakan publik tidak memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk sesuai dengan kepentingan masing-masing<sup>70</sup>. Hal ini berdasarkan bahwa seluruh lapisan masyarakat yang tercakup dalam lingkup kebijakan publik yang akan diimplementasikan, tentunya akan merasakan dampak langsung maupun yang langsung . Demi terhindarnya pemanfaatan kebijakan publik yang tidak akan diimplementasikan oleh kepentingan masyarakat kelinci orang maka sekali lagi dosa yang harus digunakan dalam menyusun kebijakan publik harus jelas dan tidak memiliki makna atau arti ganda.

Dalam menggunakan bahasa yang dapat menimbulkan makna ganda , tentunya juga harus disertai penjelasan dan penjelasan lanjutan .

---

<sup>69</sup> (Dr. sahya Anggara, 2018)

<sup>70</sup> Mustari.

Sehingga dengan penjelasan dan penegasan lanjutan tersebut , lapisan masyarakat dalam suatu sistem politik tidak punya kesempatan untuk memberikan berdasarkan pola pikir masing - masing . Penyusunan materi kebijakan publik yang jelas , tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki kepentingan untuk digunakan sesuai kepentingan pribadi atau kelompoknya . Materi kebijakan publik harus tetap tersusun demi kesejahteraan bersama , berlandaskan pada keadilan dan pemerataan . Dalam penyusunan materi kebijakan publik , yang juga harus diperhatikan secara seksama adalah komponen - komponennya <sup>71</sup>. Materi kebijakan publik menjadi tepat sasaran jika dukungan dari komponen - komponen yang ada baik . Seperti dikutip oleh Siyoto dan Supriyanto ( 2015 : 50 )

dari Davis eston , bahwa komponen kebijakan publik ada tiga bagian, yakni pelaku (aktor) kebijakan, kebijakan publik, dan kebijakan itu sendiri.

Pada dasarnya proses kebijakan publik merupakan hasil interaksi dan baik , maka kebijakan publik yang akan diimplementasikan juga baik . ketiga komponen tersebut . Sehingga jika interaksi dari ketiganya sebaliknya , jika interaksi dari ketiganya tidak baik , maka dapat dipastikan kebijakan publik yang dihasilkan juga tidak baik . Dalam konteks ini , David Easton memberikan visualisasi model interaksi ketiga komponen kebijakan publik seperti pada gambar berikut .

Komponen kebijakan publik memang tampak sederhana , namun implementasi di lapangan ternyata sangat sulit . Ketiga tersebut memiliki peran ganda dalam proses komponen , yakni sebagai variabel independen dan dependen sekaligus . Dalam arti kata ketiga bahwa saling dapat memberi pengaruh atau mempengaruhi satu sama lain <sup>72</sup> . Kebijakan pelaku dapat memberikan pengaruh terhadap lingkungan sekitarnya serta

---

<sup>71</sup> Rusdiani Atik, 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DOSEN (Studi Dampak Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Dosen PAI Terhadap Peningkatan Kinerja Dosen PAI Di Perguruan Tinggi Umum Se Bandar Lampung)', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), 1689–99.

<sup>72</sup> Haedar Akib and Antonius Tarigan, 'Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya', *Jurnal*, 1.8 (2008), 1–19.

memberikan pengaruh terhadap kebijakan yang sudah ada . Di sisi lain, pelaku kebijakan juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar serta kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Demikian juga dengan lingkungan yang memberikan pengaruh terhadap pelaku kebijakan serta kebijakan yang sudah ada, namun juga berlaku sebaliknya bahwa lingkungan saat kebijakan dibuat, dipengaruhi oleh pelaku kebijakan serta oleh kebijakan sebelumnya. Sedangkan kebijakan di satu sisi memberikan pengaruh pada pelaku kebijakan dan lingkungan yang ada saat ini di sisi yang lain kebijakan dipengaruhi oleh pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan.

#### 0. Komunikasi Implementasi Kebijakan Publik

Dalam konteks ini , Makmur dan Thahier ( 2016 : 37-38 ) menjelaskan bahwa komunikasi yang harus terjaga dalam implementasi kebijakan publik adalah komunikasi antara tiga kelompok utama Tiga kelompok ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan , di antaranya adalah kelompok pelaksana ( pelaku implementasi kebijakan publik ), sasaran implementasi kebijakan publik , dan materi kebijakan publik . Dalam teori komunikasi , variabel yang harus ada adalah komunikator , komunikan , dan pesan yang akan disampaikan . Sehingga dalam hal ini yang bertindak sebagai komunikator adalah pelaksana kebijakan publik, yang bertindak sebagai komunikan adalah sasaran kebijakan publik, dan materi kebijakan merupakan pesan yang harus tersampaikan. Situasi ini juga dapat berlaku sebaliknya, artinya sasaran kebijakan publik bertindak sebagai komunikator dan pelaku kebijakan publik bertindak sebagai komunikan. Dengan demikian, antara pelaksana (pelaku) kebijakan publik dan sasaran kebijakan publik yang terdapat hubungan dua arah. Jika keduanya dapat berkomunikasi dengan baik , tentunya implementasi kebijakan publik menjadi baik sesuai harapan . Sebaliknya jika komunikasi tidak terjadi baik antara keduanya , maka kebijakan publik juga tidak dapat memperoleh hasil yang maksimal , bahkan akan mengalami kegagalan <sup>73</sup>. Oleh karena itu, kesimpulan yang

---

<sup>73</sup> Fabiana Meijon Fadul, 'KEBIJAKAN PUBLIK', 2019, 11–45.

dapat diambil adalah bahwa dalam setiap kehidupan baik secara individu maupun kelompok, tidak terlepas dari yang namanya komunikasi. Komunikasi yang baik akan memberikan dampak yang baik pula . Sebaliknya , komunikasi yang tidak baik akan memberikan dampak yang tidak baik pula . melihat banyak masalah yang terjadi , sejak dulu hingga sekarang , kebuntuan atau masalah dalam komunikasi merupakan salah satu penyebab utamanya . Permasalahan dalam komunikasi pada awalnya akan melahirkan kesalahpahaman atau kesalahan, kemudian melahirkan atau rasa curiga antara satu dengan lainnya , saling tidak percaya dan akhirnya menimbulkan perpecahan . Ada beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya komunikasi antara pemberi pesan ( komunikator ) dengan penerima pesan (komunikasi). Terhambatnya komunikasi ini kemudian menimbulkan kesalahpahaman bahwa perbedaan serta seringkali menegakkan pertikaian.

#### 0. Kelompok Sasaran Fermentasi Kebijakan Publik

Dalam suatu sistem politik tertentu , terdapat individu - individu yang memiliki latar belakang yang berbeda - beda , yang kemudian menjadi suatu tatanan masyarakat dengan ciri khas tertentu pula . Dalam konteks implementasi kebijakan publik , yang menjadi sasaran adalah masyarakat tersebut . Implementasi kebijakan publik selain menuntut kemampuan dari pihak pelaku ( implementator ) , juga menuntut sasaran implementasi kebijakan publik ( masyarakat ). Jika keduanya memiliki kemampuan yang sama - sama mencukupi, maka akan terjadi kerja sama yang baik, implementator akan menyampaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan publik termasuk sasaran yang akan dicapai, sedangkan masyarakat sebagai sasaran kebijakan publik akan dapat dipahami dengan baik apa yang disampaikan oleh pelaksana. . Dengan kondisi yang saling memahami posisi dan otoritas masing - masing , implementasi kebijakan publik kemungkinan akan berjalan lancar dan mencapai target yang telah ditentukan . Pemahaman keduanya terkait hal yang berhubungan dengan kebijakan publik , tentunya juga dibutuhkan

kerjasama yang baik . Kerja sama yang baik dalam implementasi kebijakan , tentunya akan menghasilkan hasil yang baik pula . Sebaliknya , apabila kerja sama antara keduanya tidak terjalin , maka kebijakan publik akan mengalami banyak kendala yang mengantarkan kegagalan.

#### 0. Tahap-tahap Implementasi Kebijakan Publik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan, Pelaksanaan, Penilaian Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, tahapan pelaksanaan (implementasi) kebijakan publik dapat digambarkan sebagai berikut<sup>74</sup>.

Sosialisasi kebijakan dan Penerapan kebijakan tanpa sanksi (6-1 tahun) disertai dengan penyempurnaan kebijakan jika diperlukan Implementasi dengan sanksi disertai berakhirnya pengawasan dan pengendalian Evaluasi kebijakan<sup>75</sup> (pada tahun ke-3 dan/atau ke-5 sejak implementasi sebagai berikut:

1. Persiapan Pelaksanaan Kebijakan (0 s/d 6 bulan), meliputi sosialisasi dan pemberdayaan pihak-pihak yang melaksanakan kebijakan, baik dari pemerintah (birokrasi) maupun masyarakat (masyarakat), media cetak, dan pertemuan masyarakat.
2. Pelaksanaan Kebijakan Publik dilakukan tanpa sanksi (masa percobaan) dengan jangka waktu 6 bulan sampai dengan 1 tahun dan disertai dengan revisi kebijakan jika diperlukan.
3. Pelaksanaan kebijakan publik dengan sanksi dilakukan setelah masa percobaan selesai, disertai dengan pengawasan dan pengendalian. Setelah melaksanakan kebijakan selama tiga tahun, dilakukan evaluasi kebijakan.

Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditentukan terlebih dahulu oleh perumusan kebijakan<sup>76</sup>.

---

<sup>74</sup> Pramono.

<sup>75</sup> Apriandi.

<sup>76</sup> Akib and Tarigan.

Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan hanya terjadi setelah undang-undang diundangkan dan tersedia dana untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. dan juga Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini mencoba mengubah keputusan tersebut menjadi pola operasional dan mencoba untuk mencapai perubahan besar atau kecil seperti yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya adalah upaya untuk memahami apa yang seharusnya terjadi setelah suatu program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan, tetapi juga melibatkan jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial<sup>77</sup>.

---

<sup>77</sup> (Prisma, 2013)

## BAB V

### ASAL USUL NEGARA

#### A. Pengertian Negara

Negara ialah salah satu wujud dari organisasi yang ada pada kehidupan bermasyarakat. Dengan prinsipnya yang mana setiap warga masyarakat sebagai anggota dari sebuah negara dan harus mengikuti terhadap kekuasaan negara. Melewati aktivitas bernegara dengan pemerintah yang terdapat di dalamnya, masyarakat mau mewujudkan tujuan tertentu misalnya dapat terciptanya kesejahteraan, ketertiban, serta kертentaraman pada masyarakat. Supaya pemerintah dari sebuah negara mempunyai kewenangan dalam mengatur aktivitas masyarakat agar tidak berbuat seenaknya, hingga terdapat sistem aturan itu melukiskan sebuah hierarki atau perbuatan dalam aturan yang tertinggi levelnya sampai ke aturan yang terendah.

Negara dan konstitusi merupakan konsep dwitunggal. Yang mana bagaikan bangunan, negara berfungsi untuk pilar atau tembok yang tidak dapat berdiri secara tegak tanpa pondasi yang kokoh, yakni konstitusi Indonesia. Mayoritas tiap negara memiliki sistem konstitusi, baik konstitusi itu sudah diimplementasikan dengan optimal atau tidak. Simpulannya, konstitusi merupakan perangkat negara yang mempunyai peran tidak dapat dipandang remeh atau sebelah mata.

a. Pendapat Aristoteles (Schmandt, 2002), negara adalah komunitas keluarga dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan.

b. Jean Bodin (Schmandt, 2002), negara sebagai pemerintahan yang tertata dengan baik dari beberapa keluarga serta kepentingan bersama mereka oleh kekuasaan berdaulat.

c. Riger Soltau, (Budiardjo, 2007; Agustino, 2007; Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2007), negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat<sup>78</sup>.

---

<sup>78</sup>Atha Wisesa Raihan, "Pengertian Negara," *Sinar Grafika* edisi ke-1, no. Pengertian Negara (2021): 128.

## **Teori Suatu Negara**

Suatu negara sendiri lahir dari proses yang pastinya panjang dan rumit. Masing-masing negara pastinya mempunyai sejarah tentang kemunculan awalnya. Terdapat beberapa teori yang menerangkan bagaimana asal-usul negara yaitu teori yang bersifat ketuhanan, teori yang didasari kekuatan atau kekuasaan, teori hukum alam, dan teori perjanjian masyarakat.

## **Teori Ketuhanan**

Teori yang memiliki sifat ketuhanan adalah teori paling tua dalam kerangka dari asal-usul suatu negara. Teori ini mengacu terhadap perjanjian terdahulu yaitu jika Tuhan merupakan sumber kekuatan dari negara.

Kaum Yahudi meyakini jika Tuhan yang menakdirkan seorang raja. Kaum Yahudi sendiri yakin jika raja ialah wakil dari tuhan dan diberikan kepadanya tanggung jawab yang harus dikerjakan. Dalam teori ketuhanan, ada kepercayaan jika siapa saja yang berani menentang raja, maka dia sudah membantah peraturan dari tuhan dan para pembantah tuhan itu akan mendapat kutukan atas perlawanan yang dilakukannya. Ketika manusia itu kehilangan suatu tumpuan, maka negara diperlukan untuk membendung hal-hal yang bersifat fatal. Secara teori ketuhanan, Tuhan yang menciptakan suatu negara. Yang membuat negara dapat berfungsi untuk memperbagus kejahatan dari manusia.

## **Teori Kekuatan atau Kekuasaan**

Teori kekuatan menerangkan jika sebuah negara terbentuk karena adanya salah satu akibat dari penaklukan kaum lemah oleh kaum kuat. Teori kekuasaan berlandas kepada pikiran asal mula manusia yang bersifat agresif. Sifat yang membuat manusia meronta terus-menerus agar dapat meraih kekuasaan dengan menaklukkan kaum lemah. Sifat agresif seperti itulah yang menggiring naluri manusia agar supaya bangkit dan membangun institusi negara. Karena sebab itu, kekuatan merupakan dasar negara.

Jean Bodin, Oppenheimer, dan Chris Jenks merupakan ahli filsafat yang memegang dan menunjang teori kekuasaan di masa modern ini.

## **Teori Hukum Alam**

Teori hukum alam memaparkan jika negara muncul karena tersedia kekuasaan alam yang berlaku pada setiap waktu dan tempat, dengan sifat universal dan tidak berganti. Beberapa filsuf yang merupakan tokoh pemikir dari teori ini misalnya seperti Plato, Aristoteles, Santo Agustinus, dan Thomas Aquino. Para pemikir teori ini memiliki pandangan jika antara negara dengan alam memiliki suatu keterikatan yang tidak bisa dilepaskan.

Berikut ini merupakan pandangan dari beberapa tokoh terkait teori hukum alam untuk proses pada terbentuknya negara:

- Plato mengungkapkan terjadinya suatu negara ialah secara evolusi.
- Aristoteles mengemukakan bahwa manusia adalah *zoon politicon* yang membangun keluarga-masyarakat-negara.
- Santo Agustinus menerangkan bahwa terjadinya sebuah negara karena suatu kewajiban sebagai penebus dosa atas perbuatan dari manusia.
- Thomas Aquino mengatakan jika suatu negara ialah lembaga alamiah yang dibutuhkan manusia untuk melangsungkan kepentingan umum.

## **Teori Perjanjian Masyarakat**

Teori perjanjian masyarakat menerangkan sebenarnya terciptanya negara yaitu karena terdapat perjanjian yang mana seluruh masyarakat mengikat diri pada perjanjian itu. Masyarakat membentuk sebuah organisasi negara untuk tujuan supaya negara bisa melindungi dan mengurus kelangsungan hidup mereka. Inilah beberapa filsuf dari Inggris dan juga Perancis yang berperan sebagai pencetus teori ini yaitu John Locke, Montesquieu, Thomas Hobbes, dan JJ Rousseau.

John Locke mengatakan jika pembentukan negara yang diasaskan dari perjanjian masyarakat terdiri dari dua tahap, yaitu:

1. Pactum Uniones: Adanya perjanjian dalam masyarakat untuk membentuk suatu negara.
2. Pactum Subjectiones: Adanya perjanjian yang diadakan dengan para penguasa.

Sementara JJ Rousseau dalam teori perjanjian masyarakat menghendaki raja semata-mata hanya sebagai mandataris rakyat sehingga jika raja tidak sanggup mengerjakan kekuasaannya dengan baik, maka raja bisa diganti<sup>79</sup>.

Kali ini topik yang akan dibahas tentang sejarah singkat asal-usul Indonesia, jauh sebelum merdeka banyak negara di dunia memanggil Indonesia dengan nama berbeda-beda.

Seperti orang-orang Cina yang menjuluki Indonesia dengan julukan Nan-hai atau kepulauan Laut Selatan. Berbeda dengan orang-orang India yang menjuluki Indonesia sebagai Dwipantara dan negara lainnya seperti orang Arab menjuluki Indonesia dengan Jaza'ir al-Jawi atau kepulauan Jawa. Nama-nama itu memang mengacu kepada suatu wilayah kepulauan yang terbentang luas. Julukan Indonesia dari perspektif orang-orang Eropa yang menjadi asal usul nama negara ini, selanjutnya penjelasan mengenai bagaimana cikal bakal nama ini.

Orang Eropa mempunyai sudut pandang sendiri untuk menjuluki Indonesia. Cukup banyak orang Eropa yang membubuhkan nama yang mengacu kepada gagasan “Hindia” dan “Pulau” dengan bahasa berbeda. Salah satunya yaitu ilmuwan dari Prancis, Dennis Lombard, yang mengatakan jika wilayah dari Nusantara dengan *carrefour de civilization* atau silang budaya merupakan persimpangan, karena wilayah persimpangan itu terdapat peradaban serta pengaruh budaya dari negara lain seperti India dan Tiongkok.

Menurut ahli sejarah dari *Oxford University*, Peter Carey, sejarah pendek asal-usul dari Indonesia ini diawali sekitar pertengahan tahun 1800-an. Yang mana ada seorang etnolog dari Inggris George Samuel Windsor Earl yang pertama kali memberitakan istilah ‘Indunesia’ ke dalam wacana ilmiah pada tahun 1850. ‘Indus’ berasal dari ‘Hindia’ dan ‘nesia’ adalah bahasa Yunani yang berarti ‘pulau’ (nesos).

Dari “*Journal of Indian Archipelago and Eastern Asia*”, seorang sarjana Skotlandia, James Richardson Logan, mengganti huruf ‘u’ di ‘Indunesia’ menjadi huruf ‘o’, dan jadilah nama ‘Indonesia’. Sejak saat itu Indonesia permulaan

---

<sup>79</sup>Yusa Djuyandi, “Teori Asal-usul Negara,” Kompas.com, 2022.

dikenal oleh banyak orang. Akan tetapi, Belanda menolak nama tersebut dan bersiteguh menamakannya dengan ‘Hindia Belanda.’

Hindia-Belanda dianggap jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Filipina yang mana adalah jajahan Amerika Serikat dan juga India, sekaligus jajahan Inggris terkait pertumbuhan dan kesadaran politiknya.

Nama Indonesia sendiri mulai menggambarkan identitas politik saat trio Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan dokter Tjipto Mangunkusumo mengangkat pikiran modern berpolitik di Partai Hindia. Orang-orang berkebangsaan Indonesia mulai membentuk kesadaran berpolitik dan berkebangsaan Indonesia tanpa membedakan suku, ras, dan keyakinan.

Para pemuda pemudi dari bermacam-macam pulau dan kota juga akhirnya mulai menyatakan diri sebagai pejuang kemerdekaan bangsa ‘Indonesia’. Mereka ialah yang tergabung di dalam wilayah konseptual yang teraniaya oleh negara Belanda. Sampai pada akhirnya sukses mencatat kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Semua wilayah tidak berpatok dari perbedaan budaya serta etnis, yang mana orang-orang pribumi akhirnya bersatu dan juga mengesahkan diri mereka sebagai Bangsa Indonesia.

## **B. ASAL-USUL NEGARA INDONESIA YANG BERPANCASILA**

### Natura Manusia Indonesia

Mereka merupakan para pendiri negara Indonesia ialah Soekarno, Soepomo, dan Yamin memelopori pengetahuan fundamental berkenaan dengan siapakah manusia Indonesia. Masalah dari Indonesia sebagai negara baru yang mulai dibentuk ialah persoalan tentang siapakah manusia Indonesia itu. Soekarno maupun Soepomo mengatakan sebenarnya karakter manusia Indonesia merupakan manusia gotong royong, religius, kekerabatan, kekeluargaan, dan yang lainnya. Prinsip-prinsip dari pendirian negara Indonesia wajib menyertakan seluruh elemen-elemen dalam karakter tersebut.

Soekarno mengemukakan Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Sementara Soepomo memunculkan gagasan tentang negara integralistik yang memfokuskan terhadap watak, kekerabatan dan kekeluargaan dari masyarakat Indonesia. Kodrat/natura negara Indonesia merupakan kodrat dari manusia-manusia Indonesia ini. Sebagai sebuah negara baru yang lahir sebab hasil perjuangan serta kesepakatan semua bangsa melalui wakil-wakilnya, negara Indonesia lahir tidak dengan sendirinya, namun dengan melalui perjuangan konvensi. Gotong royong ialah ciri khas dari manusia Indonesia dan lembaga sosial yang terdapat di Indonesia,

Menurut lembaga sosial asli Indonesia yang berciri gotong royong inilah, Soepomo lalu selanjutnya mempromosikan negara integralistik yang mana negara bersatu bersama seluruh rakyatnya dan melampaui semuanya dalam keadaan apapun. Lalu Soekarno juga menyuarakan jika sebenarnya prinsip dari negara Indonesia ialah gotong royong, beliau mengutarakan bahwa tidak lagi boleh terdapat petisi golongan, kelompok, dan pribadi apapun yang bakal memperjuangkan kepentingan pribadi diatas kepentingan bersama. Tidak boleh ada petisi tentang mayoritas atas minoritas, tidak boleh ada petisi tentang warga pribumi atas peranakan, tidak boleh ada lagi petisi kaum kaya atas kaum miskin. Karena, jika ada yang mengaku seperti itu, untuk apa adanya Indonesia ini merdeka, semua itu merupakan bentuk dominasi dan juga penjajahan baru secara tersirat.

Dengan menyuarakan jika gotong royong merupakan prinsip dasar negara Indonesia, Soekarno bakal mengutarakan bahwa Indonesia dibangun sebagai bentuk tanggung jawab untuk kepentingan seluruh warga Indonesia, apapun agamanya, golongannya, sukunya, dan keadaan ekonominya. Gotong royong bukanlah suatu sikap kekurangan berani, kekurangan percaya, atau sikap yang tidak mandiri. Gotong royong tidak serta merta berarti orang-orang sekampung yang memberi sumbangan ketika terdapat dari mereka terkena musibah. Gotong royong merupakan bahu-membahu serta saling bergandengan tangan, sebuah kesadaran bahwa semua warga ialah putra-putri ibu pertiwi, mempunyai hak dan juga kewajiban yang sama rata, meskipun ketika penerapannya, pelaksanaannya, penerjemahannya dalam kehidupan sehari-hari bisa juga berbeda. Gotong royong juga adalah sebuah prinsip yang dinamis, bahkan lebih dinamis daripada kekeluargaan.

Gotong royong bisa digunakan untuk menggambarkan sebuah usaha bersama dengan saling membantu untuk kepentingan bersama. Jiwa gotong royong juga semangat sifat kekeluargaan adalah nilai potensial yang terdapat pada bumi kita Indonesia. Semangat kegotong-royongan hidup karena terdorong oleh panggilan dan kodrat manusia Indonesia sebab terdapat pengalaman sejarah yang sama. Gotong royong ialah keseimbangan antara kebutuhan/kepentingan individu untuk hubungannya dengan keperluan masyarakat yang ada secara timbal balik. Sebab hidup manusiawi utamanya pada manusia Indonesia menghadapi kepunahan dengan hubungan masyarakatnya. Hal itu bisa tergambar melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengatasi setiap masalah supaya tidak ada benturan antar individu.

Hampir semua tokoh pendiri negara Indonesia mengutarakan bahwa natura manusia Indonesia ialah manusia yang penuh dengan gotong-royongan. Adanya semangat gotong royong tercakup kerja sama, musyawarah untuk mufakat, serta rasa saling menghargai. Negara yang kuat (atau keadilan dalam konsep Plato)

akan terlahir jika seluruh warga Indonesia menghayati ke gotong-royongan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari<sup>80</sup>.

---

<sup>80</sup>Lilis Wulandari, "Paper Filsafat Pancasila Kasus Hilangnya Pancasila Di Hati Elite Politik Indonesia Ditinjau Dari Teori Asal-Usul Negara Indonesia Yang Berpancasila Dan Pancasila Menurut Soekarno," 2020.

## BAB VI

### PEMERINTAHAN

#### **Pengertian**

Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, dan ketika ditambah akhiran “an” menjadi “pemerintahan”, perbedaan atau penambahan akhiran tersebut menyebabkan perbedaan penafsiran makna pada kata-kata tersebut. sebagai "pemerintah" dengan "pemerintahan" memiliki arti yang berbeda, yaitu pemerintah adalah badan atau organisasi yang terlibat, sedangkan pemerintahan mengacu pada hal-hal atau masalah yang berkaitan dengan pemerintah..<sup>81</sup>

Menurut para ahli “Pemerintah” disebutkan sebagai berikut :

- Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa pemerintah (government) secara etimologis berasal dari kata Yunani; kubernan atau nakhoda kapal, artinya menatap ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat-negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat-negara pada masa yang akan datang dan mempersiapkan langkah-langkah untuk menyongsong perkembangan masyarakat serta mengelola dan mengarahkan masyarakat ke tujuan yang ditetapkan.
- Ndraha (2003) mengartikan pemerintah sebagai badan yang memproses pemenuhan kebutuhan manusia sebagai konsumen produk-produk pemerintahan akan pelayanan publik dan sipil. Pemerintah (government) lahir dari delegasi kekuasaan oleh rakyat. Sedangkan pemerintahan (governance) menunjuk pada kemampuan dan spontanitas dari kelompok-kelompok sosial dalam mengatur dirinya sendiri, menunjuk pula pada metode, manajemen, organisasi. Governance lebih sebagai gejala sosial, dan lebih luas dari government. Government memerlukan proses politik. Governance menunjukkan adanya tatanan dan kemampuan sedangkan government menunjuk pada organ. Konsep government

---

<sup>81</sup>Abdul Kadir, “Studi Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik,” 2017, 108–9.

menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah).

- Menurut W.S. Sayre, pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.
- Robert Mac Iver, pemerintah adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Bagaimana manusia itu bisa diperintah. Pemerintah dalam akhir uraiannya, adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksudmaksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.
- Prajudi Atmosudirdjo (1984: 19), tugas pemerintah antara lain adalah tata usaha negara, rumah tangga negara, pemerintahan, pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan fungsi pemerintah adalah pengaturan, pembinaan masyarakat, kepolisian dan peradilan.
- Woodrow Wilson, pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemerintahan diartikan sebagai suatu sistem pelaksanaan kekuasaan dan wewenang, atau sistem pelaksanaan perintah, eksekutif. Secara umum, pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu organisasi yang mempunyai kekuasaan untuk membuat dan menegakkan peraturan perundang-undangan di suatu daerah. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki:

- 1) Otoritas memerintah dari sebuah unit politik;
- 2) Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (political);

- 3) Aparatus yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan;
- 4) Kekuasaan untuk membuat peraturan perundangundangan, untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

Menurut para ahli, pengertian “Pemerintahan” disebutkan sebagai berikut<sup>82</sup> :

- H. A. Brasz, pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari teknis atau pun cara lembaga umum disusun dan difungsikan dengan baik secara intern dan ekstern terhadap warga negaranya.
- R. Mac Iver, pengertian pemerintahan adalah suatu ilmu mengenai cara bagaimana orang-orang dapat diperintah atau pun dikendalikan.
- Syafie Inu Kencana, pemerintahan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara melakukan pengurusan badan eksekutif. Pengaturan badan legislatif, kepemimpinan, dan juga koordinasi pemerintahan baik pusat dengan daerah, mau pun rakyat dengan pemerintahannya dalam setiap peristiwa dan gejala pemerintahan.
- J. S. T. Simorangkir, pemerintahan merupakan sebuah alat negara yang menjalankan tugas dan fungsi dari pemerintah.
- Haryanto, dll, pengertian pemerintahan secara fungsional merupakan sistem struktur dan organisasi dari berbagai macam fungsi yang dijalankan dengan menerapkan dasar tertentu dalam mencapai tujuan sebuah negara.

Pemerintahan dapat dipahami secara luas sebagai semua pekerjaan yang dilakukan oleh negara untuk menjamin kepentingan rakyat dan kepentingan negara itu sendiri, oleh karena itu pemerintah tidak hanya dipahami sebagai pelaksana fungsi eksekutif tetapi juga mencakup tugas-tugas lain, termasuk legislatif dan yudikatif.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup>Kadir.

<sup>83</sup>Imam Sukadi, “Sistem Pemerintahan Indonesia dan Implikasinya Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 4, no. 1 (2021): 119–28.

Sri Seomantri menyatakan bahwa sistem pemerintahan adalah hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif terdapat perbedaan yang jelas antara sistem pemerintahan presidensiil dan parlementer. Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan dimana hubungan antara eksekutif dan badan perwakilan (legislatif) sangat erat. Hal ini disebabkan adanya pertanggungjawaban para menteri terhadap parlemen. Eksekutif dalam sistem parlementer adalah kabinet, yang terdiri dari perdana menteri dan menteri-menteri yang bertanggung jawab sendiri atau bersama-sama kepada parlemen.<sup>84</sup>

Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan dimana eksekutif tidak bertanggung jawab kepada legislatif. Pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat digulingkan oleh atau melalui legislatif meskipun kebijakan yang diterapkan tidak disetujui oleh pemegang kekuasaan legislatif. Dalam sistem pemerintahan presidensial, eksekutif dan legislatif memiliki posisi yang independen. Kedua badan tersebut tidak terkait secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih secara terpisah oleh rakyat. Dalam sistem presidensial, presiden memegang posisi yang relatif kuat dan tidak dapat digulingkan karena kemunduran subjektif seperti dukungan politik yang rendah. Namun, masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melanggar konstitusi, mengkhianati negara, dan terlibat dalam masalah pidana, jabatan presiden bisa ditinggalkan. Jika dipecat karena pelanggaran tertentu, biasanya akan digantikan oleh wakil presiden. Dalam sistem pemerintahan presidensial, seorang presiden bertanggung jawab kepada para pemilihnya (kiescollege).

### **Tujuan Pemerintahan**

Tujuan fundamental suatu pemerintahan adalah untuk menjaga keteraturan dan keamanan umum sehingga setiap anggota masyarakat dapat merasakan kebahagiaan. Adapun beberapa tujuan pemerintahan adalah sebagai berikut:

---

<sup>84</sup>Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (2018): 119, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.119-135>.

Melindungi hak asasi manusia, kebebasan, kesetaraan, perdamaian, dan keadilan bagi seluruh rakyatnya.<sup>85</sup>

1. Menjunjung tinggi dan menjalankan konstitusi sehingga setiap warga negara diperlakukan dengan adil.
2. Menjaga perdamaian dan keamanan di dalam masyarakat dengan menerapkan hukum secara adil.
3. Melindungi kedaulatan bangsa dari berbagai unsur yang mengancam, baik dari dalam maupun dari luar.
4. Membuat dan menjaga sistem moneter sehingga memungkinkan perdagangan domestik dan internasional berjalan dengan baik.
5. Menarik pajak dan menetapkan APBN secara bijak sehingga pengeluaran negara tepat sasaran.
6. Membuka dan menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.
7. Menjaga hubungan diplomatik dengan negara lain dengan cara membangun kerjasama di berbagai bidang.

## **Macam-Macam Bentuk Pemerintahan**

### **Monarki (Kerajaan)**

Léon Duguit dalam *Constitutional Law Treaty* membedakan pemerintahan dalam bentuk monarki dan republik. Menurut Léon Duguit, perbedaan antara bentuk pemerintahan "monarki" dan "republik" terletak pada kepala negara. Jika ditunjuk secara turun temurun, maka kita berurusan dengan monarki. Kalau Kepala Negara diangkat bukan karena genetik tapi karena pemilihan, maka kita berhadapan dengan Republik. Dalam praktik konstitusional, bentuk pemerintahan monarki dan republik dibedakan oleh:

- a) Monarki absolut Monarki absolut adalah bentuk pemerintahan di suatu negara yang diperintah oleh satu orang (raja, ratu, raja atau kaisar) dengan kekuasaan dan otoritas yang tidak terbatas. Perintah raja adalah otoritas

---

<sup>85</sup>Siti Aulia Noviardi, "Pengertian Dan Bentuk-Bentuk Pemerintahan," 2018, 5–8.

yang harus dipatuhi rakyatnya. Dalam dirinya sendiri, raja memiliki kekuatan eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang bersatu dalam kata-kata dan tindakannya. Misalnya, Prancis di bawah Louis XIV dengan semboyan terkenal *L'état C'est Moi* (tanah air adalah aku).

- b) Monarki Konstitusional Monarki konstitusional adalah suatu bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang diperintah oleh seorang raja yang kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi.
- c) Monarki Parlementer Monarki parlementer adalah suatu bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dipimpin oleh seorang raja dengan menempatkan parlemen (DPR) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam monarki parlementer, kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet (perdana menteri) dan bertanggung jawab kepada parlemen. Fungsi raja hanya sebagai kepala negara (lambang kekuasaan) yang kedudukannya tidak diragukan lagi. Bentuk monarki parlementer masih berlaku di Britania Raya, Belanda, dan Malaysia.

### **Pemerintahan Oligarki**

Oligarki adalah kekuatan yang dikendalikan oleh segelintir orang, tetapi dengan pengaruh dominan terhadap pemerintah. Oligarki adalah bentuk kekuasaan klasik. Kata oligarki berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oligo* yang berarti “sedikit” atau “beberapa” dan *archo* yang berarti “memerintah”. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang diperintah oleh banyak orang, tetapi untuk kepentingan orang banyak (bentuk negatif). Hampir ke arah itu, menurut Aristoteles, oligarki adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok intelektual untuk kepentingan kelompoknya.

### **Pemerintahan Republik**

Dalam pelaksanaan bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan menjadi republik absolut, republik konstitusional, dan republik parlementer.

- a) Republik absolut dalam sistem republik absolut, pemerintahan bersifat diktator tanpa ada pembatasan kekuasaan. Penguasa mengabaikan konstitusi dan untuk melegitimasi kekuasaannya digunakanlah partai

politik. Dalam pemerintahan ini, parlemen memang ada, namun tidak berfungsi.

- b) Republik konstitusional dalam sistem republik konstitusional, presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi. Di samping itu, pengawasan yang efektif dilakukan oleh parlemen.
- c) Republik parlementer dalam sistem republik parlementer, presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara. Namun, presiden tidak dapat diganggu – gugat. Sedangkan kepala pemerintah berada di tangan perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem ini, kekuasaan legislatif lebih tinggi dari pada kekuasaan eksekutif.

### **Pemerintahan Demokrasi (Democracy)**

Demokrasi adalah pemerintahan dimana rakyat memegang kekuasaan. Demokrasi bisa langsung (direct demokrasi) atau melalui perwakilan (representatif demokrasi). Demokrasi adalah suatu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya untuk melaksanakan kedaulatan rakyat (citizen power) atas negara yang diperintah oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip pemisahan tiga kekuatan politik negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) yang diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling independen dan ditempatkan secara paralel. . Keterkaitan dan independensi ketiga lembaga negara tersebut diperlukan agar ketiga lembaga negara tersebut dapat saling mengawasi dan mengontrol atas dasar prinsip check and balances.<sup>86</sup>

### **Pemerintahan Di Indonesia**

Dasar-dasar sebagai penguat terkait penggunaan system pemerintahan di Indonesia, disebutkan sebagai berikut :

- Indonesia pasca perubahan konstitusi masih tetap menganut sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Pasa 14 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: “(1) Presiden Republik Indonesia memegang

---

<sup>86</sup>Kadir, “Studi Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik.”

kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar; dan (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”. Artinya, The Founding Father bangsa menyadari sepenuhnya bahwa Indonesia secara hitrogen meliputi struktur sosial, budaya dan agama maupun wilayah luas memerlukan pemerintahan efektif dan politik stabil.<sup>87</sup>

- Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwasannya bentuk negara Indonesia yakni kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republic ditambah lagi bahwasannya Presiden di Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan sesuai Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.<sup>88</sup>
- Kesepakatan pendiri bangsa (founding fathers) dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada 29 Mei- 1 Juni dan 10-17 Juli 1945, sebagaimana dianut di Amerika Serikat. Pertama, sistem itu didasarkan atas asas pemisahan kekuasaan. Seorang pakar ilmu politik Amerika Serikat menyatakan it is based upon the separation of power principle. Yang kedua, tidak ada pertanggungjawaban bersama antara Presiden sebagai pemimpin eksekutif dengan para menteri. Para menteri itu sepenuhnya bertanggung jawab kepada Presiden. Yang ketiga, Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan yang keempat, presiden itu

---

<sup>87</sup>Baharuddin Thahir, “Pemerintah dan Pemerintahan Indonesia (Sebuah Bunga Rampai),” *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 2019.

<sup>88</sup>Sukadi, “Sistem Pemerintahan Indonesia dan Implikasinya Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.”

dipilih oleh Dewan Pemilih. Jadi ini sistem pemerintahan presidensiil sebagaimana berlaku di Amerika Serikat.<sup>89</sup>

- Sedangkan sistem parlementer menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang digunakan oleh Indonesia sejak tahun 1949-1959 dengan konstitusi berbeda, yaitu Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. (04)Pembagian kekuasaan yang jelas di antara tiga cabang kekuasaan yang disebutkan dalam trias politika yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif berdasarkan prinsip “checks and balances” sudah tertuang sejak perumusan sampai pengesahan. MPR yang ditetapkan terdiri atas DPR dan DPD yang masing-masing dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Selain itu, Presiden dan Wakil Presiden dipilih sebagai satu pasangan secara langsung oleh rakyat dan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu. Kemudian Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Secara teori, berdasarkan UUD NRI 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Namun dalam praktiknya, banyak bagian dari sistem pemerintahan parlementer yang melebur ke dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Secara singkat dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia adalah sistem pemerintahan yang merupakan gabungan atau gabungan dari sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Sistem hibrida ini bukanlah campuran dari model sistem presidensial Amerika dan model sistem parlementer Inggris. Sistem campuran yang dianut oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sistem campuran pemerintahan model Indische Staatsregeling<sup>29</sup> (Konstitusi Hindia Belanda kolonial) dengan sistem pemerintahan sosialis model Indische Staatsregeling .<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup>Yani, “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.”

<sup>90</sup>Sukadi, “Sistem Pemerintahan Indonesia dan Implikasinya Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.”

## BAB VII

### GOOD GOVERNANCE

#### A. Pengertian *Good Governance*

Istilah *good governance* pertama kali muncul 125 tahun yang lalu ketika digunakan oleh Presiden Amerika Serikat yang ke 27 bernama Woodrow Wilson saat berpidato, beliau berkata bahwa pemerintah yang sedang ia pimpin saat itu harus dijalankan dengan tata kelola yang baik. Pidatonya tersebut mendapat apresiasi serta tanggapan yang baik dari kalangan akademisi, sehingga dari waktu ke waktu berkembanglah suatu ilmu pengetahuan dengan istilah *good governance*<sup>91</sup>. Sementara itu pengertian *good governance* secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti tata kelola pemerintahan yang baik. Secara rinci penggunaan *good governance* dianggap sebagai istilah untuk sebuah organisasi publik yang melakukan tugasnya dengan baik, organisasi public tersebut lebih sering diartikan sebagai pemerintahan. Beberapa ahli juga memberikan pendapatnya tentang pengertian dari *good governance* ini diantaranya yaitu :

1. Menurut Robert Charlick mengartikan bahwa *good governance* merupakan proses pengelolaan berbagai macam urusan publik yang dilakukan secara efektif serta dikontrol oleh peraturan dan kebijakan yang dianggap baik untuk menanamkan nilai-nilai kemasyarakatan<sup>92</sup>.
2. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo menyebutkan bahwa *Good Governance* adalah “Suatu bentuk manajemen atau pengaturan pembangunan, yang juga disebut sebagai administrasi pembangunan dengan cara menempatkan pemerintah sebagai suatu lembaga yang mempunyai peran sentral yaitu menjadi *Agent of change* untuk membantu masyarakat agar lebih maju atau *develoving* didalam suatu negara berkembang” efisien serta efektif dengan menjaga kerjasama atau kesinergian interaksi yang konstruktif dan

---

<sup>91</sup>Aris Toening Winarni Wijaya, Emiliana Sri Pudjiarti, *Tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)*, 2018.

<sup>92</sup>Deysi Tampongongoy, “PERANAN KEPALA DISTRIK DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DISTRIK SALKMA KABUPATEN SORONG SELATAN,” 1999, 1–15.

terorganisir diantara domain – domain baik itu negara, sektor swasta, dan masyarakat.

3. Menurut UNDP (United National Development Planning), *Good governance* merupakan proses penerapan suatu kebijakan pengelolaan berbagai urusan. penyelenggaraan sebuah negara baik secara politik, ekonomi ataupun administratif di semua tingkatan pemerintahan<sup>93</sup>. terdapat tiga pilar *good governance* yang penting, berdasarkan konsep diatas yaitu:
  - a. Kesejahteraan masyarakat (*economic governance*).
  - b. Proses pengambilan keputusan (*political governance*).
  - c. Tata laksana pelaksanaan kebijakan (*administrative governance*)

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang telah diuraikan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa *good governance* merupakan tahapan dari suatu proses penyelenggaraan pemerintahan negara yang tertata secara solid dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusannya, serta terdapat efisiensi dan efektifitas dalam menjaga kesinergian hubungan interaksi yang terorganisir secara konstruktif diantara berbagai sumber daya baik itu negara, sektor swasta, ataupun masyarakat.

Pada awal munculnya konsep *good governance* ini konsep yang dipelajari masih dilihat secara sempit, yakni hanya menjadi bahan dalam studi ilmu politik. Dengan adanya perkembangan dari tata kelola pemerintahan, maka kebutuhan akan pemahaman – pemahaman baru yang dapat membantu dalam mendukung tugas – tugas yang diselenggarakan oleh pemerintah semakin luas dan dinamis, sehingga kemudian mendorong adanya kajian-kajian yang baru dan luas pula. Saat Presiden Amerika Serikat ke 27 Woodrow Wilson memberikan pidato tentang *good governance* ini dapat disimpulkan secara pasti bahwa keadaan yang terjadi saat itu harus ditanggapi oleh semua negara di dunia. Begitu juga khususnya dikalangan para akademisi, mereka sangat paham dengan kebutuhan itu, maka diusulkanlah *good governance* sebagai asas atau dasar dalam pelaksanaan pemerintahan yang sedang berkuasa. Beberapa lembaga lain yang bertaraf dunia, seperti: *World Bank, United Nation Development Program, Asian*

---

<sup>93</sup>Muhamad Imam Syairozi dkk., "ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE," 2021, 49–59.

*Development Bank*, prinsip *good governance* tersebut juga dimasukkan sebagai program khusus untuk memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia agar pemerintahan yang berlaku dapat berjalan lebih baik<sup>94</sup>.

### C. Konsep dan Prinsip Good Governance

Dalam implementasiannya konsep *Good governance* yang diusung oleh *World Bank* dan UNDP masih tidak memiliki ketentuan yang pasti. Konsep ini lebih dikenal sebagai solusi dari adanya kinerja pemerintah yang raltif masih kurang efektif dan efesien. Konsep tersebut hadir dikarenakan *World Bank* yang merupakan suatu lembaga pemberi bantuan kepada negara-negara yang masih berjuang dalam membangun fungsi paasti institusi dan memberikan pelatihan kepada pejabat publik untuk meningkatkan keahlian dan kompetensinya. Keberhasilan dari konsep *good governance* bisa dilihat melalui terselenggaranya prinsip-prinsip yang ada didalamnya. Prinsi-prinsip tersebut digunakan sebagai tolak ukur dari kinerja pemerintah dalam mengelolah pemerintahan yang ada. Adapun prinsip-prinsip yang terdapat pada konsep *good governance* antara lain sebagai berikut<sup>95</sup>.

#### 1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah adanya keikutsertaan dari masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung atupun melalui beberapa perwakilan lembaga-lembaga yang ada dan sah untuk menyampaikan kepentingan masyarakat luas. Partisipasi masyarakat dibangun dan didasari oleh prinsip kebebasan yang adil dan santun. Dengan adanya partisipasi diharapkan masyarakat dapat membuat suatu kebijakan publik tersebut menjadi lebih tepat sasaran, karena adanya campur tangan yang berasal dari suara masyarakat yang bersangkutan.

#### 2. Supremasi Hukum

---

<sup>94</sup>Dr. Ely Siswanto, *Good University Governance Prinsip dan Implentasi Dalam Penggalian Pendapatan*, 2014.

<sup>95</sup>Buku Ajar, *Sistem Administrasi, dan Negara Republik, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, 2020.

Hukum memiliki peranan penting untuk menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh mahluk hidup. Hukum yang bersifat mengikat dan memaksa tentunya haruslah didasari oleh beberapa prinsip yaitu tidak memihak, adil, dan konsisten. Hukum yang ada harus diberlakukan tanpa pandang bulu bukan tumpul keatas tajam kebawah dan tidak melihat pada jabatan, materi, dan kekerabatan.

### 3. Transparansi

Transparansi atau keterbukaan dapat diartikan dengan adanya pihak pemerintahan yang memberikan kemudahan masyarakat dalam melihat serta mengakses informasi terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi tersebut harus bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali dengan memperhatikan beberapa ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Informasi yang ada haruslah bersifat update atau terbaru dan validasinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

### 4. *Stakeholder*

Adanya *Stakeholder* juga memiliki peranan penting dalam menciptakan kemitraan dengan pemerintahan. *Stakeholder* yang dimaksud bisa mempunyai berkedudukan sebagai pengambil keputusan ataupun pelaksana program. *Stakeholder* harus mempunyai kepentingan yang sama dan seharusnya berjalan selaras dengan kepentingan yang telah dibangun oleh pemerintah dan masyarakat.

### 5. Berorientasi pada Konsensus

Pemerintah dalam hal ini memiliki peran penting sebagai katalisator yakni penghubung yang menjembatani berbagai aspirasi, pendapat dan kepentingan-kepentingan yang berbeda sehingga diharapkan nantinya bisa didapat sebuah konsensus yang berdasar pada kesepakatan bersama.

### 6. Kesetaraan

Kesetaraan yang dimaksud disini adalah seluruh masyarakat yang harus mempunyai kesempatan yang sama dimata hukum dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Prinsip kesetaraan ini memiliki pandangan lurus terhadap keadilan dan pembangunan ekonomi yang stabil, dengan tujuan bahwa semua masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam melakukan usaha

untuk mengembangkan kompetensi diri tanpa adanya intervensi atau larangan dari pihak manapun.

#### 7. Efektifitas dan Efisiensi

Dalam implementasi dari program-program dan kebijakan, pemerintah tentunya harus berpegang pada prinsip efektif dan efisien. Program atau kebijakan publik dapat dikatakan efektif, jika program atau kebijakan publik tersebut dijalankan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Begitu juga dengan efisien, yang berarti bahwa pemerintah harus bijak dalam menggunakan anggaran dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan guna mencapai target yang telah ditentukan.

#### 8. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari segala bentuk kebijakan atau program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Adapun bentuk pertanggungjawaban berbeda-beda tergantung dari situasi, kondisi dan pihak yang terkait. Tujuan dari akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

#### 9. Visi Strategis

Visi strategis merupakan ideologi atau cara pandang yang dinilai baik, berasal dari pemerintah dan masyarakat dalam proses membangun perekonomian manusia dan mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Visi strategis merupakan rencana kebijakan atau program yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan dan cita – cita negara. Cara pandang yang strategis tentunya dapat membuat suatu negara bersaing dalam mempertahankan eksistensinya.

### **D. Penerapan Good Governance Di Indonesia**

Konsep *Good Governance* hadir di Indonesia pasca era reformasi. Hadirnya konsep tersebut hadir dikarenakan berbagai macam konflik permasalahan yang ada. Adanya desakan dari pemerintahan pada masa orde baru yang menjadikan presiden sebagai pusat kekuasaan berakibat pada beberapa konstitusi dan instansi tinggi negara tidak dapat berjalan dengan baik, dan juga

terganggunya *control social* yang merupakan tugas dari partisipasi masyarakat<sup>96</sup>. Dalam penerapannya, pemerintah saat itu masih belum bisa memahami dengan baik tentang apa itu *good governance*, sehingga dalam beberapa kasus di lapangan konsep tersebut belum dapat berjalan sesuai harapan. Seiring berjalannya waktu pemerintahpun mulai berbenah untuk berkomitmen menjadikan *good governance* tersebut sebagai dasar pondasi dan landasan dari nilai pemerintahan. Pada masa reformasi saat itu, badan eksekutif dan legislative negara menciptakan 3 perundang-undangan dengan tujuan mengubah sistem dalam pemerintahan di Indonesia, diantaranya undang – undang tersebut yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemberian kewenangan yang lebih besar untuk pemerintah daerah (Kabupaten dan Kota) yang dapat mengatur dan mengelola bidang pemerintahan dan bidang pembangunan.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang pemberian dan penyerahan kewenangan yang lebih besar dalam urusan pengelolaan dan pengalokasian dana untuk pemerintah daerah (Kabupaten atau kota).
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang pelaksanaan di bidang pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan baik ditingkat pusat dan daerah sebagai bentuk pengimplementasian penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Negara yang berperan sebagai pemberi layanan kepada masyarakat dengan tujuan tercapainya kesejahteraan yang adil dapat berjalan dengan baik karena adanya sistem pemerintah yang memegang teguh pada 3 bidang dasar pembangunan berkelanjutan, yaitu bidang lingkungan, bidang ekonomi dan bidang sumber daya manusia. Konsep *good governance* ini saling memiliki keterkaitan diantara 3 pihak yang berperan utama, yaitu: pemerintah sebagai penyelenggara negara, pihak korporat sebagai penggerak bidang perekonomian, serta masyarakat sipil sebagai pihak penyesuai. Hubungan antara pihak – pihak tersebut saling berhubungan dan masing – masingnya berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik. Adanya sinkronisasi dan harmonisasi diantara pihak-pihak tersebut adalah suatu hal yang sangat penting

---

<sup>96</sup>Andalus Handayani dan Mohamad Ichšana Nur, "Implementasi Good Governance Di Indonesia 1 Fitria Andalus Handayani, 2 Mohamad Ichšana Nur 1" 11, no. 1 (2019): 1–11.

walaupun keadaan Indonesia saat ini masih sulit untuk dapat terjadi<sup>97</sup>. Konsep *good governance* ini dapat terwujud dengan cara kesinergian dari beberapa elemen di suatu negara seperti masyarakat sipil, sektor publik, dan sektor privat yang berperan dalam mengelola sumber daya alam, ekonomi, lingkungan dan sosial di negara tersebut. *Good governance* dapat mencapai dengan tercapainya indikator – indikator yaitu partisipasi, efisiensi dan efektivitas, transparansi, dan keadilan.

---

<sup>97</sup>Pemahaman Aparatur dkk., “Pemahaman aparatur pemerintah terhadap penerapan akuntansi keuangan demi terciptanya *good governance*,” no. 32 (2017): 36–44.

## BAB VIII

### Kebijakan Publik Presiden Indonesia dari Masa ke Masa

#### Presiden Soekarno

##### A. Biografi Soekarno

Ir. Soekarno atau akrab dipanggil Bung Karno dilahirkan pada 6 Juni 1901, beliau dilahirkan pada hari Kamis Pon dalam penanggalan Jawa. Ia dilahirkan di desa Lawang Sekaten Surabaya. Soekarno lahir dari perpaduan antara bangsawan kelas priyayi yang didapatkan dari ayahnya yaitu Raden Soekemi Sosrodihardjo dan keluarga Brahmana yang taat beribadah didapatkan dari ibunya, sehingga memiliki kepercayaan dan kultur terhadap mistik Jawa yang kuat. Kebudayaan Jawa membentuk perkembangan Islam di Jawa yang berwujud pada pola sinkretis dan puritan<sup>98</sup>. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap bagaimana pola pikir Soekarno di masa depan dalam menentukan kebijakan dan sikapnya serta berbagai persoalan yang mengenai agama, dan persoalan dalam memecahkan masalah-masalah negara juga. Hal tersebut bisa kita lihat dari perkembangan kebijakannya. *Bernard Dahm* berpendapat jika akan memahami pola pikir Soekarno tidak bisa terlepas dari tokoh yang disukainya di cerita pewayangan yang terdapat dalam masyarakat Jawa. Tokoh tersebut yaitu Bima dan Pandawa. Tokoh ini tidak mengenal kompromi dengan orang yang tidak bisa memahami pola pemikirannya, akan tetapi orang yang mau memahami pemikirannya sangat bisa bekerja sama dengannya, karena sesungguhnya kualitas pemahaman itu memang berbeda-beda<sup>99</sup>.

Dalam riwayat hidup pendidikan, Soekarno diminta oleh kakeknya di Tulungagung menempa pendidikan serta meringankan beban ekonomi Raden Soekemi Sosrodihardjo. Pada tahun 1907 Soekarno bersekolah di Sekolah Dasar atau disebut dengan Sekolah Rakyat (SR) di Tulungagung dengan kakeknya<sup>100</sup>. Pada zaman itu, beliau bukan termasuk murid yang rajin, meskipun begitu Soekarno bukan termasuk murid yang bodoh, hanya saja beliau kurang

---

<sup>98</sup> Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*.

<sup>99</sup> Fabiana Meijon Fadul, 'BIOGRAFI DAN PERJUANGAN SOEKARNO', 2019.

<sup>100</sup> Tamar Djaya, *Soekarno Hatta Ada Persamaan Dan Perbedaannya*, 1983.

mempunyai niat belajar di sekolah itu. Di samping itu, beliau tidak pernah menghafal pelajaran di sekolah dengan baik, bahkan beliau lebih memilih untuk menghafal cerita pewayangan terutama cerita tentang perang Baratayuda.

Soekarno selanjutnya mengenyam pendidikan di *Europesche Lagere School* (ELS) pada tahun 1911, yang sekarang menjadi SMPN 2, di Jalan A Yani, Kota Mojokerto. Setelah menempuh ELS Soekarno dikirim orang tuanya untuk melanjutkan studinya ke *Hogere Burger School* (HBS) di Surabaya pada tahun 1916. Menurut pendapat Bernhard Dahm, meskipun perbedaan ras tidak begitu kentara di sekolah menengah tersebut, namun karena sedikit siswa-siswa bumiputera yang lolos masuk sekolah ini, tergambar bagaimana sulitnya kesempatan untuk masyarakat bumiputera bisa mengenyam pendidikan sebagaimana pendidikan yang diperoleh orang-orang Belanda<sup>101</sup>. Soekarno menyelesaikan sekolahnya di HBS Surabaya, pada tanggal 10 Juni 1921, akhir bulan Juni 1921 Soekarno mulai berpindah ke kota Bandung dan mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Teknik atau *Technische Hogeschool* (THS) Bandung atau sekarang lebih dikenal dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan pada tanggal 25 Mei 1928 ia memperoleh gelar Insinyur Teknik<sup>102</sup>.

Setelah menempuh pendidikannya sebagai mahasiswa Soekarno memperoleh gelar *Doctor Honoris Causa* dari 26 Universitas di dalam juga di luar negeri. Memperoleh dari Universitas dari dalam negeri yang terkemuka di Indonesia seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Hasanuddin, Universitas Padjadjaran, dan Institut Agama Islam Negeri Jakarta, juga dari Universitas di luar negeri. Di antaranya ada, *Columbia University* (Amerika Serikat), *Lomonosov University* (Moscow), *Berlin University* (Jerman), dan *Al-Azhar University* (Cairo). Dari macam-macam bidang keilmuan tersebut bisa menunjukkan bagaimana luasnya pengetahuan Soekarno, hal tersebut juga sangat berpengaruh dengan bagaimana beliau bisa berinteraksi dengan bermacam-macam kalangan orang yang ditemuinya.

---

<sup>101</sup> J. D. Legge, *Soekarno, Sebuah Geografi Politik*.

<sup>102</sup> Sagimun, *Perlawanan dan Pengasingan Pejuang Nasional*, 1986.

Bidang keilmuannya tidak hanya tentang Ilmu Teknik, akan tetapi juga tentang Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Politik, Filsafat, Ilmu Sejarah, dan Ilmu Ushuluddin<sup>103</sup>. Karena sejatinya ilmu pengetahuan sangat penting dimiliki untuk semua orang yang menjadi pemimpin, dan sikap seseorang bisa dinilai dari seberapa luas ilmu yang dia miliki dan ilmu juga bisa mempengaruhi akhlak seseorang. Decak kagum banyak beliau peroleh karena kemampuan akademik dan kebijakan-kebijakan politik yang beliau terapkan, sampai dunia akademik mengakuinya. Sampai-sampai dunia Internasional pun juga mengakui bagaimana hebatnya Soekarno lalu membuat Indonesia menjadi negara bebas serta diperhitungkan oleh dunia.

Karena dijajah oleh Belanda sudah membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi berantakan. Penjajahan itu membuat sumber kesejahteraan masyarakat Indonesia tercekik dan struktur rohani masyarakat berubah, kepribadian menjadi hancur, kekayaan yang dimiliki Bangsa Indonesia diambil dan dibawa Belanda untuk diperjualbelikan, bahkan pendidikan masyarakat Indonesia sendiri sangat tidak layak serta persatuan bangsa terpecah belah<sup>104</sup>.

Atas pandangan dan pendapatnya tersebut membuat beberapa tokoh intelektual kanan Belanda justru berpendapat negative terhadap Soekarno sebagai seorang “Quisling” yang menjual bangsanya kepada Jepang. Tetapi tuduhan ini tidak berkembang bahkan tidak berpengaruh dalam perkembangan bangsa dewasa ini<sup>105</sup>.

Sejak berada di Surabaya Soekarno mulai berkenalan dengan Pemikiran Barat serta pemikiran keislaman. Soekarno ditempatkan oleh ayahnya di rumah Tjokroaminoto dengan dua alasan utama, yaitu :

1. Tjokroaminoto adalah sahabat dekat dari ayah Soekarno yaitu Raden Soekemi Sosrodihardjo,
2. Inisiatif dari keinginan orang tuanya untuk menjadikan Soekarno sebagai tokoh Karno yang kedua dalam dunia nyata mengikuti jejak dalam cerita pewayangan<sup>106</sup>.

---

<sup>103</sup> 'Http://Www.Gentasuararevolusi.Com/Index.Php/Biografi.Html'.

<sup>104</sup>Bernard Dahm, *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, t.t.

<sup>105</sup>Dahm.

<sup>106</sup>Cindy Adams, “BUNG KARNO PENYAMBUNG LIDAH RAKJAT INDONESIA Bab 1,” 1965, 110.

Dengan tinggal di rumah Tjokroaminoto tersebut menjadikan Soekarno semakin mengenal tokoh tersebut. Tokoh Tjokroaminoto sendiri waktu itu dipandang orang sebagai inkarnasi kebaikan dari kebahagiaan masa depan, oleh sebab itu tidak mengherankan jika pada tahun 1914 ia dianggap sebagai Ratu Adil<sup>107</sup>.

Pengalaman Soekarno di dunia pendidikan modern bertambah juga dengan kemajuan pola pendidikan dalam masyarakat tradisional yaitu dorongan bagi anak-anak muda sebagai calon pemimpin masa depan untuk pergi merantau mencari pengalaman di sisi dunia yang lainnya. Soekarno sebagai pemuda Jawa juga pergi untuk merantau dan mengasingkan diri. Pada saat itu, Soekarno terkadang tinggal di rumah seorang guru untuk menimba ilmu, atau menumpang di rumah keluarga.

Demikian juga seperti Soekarno ketika dipisahkan dari masyarakat untuk dipersiapkan kembali pemunculannya dengan bentuk yang sama. Gurunya yaitu Tjokroaminoto yang membentuk hidup Soekarno muda dan mengantarkannya kembali pada perbatasan masyarakat sehari-hari setelah usianya dianggap sudah cukup matang<sup>108</sup>.

Soekarno tidak hanya menunggu bimbingan dari gurunya, tetapi juga berusaha mengembangkan dan mempersiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh secara terarah, Soekarno membuat strategi komunikasi baik secara langsung dan juga tidak langsung dengan orang yang dilihatnya mempunyai *mindset* yang berwawasan masa depan dan berkelanjutan. Di rumah Tjokroaminoto itulah beliau bergabung dengan orang-orang yang datang dari berbagai aliran pemikiran sampai dari yang berhaluan komunis seperti Alimin, Muso, Semaun dan Darsono<sup>109</sup>.

### **Politik Praktis Ir. Soekarno**

Diadakannya rapat besar pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung yang dihadiri oleh Soekarno, Tjipto Mangunkusumo, Ishaq, Soedjadi, Boediarto, Tilaar, dan

---

<sup>107</sup>Dahm, *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*.

<sup>108</sup>John D.Legge, *Soekarno, Sebuah Geografi Politik*, t.t.

<sup>109</sup>Cindy Adams, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*.

Soedardjo yang mana adanya rapat tersebut memutuskan untuk mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang berasaskan marhaenisme<sup>110</sup>.

Adapun unsur-unsur Marhaenisme adalah :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Sosio Nasionalisme
- c. Sosio Demokrasi

Dengan asas dan perjuangan Marhaenisme, PNI memiliki tekad untuk meneruskan perjuangan yang progresif menentang imperialisme Belanda, asas dan perjuangan seperti yang dimaksudkan untuk menciptakan kemerdekaan, menumbuhkan masyarakat yang adil dan makmur, serta membangun Indonesia yang baru. Di samping menumbuhkan keinsafan akan bagaimana jeleknya nasib yang dialami bangsa Indonesia, maka tujuan pendirian PNI juga bermaksud agar supaya timbul rasa nasionalisme bagi rakyat Indonesia<sup>111</sup>.

Upaya yang dilakukan Soekarno untuk membangun kesatuan dan persatuan seluruh aliran dan partai politik di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia menghadapi penjajah Belanda. Sebab yang lain, Soekarno mempunyai harapan untuk menciptakan bangsa Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Dengan begitu, Soekarno menjadi lebih aktif dan tampil sebagai pemimpin PNI. Usaha yang dikerjakan oleh Soekarno cukup berhasil, maka dari itu pertumbuhan dan perkembangan PNI di beberapa daerah dari Jawa maupun luar Jawa cukup cepat, bahkan menjadi partai yang paling berpengaruh di dalam masyarakat Indonesia.

PNI sangat berkembang dengan pesat sampai-sampai memiliki anggota sebanyak 13,5 juta orang di Tanah Jawa saja. Hal tersebut juga menjadi bukti jika kekuatan yang dimiliki PNI saat itu tidak seharusnya dianggap sepele oleh penjajah Belanda. Pantas saja jika Pemerintah Hindia Belanda merasa bahwa sepak terjang dari PNI ini mencurigakan jika semakin lama diamati<sup>112</sup>.

Pemerintah Hindia Belanda tidak hanya bersikap curiga terhadap PNI sebagai parpol namun lebih fundamental yaitu kepada Soekarno karena

---

<sup>110</sup>Herbert Feith, *Pemikiran Politik Indonesia 1945 – 1965*, 1988.

<sup>111</sup>D.Legge, *Soekarno, Sebuah Geografi Politik*.

<sup>112</sup>A. K. Pringgodigdjo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, t.t.

merupakan ketua serta otak inti dari pergerakan PNI. Sebagaimana bisa terlihat dari tahap-tahap yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada Soekarno seorang. Beberapa tahapan yang ditempuh oleh Soekarno yaitu bersama dengan Soekiman atas nama PSII kepada partai-partai politik yang terdapat di Indonesia mereka mengirimkan surat kepada pengurus besar partai politik. Isi dari surat tersebut yaitu mengajak untuk membuat partai dari gabungan seluruh partai di Indonesia. Mendapatkan respon positif dari partai politik di seluruh Indonesia melalui surat tersebut, jadilah pada tanggal 17 Desember 1927 terbentuklah Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan atau biasa disebut PPPKI<sup>113</sup>. Tahapan selanjutnya yang dikerjakan Soekarno adalah karena sudah memiliki kekuatan yaitu PPPKI menjadikan perjuangan politik Indonesia semakin matang dan hebat, hingga dengan waktu kurang lebih 2 tahun, PPPKI bergerak dengan propagandanya menentang kolonialisme serta imperialisme Belanda yang ada di Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928 diadakan Kongres Pelajar yang merupakan suatu peristiwa bersejarah yang melahirkan Sumpah Pemuda, yang mana sumpah itu berisikan segala kesungguhannya berjuang mengobarkan semangat persatuan dan kesatuan. Pada saat itu juga dinyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin langsung oleh sang pencipta lagu yaitu Wage Rudolf Supratman atau biasa disebut W. R. Supratman<sup>114</sup>.

Karena jiwa pemuda yang terlalu menggebu dan tanpa perencanaan yang matang perjuangan tersebut tidak bertahan lama, karena setelah itu Soekarno ditangkap dan dipenjara, PPPKI juga tidak lama pergerakannya memudar sementara konflik dan kepentingan pribadi semakin mencolok, dibanding kepentingan PPPKI banyak dari anggota partai memilih mementingkan kepentingan dari federasinya sendiri. Pada tahun 1930 PNI dibubarkan oleh Sartono dan diganti menjadi nama Partai Indonesia (PARTINDO). Setelah itu Soekarno dibebaskan dan beliau mencoba untuk menyatukan lagi anggota dari PNI, namun sayang usaha tersebut gagal namun beliau kemudian ikut aktif di PARTINDO<sup>115</sup>.

---

<sup>113</sup> A. K. Pringgodigjo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia* (Dia Rakyat, 1991).

<sup>114</sup> Terj. M. Mulyadi Djoyomartono, *Pasang Naik Kulit Berwarna*, t.t.

<sup>115</sup> D. Legge, *Soekarno, Sebuah Geografi Politik*.

Soekarno kembali ditangkap pada tahun 1934 dan diberangkatkan dengan Inggit dari Surabaya ke tempat pengasingan yang terpencil yaitu Kota Ende Flores. Setahun setelahnya Soekarno dipindahkan dari Ende ke Bengkulu karena menderita penyakit malaria. Di tahun 1942 Soekarno kabur dari penjara, beliau kabur ke daerah Padang dengan menyeberangi Selat Sunda lalu menuju ke Jakarta di bulan Juli 1942<sup>116</sup>. Usaha dari Belanda untuk menangkap Soekarno tidak membuat perjuangan rakyat Indonesia kendor, hal tersebut justru membuat perjuangan serta membebaskan bangsa Indonesia dari penjajah semakin kuat. Meskipun Soekarno ada di penjara, akan tetapi masing-masing sudah memegang garis komando untuk perjuangan.

Pada tahun awal masa penjajahan Jepang (1942-1945), pemerintah Jepang sempat tidak memperhatikan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia terutama untuk "mengamankan" keberadaannya di Indonesia. Hal itu terlihat pada Gerakan 3A dengan tokohnya Shimizu dan Mr. Syamsuddin yang gerakannya kurang begitu populer pada saat itu.<sup>66</sup> Akan tetapi pada akhirnya, pemerintahan pendudukan Jepang memperhatikan dan juga sekaligus memanfaatkan tokoh-tokoh Indonesia. Disebutkan dalam berbagai organisasi seperti BPUPKI, PPKI, Jawa Hokokai, dan Pusat Tenaga Rakyat (Putera), tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, K.H. Mas Mansyur, dan lainnya disebut-sebut dan terlihat begitu aktif<sup>117</sup>.

Untuk mencapai kemerdekaan Indonesia para tokoh nasional membuat kerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang. Pada saat pembukaan menjelang pembacaan teks proklamasi Soekarno sendiri mengatakan jika sebetulnya kita perlu membuat perjanjian kerja sama dengan pemerintah Jepang untuk kemerdekaan RI, meskipun dengan mengandalkan kekuatan serta perjuangan kita sendiri bisa yakin dan percaya akan mampu memperjuangkan kemerdekaan RI. Dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia Soekarno aktif untuk merumuskan Pancasila, UUD 1945, serta dasar-dasar dari pemerintah Indonesia juga merumuskan naskah Proklamasi untuk Kemerdekaan.

---

<sup>116</sup>Sagimun MD, *Perjuangan dan Pengasingan Pejuang Indonesia*, 1986.

<sup>117</sup>Peter Kasenda, *Soekarno Muda: Biografi Pemikiran 1926-1933*, t.t.

Para pemuda Indonesia menuntut kepada Soekarno dan Mohammad Hatta lekas memproklamasikan kemerdekaan RI, karena saat itu terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Hal tersebut terjadi sebab pemerintah Jepang memilih untuk menyerah karena bantuan pasukan Sekutu belum juga datang, namun Soekarno Hatta menolak karena belum adanya kejelasan yang pasti penyerahan dari Jepang. Pada tahun 1943, Soekarno, Mohammad Hatta, dan Ki Bagoes Hadikoesoemo diundang oleh Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo untuk menuju ke Jepang dan disana mereka diterima langsung oleh Kaisar Hirohito. Kepada tiga tokoh Indonesia itu Kaisar Hirohito memberikan Bintang Kekaisaran atau bisa disebut Ratna Suci. Karena Soekarno banyak terlibat dalam organisasi yang dibentuk oleh Jepang, Belanda menuduh Soekarno bekerjasama dengan Jepang untuk kemerdekaan khususnya dalam kasus romusha<sup>118</sup>.

Setelah melalui masa revolusi kemerdekaan yang cukup rumit hingga adanya perpindahan ibukota RI ke Yogyakarta dan perubahan sistem pemerintahan semipresidensiil/*double executive* dari yang awalnya (*presidensiil/single executive*). Hal tersebut terjadi karena adanya maklumat wakil presiden Nomor X, dan maklumat pemerintah pada bulan November 1945 tentang partai politik. Indonesia mendapat Pengakuan Kedaulatan atau (Pemerintah Belanda menyebutkan sebagai Penyerahan Kedaulatan), setelah itu Soekarno diangkat menjadi Presiden Indonesia Serikat (RIS) serta Sutan Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri/Kepala Pemerintahan RIS. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS kembali berubah menjadi Republik Indonesia dan Presiden Soekarno menjadi Presiden RI<sup>119</sup>.

Presiden Soekarno berkunjung ke berbagai negara dan bertemu dengan para pemimpin negara tersebut untuk menjalankan politik luar negeri yang bersifat bebas dan aktif di dunia Internasional. Negara serta pemimpin yang dikunjungi oleh Presiden Soekarno misalnya Uni Soviet dengan pimpinan Nikita Khrushchev, Amerika Serikat dengan pimpinan John Fitzgerald Kennedy, Kuba dengan pimpinan Fidel Castro, Republik Rakyat Cina atau RRC dengan pimpinan Mao

---

<sup>118</sup>Kasenda.

<sup>119</sup> Peter Kasenda, *Soekarno Muda: Biografi Pemikiran 1926-1933*.

Tse Tung<sup>120</sup>. Usaha tersebut dilakukan oleh Presiden Soekarno untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain tentang kemerdekaan Indonesia, yang mana usaha tersebut merupakan strategi diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Pengakuan itu tidak mudah dilakukan karena dua penguasa dunia itu memberikan pilihan kepada Indonesia untuk memilih salah satu dari mereka, akibatnya langkah politik luar negeri untuk bebas dan aktif sukar diterima oleh kedua penguasa dunia itu.

Pada tahun 1966 masa jabatan dari Presiden Soekarno berakhir dan pada tahun itu juga Soekarno terakhir kali menjadi inspektur upacara pada hari kemerdekaan Indonesia. Pada tahun ini juga ada peristiwa yang bernama Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) tanggal 11 Maret 1966 yang berisi tentang menyerahkan mandat wewenang pengendalian keamanan kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) serta Menteri Panglima AD, untuk mengambil alih "tindakan yang diperlukan" agar dapat memulihkan dan mengatasi situasi keamanan dan kestabilan pemerintahan yang buruk.

## **B. Teori yang berkaitan dengan Soekarno**

### **□ Teori Kepemimpinan**

Tipe kepemimpinan karismatik merupakan daya tariknya yang sangat memikat yang mana bisa mendapatkan pengikut dengan jumlah yang banyak. Bisa dikatakan jika seorang pemimpin karismatik adalah seseorang dengan aura yang bisa membuat pengikutnya serta orang lain kagum meskipun mereka tidak bisa menjelaskan secara spesifik bagaimana pemimpin dengan tipe pemimpin karismatik ini bisa dikagumi. Pemimpin dengan tipe tersebut bisa saja membuat orang lain merasa menjadi pengikut dari seseorang tersebut adalah hal yang sangat benar, karena dengan pemimpin karismatik bisa membuat orang lain kagum terhadap sikap serta keputusan yang dipilih meskipun belum memiliki suatu hal konkret kenapa kebijakan tersebut benar atau salah<sup>121</sup>.

---

<sup>120</sup> Nurdin Saleh, 'Gelora Senayan Siap Berubah Menjadi Gelora Bung Karno', *Tempo.Co*, 2003.

<sup>121</sup> Encep Syarifudin, 'Teori Kepemimpinan', *Alqalam*, 21.102 (2004), 459  
<<https://doi.org/10.32678/alqalam.v21i102.1644>>.

Teori kepemimpinan karismatik merupakan perluasan dari teori atribusi. Teori ini menyatakan bahwa pengikut menghubungkan (hubungan) dengan kepemimpinan yang heroik atau luar biasa ketika mereka mengamati perilaku tertentu. Studi tentang kepemimpinan karismatik terutama ditujukan untuk mengidentifikasi perilaku yang membedakan pemimpin karismatik dari yang tidak seperti biasanya.

Transformasi dalam teori kepemimpinan berkembang dari waktu ke waktu berdasarkan keingintahuan para ilmuwan dan peneliti. pada awalnya, kepemimpinan dilihat dari segi sifat bawaan, karakteristik, atau bakat. Ketidakpuasan dengan hasil pendekatan sifat memunculkan kepemimpinan berbasis perilaku. Kedua pendekatan tersebut tidak memuaskan peneliti menggunakan pendekatan yang berbeda, bahwa keberhasilan seseorang tergantung pada situasinya. Bahkan perkembangan terakhir mendekati ciri-ciri seorang pemimpin<sup>122</sup>.

Pemimpin karismatik dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu pemimpin visioner dan pemimpin karismatik krisis (Ivancevich, 2007: 211). Pemimpin karismatik memiliki visi yang mengartikulasikan visi bersama tentang masa depan. Melalui keterampilan komunikasi mereka, pemimpin visioner karismatik menghubungkan kebutuhan dan tujuan pengikut mereka dengan tujuan atau misi organisasi. Lebih mudah untuk mencocokkan pengikut tujuan dengan visi, misi, dan tujuan organisasi jika mereka tidak puas atau ditentang oleh keadaan saat ini. Pemimpin karismatik memiliki kemampuan untuk melihat gambaran besar dan peluang yang ada di dalam gambaran besar tersebut (Barbara Mackoff & Wenet, 2001). Sedangkan gaya kepemimpinan karismatik pada masa krisis akan menunjukkan pengaruhnya ketika sistem dihadapkan pada situasi dimana pengetahuan, informasi dan prosedur yang ada masih kurang (Ian I. Mirtoff, 2004). Tipe pemimpin ini dengan jelas mengkomunikasikan tindakan apa yang perlu diambil dan apa konsekuensinya<sup>123</sup>.

---

<sup>122</sup> Dewi Riasty Ayuni, 'Teori Kepemimpinan', p. 2022.

<sup>123</sup> John F Kennedy, Winston Churchill, dan Warrant Buffet, "Pemimpin Karismatik," t.t., 1-4.

Soekarno juga merupakan sosok yang sangat sempurna, apalagi dalam hal kepala negara yang sangat luas dan sangat beragam, Soekarno juga sangat kharismatik dan sangat berarti, tetapi ia juga seorang ulama atau ideologi pikirnya (Waoma, 2020). Soekarno adalah contoh pemimpin yang kharismatik. Dia memiliki keterampilan berbicara di depan umum dan berbicara di depan umum yang kuat, kepribadian yang menarik, dan komitmen yang bertahan lama. Dia melobi masyarakat untuk perubahan positif, yaitu kemerdekaan Indonesia.

Presiden pertama Indonesia ini juga dikenal pemaarah, tetapi ia dipuji karena menyampaikan semangat yang luar biasa ini kepada orang lain. Dia bisa mengangkat semangat orang dan menginspirasi mereka untuk berani melakukan apa yang mereka inginkan. Semua orang yang mengikuti pemimpin dengan gaya seperti Presiden Soekarno seringkali memiliki keyakinan yang kuat bahwa pemimpin selalu benar, merasa dicintai dan bangga dengan pemimpinnya, memiliki motivasi yang kuat, kuat untuk berpartisipasi dalam misi kelompok, bersedia untuk mematuhi pemimpin dan percaya bahwa mereka dapat berkontribusi pada kelompok<sup>124</sup>.

Advokasi, pengaruh, dan diplomasi Soekarno menyatukan berbagai suku, agama, dan golongan menjadi satu kesatuan yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai pernyataan dan gagasannya mampu mengobarkan semangat dan mempersatukan seluruh bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah dari tanah airnya untuk memperoleh kemerdekaan. Ide-ide Soekarno tidak hanya menyulut semangat rakyat Indonesia dalam perjuangannya mengusir penjajah, tetapi juga menginspirasi para pemimpin nasional di berbagai belahan dunia. Melalui idenya, Soekarno ingin membuat masyarakat Indonesia hidup mandiri, tanpa hutang apalagi mengemis dari organisasi atau luar negeri<sup>125</sup>.

Dalam komunikasi internasional, Soekarno memainkan peran diplomasi tingkat tinggi, diplomasi puncak, di mana peran kepala negara terutama dalam melaksanakan jalur diplomatik. Dia tampaknya tidak hanya membawa pesan, tetapi dia adalah pesan itu sendiri. Biarkan dunia mengenal Indonesia melalui dia.

---

<sup>124</sup> Selsya Billa Regita, 'Kepemimpinan Indonesia Dari Masa Ke Masa', *Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 2021.

<sup>125</sup> Junaidi Robert, *Gaya Kepemimpinan Para Tokoh Dunia*, 2014.

Kemampuannya untuk menarik opini internasional dapat dilihat dari cara para pemimpin dunia bereaksi terhadap retorika dan sikap politik Sukarno. Oleh karena itu, dimanapun mereka berada, terutama di luar negeri, mereka selalu diperhatikan oleh media internasional<sup>126</sup>.

Realitas kehidupan politik menunjukkan bahwa keberanian politik adalah seseorang yang mampu menggerakkan opini publik; dan kegiatan untuk memobilisasi opini publik (Onong, 2000: 159)<sup>127</sup>. Sedemikian rupa sehingga Soekarno kemudian memantapkan dirinya sebagai media player yang berpengaruh dan muncul di garis depan untuk mewakili negara-negara Asia-Afrika. Seorang pemimpin dengan kemampuan orasinya, mampu membuat para pemimpin dan rakyat negara-negara tertindas mengerti bahwa ia tentu memiliki gengsi dan kemampuan untuk mempengaruhi dan memperkuat solidaritas dengan negara lain. semua yang mendengarnya dengan apa yang dirasakan oleh pemimpin Retorika kolonial. Tidak hanya melalui saluran dalam negeri, tetapi juga di luar negeri dan di forum internasional serta media massa internasional telah menjadi kendaraan Soekarno untuk menyampaikan pesan komunikasi internasional yang konsisten, kampanyenya melawan ketidak-realistic dan kapitalisme, dan melalui ajakannya kepada negara jajahan untuk bersatu melawan sistem dunia yang tidak adil<sup>128</sup>.

Teori yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini adalah teori retorika ajakan, teori retorika ajakan adalah teori kritis (Little John dan Karen, 2011:262). Frasa ini diciptakan oleh Sonja K. Foss dan Cindy L. Griffin dalam makalah mereka, *Beyond Persuasion*. Mereka berdebat tentang melihat cara interaksi lain, di mana satu orang mencoba mengubah orang lain. (Petit Jean dan Karen, 2011: 265). Retorika ajakan menggunakan gagasan ajakan, baik secara harfiah maupun metaforis, sebagai percakapan. Ketika komunikator mengajak orang lain untuk menyadari sudut pandang pembicara, dia kemudian mengajak pendengar untuk melihat dunia dalam persepsi pembicara, meskipun menerima ajakan itu tergantung pada masing-masing pendengar, setidaknya tujuannya untuk

---

<sup>126</sup> Franky P. Roring, 'Retorika Soekarno Dalam komunikasi Internasional Anti Imprealisme Dan Kapitalisme', *Jurnal Oratio Directa*, 1.1 (2018), 44–62.

<sup>127</sup> H. Alfani and others, *Media Dan Komunikasi Politik*, 2011.

<sup>128</sup> Sukawarsini Djelantik and others, 'Komunikasi Internasional Dalam Era Informasi Dan Perubahan Sosial Di Indonesia', *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 12.7 (2016), 105–6.

mengundang pemahaman dengan sudut pandang yang berbeda. dari semua pihak yang terlibat dalam interaksi (Little John dan Karen, 2011: 265). Retorika hak pilih mengasumsikan bahwa ketika kita terbuka untuk ide-ide selain kita sendiri, kita lebih mungkin untuk dipahami (Little John dan Karen, 2011: 266). Sonja Foss dan Karen Foss menyarankan bahwa langkah pertama yang penting dalam menerapkan rezim ajakan bertindak adalah menciptakan lingkungan yang tepat dengan menciptakan dan menerapkan asumsi retorika manipulatif. Lingkungan yang memungkinkan semua pihak untuk lebih memahami mencakup empat elemen: kebebasan, keamanan, nilai, dan keterbukaan (Little John dan Karen, 2011: 267). Keempat faktor ini mempengaruhi komunikasi internasional.

### **Cara kerja Soekarno**

Dalam teori retorika ajakan, wacana dapat dijelaskan dengan menggunakan gagasan ajakan, baik secara harfiah maupun metafora. Hasil yang diharapkan bukan untuk mengubah orang lain, tetapi untuk melibatkan pemahaman dengan perspektif yang berbeda dari semua pihak yang terlibat dalam interaksi. Kita harus memahami bagaimana negara terjajah pada saat itu tampaknya ditakdirkan untuk menjadi negara terjajah ketika orang kulit putih menguasai dunia. Menurut teori ini, upaya Soekarno dipandang sebagai upaya agar masyarakat memahami apa visi dominasi kulit putih dengan ideologi imperialisme dan kapitalisme yang dikonstruksi seolah-olah merupakan sesuatu yang direncanakan. Dan pandangan nasionalisme dan internasionalisme diselaraskan, menawarkan perspektif berbeda yang sampai sekarang penuh dengan kontradiksi antara nasionalisme dan internasionalisme. Soekarno justru tampil sebagai juru bicara utama negara-negara nonblok. Dia tidak hanya mengirim dan membawa pesan, tetapi pesan itu sendiri,

*“jadi Indonesialah yang pertama-tama berani menyangkal slogan yang sudah berpuluh-puluh tahun didengung-dengungkan didunia ini, yaitu peaceful coexistence, peaceful coexistence. Indonesia dengan tidak tendeng aling-aling berkata : tidak, tidak bisa peaceful coexistence dengan imprealis. Oleh karena itu maka Indonesia sekarang ini yang paling di cap sebagai enemy number one, musuh nomer satu, apalagi Indonesia ini, saudara-saudara, makin lama makin*

*mempengaruhi rakyat-rakyat Asia, Afrika, bahkan Latin Amerika, bahkan rakyat-rakyat lain di luar Asia, Afrika dan Latin Amerika itu.”*

Sebagian besar pidato yang diberikan oleh politisi, terutama para pemimpin pandai menyampaikan pentingnya pesan mereka dan keakuratan kebenaran yang dikandungnya. Di negara-negara lama dan baru, wacana selalu memainkan peran penting dalam memunculkan perasaan dan pemikiran tentang akar identitas (Williams, 2009): 6). Lihat bagaimana Presiden Soekarno muncul dalam pidatonya di Sidang Umum PBB XV pada 30 September 1960, ia muncul sebagai pemimpin yang baru merdeka, bahkan berkomunikasi dengan jelas, mengusulkan restrukturisasi organisasi PBB yang lebih adil dan bahkan mengusulkan untuk memasukkan Pancasila ke dalam Piagam PBB dan sebagai dasar organisasi<sup>129</sup>.

Konsistensi pemikiran Soekarno tercermin dari kefasihannya, yang menunjukkan bahwa pemikirannya selalu konsisten dengan anti-imperialis. Ini mewakili cara berpikir dan berbicara yang teratur. Zainul Maarif (2016:20) mengatakan bahwa tidak ada orang yang dapat berbicara dengan tertib tanpa adanya proses berpikir yang teratur. Tidak ada orang yang bisa menulis secara sistematis tanpa berpikir sistematis.

Soekarno sebagai seorang pemimpin memiliki kemampuan dan kemampuan menguasai paideia. Seperti yang dikemukakan Pat Anderson dalam Zainul Maarif (2016:21), paideia adalah seni berpikir yang menggabungkan filsafat, puisi, dan retorika. Filsafat identik dengan pemikiran, puisi identik dengan sastra, dan retorika identik dengan wacana. Ungkapan retorika dalam bentuk verbal, meskipun kadang-kadang tertulis. Puisi, di sisi lain, ditulis, bahkan ketika itu diucapkan. Yang jelas retorika dan puisi berkaitan erat dengan ucapan dan/atau tulisan.

Soekarno muncul sebagai orang berpengaruh yang dapat membangun solidaritas dengan para pemimpin negara-negara tertindas untuk membangun kekuatan bersama melawan negara-negara kapitalis imperialis. Dan sempat mengguncang negara-negara dominan di dunia saat itu. Kemampuan Soekarno

---

<sup>129</sup> Aditya Rangga, 'Perbedaan Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Parlementer', *Cerdika.Com*, 2020.

untuk berkomunikasi secara internasional dengan percaya diri tidak terlepas dari cara ia membangun persepsi bahwa ia dapat mewakili negaranya dan memimpin negara-negara tertindas, dan mengingat Soekarno dan Indonesia setara dan berusaha untuk setara dengan negara-negara besar seperti AS dan negara-negara besar lainnya. Artinya, walaupun Soekarno menganggap AS kecil atau tidak berarti bagi Indonesia, pengaruh AS juga kecil bagi Indonesia. Sebaliknya, jika Indonesia menganggap kita lemah terhadap AS, maka AS memiliki pengaruh yang kuat terhadap Indonesia<sup>130</sup>.

### C. Kebijakan Publik Soekarno

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau (KBBI), kebijakan ialah kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, serta deretan konsep dan asas yang jadi garis besar dan juga dasar rencana ketika pelaksanaan dari suatu pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dan lain sebagainya), pernyataan dari cita-cita, prinsip, tujuan atau maksud sebagai sebuah garis pedoman untuk manajemen didalam upaya menggapai sasaran, garis, haluan untuk mencapai tujuan. (Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 120)<sup>131</sup>.

Kebijakan politik merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala negara untuk menghasilkan serta menetapkan aturan. Kebijakan politik ini sangat penting mengingat semua keputusan yang berupa keputusan tertulis atau keputusan tidak tertulis oleh pemerintah sangat berpengaruh mengenai kehidupan masyarakat<sup>132</sup>.

Dipimpin oleh Soekarno, masa orde lama dimulai dari 1945 sampai 1966 atau selama 22 tahun. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, sistem pemerintahan juga dirubah yang awalnya presidensial berubah jadi parlementer. Dari sepanjang tahun itu, walaupun Indonesia telah merdeka namun masih

---

<sup>130</sup>Franky P. Roring, "Retorika Soekarno Dalam komunikasi Internasional Anti Imprealisme Dan Kapitalisme," *Jurnal Oratio Directa* 1, no. 1 (2018): 44–62.

<sup>131</sup>Shraddha More. Anita Chaudhari, Brinzel Rodrigues, "KEBIJAKAN POLITIK SOEKARNO TERHADAP PERAN PARTAI POLITIK ISLAM PADA MASA ORDE LAMA," no. 1384132 (2016): 390–92.

<sup>132</sup>Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, 2011.

mengalami masalah serta peperangan. Contohnya ketika melawan Belanda untuk merebut Irian Barat.

Perubahan dari Kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer mempunyai penerapan sistem politik yang sedikit berbeda. Dimana seperti para menteri kabinet parlementer bertanggung jawab terhadap DPR, kekuasaan legislatif memiliki peran yang lebih kuat dibanding eksekutif, program dari kebijakan kabinet harus sesuai dengan tujuan politik. Bukan hanya hal itu, namun di masa orde lama juga tidak terlalu memikirkan pembangunan demi kepentingan masyarakat. Jumlah pembangunan di masa orde lama bisa dihitung jumlahnya, misalnya sarana olahraga di wilayah Senayan, Pabrik Baja Krakatau Steel, serta Bendungan Jatiluhur. Dan dari ketiga pembangunan untuk masyarakat tersebut diketahui tidak tuntas dan baru terselesaikan pada masa Orde Baru<sup>133</sup>.

Selama periode 1959-1966 disebut menjadi demokrasi terpimpin menyesuaikan dari had Dekrit Presiden 1959, yang mengemukakan jika seluruh sistem pemerintahan dikelola sepenuhnya oleh presiden. Hal lainnya yaitu sesuai isi dekrit yang menjelaskan jika UUD 1945 diterapkan kembali, sementara UUDS 1950 disahkan sudah tidak berlaku. Pada pembukaan Sidang Konstituante pada 10 November 1956 Demokrasi terpimpin untuk pertama kalinya diumumkan. Semasa periode demokrasi liberal Soekarno menyampaikan jika perkembangan Indonesia terhalang oleh banyak nya perbedaan ideologis dalam kumpulan kabinet.

Dengan sistem demokrasi terpimpin Soekarno memulai dengan menata lagi parlemen baru serta membubarkan parlemen yang lama. Lalu satuan tentara juga diikutsertakan untuk politik di Indonesia sebagai kelompok fungsional, berbarengan dengan ikut serta PKI dalam menyeimbangkan. Pilihan untuk mengikutsertakan PKI mendapat banyak penolakan, meskipun menurut Soekarno adanya ikut serta PKI bisa menjadi penyeimbang. Karena banyak penolakan tersebut adanya PKI malah menimbulkan konflik yang berbuntut pada puncak peristiwa G30S PKI pada tanggal 30 September 1965<sup>134</sup>.

---

<sup>133</sup> CNN Indonesia, 'Sejarah Singkat Orde Lama Di Bawah Pemerintahan Soekarno', *CNN Indonesia*, 2022.

<sup>134</sup> CNN Indonesia.

- **Kebijakan politik Soekarno terhadap partai politik Islam**

Selama masa Demokrasi Terpimpin kekuasaan berpusat kepada tiga kekuasaan pokok, yakni: Soekarno, PKI, dan TNI-AD, kekuasaan yang lainnya ada namun tidak terlalu berperan. Karena pada masa ini didominasi oleh Presiden, membuat peranan partai politik terbatas, pengaruh komunis berkembang dan peranan ABRI lebih meluas sebagai sosial politik. Saat itu, partai berhaluan kanan dimana mereka yang menentang kebijakan Soekarno akan melambung keluar dari wilayah politik. Contohnya Masyumi atau (Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang harus mengalami nasib buruk dan tersingkir dari arena politik. Partai Masyumi ini merupakan gerakan organisasi politik Islam yang radikal, dimana dari pandangan Soekarno lebih berbahaya dibandingkan PKI. Gaya dari para pemimpin PKI selalu terlihat patuh dan tunduk di depan Soekarno. Sedangkan para tokoh dari Partai Masyumi terlihat sering bersikap menentang kepada setiap kebijakan-kebijakan dari Soekarno. Masyumi terbiasa mengkritik secara tajam dengan kebijakan dari Soekarno yang dianggap mulai melenceng serta melupakan prinsip-prinsip dasar kehidupan susunan kenegaraan. Hal tersebut menyebabkan Soekarno tidak menyukai Masyumi. Namun sebelum dibubarkan oleh Soekarno, Masyumi membubarkan diri terlebih dahulu<sup>135</sup>.

Pada saat itu poros kekuasaan ada ditangan seorang pemimpin yakni Soekarno, dimana terdapat konsekuensi politik yang berbeda untuk partai-partai Islam. Sayap pesantren, seperti NU dengan PSII dan Perti, diizinkan aktif di bawah naungan Demokrasi Terpimpin menggunakan gaya serta retorika politik masing-masing. Setiap partai ini sudah melakukan macam-macam upaya penyesuaian diri bersama dengan bermacam pertumbuhan politik yang serba rumit. Untuk kaum modernis, situasi baru tersebut cukup pasti. Dalam pandangan Soekarno, kelompok modernis ini “merintanginya penyelesaian revolusi kita, “atau dengan menggunakan jargon komunis, yang mana mereka merupakan kelompok kepala batu, salah satu jargon yang juga terkenal dalam kamus politik Soekarno.

Dari pemikiran logika revolusioner seorang Soekarno menyatakan lebih dalam, jika kelompok modernis, terutama masyumi, tidaklah ada ketika masa

---

<sup>135</sup>Maurice Duverger, *Partai-Partai Politik dan Kelompok-kelompok Kepentingan*, 1981.

Demokrasi Terpimpin. Sebaliknya, tiga partai Islam yang lain, seperti NU, PSII, dan Perti, mereka berusaha dengan menyesuaikan diri terhadap demokrasi ala Soekarno itu, tiga partai tersebut bersikap akomodatif menjadikan mereka dapat hidup berdampingan dengan masa Soekarno dan bertahan di arena demokrasi terpimpinnya Soekarno. NU merupakan partai yang terbesar di antara ketiganya, oleh sebab itu bisa dikatakan sebagai pendukung utama pada setiap gagasan dari Soekarno. Bahkan, NU sangat menikmati suasana politik yang diciptakan oleh Soekarno dengan sistem Nasakomnya<sup>136</sup>.

Selama masa Orde Lama, sepertinya peran umat Islam terbagi menjadi tiga aspirasi besar yaitu:

- (1) Masyumi sebagai peran perwakilan dari umat Islam yang bersikap kritis terhadap negara;
- (2) NU sebagai peran perwakilan umat Islam untuk bersikap akomodatif terhadap negara;
- (3) Gerakan DI/TII atau Darul Islam/Tentara Islam Indonesia sebagai perwakilan peran dari umat Islam yang berseberangan pemikirannya (di luar pagar sampai memberontak)<sup>137</sup>.

Banyak orang dari kalangan Islam yang menilai jika kebijakan Presiden Soekarno tidak banyak berpihak kepada umat Islam, melihat banyak peran umat Islam sejak masa perjuangannya sampai masa kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut yang mengakibatkan kekecewaan dari pihak umat Islam.

Pada zaman Demokrasi Liberal diawali dengan perpolitikan yang dimana tumbuh subur partai politik, hal itu berdampak terhadap berkembangnya partai-partai politik baik yang beraliran nasionalis, agama dan marxis. Perkembangan dari Demokrasi Liberal bisa dilihat dengan berbagai partai tersebut ternyata tak terlalu menguntungkan terhadap sistem negara yang berdasarkan dari Pancasila ini. Pertandingan antar partai atau golongan tidak bisa dihindari, karena setiap partai atau golongan mau menang sendiri serta tidak mengamati

---

<sup>136</sup>Iqbal Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*, 2009.

<sup>137</sup>Ahmad Syafii Ma'arif, *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante: Islam dan Masalah Kenegaraan*, t.t.

kepentingan yang lainnya atau secara umum, sehingga membuat peran pemerintah jadi tidak stabil. Faktor-faktor itu membuat Presiden Soekarno menetapkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang memastikan kembali berlakunya UUD. Hal seperti itu mengakibatkan era Demokrasi Liberal berakhir serta berubah menjadi Demokrasi Terpimpin<sup>138</sup>.

Menurut hal tersebut di atas bisa dikemukakan jika dengan kebijakan politik Soekarno dikaitkan dengan peran partai politik Islam maka menjadi kebijakan penyederhanaan partai politik yang ditetapkan oleh Presiden Soekarno saat era Demokrasi Terpimpin tidak meninggalkan kondisi yang sangat penting terhadap partai politik, utamanya peran dari partai politik Islam, yang mana terdapat partai Masyumi yang mau tak mau harus membubarkan diri. Sementara partai NU, PSII, dan PERTI terpaksa mengikuti dan tunduk terhadap sistem pemerintahan Soekarno.

Pada saat diterapkannya Demokrasi Terpimpin peran Presiden Soekarno sangatlah kuat, sehingga bisa dibilang sebagai bentuk pemerintahan otoriter, sebab apabila diamati dari kebijakan penyederhanaan partai politik yang ditetapkan oleh Soekarno pada era Demokrasi Terpimpin memakai Perpres No.7 tahun 1959 serta Perpres No.13 tahun 1960. Bahwa partai Islam menghadapi deregulasi peran seperti contoh: Masyumi yang mengalami mimpi buruk, karena dengan ditetapkannya kebijakan penyederhanaan sebagai senjata dari Soekarno untuk membubarkan partai Masyumi, yang diduga tidak mengakomodasi sistem pemerintahan Soekarno. Akan tetapi peran serta partai Islam untuk pemerintahan dari tahun 1957 sampai 1965 tidak terlalu memberi warna terhadap kabinet yang terkandung karena hal itu juga kurang berarti untuk kedudukan umat Islam<sup>139</sup>.

- **Kebijakan Anti Korupsi di Era Soekarno**

Pada masa Orde Lama, pada akhir 1950-an kebijakan anti korupsi dikeluarkan. Dengan dasar UU Keadaan Bahaya, dibentuk oleh Panitia Retooling (Paran) yang dimana terdapat satu ketua dan dua anggota. Eksistensi Paran tidak

---

<sup>138</sup> Delvira Hutabarat, 'Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Mengakhiri Sistem Pemerintahan Liberal Indonesia', *Liputan6.Com*, 2021.

<sup>139</sup> Anita Chaudhari, Brinzel Rodrigues, "KEBIJAKAN POLITIK SOEKARNO TERHADAP PERAN PARTAI POLITIK ISLAM PADA MASA ORDE LAMA."

bertahan lama dan cepat lenyap setelah dirasa berlawanan dengan kewenangan pemberantasan korupsi yang terdapat pada tangan Presiden. Paran lalu dibubarkan setelah melewati kekisruhan politik.

Kemudian Presiden Soekarno menerbitkan Kepres No. 275 pada tahun 1963 sebagai dasar dari penciptaan lembaga Operasi Budhi yang bekerja untuk menjerat perusahaan serta lembaga-lembaga negara yang melangsungkan perbuatan korupsi. Dimulai dari kinerja Operasi Budhi dilihat menguntungkan karena sukses melindungi uang negara sebesar Rp 11 milyar pada saat itu. Operasi Budhi dibubarkan saat hendak memerangkap Direktur Pertamina dan dialihkan dengan lembaga yang baru yaitu Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar). Keberasaan Kontrar tidak mempunyai jejak tugas yang signifikan ketika pemberantasan korupsi dan dibubarkan pada saat Soekarno tidak lagi menjabat sebagai presiden<sup>140</sup>.

- **Kebijakan Perekonomian di era Soekarno atau Orde Lama**

Sampai saat ini, hampir tidak ada catatan sejarah tentang keberhasilan kebijakan ekonomi orde lama. Sedangkan indikator makro ekonomi saat itu menunjukkan bahwa fondasi ekonomi Indonesia masih rapuh (pertumbuhan ekonomi yang memburuk, inflasi yang sangat tinggi di atas 500% dan defisit neraca perdagangan). Strategi dan kebijakan ekonomi orde lama selalu menimbulkan pertanyaan. Pemikiran ekonomi Soekarno mendominasi arah, strategi dan kebijakan ekonomi orde lama. Perekonomian Soekarno luput dari arsip sejarah para pemikir ekonomi negara<sup>141</sup>.

Dari sumber yang lain mengatakan jika inflasi pada tahun 1966 sampai menyentuh angka 650 persen, rupiah masih terus dicetak saat itu, sementara itu produksi bermacam produk terus anjlok. Radius mencatat, sebagaimana yang dapat dikutip dari Gero (2010: 21), kebijakan "berdikari" atau berdiri di atas kaki sendiri yang disuarakan oleh Presiden Soekarno yang melangsungkan semua impor produk pangan serta barang diberhentikan. Impor beras tidak diperbolehkan saat Agustus 1964, hal tersebut membuat keadaan dari persediaan pangan nasional

---

<sup>140</sup> Cegah Korupsi, 'Korupsi Era Orde Lama', *Cegahkorupsi.Com*, 2015.

<sup>141</sup>D. Dhakidae, *Soekarno membongkar sisi-sisi hidup putra sang fajar*, 2013.

yang sudah sulit malah jadi semakin sulit. Persediaan devisa dan juga emas terus berkurang dari jumlah 408,9 juta dolar AS (1960-1965) menjadi sekitar minus 4,5 juta dolar AS (1960-1965) Pendapatan per kapita dari 107 juta rakyat Indonesia, pada masa itu cuman 60 dolar AS. Kurs rupiah sangat anjlok dari Rp 186,67 per dolar AS (tahun 1961) menjadi sekitar Rp 14.083 per dolar AS (tahun 1965). Defisit anggaran sampai di atas 140 persen. Ketidakstabilan politik di Indonesia pada akhir September 1965 hingga mencapai titik klimaksnya dengan terjadinya kudeta namun berlangsung gagal dari Partai Komunis Indonesia (PKI) (Tambunan, 2006).

Mulai dari peristiwa berdarah itu terjadi suatu perubahan sistem politik yang cukup mencolok di negeri ini, yang mana setelahnya juga mengganti sistem ekonomi yang diterapkan Indonesia pada era Orde Lama, yaitu dari pemikiran-pemikiran sosialis ke semikapitalis (kalau tidak dapat dikatakan ke sistem kapitalis sepenuhnya). Kejadian aktual perekonomian Indonesia sendiri menurut Undang-undang 1945 Pasal 33 mengikuti suatu sistem yang berdasar pada prinsip-prinsip kebersamaan atau koperasi berdasarkan ideologi Pancasila. Namun, faktanya dalam implementasi sehari-hari ada saat era Orde Baru dan sampai sekarang pola perekonomian bangsa ini cenderung membias sistem kapitalis seperti negara Amerika Serikat (AS) atau negara-negara lain dengan industri yang maju, dimana karena pelaksanaannya tidak baik membuat hadirnya kesenjangan ekonomi di Indonesia yang terasa sekarang ini semakin besar, apalagi setelah peristiwa krisis ekonomi.

Sebagai Bapak Proklamator pada Kemerdekaan Indonesia, Soekarno sangat membenci dasar-dasar pemikiran negara Barat, termasuk sistem ekonomi liberal/kapitalismenya. Soekarno memandang sistem kapitalisme-liberalisme selama masa penjajahan Belanda sudah sangat menyengsarakan rakyat Indonesia, sehingga sistem tersebut harus dibenci dan dilenyapkan dari Indonesia. Menurut Soekarno, untuk melenyapkan atau menyamakan kekuatan dengan ekonomi negara Barat berlandaskan kapitalisme-liberalisme, Indonesia harus mempergunakan pemikiran dari Marhaenisme yaitu Marxisme. Akan tetapi, saat tahun 1959 paham kapitalisme –liberalisme secara konstitusional ditolak dengan diterapkannya kembali UUD 1945 sebagai landasan dari sistem ekonomi

Indonesia pada saat itu. Namun, pada implementasinya Soekarno menggunakan sistem ekonomi komando seperti yang digunakan khususnya di negara-negara dengan aliran komunis, seperti Uni Soviet (sekarang disebut Rusia), negara-negara Eropa Timur (sekarang disebut negara-negara transisi), dan Cina. Dengan sistem tersebut, semua rencana serta keputusan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, termasuk pemilihan industri yang akan dibangun, sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat (Tambunan, 2006)

Langkah yang diambil Soekarno paling terkenal dan membuat kinerja perekonomian Indonesia menjadi jelek saat era Orde Lama adalah mengheboh-hebohkan “Ekonomi Terpimpin” pada tahun 1957 yang menjadikan lebih kuat lagi sistem ekonomi komando dan juga selama tahun 1957-1958 muncul adanya nasionalisasi perusahaan-perusahaan dari Belanda. Dengan menghebohkannya ekonomi terpimpin, sistem politik dan ekonomi yang ada di Indonesia tambah akrab dengan aliran/pemikiran sosialis-komunis. Meskipun ideologi dari Indonesia itu Pancasila, efek dari ideologi komunis terutama negara bekas Uni Soviet dan Cina sangat kukuh. Aktualnya, pada utamanya pemerintah dan masyarakat Indonesia pada umumnya, mengambil aliran politik yang berpedoman pada komunis hanya ialah suatu pemikiran dari perasaan antikapitalisasi antikolonialisasi, dan antiimperialisasi pada masa itu.

Sebagaimana sudah diterangkan sebelumnya. Soekarno meyakini jika pemikiran Marxisme ialah satu-satunya pertahanan yang efektif untuk menentang adanya kapitalisme. Saat zaman itu, prinsip-prinsip individualisme, persaingan independen serta perusahaan swasta/pribadi sangat dilarang oleh pemerintah dan masyarakat kebanyakan memandang jika prinsip-prinsip tersebut kerap dihubungkan dengan refleksi kapitalisme. Peristiwa ini membikin Indonesia jadi tambah repot untuk memperoleh dana dari negara-negara barat, meski dalam bentuk pinjaman ataupun penanaman modal asing (PMA), sementara untuk menangani rekonstruksi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia sangat memerlukan dana yang sangat besar (Hill dan Williams, 1989). Sampai-sampai pada akhir tahun 1950-an, persisnya sebelum menasionalisasikan perusahaan-perusahaan dari Belanda, sumber pokok dari penanaman modal asing di Indonesia asalnya ialah Belanda yang mayoritas untuk aktivitas ekspor hasil

dari perkebunan dan juga pertambangan serta untuk aktivitas-aktivitas ekonomi yang terpaut (Mubyarto, 2000).

Sesudah itu, saat tahun 1963 Soekarno memberitahukan konsep ekonomi yang diketahui memiliki sebutan Deklarasi Ekonomi, yang berisi seperti ambisi untuk memakai sistem ekonomi pasar, sebagai “penilaian” terhadap penerapan ekonomi komando. Namun, ambisi tersebut tidak bisa dilakukan karena tidak mempunyai dukungan dari para partai politik yang ada pada zaman itu, tak luput juga Partai Komunis Indonesia. Prinsip-prinsip deklarasi ekonomi kemudian dilupakan oleh orang, dan sampai selesainya era Orde Lama, sistem ekonomi Indonesia yang berlaku tetap sistem komando<sup>142</sup>.

#### **D. Kelebihan dan kekurangan kepemimpinan Soekarno**

Dari tipe kepemimpinan Soekarno yang karismatik terdapat kelebihan serta kekurangan yang bisa kita temukan, kelebihan dari tipe kepemimpinan karismatik Soekarno yaitu:

- a. Bisa mendorong orang lain untuk transformasi ke arah yang lebih bagus. Seorang Soekarno bisa menjual visi serta memotivasi orang agar dapat mewujudkannya. Selalu mencari celah untuk memperbaiki keadaan dan mempunyai keinginan yang tidak mudah puas dengan sesuatu yang sudah didapat.
- b. Memberikan kekuatan yang positif, sehingga hal tersebut bisa membangun para pengikutnya percaya diri jika mereka ada di arah yang tepat dan akurat. Soekarno juga menumbuhkan optimisme terhadap para pemuda bangsa dan membuat kebersamaan kepada orang-orang disekitarnya.
- c. Menumbuhkan komitmen yang kuat, sehingga para pemuda kompak dan semangat untuk melakukan serta mewujudkan visi bersama. Cara Soekarno berkomunikasi dengan rakyat menggunakan tingkat emosional yang kuat yang mana itu dapat membangkitkan emosi yang lebih kuat terhadap para pejuang serta rakyat<sup>143</sup>.

---

<sup>142</sup>Zulkifli 2020 andi ika, *PEREKONOMIAN INDONESIA SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA*, 2020.

<sup>143</sup> Nur Amalia and others, 'Wawasan Dalam Pendidikan', 155–67.

Meskipun demikian, ada beberapa kekurangan yang dimiliki dari tipe kepemimpinan karismatik.

- 1) Biasanya tipe pemimpin karismatik ini memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Mereka bisa menganggap visi mereka adalah yang paling baik, walaupun bagi beberapa orang ada yang kontra dengan visi Soekarno. Contoh ketika Soekarno mengikutsertakan PKI dalam politik Indonesia yang ditentang oleh banyak pihak namun Soekarno berpikir adanya PKI sebagai penyeimbang. Mungkin para pemimpin tipe karismatik ini berkeyakinan jika mereka ada di atas hukum yang ada, sehingga mengadakan pelanggaran finansial atau etika.
- 2) Tidak adanya regenerasi. Pemimpin dengan tipe karismatik ini tidak dapat mewariskan gaya dari kepemimpinannya ke orang lain maupun kepada orang disekitarnya, karena karakter tersebut melekat tidak pada semua orang. Maka, terlampau bergantung kepada seorang pemimpin yang memiliki aura berkarisma juga tidak baik. Seperti kehilangan sosok yang memiliki kekuatan untuk memikat serta bisa jadi kehilangan arah dan visi<sup>144</sup>.

### **Kelebihan dan kekurangan dari pemerintahan liberal yang pernah dipakai Indonesia**

Secara utuh yang berkaitan dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal yang sudah digunakan oleh pemerintah Indonesia pada saat itu mempunyai kelebihan serta kekurangan. Lalu hal ini yang menjadi kelebihan serta kekurangan dari sistem pemerintahan demokrasi liberal yang digunakan pada saat itu adalah:

#### 1. Kelebihan Demokrasi Liberal

- a. Pembuat kebijakan bisa dibenahi secara pesat karena gampang terbentuknya penyesuaian opini antara eksekutif dan juga legislatif. Hal tersebut karena kekuasaan wewenang dari eksekutif dan legislatif ada di satu partai atau satu koalisi partai.
- b. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan implementasi kebijakan publik jelas.

---

<sup>144</sup> Amalia and others.

c. Kabinet menjadi berhati-hati dalam melaksanakan pemerintahan karena adanya pengawasan yang ketat dari parlemen terhadap kabinet

d. HAM dipegang teguh dan dijunjung tinggi oleh negara.

## 2. Kelemahan Demokrasi Liberal

a. Kedudukan dari badan eksekutif/kabinet sangat bergantung kepada mayoritas dukungan parlemen. Sehingga kemungkinan sewaktu-waktu kabinet bisa saja dijatuhkan oleh parlemen.

b. Keberlangsungan hierarki dari kabinet tidak dapat ditentukan apakah berakhir sesuai dengan masa jabatannya. Karena sewaktu-waktu kabinet bisa bubar.

c. Kabinet bisa menyetir parlemen. Hal tersebut bisa terjadi jika para anggota kabinet merupakan anggota parlemen yang dimanfaatkan dan bagaikan bekal penting untuk menjadi menteri ataupun jabatan eksekutif lainnya.

d. Multipartai, yang mengakibatkan aspirasi belum tersalurkan seluruhnya dengan baik.

e. Kebebasan mengeluarkan pendapat yang terlalu bebas, sehingga tidak ada pertanggung jawabannya<sup>145</sup>.

Berdasarkan apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari sistem pemerintahan demokrasi liberal, jadi memunculkan beberapa permasalahan yang berujung terhadap gagalnya sistem pemerintahan tersebut dipertahankan di Indonesia.

---

<sup>145</sup> Sulfachriadi, 'Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Pemerintahan Soekarno (1949-1966)', *Skripsi*, 2015, 21–23.

## **BAB IX**

### **SOEHARTO**

#### **A. Biografi Soeharto**

Suharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia. Saat itu, Desa Kemusuk terbagi menjadi dua bagian, yaitu Kemusuk Lor (utara) dan Kemusuk Kidul (selatan). Suharto, Demang Wongsomengolo adalah salah satu pendiri Kampung Kemusuk. Pohon keluarga ayah Suharto berasal dari bagian selatan desa, sedangkan pohon keluarga ibunya berasal dari Kemusuk Utara. Pada waktu itu, adalah hal biasa bagi orang-orang untuk menikah di lingkungan yang sama. Itu karena sangat sulit dan tidak terpikirkan untuk bertemu dengan siapapun dari luar daerah, yaitu kakek dari pihak ayah Soeharto, Kertoirono. Dia memiliki dua anak, Kertoredjo, yang kemudian menjadi ayah Suharto, dan seorang putri yang dikenal sebagai Ibu Prawirowihardjo. Di rumah Ibu Prawirowihardjo Soeharto tinggal semasa muda<sup>146</sup>.

Dalam tradisi Jawa Tengah, seorang laki-laki biasa mengganti namanya saat menikah. Oleh karena itu, tidak heran jika Kertoredjo mengganti namanya menjadi Kertosudiro ketika menikah dengan menggunakan nama belakang istrinya. Kertosudiro bekerja sebagai petugas irigasi desa, atau ulu-ulu. Peringkat ini tinggi bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Dia menikah dan memiliki dua anak dari pernikahan sebelumnya ketika dia bertemu dengan seorang gadis yang nantinya akan menjadi ibu Suharto. Ibu Suharto adalah putri Notosudiro. Perjodohan atau perjodohan adalah hal biasa dalam tradisi Jawa kuno. Tentu saja pernikahan yang diatur memiliki pasang surut. Bagi Suharto kecil, pernikahan orang tuanya tampak baik-baik saja, tetapi tidak demikian bagi ibunya. Nama ibunya adalah Sukirah. Ketika Sukirah bertemu Kertoredjo, dia baru berusia 16 tahun. Namun, sudah waktunya bagi Sukirah untuk menikah karena anak perempuan saat itu harus menikah di usia yang sangat muda. Sukirah juga

---

<sup>146</sup>RETNOWATI ABDULGANI-KNAPP, *SOEHARTO: The Life and Legacy of Indonesia's Second President: AN AUTHORISED BIOGRAPHY*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2013.

terkenal dengan kecantikannya. Tak lama setelah pernikahan, Sukirah langsung hamil<sup>147</sup>.

Pada masa itu belum ada radio atau televisi dan hiburan yang biasa adalah wayang, yang hanya dipentaskan pada acara-acara khusus seperti kelahiran atau pernikahan. Mungkin itu sebabnya Kertosudiro lebih banyak menghabiskan waktu luangnya untuk berjudi dan makan. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh para ulu-ulu atau yang memengangnya<sup>148</sup>.

Posisi seperti itu, tetapi membutuhkan banyak uang untuk mendukung kebiasaan ini. Akibatnya, Sukirah harus menjual perhiasannya. Menghadapi masalah seperti itu sejak kecil, Sukirah menjadi semakin frustrasi dan tidak bahagia dalam pernikahannya. Di akhir kehamilannya, dia memutuskan untuk kembali ke rumah masa kecilnya. Namun, tradisi memandang rendah seorang wanita yang meninggalkan suami dan rumahnya, sehingga keluarganya tidak menyambutnya kembali dengan tangan terbuka. Tertekan oleh perilaku buruk keluarga, ia sering bersembunyi dari kamar ke kamar dan berpuasa. Tindakan ini dikenal sebagai *ngebleng* dalam bahasa Jawa dimana seseorang berpuasa selama sehari-hari. Rumah di pedesaan umumnya memiliki beberapa ruangan yang disebut *sentong*. Senang mengurung diri dan bersembunyi di tengah atau di Sentong Tengah. Setelah dia menghilang, keluarganya langsung panik ketika dia tidak ditemukan. Ketika dia akhirnya ditemukan, dia *linglung* dan dalam kesehatan yang sangat buruk. Setelah dia sembuh, orang tuanya memaksanya untuk kembali ke suaminya. Tidak lama kemudian, dia melahirkan seorang putra yang sehat yang ditakdirkan untuk menjadi presiden kedua Indonesia<sup>149</sup>.

Anak laki-laki kecil itu lahir pada tanggal 8 Juni 1921. Masih lemah setelah sakit, Sukirah tidak bisa menyusui anaknya yang baru lahir. Bayi itu diberi nama "Soeharto" oleh ayahnya. "Soe" berarti "lebih baik" dan "harto" berarti "kekayaan". Kertosudiro berharap anaknya tumbuh menjadi orang kaya dan berpangkat tinggi. Harapan ini menjadi kenyataan<sup>150</sup>.

---

<sup>147</sup>ABDULGANI-KNAPP.

<sup>148</sup>ABDULGANI-KNAPP.

<sup>149</sup>ABDULGANI-KNAPP.

<sup>150</sup>ABDULGANI-KNAPP.

Suharto adalah putra tunggal mereka dari pernikahan orang tuanya, yang tidak berlangsung lama. Saat kesehatan Sukirah memburuk, bayi tersebut diserahkan ke bidan desa yang juga membantu proses persalinan. Bidan Mbah Kornodiryo kebetulan adalah saudara perempuan dari nenek dari pihak ayah Suharto. Bayi tersebut baru berusia 40 hari ketika diserahkan kepada Mbah Kromodaryo untuk dirawat. Mbah Kromodiryo membawa Suharto kecil ke mana-mana dan mengajarnya untuk berdiri dan mengambil langkah pertamanya. Ketika Mbah Kromodiryo harus menjalankan tugasnya sebagai bidan, kakeknya akan membawa Suharto bersamanya ke lapangan. Anak kecil digendong di pundak kakek sedangkan kakek<sup>151</sup>.

Kehidupan desa sangat nyaman bagi Suharto. Dia ingat kecelakaan Pisau itu jatuh di kakinya saat dia sedang memotong pohon pisang. Ketika dia melihat luka neneknya dibalut dengan cinta, dia menyadari betapa dia sangat mencintainya. Bagi Suharto, ini adalah saat paling bahagia dalam hidupnya. Dia menyukai kehidupan desa, bermain dengan kerbau dan menangkap belut di sungai. Tahun-tahun masa kecilnya meninggalkan kesan mendalam pada dirinya dan Hal ini terlihat dari kebiasaan Pak Harto yang makan makanan sederhana dan mengenakan pakaian dari tanah. Kebiasaannya yang sederhana itulah yang membedakannya dengan orang-orang "Barat" di negeri ini. Bagi kelompok ini, orang seperti Pak Harto dianggap "terlalu Jawa" bahkan kadang dipandang sebelah mata<sup>152</sup>.

Beratnya beban pernikahan akhirnya membuat Sukirah mengajukan gugatan cerai. Seperti semua kasus perceraian, ada persaingan antara suami dan istri untuk hak asuh anak-anak mereka. Baik Sukirah maupun Kertosudiro ingin mengasuh anak mereka. Sukirah akhirnya memutuskan untuk memberikan hak asuh anak kepada mantan suaminya. Keputusan itu tidak mudah, tetapi dia menyadari bahwa dia masih muda dan tidak sehat secara fisik, dia tidak punya pilihan selain membiarkan mantan suaminya bertanggung jawab atas anak mereka. Ini tidak berarti bahwa Sukirah tidak bertanggung jawab atau tidak pasti seperti yang

---

<sup>151</sup>ABDULGANI-KNAPP.

<sup>152</sup>ABDULGANI-KNAPP.

dijelaskan oleh banyak buku lain tentang Suharto. Suharto kecil tinggal bersama Mbah Kromodaryo dan suaminya sampai ia berusia 4 tahun<sup>153</sup>.

Setelah Sukirah bercerai, Kertosudiro menikah lagi dan memiliki empat anak lagi. Sukirah juga menikah lagi dengan Atmopawiro, dan dikaruniai tujuh orang anak. Salah satunya adalah Probosutedjo, yang lahir pada 1 Mei 1931 dan kemudian menjadi sangat setia kepada Suharto, yang berdiri di samping saudara tirinya di saat dibutuhkan dan melalui suka dan duka, kemenangan dan kesakitan<sup>154</sup>.

Suharto diambil kembali oleh Sukirah ketika ia berusia empat tahun. Atmopawiro mencintai anak tirinya dan bahkan membelikannya seekor kambing. Tindakan ini jelas menunjukkan kecintaannya pada Suharto, karena kambing adalah hewan yang sangat dihargai di Indonesia. Kambing biasanya dijadikan hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Kambing juga diberikan saat bayi baru lahir: satu kambing untuk anak perempuan dan dua ekor kambing untuk anak laki-laki. Beberapa penulis sering menggambarkan Suharto sebagai seorang penyendiri. Meski Suharto sering kesepian dan jauh sebagai anak tunggal, keluarganya sangat peduli dan menyayanginya.

Setelah beranjak dewasa, Soeharto menghabiskan waktu luangnya sebagai penggembala kambing. Sepulang sekolah ia memelihara kambing dan domba, dan ketika ia cukup umur, ia memelihara kerbau. Suatu hari, kakek dari pihak ibu, Mbah Atmosudiro, meminta Suharto kecil untuk membawa kerbau ke sawah. Di tengah perjalanan, kerbau itu jatuh ke sungai kecil. Suharto mengira hewan itu tahu ke mana harus pergi, tetapi ternyata tidak sebandai kelihatannya. Anak sungai menyempit sehingga kerbau tidak bisa bergerak maju atau mundur. Bocah itu hanya bisa berteriak keras. Untungnya, kakeknya, yang khawatir cucunya tidak akan datang pada malam hari, akhirnya mengirim seorang pria untuk menemukannya. Soeharto akhirnya ditemukan. Kejadian ini terukir dalam ingatan seorang anak kecil yang menangis putus asa dan menghilang<sup>155</sup>.

---

<sup>153</sup>ABDULGANI-KNAPP.

<sup>154</sup>ABDULGANI-KNAPP.

<sup>155</sup>ABDULGANI-KNAPP.

Ketika Suharto berusia delapan tahun, Sukirah melahirkan beberapa anak lagi. Kertosudiro kemudian memutuskan agar Suharto diasuh oleh adik perempuannya, Ibu Prawirowihardjo, yang tinggal di Wuryantoro, tempat yang lebih makmur dari Kemusuk. Keluarga Prawirowihardjo diharapkan dapat memberikan pendidikan yang lebih baik kepada Suharto, mengingat Prawirowihardjo adalah seorang pertanahan dan memiliki kedudukan yang cukup tinggi di kalangan petani. Namun, Kertosudiro tidak berani memberi tahu Sukirah tentang rencananya, sehingga dia "menculik" putranya. Suharto kecil diam-diam diambil dari kelasnya dan dibawa dengan kereta api ke Yogyakarta. Selama di kota besar, ia dibawa ke toko untuk membeli baju baru dan baju lamanya dibuang. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dengan bus ke Wonogiri melalui Solo dan terhubung ke Wuryantoro dengan taksi. Mereka tiba pada pukul sembilan. Bu Prawirowihardjo dan keluarganya langsung menyambut anak kecil itu ke keluarga mereka. Pasangan Prawirowihardjo memiliki sembilan anak - salah satunya adalah Sudwikatmono, yang kemudian membuka diri pada dunia. Bisnis makmur dan berkembang ketika Suharto menjadi Presiden<sup>156</sup>.

Setahun setelah "penculikan" itu, saat Soeharto sedang berlibur, Atmopawiro membawanya pulang. Atmopawiro berjanji untuk membawa anak itu kembali ke Wuryantoro pada akhir liburan, tetapi Sukirah tidak membiarkannya pergi. Bu Prawirowihardjo harus datang sendiri untuk mengadopsi anak itu. Sukirah akhirnya menyerah karena menyadari bahwa keluarga Prawirowihardjo peduli dengan Soeharto dan memperlakukannya seperti anak sulung mereka. Ia tinggal di rumah Prawirowihardjo hingga remaja. Hal ini membentuk karakter Suharto dan posisinya sebagai anak sulung yang mengasuh adik-adiknya yang lebih muda dan lebih lemah. Sifat ini tetap ada sampai dia menjabat sebagai Presiden<sup>157</sup>.

Sebagai seorang muslim yang taat, Ibu Prawirowihardjo Suharto tidak hanya mengajarkan pentingnya sekolah, tetapi juga pentingnya pendidikan spiritual dan agama. Suharto begadang semalaman belajar membaca dan menguraikan Quran. Saat ini, hati Suharto tergerak untuk mengikuti ajaran nenek

---

<sup>156</sup>ABDULGANI-KNAPP.

<sup>157</sup>ABDULGANI-KNAPP.

moyangnya, sebuah perkembangan penting yang kemudian mempengaruhi dan mempengaruhinya selama sisa hidupnya. Ini juga saatnya untuk mempelajari tiga prinsip tentang apa yang tidak boleh dilakukan dalam hidup. "Jangan kaget", "Jangan kaget" dan "Jangan tertawa". Atau "sabar, dapat dimengerti, dan dapat dibaca" - sabar, terima apa yang terjadi, jangan pernah mengeluh, selalu waspada<sup>158</sup>.

Suharto mengambil pelatihan spiritualnya dengan serius. Di antara mereka dia berpuasa pada hari Senin dan Kamis dan tidur di luar di bawah atap. Orang Jawa umumnya percaya bahwa puasa dan meditasi dapat memberikan kekuatan batin untuk mengatasi segala cobaan hidup. Dia tidak pernah mempraktekannya. Itu hanya membakar sampah yang tidak aktif. Ia juga bergabung dengan Hizbul Wathan, sebuah kelompok keagamaan seperti Pramuka. Latihan tersebut di atas dilakukan untuk menghormati nenek moyang kita yang memiliki Hada. Sementara itu, sentimen nasionalismenya diasah dan dikembangkan melalui kelas-kelas sekolah, dan agama Islam yang dia pelajari tadi malam diinjak-injak. Ketiga faktor tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi dan membentuk watak serta sikap kehidupan masa depan.

Indonesia merupakan negara agraris yang makanan pokoknya adalah beras, dan pertanian merupakan salah satu penggerak utama perekonomian negara. Sikap psikologis masyarakat agraris yang sangat penting dan sentral adalah sikap kerjasama antar anggota masyarakat. Aspek penting dalam kehidupan masyarakat Jawa ini akan sangat mempengaruhi keputusan Suharto sebagai presiden ke depan. Pemahamannya tentang semangat komunitas petani, harapan, ketakutan, dan kebutuhannya, sangat berharga bagi karier politiknya<sup>159</sup>.

Selama tinggal bersama keluarga Prawirowihardjo, Suharto memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan pengetahuan praktis tentang pertanian. Kalau mau dianalisa, hal yang satu ini adalah salah satu rahasia sukses manajemen Indonesia. Ia sering menemani pamannya saat mengunjungi lahan yang sudah siap tanam. Pada saat seperti itu, pertanyaan dan jawaban sering

---

<sup>158</sup>ABDULGANI-KNAPP.

<sup>159</sup>ABDULGANI-KNAPP.

datang kepada paman saya, yang mampu menjelaskan metode budidaya yang lebih canggih kepada para petani. Suharto sangat mengagumi dedikasi pamannya<sup>160</sup>.

Mereka dalam pekerjaan mereka. Keuletan dan kreativitas pamannya sangat menginspirasi Suharto dan menjadi prinsip yang membimbingnya hingga tua. Ia juga bangga dengan keunggulannya di Beptani dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Bawang merah dan bawang putih yang ia tanam selalu berkualitas tinggi.

Di malam hari saya sering menghabiskan malam bersama teman-teman sekolah di masjid. Sama seperti ayah saya yang bersekolah di Surabaya, saya mendengar nama-nama pahlawan nasional seperti Raden Ajeng Kartini dan Putera Diponegoro di kelas. Maka tidak heran jika pemerintah Belanda tidak suka membesarkan anak pribumi. Memang benar bahwa pengetahuan sama kuatnya dengan kekuatan, tetapi pengetahuan juga dapat membahayakan yang kuat<sup>161</sup>.

Ajaran nenek moyang lainnya yang paling ia yakini adalah: "Hormati Kalawan Gusti, Guru, Ratu, Lan Wong Atuwu Karo", yaitu "Hormati Tuhan Yang Maha Esa, guru, penguasa dan orang tua." Suharto kemudian menerapkan prinsip ini dalam perlakuannya terhadap Presiden. Sukarno dan kritikus lainnya<sup>162</sup>.

Selama ini ia menyerap karakter dan filosofi hidup orang-orang di sekitarnya. Saat itulah dia merasa paling dicintai. Dia mencintai dan dicintai oleh orang-orang yang merawatnya seperti anak kandung, bahkan jika dia berasal dari ibu atau ayah yang berbeda. Hubungan masa kecilnya dengan orang tua, saudara kandung, teman, dan anggota keluarga lainnya memainkan peran penting dalam keputusannya nanti sebagai presiden. Pengalaman masa kecilnya, terutama penderitaan Sukirah dan berbagai kesulitan keuangan yang dihadapi Kertosudiro, mengajarnya untuk tidak miskin. Cinta dan perhatian Mbah Kromodiriyo dari Atmopawiro mempengaruhi keputusannya untuk selalu menjaga kerabatnya di masa depan. Prestasi Prawirowihardjo tidak salah, mereka menginspirasi

---

<sup>160</sup> ABDULGANI-KNAPP.

<sup>161</sup> ABDULGANI-KNAPP.

<sup>162</sup> ABDULGANI-KNAPP.

dalam memecahkan berbagai masalah. Menggunakan snort (sejenis tanaman) sebagai pupuk tanah kering. Suharto melakukan hal yang sama dengan pabrik gung Lamtoro<sup>163</sup>.

Setelah menyelesaikan sekolah dasar selama lima tahun, Suharto melanjutkan pendidikannya di Sekolah Schakel, sebuah sekolah menengah pertama di Wonogiri. Dia harus pindah ke SelogIf, 6 km dari sekolah barunya dan berbagi kamar dengan Sulardi, teman sekelas calon istrinya. Mereka tinggal bersama saudara perempuan Sulardi, istri seorang petugas dinas pertanian, dan dia memberi kesempatan kepada Suharto untuk menyelesaikan pendidikannya di Yogya. Selama waktu inilah ia mendengar tentang protes awal Indonesia terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Segera, angin perang mulai bertiup melintasi Pasifik. Terlalu sibuk dengan urusan perang, Belanda tidak memperhatikan gerakan bawah tanah yang diorganisir oleh para politisi muda Indonesia. Mereka banyak mengadakan pertemuan untuk memperjuangkan kemerdekaan negara dari penjajahan Belanda. Suharto tidak terlalu terlibat dalam kegiatan tersebut karena ia berkonsentrasi menyelesaikan pendidikannya yang tidak selesai sampai tahun 1939. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Muhammadiyah, ia harus mencari pekerjaan karena ayahnya tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi<sup>164</sup>.

Suharto memutuskan untuk kembali ke Wuryantoro dengan harapan akan ada kekerabatan yang membantunya. Dia benar, tidak lama setelah dia diterima sebagai pegawai di Bank Desa. Pekerjaan ini tidak terlalu menarik baginya, tetapi itu lebih baik daripada menganggur. Sebagai pegawai bank, ia diwajibkan mengenakan pakaian adat Jawa lengkap yang terdiri dari blangkon, beskap, dan sarung. Dia mengendarai sepedanya ke petani dan pedagang kecil yang membutuhkan kredit untuk bisnis mereka. Ketika salah satu sarung yang dipakainya mulai usang, dia harus meminjam sarung bibinya. Suatu hari dalam perjalanan turun, kasingnya tersangkut di jeruji sepeda dan pecah. Bibinya sangat

---

<sup>163</sup>ABDULGANI-KNAPP.

<sup>164</sup>ABDULGANI-KNAPP.

marah karena itu adalah vagina terindah yang dia miliki. Kejadian ini mengakhiri karirnya di dunia perbankan<sup>165</sup>.

Menganggur lagi, ia pindah ke Solo untuk mengadu nasib setelah seorang teman memberitahunya ada lowongan sebagai juru masak di Angkatan Laut Belanda. Dia pikir itu akan menjadi kesempatan terakhirnya. Tapi sepertinya tidak ada tawaran pekerjaan di Solo juga. Kemudian ia memutuskan untuk kembali ke Wuryantoro. Sambil mencari pekerjaan, ia menghabiskan waktu luangnya dengan bekerja sama, antara lain membantu membangun langgar, depot padi, membersihkan parit, dan sebagainya.

Karier Suharto sebagai prajurit di satuan tempur tidak dimulai dengan sengaja. Saat itu terjadi kekosongan di Angkatan Bersenjata Belanda (KNIL). Dia bergabung dengan KNIL pada 1 Juni 1940 dan itu adalah langkah pertama yang memulai karir militernya yang panjang. Ia memulai pelatihan dasar militer di Gombang, sebelah barat Yogya. Pelatihan militer membuatnya terpesona dan memengaruhinya sepanjang hidupnya. Masa kecilnya yang bergejolak membuatnya menghargai disiplin dan aturan ketat kehidupan militer. Di sini, tentu saja, kualitas kepemimpinan dan keterampilan berpikir strategisnya dilatih<sup>166</sup>.

Di Angkatan Bersenjata Kerajaan Belanda ada dua jenis pelatihan: jangka panjang dan jangka pendek. Dia memilih yang pendek di mana pelatihannya sulit. Latihan dimulai pagi hari dan berakhir larut malam. Pelatihannya sangat berbeda dari pekerjaannya sebagai pegawai bank. Setelah lulus sebagai taruna terbaik di kelasnya, ia dikirim ke Batalyon XIII di Rampal, Malang Pada 2 Desember 1940 ia dianugerahi pangkat Kopral. Dia kemudian dikirim ke Gombang untuk pelatihan lebih lanjut dan segera dipromosikan menjadi sersan. Kemudian Jepang mendekat dan dia pergi ke Bandung sebagai tentara cadangan di pangkalan militer di Cisarua. Sejak Belanda menyerah kepada Jepang pada 8 Maret 1942, ia hanya diperbolehkan tinggal di sana selama seminggu.

Setelah Belanda dikalahkan, ia memutuskan untuk kembali ke Yogya. Saat kereta yang dia naiki mendekati area lemparan, dia mendengar di radio bahwa

---

<sup>165</sup>ABDULGANI-KNAPP.

<sup>166</sup>ABDULGANI-KNAPP.

semua tentara harus melapor ke Jettis. Dia memutuskan untuk tidak turun dari kereta untuk menghindari ditangkap oleh Jepang. Dia mengubah rencana dan naik kereta api lain ke Sleman. Setelah bermalam di sana, ia naik bus ke Wonogiri dan melanjutkan perjalanan ke Uriantoro<sup>167</sup>.

Situasi di negara ini semakin memburuk. Suharto memutuskan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Yogya dipilih karena Yogya adalah kota besar dan saya pasti merasa Yogya memiliki pemandangan yang lebih baik. Dia mulai belajar mengetik, tetapi berhenti karena dia jatuh sakit. Suatu hari dia membaca pemberitahuan bahwa ada lowongan di Keibuho, sebuah unit polisi Jepang. Awalnya dia sedikit ragu karena takut orang Jepang akan mengetahui pekerjaannya sebelumnya, namun akhirnya dia memutuskan untuk menjadi sukarelawan. Dia tertular malaria pada usia muda dan terus datang kembali. Untungnya, dia lulus pemeriksaan fisik. Setelah tiga bulan pelatihan, saya mendapat pekerjaan sebagai sopir pengiriman dan harus belajar bahasa Jepang. Ia kemudian, dibujuk oleh Irjen Polri, bergabung dengan Pembela Tanah Air (PETA), cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Dia lulus ujian lagi dan dilatih selama empat bulan untuk menjadi komandan peleton. Pelatihan ini cukup mudah baginya yang memiliki pelatihan yang sama di KNIL. Latihan Shodancho sendiri cukup sulit, termasuk harus mandi di sungai yang kotor di belakang pabrik ban Tahun Baik sekarang<sup>168</sup>.

Pada tahun 1944, ia menyelesaikan kursus perwira di Bogor dan menjadi Chudancho (komandan kompi). menjadi Pendidikan Chudancho dan Daidancho dan komandan batalion tidak terlalu kasar dan lebih nyaman. Setelah menyelesaikan Kursus Taktik Militer dan Strategis pada tahun 1944, ia ditugaskan untuk berlatih di Seibu, markas PETA di Solo. Patriotismenya berkembang selama di PETA<sup>169</sup>.

Sejak saat itu, PETA menjadi bagian dari tentara baru Indonesia. Satuan ini bukan merupakan kelanjutan dari pasukan Belanda atau Jepang, tetapi muncul pada masa revolusi, terdiri dari pemuda-pemuda merdeka dan para pejuang

---

<sup>167</sup>ABDULGANI-KNAPP.

<sup>168</sup>ABDULGANI-KNAPP.

<sup>169</sup>ABDULGANI-KNAPP.

kemerdekaan. Artinya, sejak lahirnya PETA telah menjadi kekuatan sosial yang kemudian menjadi lembaga nasional.

Pada tahun 1945, Batalyon PETA memberontak melawan Jepang di Blitar, Jawa Timur. Setelah pemberontakan yang dipimpin oleh seorang letnan PETA bernama Supriyadi dipadamkan, Jepang berencana untuk "membersihkan" anggota PETA. Desas-desus juga menyebar bahwa Suharto akan dipecat. Pemberontakan Blitar berakhir dengan kekosongan kepemimpinan ketika Shodancho dan Bundancho yang ikut serta dalam pemberontakan ditangkap dan diadili oleh pengadilan militer. Namun, Jepang mengira Suharto akan berguna bagi mereka dan menugaskannya ke Brebeg di kaki Gunung Wilis, selatan kota Madiun. Tentara Jepang membentuk unit pertahanan di desa-desa, kota-kota dan kota-kota. Unit pertahanan ini disebut Keibodan dan Seinandan. Wanita juga direkrut untuk menemukan Fujinkai. Segera, lomusha, atau kerja paksa, diterapkan di tingkat desa. Di Brebeg, Suharto melatih awak PETA di Batalyon Blitar di Bundancho<sup>170</sup>.

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada pukul 10.00 pagi pada hari Jumat, 17 Agustus 1945. Saat itu adalah awal Ramadhan. Suharto berada di Brebeg ketika membaca berita di koran lokal Matahari tentang proklamasi, konstitusi baru, Soekarno sebagai presiden pertama dan Bung Hatta sebagai wakil presiden. Sultan Hamengkubuwono IX. Dan Paku Alam VIII Yogya mengucapkan selamat kepada pemerintahan baru. Sultan Hamengkubuwono IX. Ia menghimbau kepada Manmin agar rela berkorban demi tujuan bersama negara baru dan mempertahankan kemerdekaan yang baru dideklarasikan. Sementara itu, Presiden Soekarno mengimbau mantan anggota PETA Heiho (Tentara Lokal Jepang yang terdiri dari relawan dan milisi), Kai-gun (Angkatan Laut Jepang) dan KNIL untuk bergabung dengan Kementerian Keamanan Rakyat (BRR) yang dibentuk Korps Persiapan Kemerdekaan dan bersatu. komite<sup>171</sup>. Indonesia, 22 Agustus 1945. Suharto menanggapi seruan ini, dan dia dan teman-temannya, mantan anggota PETA, kemudian bergabung

---

<sup>170</sup>ABDULGANI-KNAPP.

<sup>171</sup>ABDULGANI-KNAPP.

dengan BRR, tetapi jauh di lubuk hati mereka masih meragukan niat Jepang yang sebenarnya.

Pada tanggal 5 Oktober 1945, dua bulan setelah proklamasi kemerdekaan, Presiden Sukarno mengumumkan pembentukan Tentara Nasional Indonesia, atau TKR, dan Suharto mengundurkan diri pada hari yang sama. Semua unit BKR menjadi unit TKR. Pada tanggal 7 Januari 1946, TKR berganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Dua minggu kemudian, namanya diubah kembali menjadi URI Republik Indonesia. Tentara Republik Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Keputusan Presiden Presiden Sukarno pada tanggal 3 Juni 1947. TNI kemudian berubah nama kembali menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (APRI). Angkatan Laut dan Angkatan Udara juga bergabung, dipindahkan ke Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan kepolisian dikonsolidasikan. Namun, sejak pertengahan 1960-an, istilah TNI dan ABRI digunakan secara bersamaan<sup>172</sup>.

Dalam pidato yang sama, Presiden Soekarno mengingatkan semua pihak bahwa militer, APRI, muncul dari rakyat dan berdiri di atas dasar yang sama dengan seluruh rakyat Indonesia. APRI mengambil alih misi militer pemerintah Hindia Belanda yang dihapuskan dan dibubarkan, termasuk semua pengadaan senjata. Sejak itu, militer memainkan peran penting dalam politik domestik, dan pada tahun 1965 memainkan peran utama. Sejak itu, militer menjadi kekuatan dominan selama pemerintahan Suharto. Tugas utama tentara adalah bekerja dengan penduduk untuk melindungi negara dari serangan internal dan eksternal dan untuk menjaga stabilitas sosial-politik negara.

Namun, Belanda tidak mengakui kemerdekaan republik baru, dan Indonesia melakukan serangkaian perang untuk mempertahankan kemerdekaannya dengan Sekutu, dengan Belanda mengklaim mempertahankan koloni mereka dan Jepang berusaha mempertahankan kemerdekaannya. mendominasi Indonesia<sup>173</sup>.

Pasukan Sekutu mendarat di Semarang pada 19 Oktober 1945 bersama Belanda dan NICA. Rakyat segera mengetahui maksud sebenarnya dari Belanda

---

<sup>172</sup>ABDULGANI-KNAPP.

<sup>173</sup>ABDULGANI-KNAPP.

untuk mendapatkan kembali kekuasaan mereka. Tetapi pemimpin baru Republik telah menangani situasi secara diplomatis. Seperti di Surabaya, koalisi gagal memahami aspirasi rakyat Indonesia yang memilih merdeka dan mati.

Pada tanggal 31 Oktober 1945, mulai terjadi perselisihan sipil di Semarang dan Magerlang. Pada tanggal 10 November, terjadi pertempuran sengit di Surabaya yang menewaskan Jenderal Malabi yang memimpin pasukan Sekutu. Peristiwa ini membuat Surabaya dikenal sebagai “Kota Pahlawan”. Batalyon X, dipimpin oleh Suharto, yang kemudian dipromosikan menjadi mayor, melancarkan serangan besar-besaran terhadap posisi Sekutu di Ambarawa dan Banyubiru. Serangan itu membawa nama Mayor Suharto menjadi perhatian Kolonel Gato Subroto. Dia dari Seksi V/pekerja. Dia adalah ayah tiri dari Mohamad (Bob) Hasan, yang kemudian menjadi teman baik walikota<sup>174</sup>.

Suharto Pasukan sekutu mundur ke Semarang. Pada tanggal 18 Desember 1945, Kolonel Sudirman TKR yang telah diangkat menjadi jenderal mulai melihat keberhasilan Mayor Suharto. Pada bulan Desember 1945, Soedirman mengangkat Mayor Suharto sebagai komandan Resimen 3 Yogya dan mengangkatnya menjadi letnan kolonel. Setelah itu, Suharto memimpin wilayah Jogja dan memimpin 4 batalyon<sup>175</sup>.

NICA menyerang ibu kota dan menciptakan suasana yang sangat tegang di Jakarta. Presiden Sukarno menganggap situasi seperti itu tidak hanya berbahaya bagi para pemimpin, tetapi juga bagi situasi politik republik baru itu sendiri. Pada tanggal 4 Januari 1946, Presiden mengumumkan bahwa pemerintah akan dipindahkan ke daerah yang tidak terpengaruh oleh Belanda. Kota Yogya dipilih karena terletak di tengah pulau Jawa dan sudah lumrah adanya pemerintahan di sana. Misi Lt. Kolonel Suharto menjadi lebih sulit karena dia sekarang bertanggung jawab atas keamanan pemerintah selama di Yogyakarta<sup>176</sup>.

penelitian terdahulu

---

<sup>174</sup>ABDULGANI-KNAPP.

<sup>175</sup>ABDULGANI-KNAPP.

<sup>176</sup>ABDULGANI-KNAPP.

Membangun Demokrasi melalui tentara nasional Indonesia mencatat beberapa penelitian sebelumnya terkait profesionalisme TNI antara lain Mulyadi (2009) dengan judul Depolitisasi TNI: Pembangunan Teritorial TNI AD. termasuk. Dari tahun 2004 hingga 2009 ia memimpin Provinsi DKI Jakarta. Kajian Mulyadi berfokus pada gagasan bahwa membangun TNI menjadi 'tentara profesional' membutuhkan depolitisasi militer. Kajian berikut dari Dharmawan (2005) berjudul Pengaruh Reformasi Internal TNI Terhadap Profesionalisme Aparatur Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Daerah: Studi Kasus di Kodim 0501 Jakarta Pusat. Penelitian ini berfokus pada pengaruh reformasi internal TNI terhadap profesionalisme alutsista TNI di Kodim 0501 Jakarta Pusat. Selanjutnya, Khasman (2010) melakukan penelitian yang berjudul “Persepsi Mahasiswa TNI Angkatan Laut tentang Profesionalisme TNI dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Ketahanan Ideologi: Kajian di Pusdiklpa dan STTAL Kobangdikal Surabaya, Jawa Timur”. Penelitian ini berfokus pada persepsi mahasiswa angkatan laut Indonesia tentang pengaruh TNI dalam membentuk profesionalisme dan ketahanan ideologis.

Karena profesionalisme TNI tidak dapat dihindari dan TNI telah kehilangan kendali sebagai otoritas dan otoritas pertahanan negara selama 32 tahun Orde Baru, maka perlu dibentuk TNI yang profesional untuk mengunci barak dan membukanya. Pada acara Mencegah masuknya kembali ke dunia politik yang sebenarnya masih terus dilakukan, namun berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia masih menghadapi kendala. Karena masih ada upaya untuk membawa TNI kembali ke dunia politik yang sebenarnya. Hambatan perkembangan demokrasi akibat kurangnya profesionalisme militer dapat merugikan hak-hak masyarakat sipil. Karena ketika pemerintah diperintah oleh militer, hak-hak masyarakat sipil diabaikan<sup>177</sup>.

### **Hubungan Militer dengan Politik Indonesia**

---

<sup>177</sup>Yusa Djuyandi, “Membangun Demokrasi melalui Profesionalisme Tentara Nasional Indonesia,” *Humaniora* 3, no. 2 (Oktober 2012): 512, <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i2.3356>.

Kehadiran TNI/Polri dalam kancah politik, sosial, dan ekonomi di negara berkembang disebabkan oleh lemahnya peran organisasi nirmiliter dalam mengendalikan segala aspek kehidupan masyarakat. Transisi ABRI di bidang politik, sosial dan ekonomi membutuhkan waktu yang cukup lama. Proses ini berlangsung selama 20 tahun pada masa Orde Baru. ABRI bangga dengan perannya sebagai kelompok utama dalam seluruh proses kehidupan politik di Indonesia. Selain persaingan politik dan pertikaian antar partai politik sepanjang perjalanannya, sejarah politik Indonesia juga sarat pengalaman mengingat kurangnya koordinasi yang baik antara sipil dan militer. Di sinilah akhirnya menjadi fenomena revolusioner saat itu, yang berdampak kuat pada politik Indonesia.

Transisi militer ke bidang politik, sosial, dan ekonomi berlangsung lama, dan proses ini berlangsung selama 20 tahun pada masa Orde Baru. Militer percaya bahwa ia memiliki peran penting dalam kehidupan politik Indonesia. Peran militer di era Orde Baru adalah pusat pemerintahan dan politik, dan sumber kekuasaannya terletak pada kekuasaan Suharto sebagai presiden dan seorang jenderal militer yang sangat dihormati. Kemampuan untuk menyusup ke dalam kegiatan sosial dan politik militer membuat semua program pembangunan waktu itu efektif dan efisien<sup>178</sup>.

### **Kisah perkawinan Soeharto**

Dimulai dari Selama menjadi ibu negara, Siti Hartinah Suharto konsisten dalam perjuangan dan dedikasinya. Nama panggilan ibu Tien Suharto. Siti Hartinah (Cik Tien Soeharto) lahir pada tanggal 23 Agustus 1923 di Kampung Jaten dari pasangan RM Soemoharjomo dan R. Aj. sepenuh hati. Dia adalah anak kedua dari sepuluh bersaudara. Kakaknya adalah R.Aj. Sedangkan Siti Hartini, kakak-kakaknya RM Ibnu Hartomo, RM Ibnu Harjatno, R. Aj. Siti Hartanti, RM Ibnu Harjoto, RM Ibnu Widodo, R.Aj. City Harzanti, RM Bernardi Ivnu Harzanto dan RM Savarno Ivnu Harzanto.

---

<sup>178</sup>Azhari Fadli dkk., "Hubungan Militer dengan Politik di Indonesia," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 1 (Januari 2022): 1039, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i1.5946>.

Masa kecil Siti Hartinah ditandai dengan berpindah-pindah menurut orang tuanya yang ditugaskan ke berbagai daerah. Terkadang, ketika orang tua Anda pindah, Anda tidak memiliki tempat tinggal untuk keluarga Anda. Ada suatu masa ketika keluarga itu tinggal sementara di rumah kepala desa sebelum mencari rumah baru. Pada saat itu, tidak ada kantor pegawai negeri sipil setingkat lebih rendah.

Siti Hartinah semakin tua tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda tertarik pada lawan jenis. Orang tua, bibi, dan kerabatnya benar-benar khawatir Virgo berlesung pipit ini tidak akan menemukan pasangan. Bahkan, Siti Hartinah sendiri sering berdoa untuk mendapatkan pasangan yang benar-benar cocok, tidak hanya sebagai suami tetapi juga sebagai calon pasangan<sup>179</sup>.

Hingga suatu hari, sekelompok keluarga Prawirowihardjo, orang tua angkat Soeharto, datang melamar Siti Hartinah. Saat pengusulan, Soeharto dan Siti Hartina belum pernah bertemu. Sebelum melamar, ada keragu-raguan di benak anak muda Suharto bahwa lamaran itu akan ditolak. Pasalnya, dia berasal dari orang biasa dan Siti Hartinah berasal dari keluarga bangsawan.

Mungkin itu yang disebut teman. Siti Hartinah ditawari sekali atau dua kali, atau seorang pemuda mencoba mendekatinya, tetapi dia selalu menolak. Namun, ketika penuduhnya adalah seorang perwira muda bernama Suharto, dia tidak keberatan.

Pada tanggal 26 Desember 1947, sepasang suami istri yang belum pernah bertunangan menikah. Pernikahan itu sangat sederhana. Resepsi hanya diterangi cahaya lilin yang redup. Malam pertamanya adalah jam malam. Semua warga tidak diperbolehkan keluar rumah dan tidak boleh terlihat dari rumah oleh satpam. Dalam situasi darurat seperti ini, memang benar tidak ada dokumen berupa foto pernikahan mereka berdua. Saat menikah, Soeharto berusia 26 tahun dan Siti Hartinah berusia 24 tahun. Bahkan tanpa upacara pertunangan, keduanya berusaha untuk tetap menikah selama berabad-abad. Keduanya menganut pepatah abadi bahwa cinta datang dari hubungan dekat.

---

<sup>179</sup>“Biografi Presiden - Situs Web Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia,” t.t.

Pada tanggal 23 Januari 1949, di rumah pengungsinya, Bu Suharto mengalami peristiwa baru yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Ia melahirkan anak pertamanya, Siti Hardijanti Rukmana. Pada 1 Mei 1951, keluarga Suharto menjadi lebih aktif setelah kedatangan anak kedua bernama Sigit Harjojudanto. Pada 23 Juli 1953, anak ketiga mereka, Bambang Tri Hatmojo, lahir anak keempat mereka, Siti Hediati Haryadi (Titik), lahir pada 14 April 1959 di Semarang. Anak kelima mereka diberi nama Hutomo Mandala Putra (Tommy) pada 12 Agustus 1962. Anak bungsu Siti Hutami Endang Adiningsih yang kerap disapa Mamiiek Soeharto lahir pada 23 Agustus 1964.

Siti Hartinah meninggal pada Minggu, 28 April 1996 di Jakarta. Ia dimakamkan bersama suaminya Suharto di Astana Giribanggun, Surakarta (menikah pada 26 Desember 1947)<sup>180</sup>.

## **B. Teori kepemimpinan Soeharto**

### **1. Tipe militer**

Meskipun jenis kepemimpinan militer dan militer ini memiliki dua suku kata yang berbeda, keduanya memiliki arti yang sama. Jadi, tipe kepemimpinan militeristik atau militeristik adalah pemimpin yang mendorong bawahannya untuk lebih sering menggunakan sistem komando, juga pemimpin yang menggunakan tipe kepemimpinan ini suka bergantung pada jabatan dan menyukai formalitas yang berlebihan. Biasanya, pemimpin yang menggunakan tipe kepemimpinan ini sulit menerima kritik dari bawahan, meskipun itu kritik yang membangun. Sebenarnya tipe kepemimpinan militer ini sangat mirip dengan tipe kepemimpinan otoriter atau otokratis, namun harus jelas bahwa tipe kepemimpinan militer ini sangat berbeda dengan kepemimpinan organisasi militer (tokoh militer)<sup>181</sup>. Ciri-ciri pemimpin yang menggunakan tipe kepemimpinan militer atau militer ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemimpin yang menggunakan tipe kepemimpinan militer ini biasanya menggunakan sistem komando atau komando atas bawahannya. Artinya

---

<sup>180</sup>"Biografi Presiden - Situs Web Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia."

<sup>181</sup>"INA-Rxiv Papers | PERISTIWA MUNDURNYA SOEHARTO DARI JABATAN PRESIDEN INDONESIA," t.t.

pemimpin yang menggunakan tipe kepemimpinan ini keras, kaku dan tidak bijaksana, sehingga pemimpin yang menggunakan tipe kepemimpinan ini selalu menuntut kepatuhan mutlak dari bawahannya.

- b. Pemimpin yang menggunakan tipe kepemimpinan militer ini menyukai formalitas seperti ritual dan menampilkan keangkuhan yang berlebihan. Jadi maksud dari kalimat di atas adalah bahwa seorang pemimpin yang menggunakan kepemimpinan militer jenis ini selalu memperingati hari-hari besar negara dengan mengadakan upacara sebagai tanda bahwa dia telah memperingati hari-hari besar negara<sup>182</sup>.
- c. Pemimpin yang menggunakan tipe kepemimpinan militer ini selalu menuntut disiplin yang tegas dan kaku dari bawahannya. Jadi, maksud dari pernyataan di atas adalah bahwa seorang pemimpin yang menggunakan tipe kepemimpinan ini selalu menerapkan aturan yang mutlak dan harus dipatuhi oleh rakyatnya, sehingga tidak mengherankan jika pemimpin tidak menerima saran, rekomendasi, rekomendasi dan kritik darinya. . Dengan kata lain, komunikasi hanya dapat dilakukan satu arah. Salah satu pemimpin yang menggunakan tipe kepemimpinan militer ini adalah Suharto yang menjabat sebagai Presiden ke-2 Republik Indonesia karena Suharto sudah memiliki ciri-ciri tipe kepemimpinan militer yaitu pemimpin yang menggunakan tipe kepemimpinan militeristik ini selalu menuntut ketegasan. dan Disiplin yang kaku dari bawahannya. Jadi, maksud dari pernyataan di atas adalah bahwa seorang pemimpin yang menggunakan tipe kepemimpinan ini selalu menerapkan aturan yang mutlak dan harus dipatuhi oleh rakyatnya, sehingga tidak mengherankan jika pemimpin tidak menerima saran, rekomendasi, rekomendasi dan kritik darinya. . Dengan kata lain, komunikasi hanya Suharto yang menggunakan gaya kepemimpinan militeristik karena dipengaruhi oleh latar belakangnya sebelum menjadi Presiden ke-2 Republik Indonesia. Suharto adalah seorang jenderal yang terbiasa menggunakan sistem komando dalam menjalankan tugasnya. Tidak heran jika perintah atau peraturan dibuat dan diberlakukan. dengan Suharto selalu kaku, kompulsif

---

<sup>182</sup>"INA-Rxiv Papers | PERISTIWA MUNDURNYA SOEHARTO DARI JABATAN PRESIDEN INDONESIA."

dan absolut. Apalagi pada masa kepemimpinan Suharto sebenarnya ada keselarasan antara dirinya dengan ABRI, dibuktikan dengan kebijakan dwi peran ABRI pada masa Orde Baru. Dwifungsi ABRI ini berarti ABRI memiliki dua fungsi yaitu fungsinya sebagai Garda Pertahanan, Keamanan Nasional Indonesia dan ABRI juga diperbolehkan untuk terlibat dalam segala kegiatan politik, sehingga tidak heran pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinannya. Suharto banyak ABRI memegang posisi politik<sup>183</sup>.

## 2. Tipe otokratis

Tipe kepemimpinan otokratis ini juga sering disebut sebagai tipe kepemimpinan otoriter, walaupun keduanya memiliki dua suku kata yang berbeda, namun otokratis atau otoriter memiliki arti yang sama, yaitu didasarkan pada kekuasaan atau kewenangan yang sebagian besar bersifat mutlak dalam kepemimpinan. dengan kata lain, tipe kepemimpinan. Tipe ini dipandang sebagai tipe yang didasarkan pada kekuasaan posisi dan kekuasaan, apalagi pemimpin yang menggunakan tipe otokratis ini menganut sistem otoritas terpusat, maka setiap kebijakan dan aturan ditentukan, tanpa bawahan, pemimpin tipe ini, untuk berunding paling banyak. menginginkan kekuasaan mutlak, lajang dan menguasai keadaan. Tipe kepemimpinan otokratis yang digunakan seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya memiliki karakteristik yang menjadi ciri kepemimpinannya<sup>184</sup>. Sifat-sifat tersebut adalah sebagaiberikut:

a. sebuah. Pemimpin yang menggunakan tipe kepemimpinan otokratis ini selalu memberi perintah, yang selalu dipaksakan dan harus selalu dipatuhi oleh bawahan atau rakyatnya<sup>185</sup>.

b. Seorang pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan jenis ini selalu menetapkan kebijakan yang berlaku untuk semua pihak tanpa harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan anggota organisasi atau pejabat pemerintah lainnya<sup>186</sup>.

---

<sup>183</sup>"INA-Rxiv Papers | PERISTIWA MUNDURNYA SOEHARTO DARI JABATAN PRESIDEN INDONESIA."

<sup>184</sup>"INA-Rxiv Papers | PERISTIWA MUNDURNYA SOEHARTO DARI JABATAN PRESIDEN INDONESIA."

<sup>185</sup>"INA-Rxiv Papers | PERISTIWA MUNDURNYA SOEHARTO DARI JABATAN PRESIDEN INDONESIA."

<sup>186</sup>"INA-Rxiv Papers | PERISTIWA MUNDURNYA SOEHARTO DARI JABATAN PRESIDEN INDONESIA."

c. Seorang pemimpin yang menggunakan jenis kepemimpinan otokratis ini tidak pernah memberikan informasi rinci tentang rencana masa depan, tetapi hanya memberi pengarahan kepada setiap anggota organisasinya tentang langkah-langkah yang harus mereka ambil segera. Pada dasarnya manajer yang menggunakan tipe kepemimpinan otokratis ini memiliki sikap dan prinsip yang sangat konservatif, ketat dan kaku yang selalu didasarkan pada struktur dan tugas. Biasanya pemimpin yang menggunakan kepemimpinan otokratis seperti ini dalam kepemimpinannya akan bersikap baik kepada anggota organisasinya selama anggota organisasi tersebut mau mematuhi pemimpinnya secara mutlak. Diantara pemimpin yang menggunakan tipe kepemimpinan otokratis atau otoriter ini adalah Suharto, karakter ini sudah memiliki ciri atau ciri dari tipe kepemimpinan otokratis karena menggunakan gaya kepemimpinan otokratis serta menetapkan pedoman/pedoman yang bersifat umum bagi semua pihak. Tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan anggota organisasi atau dengan pejabat pemerintah lainnya. Kemudian kedua tokoh ini adalah eksekutif yang menggunakan tipe kepemimpinan otokratis ini dan tidak pernah memberikan informasi rinci tentang rencana masa depan, tetapi hanya memberi tahu setiap anggota organisasi mereka tentang langkah-langkah yang harus mereka ambil segera<sup>187</sup>.

### **3. Menurut teori Aristoteles,**

Negara dibentuk oleh penggabungan keluarga menjadi kelompok yang lebih besar, kelompok ini bergabung dengan kelompok lain untuk memenuhi rasa keadilan. Jika ada keadilan, maka akan tercipta kebahagiaan dan negara yang menjunjung tinggi nilai keadilan. Banyak warga yang berpartisipasi dalam diskusi tersebut. Dengan keadilan, masyarakat dapat berkumpul dengan damai, tanpa kekerasan dalam hidup. Semua bisa berjalan dengan aman, damai dan nyaman. Namun, dalam kebersamaan pasti ada yang mencari kesempurnaan dan kepuasan pribadi. Tidak peduli dengan orang lain. Namun dalam kepemimpinannya, Suharto tidak adil kepada rakyat, seperti tidak adanya kebebasan berpendapat, yang menghalangi pers, banyak surat kabar dan majalah yang dilarang. Tidak ada komunitas yang terlibat dalam konsultasi. Dalam kepemimpinannya, Suharto

---

<sup>187</sup>“INA-Rxiv Papers | PERISTIWA MUNDURNYA SOEHARTO DARI JABATAN PRESIDEN INDONESIA.”

lebih mementingkan dirinya sendiri daripada masyarakat. Ada penembak jitu yang digunakan oleh rakyat ketika mereka melawan dan tidak menuruti keinginan Suharto. Sehingga masyarakat tidak bebas dan tidak aman selama kepemimpinan Suharto<sup>188</sup>.

#### **4. Menurut teori Plato,**

Kebutuhan manusia atau individu berbeda dan mereka harus bersatu dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan bersama itu. Kesatuan individu inilah yang kemudian disebut oleh masyarakat sebagai bangsa. Dalam kerjasama diperlukan struktur yang sama sebagai karakteristik individu. Pembangunan yang tidak merata menciptakan kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sehingga sebagian besar kekayaan daerah dialihkan ke pusat, terutama di Aceh dan Papua. Karena perbedaan pendapat yang timpang antara si kaya dan si miskin menyebabkan ketimpangan sosial dalam masyarakat. Orang kaya merasa lebih nyaman di segala bidang<sup>189</sup>.

Setelah itu, orang ingin menunjukkannya kepada Presiden, tetapi sayangnya mereka tidak berani, tetapi para mahasiswa yang mengetahui hal ini memprotes keadilan dari 5 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998. Semua mahasiswa dari berbagai universitas turun ke jalan untuk menuntut keadilan bagi Presiden. Mahasiswa menginginkan pergantian presiden karena banyak terjadi kekerasan dan perilaku tidak profesional di tempatnya selama kepemimpinannya. Saat mahasiswa berdemonstrasi di sekitar gedung MPR/DPR, polisi menjaga gedung dengan ketat. Kemudian, hari demi hari, jumlah mahasiswa yang berdemonstrasi untuk menggulingkan Soeharto sebagai presiden semakin meningkat<sup>190</sup>.

### **Kebijakan politik soeharto**

#### **Sepintas historis**

Menurut Soemardjan (1976:153), setelah berakhirnya Perang Dunia II, program pembangunan sosial politik terutama yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi mendapat prioritas tertinggi di hampir semua negara.

---

<sup>188</sup>"INA-Rxiv Papers | PERISTIWA MUNDURNYA SOEHARTO DARI JABATAN PRESIDEN INDONESIA."

<sup>189</sup>"INA-Rxiv Papers | PERISTIWA MUNDURNYA SOEHARTO DARI JABATAN PRESIDEN INDONESIA."

<sup>190</sup>"INA-Rxiv Papers | PERISTIWA MUNDURNYA SOEHARTO DARI JABATAN PRESIDEN INDONESIA."

Telah lama diketahui bahwa pembangunan di negara maju terdiri dari proses percepatan kelangsungan hidup dan pola kerja masa lalu. Sementara itu, bagi negara berkembang termasuk Indonesia (pada masa Orde Baru), pembangunan merupakan proses penghilangan beberapa faktor sosial budaya secara bertahap, diikuti dengan upaya yang rumit untuk beradaptasi dengan situasi, teknologi, dan praktik baru yang baru. -Bentuk organisasi dan mekanisme kerja baru<sup>191</sup>.

Berbicara tentang konteks pembangunan, tidak dapat dihindari untuk membahas konsep Lucian W. Pye (1976:33-34) dalam konteks tesisnya bahwa "pembangunan politik dipandang sebagai prasyarat politik untuk pembangunan ekonomi". Menurutnya, perhatian harus diberikan pada masalah pembangunan ekonomi dan kebutuhan untuk mengubah ekonomi statis menjadi ekonomi terbuka yang dapat merosot dengan sendirinya. Kenyataannya, begitu pula para ekonom, yang menunjukkan bagaimana kerangka sosial dan politik dapat memainkan peran penting dalam menghambat atau memfasilitasi kemajuan pendapatan per kapita.

Oleh karena itu, pemerintahan Orde Baru berkaitan dengan perwujudan pembangunan nasional berdasarkan suatu konsep yang telah mapan pada masanya dan selalu disosialisasikan dan diindoktrinasi, yaitu konsep trilogi pembangunan yang memuat tiga pokok pokok yaitu. : (1) pemerataan pembangunan; (2) pertumbuhan ekonomi; dan (3) stabilitas nasional<sup>192</sup>.

Di bidang ekonomi, upaya perbaikan dimulai dengan program stabilisasi dan pemulihan ekonomi. Program ini disampaikan sesuai dengan skala prioritas yang meliputi:

1. pengendalian inflasi;
2. Kebutuhan nutrisi yang cukup;
3. pemulihan infrastruktur ekonomi;
4. Peningkatan ekspor; dan

---

<sup>191</sup>Yeby Ma'asan Mayrudin, "MENELISIK PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL DI ERA PEMERINTAHAN SOEHARTO," *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)* 4, no. 1 (Desember 2018): 71–90.

<sup>192</sup>Mayrudin.

5. Persyaratan pakaian yang memadai.

## **Kehidupan Politik Masa Orde Baru**

### **A. Penataan Stabilitas Politik Pembubaran PKI dan Organisasi Massanya**

Kita tentu tahu bahwa Partai Komunis Indonesia adalah salah satu partai yang dilarang oleh rakyat Indonesia. Selain bertentangan dengan falsafah nasional Pancasila, PKI juga dituding sebagai penyebab terjadinya gerakan 30 September 1965. Oleh karena itu, langkah pertama Presiden Soeharto adalah membubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya dimulai ketika Letjen Suharto menerima amanat Orde Sebelas Maret. Melalui legitimasi ini, ia mengambil beberapa langkah untuk menjamin keamanan dan stabilitas pemerintahan. Pada tanggal 12 Maret 1966 dikeluarkan surat keputusan yang berisi tentang pembubaran dan larangan PKI dan ormas-ormas yang mencari perlindungan dan perlindungan atau sejenisnya untuk melakukan kegiatan di wilayah Indonesia. Keputusan ini kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Presiden/Panti ABRI/MPRS Amanat No. 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966. Pada tanggal 18 Maret 1966, Letjen Suharto menemukan 15 menteri yang diduga terlibat dalam G30S/PKI. Setelah itu, dia mereformasi kabinet Dwikora yang lebih baik dan membersihkan lembaga legislatif, termasuk MPRS dan DPRGR<sup>193</sup>.

### **B. Penyederhanaan Partai Politik**

Coba tebak ada berapa partai politik di Indonesia saat ini? Tentu tidak banyak. Tahukah Anda bahwa dulu kita hanya memiliki 3 partai politik? Bisakah Anda memberi tahu saya pesta mana itu? Anda pasti ingin tahu kenapa hanya ada 3 partai politik di Indonesia saat itu? Tidak semua orang tidak ingin mendirikan partai, tetapi sistem 3 partai merupakan salah satu kebijakan Presiden Suharto di bidang politik, keadaan ini sebenarnya berlangsung cukup lama dari tahun 1973 sampai 1999. Penyederhanaan atau penggabungan partai pada tahun 1973, kebijakan Presiden Suharto adalah untuk menciptakan stabilitas politik dalam

---

<sup>193</sup>"Orde Baru," t.t.

kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan ini dipandang sebagai syarat terpenting bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Mengapa demikian? Orde baru diharapkan tidak lagi berdasarkan ideologi dan politik, tetapi pada program ekonomi. Menurut pemerintah Orde Baru, ketidakstabilan politik yang terjadi pada masa lalu (Orde Lama) disebabkan oleh sistem kepartaian. Pahami juga bahwa saat itu banyak partai politik yang melahirkan banyak ideologi dan kepentingan dalam waktu yang bersamaan. Partai politik sulit dikendalikan dan akhirnya terjadi gerakan yang membahayakan bangsa dan negara. Hal inilah yang melatarbelakangi perlunya mengkombinasikan kendaraan politik. Penggabungan partai-partai pemerintah pada tahun 1973 tidak didasarkan pada ideologi tetapi pada kesamaan program. Jadi semoga kita bisa membantu pemerintah bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik<sup>194</sup>.

### **C. Pemilihan Umum Masa Orde Baru**

Kalian pasti tahu kenapa negara kita mengadakan pemilihan umum? Ya memang benar, pemilihan umum adalah ciri utama negara demokrasi seperti negara kita Indonesia. Pemilu di era Orde Baru memang unik dibandingkan dengan pemilu yang berlangsung sebelum dan sesudahnya. Seperti yang Anda pelajari di atas, keunikan ini disebabkan oleh kebijakan penggabungan partai, sehingga hanya 3 partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan federal sejak tahun 1977. Pemilihan itu sendiri berlangsung enam kali selama reorganisasi, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Pada pemilu 1971 peserta partai masih cukup banyak yaitu 10 partai politik, pada pemilu kali ini kelompok Karya. mendapat suara terbanyak. Pemilu berikutnya dimulai tahun 1977 hingga 1997, partai-partai peserta pemilu diikuti oleh tiga partai politik yaitu PPP, Golkar dan PDI<sup>195</sup>.

### **D. Dwi fungsi ABRI**

Konsep dwifungsi ABRI muncul dari Jenderal A.H. Konsep “jalan tengah” dikemukakan oleh Nasution. Peran ganda ABRI dilaksanakan untuk memberikan kesempatan yang luas bagi perwira militer untuk berpartisipasi di bidang

---

<sup>194</sup>“Orde Baru.”

<sup>195</sup>“Orde Baru.”

non-militer. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas politik. Melalui dua peran ABRI tersebut, perwira militer menduduki posisi penting pada masa Orde Baru, seperti walikota, gubernur, duta besar, hakim dan lain-lain. Peninggalan peran ganda ABRI masih dapat ditemukan, meskipun implementasi dan kebijakannya telah dihilangkan. Salah satu kelalaian tersebut adalah banyaknya nama jalan, terutama di daerah yang menggunakan nama AMD. AMD sendiri merupakan singkatan dari ABRI Memasuki Desa. Salah satu program pemerintah terkait pembangunan desa adalah pengabdian kepada masyarakat. Program dwifungsi ABRI dihapuskan sejalan dengan Agenda Reformasi 98 yang menandai berakhirnya rezim Orde Baru<sup>196</sup>.

## **E. Kebijakan Politik Luar Negeri Masa Orde Baru**

Dasar politik luar negeri Orde Baru telah diatur dengan undang-undang dalam Keppres No. XII/MPRS/1966. Menurut Ketetapan MPRS, politik luar negeri Indonesia secara keseluruhan terikat pada kepentingan nasional. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri Indonesia yang independen dan aktif tidak boleh berpihak pada blok ideologis yang ada. Sebagai wujud pelaksanaan politik luar negeri yang mandiri dan aktif pada masa Orde Baru, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut<sup>197</sup>.

### **a. Normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia**

Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia setelah Presiden Soekarno mengumumkan Dwikora pada 3 Mei 1964. Tindakan pemerintah Orde Lama jelas menyimpang dari pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif<sup>198</sup>.

Normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia berhasil dicapai dengan ditandatanganinya Perjanjian Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1966. Perjanjian Normalisasi Indonesia-Malaysia merupakan hasil perundingan Bangkok (29 Mei-1 Juni 1966). Perundingan tersebut dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Malaysia Tun Abdul Razak dan Menlu/Menlu

---

<sup>196</sup>“Orde Baru.”

<sup>197</sup>“Kebijakan Politik Luar Negeri Masa Orde Baru,” t.t.

<sup>198</sup>“Kebijakan Politik Luar Negeri Masa Orde Baru.”

Indonesia Adam Malik. Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian Bangkok<sup>199</sup>.

Perjanjian Bangkok memuat tiga poin utama, sebagai berikut.

- Rakyat Sabah dan Sarawak akan diberi kesempatan untuk menegaskan kembali keputusan yang diambil terkait posisi mereka di Federasi Malaysia.
- Kedua pemerintah sepakat untuk melanjutkan hubungan diplomatik.
- Kedua pemerintah menghentikan segala bentuk permusuhan.

#### **b. Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)**

Indonesia pernah menjadi anggota aktif Perserikatan Bangsa-Bangsa pada masa pemerintahan Soekarno, tepatnya pada tanggal 28 September 1950. Perkembangan yang sering terjadi pada Soekarno memutuskan bahwa Indonesia akan keluar dari badan dunia pada tanggal 1 Januari 1965. Alasan utama keluarnya Indonesia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah masuknya Malaysia sebagai anggota tidak tetap PBB<sup>200</sup>.

Setelah penyerahan kekuasaan dari Sukarno ke Suharto pada tahun 1966, Indonesia sekali lagi memutuskan untuk kembali ke PBB pada 28 September. Dasarnya adalah politik luar negeri Indonesia yang mandiri dan aktif. Kegiatan Indonesia di PBB tergambar melalui terpilihnya Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk sidang tahun 1974<sup>201</sup>.

#### **c. Pemerksa ASEAN**

Kegiatan Indonesia dalam hubungan luar negeri juga dibuktikan dengan berdirinya ASEAN. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN adalah perkumpulan negara-negara Asia Tenggara yang didasarkan pada kesetiaan, persahabatan, dan kerja sama. Organisasi ini didirikan pada tanggal 8

---

<sup>199</sup>"Kebijakan Politik Luar Negeri Masa Orde Baru."

<sup>200</sup>"Kebijakan Politik Luar Negeri Masa Orde Baru."

<sup>201</sup>"Kebijakan Politik Luar Negeri Masa Orde Baru."

Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Indonesia diwakili oleh Adam Malik memelopori pembentukan ASEAN dengan menandatangani Deklarasi Bangkok<sup>202</sup>.

## **F. Kehidupan Ekonomi Masa Orde Baru**

Pada awal kelahirannya, Orde Baru memfokuskan programnya pada pembangunan ekonomi salah satu program yang berhasil seperti Repelita dalam swasembada beras pada 1980 hingga disebut Macan Asia. Pada situasi ekonomi Indonesia pada awal Orde Baru yang cukup bermasalah, sehingga fokus ekonomi harus didasarkan pada amanat Pancasila untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam programnya, pemerintah Orde Baru membuat dua kebijakan ekonomi, yaitu jangka panjang dan jangka pendek<sup>203</sup>.

### **Program jangka pendek**

Presiden Soeharto menghadapi masalah yang cukup sulit di bidang ekonomi pada awal pemerintahannya. Berbagai permasalahan pun muncul, seperti inflasi B. yang mencapai 650% sehingga menyebabkan kenaikan harga kebutuhan sehari-hari. Selain itu, fasilitas produksi mengalami kerusakan terutama di sektor pertanian. Masalah ini mengakibatkan kurangnya kekayaan bagi masyarakat Indonesia. Pemulihan dan stabilitas ekonomi menjadi kebijakan pertama pemerintah Orde Baru untuk memulihkan keadaan ini. Rehabilitasi berarti perbaikan fisik prasarana dan sarana produksi. Dan stabilitas bertujuan untuk mengendalikan inflasi agar harga tidak terus naik. Program stabilitas dan pemulihan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru telah membuahkan hasil yang cukup baik. Tingkat inflasi yang semula 650% berhasil diturunkan menjadi 120 pada tahun 1969. Kerusakan infrastruktur mulai diperbaiki dan diperbaharui. Pemerintah Orde Baru siap menjalankan program jangka panjang, khususnya di bidang pertanian<sup>204</sup>.

### **b. program jangka panjang**

---

<sup>202</sup>"Kebijakan Politik Luar Negeri Masa Orde Baru."

<sup>203</sup>"Kehidupan Ekonomi Masa Orde Baru," t.t.

<sup>204</sup>"Kehidupan Ekonomi Masa Orde Baru."

Pada tanggal 1 April 1969, pemerintah membentuk suatu landasan pembangunan yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita I (1969) berfokus pada rehabilitasi infrastruktur penting dan pengembangan iklim usaha dan investasi. Repelita II (1974-1979) dan Repelita III (1979-1984) menitikberatkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi komoditas. Fokus Repelita IV (1984-1989) dan Repelita V (1989-1994), selain berusaha mempertahankan kemajuan di sektor pertanian, juga difokuskan pada sektor industri, khususnya industri yang menghasilkan barang-barang ekspor, yaitu industri yang menyerap tenaga kerja, pengolahan produk pertanian dan industri yang dapat menghasilkan mesin industri<sup>205</sup>.

---

<sup>205</sup>“Kehidupan Ekonomi Masa Orde Baru.”

**Kelebihan orde baru :**

1. PDB per kapita Indonesia meningkat, dari hanya \$70 pada tahun 1968 menjadi lebih dari \$1.000 pada tahun 1996.
2. Pada masa Orde Baru, program KB berhasil dilaksanakan.
3. Gizi dasar yang cukup diperlukan untuk mengurangi dampak malnutrisi.
4. Keamanan internal diperkuat dan diperkuat.
5. Pengurangan buta huruf. Semoga kita bisa mengurangi pengangguran.
6. Keberhasilan gerakan wajib belajar dan keberhasilan gerakan orang tua angkat.
7. Berhasil mempromosikan nasionalisme dan kecintaan pada produk lokal.

**Kelemahan orde baru:**

1. Apalagi pada tahun 1990-an banyak terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
2. Karena pembangunan yang tidak seimbang menimbulkan kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, karena sebagian besar kekayaan daerah dialihkan ke pusat, terutama di Aceh dan Papua.
3. Mereka sering menyebarkan rasisme dan tidak menghormati hak asasi manusia
4. Karena perbedaan pendapat antara si kaya dan si miskin menimbulkan ketimpangan sosial di masyarakat. Merasa lebih kaya di semua bidang.
5. Kebebasan pers dibatasi dan banyak surat kabar dan majalah dilarang.
6. Ada program "Penembak Misterius" (Peter) untuk memberikan keamanan. Jika ada yang menghina atau memprotes Suharto malam itu, orang itu akan diculik atau ditembak secara misterius.
7. Tidak ada kebebasan berbicara.

## BAB X

### BJ. HABIBIE

#### A. BIOGRAFI (SEJARAH KEPEMIMPINAN)

Bacharuddin Jusuf Habibie, lahir di Pare pada tahun 1963 beliaulah di Pare pada tahun 1936<sup>206</sup>. Beliau mengenyam pendidikan teknik mesin di Universitas Indonesia Bandung (yang sekarang bernama Institut Teknologi Bandung) pada tahun 1954 dan pada tahun 1955-1965 beliau melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen, Jerman Barat dan menerima gelar diploma dengan predikat summa cumlaude. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei 1962, dan dikarunia dua orang putra yaitu Ilham Akbar Habibie dan Thareq Kemal Habibie. BJ. Habibie dikenal sebagai yang cerdas bahkan beliau berhasil membuat pesawat N250 Gatot Kaca<sup>207</sup> yaitu pesawat pertama buatan Indonesia. Karir seorang BJ. Habibie terus meningkat, beliau pernah menjabat Menteri Negara dan Riset ke 4 pada 29 Maret 1978 sampai 11 Maret 1998<sup>208</sup>. Sebelum menjabat sebagai presiden, Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden (14 Maret 1998 – 21 Mei 1998) dalam kabinet Pembangunan VII di bawah Presiden Soeharto. Beliau diangkat menjadi ketua umum ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), pada masa jabatannya sebagai menteri.

Pada tahun 1998 Indonesia mengalami gejolak dimana adanya krisis moneter dan juga protes besar-besaran yang menuntut presiden Soeharto mundur dari jabatannya, hingga akhirnya presiden Soeharto mundur dari jabatannya pada 21 Mei 1998 kemudia Bacharuddin Jusuf Habibie dilantik menjadi presiden Republik Indonesia ke 3 menggantikan Soeharto. Pengangkatan Habibie menjadi presiden menimbulkan beberapa kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Pihak yang pro menganggap

---

<sup>206</sup>Lihat lebih lanjut di Biografi Bacharuddin Jusuf Habibie [https://id.wikipedia.org/wiki/B.\\_J.\\_Habibie](https://id.wikipedia.org/wiki/B._J._Habibie) diakses pada 21 Oktober 2022.

<sup>207</sup> Lebih lanjut di Pesawat N-250 Gatot Kaca <https://id.wikipedia.org/wiki/N-250> diakses pada tanggal 21 Oktober 2022.

<sup>208</sup> Bacharuddin Jusuf Habibie. 2006. *Deti-detik yang Menentukan*. Jakarta : THC Mandiri hlm 547

pengangkatan Habibie sudah konstitusional. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada UUD 1945 pasal 8 ayat (1) yang berisi “bila presiden magkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya”<sup>209</sup>. Sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa pengangkatan Habibie dianggap tidak konstitusional karena bertentangan dengan ketentuan pasal 9 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “sebelum presiden memangku jabatan maka presiden harus mengucapkan sumpah atau janji di depan MPR atau DPR”.

Bacharuddin Jusuf Habibie mewarisi kondisi negara yang kacau selepas pengunduran diri Soeharto pada masa orde baru, yang menimbulkan kerusuhan dan disintegrasi di hampir seluruh Indonesia. Salah satunya Tragedi Semanggi yang menelan banyak korban diantaranya luka-luka dan korban jiwa, pengusutan harta kekayaan Soeharto dan keluarganya, menaikkan kembali mata uang Rupiah terhadap Dollar yang menyebabkan krisis ekonomi yang melanda Indonesia serta pembebasan para tahanan politik yang ditahan selama masa pemerintahan Orde Baru, lebih khusus adalah PBB yakni permasalahan kasus Hak Asasi Manusia yang terjadi di Timor Timur. Setelah pemberian kekuasaan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie membentuk sebuah kabinet dengan tugas mendapatkan kembali dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi.

Tugas pokok kabinet tersebut adalah menyiapkan proses reformasi di bidang politik, hukum, dan ekonomi. Di bidang politik memperbarui berbagai perundangan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik sebagaimana diamanatkan GBHN (Garis Besar Haluan Negara). Di bidang hukum meninjau kembali undang-undang subversi. Di bidang ekonomi mempercepat penyelesaian undang-undang yang menghilangkan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat<sup>210</sup>.

---

<sup>209</sup> Agung Maha Rani. GAYA KEPEMIMPINAN BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE PASCA ORDE BARU TAHUN 1998-1999. Jurnal ilmu pemerintahan. Volume 2 No 2. Oktober 2015. Hlm 3.

<sup>210</sup> A.Makmur Makka, Buku Biografi Bacharuddin Jusuf Habibie “Dari Ilmuwan ke Negarawan sampai Minandito” (Kota Jakarta : PT. THC Mandiri :2012), hal 180.

## B. TEORI KEPEMIMPINAN

Kepemimpinan adalah suatu teori yang menjelaskan bagaimana cara seseorang memimpin sebuah kelompok maupun organisasinya demi membawa kelompok atau organisasi tersebut menuju tujuan yang sudah dicita-citakannya. Teori kepemimpinan adalah penggeneralisasian satu seri perilaku pemimpin dan konsep-konsep kepemimpinannya, dengan menonjolkan latar belakang historis, sebab musabab timbulnya kepemimpinan, persyaratan menjadi pemimpin, tugas pokok dan fungsinya, serta etika profesi kepemimpinan<sup>211</sup>. Menurut teori yang dikemukakan oleh Terry Frankin tahun 1982 menjelaskan bahwa mendefinisikan kepemimpinan sebagai hubungan dimana pemimpin mempengaruhi orang lain untuk mau bekerjasama melaksanakan tugas-tugas yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

BJ. Habibie adalah seorang presiden ke-3 RI yang menjabat pada tahun (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999), beliau pemimpin yang cerdas dan berani mengambil resiko. Bahkan presiden Soeharto pernah berkata “jikalau Dr. Habibie dapat memimpin orang Jerman mengembangkan teknologi untuk membuat pesawat terbang, maka saya yakin Dr. Habibie mampu memimpin bangsa Indonesia membuat apa saja dan dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang sangat kita butuhkan<sup>212</sup>.”

Gaya kepemimpinan BJ. Habibie selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dapat dilihat dari kebiasaan beliau sehari-hari, ataupun dapat dilihat dari kebiasaan sehari-hari atau latar belakang yang membentuk kepribadiannya. Gaya kepemimpinan Habibie lebih cenderung pada perilaku pemimpin yang memberi pertimbangan sendiri dan rangsangan intelektual (Hasibuan : 2001). Hal tersebut dinamai Gaya Kepemimpinan Transformasional yang memiliki sifat revolusioner dan aktif.

Gaya kepemimpinan transformasional merupakan hasil perkembangan pemikiran beberapa teoritis kepemimpinan yang memiliki

---

<sup>211</sup> Kartono, Kartini. 1994. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada hlm 31.

<sup>212</sup> Arimbi Bimoseno. 2014. *Pesawat Habibie Sayap-sayap Mimpi Indonesia*. Jakarta: kata media hlm 55.

ciri selalu memulai dengan perubahan baik dari diri sendiri maupun dari luar. Pemimpin transformasional selalu menetapkan hal yang menantang dan memiliki harapan yang lebih tinggi di banding dengan gaya kepemimpinan lainnya. Pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan transformasional sering memainkan peranan langsung dalam menciptakan perubahan, membangun advokasi arah baru, serta membangun visi dan misi<sup>213</sup>. Kepemimpinan dengan gaya transformasional adalah kepemimpinan yang dapat memotivasi untuk dapat terus berprestasi melampaui harapan yang sudah direncanakan.

Konsep Kepemimpinan Transformasional dikemukakan oleh James MacGregor Burns (1979) pada bukunya yang mendapat penghargaan Pulitzer Prize dan National Book Award yang berjudul *Leadership*. Dalam buku tersebut, Burns menggunakan istilah kepemimpinan transformasi. Bass memformulasikan pengertian konsep kepemimpinan transformasional berbeda dengan Burns. Latar belakang pendidikan mereka inilah yang membuat pandangan masing-masing berbeda. Burns seorang ilmuwan politik dan Bass merupakan psikologi industri, maka pola pikir mereka untuk terkait hal ini berbeda.

Menurut Bass dalam buku karya Wirawan (2013 : 141) istilah kepemimpinan Transformasional merupakan upaya pemimpin yang mentransformasi para pengikut dari satu tingkat kebutuhan rendah hierarki kebutuhan ke tingkat kebutuhan lainnya yang lebih tinggi menurut Teori Motivasi Abraham Maslow. Pemimpin dapat mentransformasi harapan untuk suksesnya pengikut, serta nilai-nilai, dan mengembangkan budaya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pemimpin melalui kepemimpinan unu pengikut dapat mencapai kinerja yang sangat melebihi harapan pemimpin (*performance beyond expectations*).

Pada buku yang ditulis oleh beliau sendiri menjelaskan bagaimana beliau ingin merubah warisan ke otoriteran dan feodalnya pemerintahan yang sudah lama berkembang selama 53 tahun, beliau ingin mengubah

---

<sup>213</sup> Isnaini Muallidin. Kepemimpinan transformasional dalam kajian teoritik dan empiris. Paper leadership jurusan ilmu administrasi publik. Hlm 10

tersebut dalam waktu yang cepat agar bangsa Indonesia yang demokratis dan transparan dapat beliau pimpin<sup>214</sup>

BJ. Habibie juga beranggapan bahwa presiden merangkap wakil presiden dan koordinator harian besar keluarga Golkar yang memiliki suara mayoritas pada jajaran MPR dan DPR yang jelas sangat tidak sehat dan tidak menguntungkan objektivitas pimpinan nasional dan kualitas reformasi<sup>215</sup>, dengan begitu beliau memutuskan untuk segera melakukan reformasi Golkar menjadi suatu partai politik dan membubarkan keluarga besar Golkar. Maka dari itu presiden dapat bertindak lebih objektif, bermoral baik, dan tidak mementingkan kepentingan pribadi, keluarga serta golongan, kecuali kepentingan masyarakat Indonesia.

Salah satu contoh bentuk penerapan gaya kepemimpinan transformasional pada era BJ Habibie yakni ketika Indonesia dihadapkan dengan kasus krisis ekonomi. Krisis yang mendera Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 berdampak buruk pada perekonomian. GNP per kapita menurun sampai hampir dua per tiga dibandingkan dengan sebelumnya atau ganya US\$ 400 pada tahun 1998. Inflasi akumulatif pada tahun 1998 mencapai 77,63 %. Angka pengangguran tercatat bertambah 17,1% atau sekitar 15,4 juta dari angkatan kerja. Jumlah dari penduduk miskin mencapai 40% dari jumlah penduduk Indonesia. BJ. Habibie menentukan bahwa prioritas utama yang harus dilakukan adalah mengatasi krisis ekonomi dengan mencegah memburuknya kondisi perekonomian nasional dan dilanjutkan dengan pemulihan ekonomi.

Presiden BJ. Habibie menyatakan keyakinannya bahwa kemerosotan ekonomi dapat dihentikan dalam tahun 1999 dan permulaan tahun 2000 akan dimulai satu fase pertumbuhan ekonomi baru. “Berbagai upaya akan dilakukan untuk membuat perubahan ekonomi ke arah yang lebih baik,” ucap BJ. Habibie<sup>216</sup>. Masalah ekonomi yang dihadapi oleh beliau luar biasa sulit. Namun BJ. Habibie menyelesaikan permasalahan ini dengan dua sisi : yakni sisi ekonomi dan sisi politik sekaligus untuk

---

<sup>214</sup>Bacharuddin Jusuf Habibie. 2006. *Deti-detik yang Menentukan*. Jakarta : THC Mandiri hlm 73

<sup>215</sup>Bacharuddin Jusuf Habibie. 2006. *Deti-detik yang Menentukan*. Jakarta : THC Mandiri hlm 73

<sup>216</sup>*Asiaweek*, 4 September 1998.

dapat menghasilkan perbaikan kondisi yang berkesinambungan dan menciptakan pemerintahan yang kuat.

Langkah yang diambil oleh beliau untuk mengatasi krisis ekonomi dengan mengambil dua sasaran pokok. Pertama, menjaga ketersediaan bahan makanan dan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau. Kedua, mempertahankan kelangsungan perputaran roda perekonomian nasional<sup>217</sup>. Agar dapat mencapai tujuan tersebut presiden BJ. Habibie membuat tiga program : program jangka pendek, program jangka menengah, dan program jangka panjang.

Program jangka pendek dengan mengurangi beban masyarakat, diutamakan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah yang terkena dampak krisis ekonomi. Meliputi program jaring pengaman sosial (JPS), penyediaan kebutuhan rakyat serta pengendalian harga. Pelaksanaan program ini bersamaan dengan diterapkan kebijakan moneter ketat untuk meredam gejolak spekulatif dan mendorong kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Program jangka menengah, upaya penyehatan sistem perbankan untuk membangkitkan kepercayaan dan kegiatan dunia usaha, khususnya investor luar negeri, dan pengendalian laju inflasi serta berbagai upaya reformasi struktural untuk memperkuat landasan perekonomian nasional dengan meningkatkan efisiensi dan daya saing. Program jangka panjang, sedang dalam pelaksanaan landasan bagi perekonomian yang maju, modern, mandiri, dan berkualitas, terbuka seluas-luasnya bagi semua pihak berkesempatan untuk berperan dan menikmati hasil pembangunan. Kini sedang dibangun institusi ekonomi agar dapat berfungsi dengan baik dalam sistem ekonomi yang beorientasi ke pasar dalam negeri dan global<sup>218</sup>.

Keinginan untuk melakukan perubahan dan pembaruan dalam reformasi ekonomi mencakup usaha mulai dari mengatasi krisis ekonomi, memberdayakan ekonomi rakyat, memperkuat kelembagaan perekonomian, mendorong persaingan sehat, sampai pemberantasan KKN dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Berbagai upaya untuk mengatasi

---

<sup>217</sup> A.W. Praktiknya, et al., *Pandangan dan Langkah Reformasi BJ. Habibie*, hal. 15

<sup>218</sup> A.W. Praktiknya, et al., dan *Republika*, 26 Mei 1999.

dampak sosial dan krisis ekonomi. Upaya ini dilengkapi dengan perubahan struktural yang mencakup restrukturisasi perbankan dan utang luar negeri swasta. Pada aspek kelembagaan, berbagai undang-undang yang mendorong kegiatan ekonomi yang efisien dan sehat telah disahkan, antara lain UU Perbankan, UU Kepailitan, UU Bank Indonesia, UU Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar<sup>219</sup>.

BJ. Habibie pada masa pemerintahannya terpacu untuk melakukan restrukturisasi utang swasta domestik dan utang luar negeri serta mempercepat rekapitalisasi perbankan<sup>220</sup>. Restrukturisasi perbankan dilakukan melalui langkah likuidasi bank-bank yang tidak sehat dan rekapitalisasi dalam upaya memperbaiki sistem perbankan<sup>221</sup>. Biaya rekapitalisasi perbankan diperkirakan mencapai RP. 300 triliun. Dari proses ini diharapkan akan lahir suatu sistem perbankan nasional yang sehat, andal, dan tangguh yang dapat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Pada rekapitalisasi tersebut diharapkan sektor perbankan bisa menggerakkan sektor riil sebagai salah satu kunci pemulihan ekonomi. Langkah penyehatan sektor perbankan antara lain ditujukan untuk menghindarkan negara dari kebangkrutan ekonomi<sup>222</sup>.

Perlahan ekonomi Indonesia memang sudah mulai bangkit. Indikasinya cukup jelas terus menguatnya nilai rupiah dalam kurun waktu yang cukup lama, menurunnya indeks harga konsumen, dan laju inflasi yang memungkinkan pemerintah memangkas suku bunga bank<sup>223</sup>. Direktur IMF Stanley Fischer menilai positif program restrukturisasi sistem perbankan yang dilakukan pemerintahan BJ. Habibie sebagai bagian penting bagi pemulihan ekonomi<sup>224</sup>.

Disamping menciptakan berbagai kemudahan, pemerintah juga memberi peluang usaha kepada pengusaha besar, menengah, dan kecil

---

<sup>219</sup> A.W. Praktinya, et al. 1999

<sup>220</sup> *Republika*, 25 Mei 1999

<sup>221</sup> *Republika*, 8 Februari 1999

<sup>222</sup> *Republika*, 3 Mei 1999

<sup>223</sup> *Republika*, 22 Mei 1999

<sup>224</sup> *International Herald Tribune*, 31 Maret 1999

serta koperasi berupa iklim yang menarik bagi penanaman modal dan pertumbuhan perekonomian nasional. Monopoli dan persaingan yang tidak sehat di antara pelaku ekonomi dicegah dengan UU Larangan Monopoli dan persaingan tidak sehat. Investor dalam negeri maupun investor asing bergairah menanamkan modalnya secara sendiri-sendiri atau berpatungan. Dalam masa reformasi, upaya ini mendapatkan prioritas utama<sup>225</sup>.

Penguatan kurs rupiah yang terjadi secara berangsur merupakan konsekuensi logis dari perkembangan situasi politik yang semakin membaik dan terkendali. Selain itu faktor fundamental ekonomi yang lain seperti kecenderungan turunnya tingkat suku bunga, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dan laju inflasi yang semakin rendah<sup>226</sup>.

Turunnya inflasi telah memberikan dampak positif terhadap tingkat suku bunga dan stabilitas situasi moneter<sup>227</sup>. Bunga deposito yang semula mencapai 69% turun menjadi 29% bunga harian yang semula mencapai 40% turun menjadi 19%. Turunnya suku bunga tersebut diakibatkan oleh turunnya inflasi dan menguatnya angka rupiah<sup>228</sup>.

Berdasarkan fakta tersebut pada triwulan pertama dan kedua tahun 1999 perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Perkembangan ini sekurang-kurangnya diperlihatkan oleh beberapa indikator sebagai berikut : menguatnya indeks pasar modal, menurunnya suku bunga bank, menguatnya rupiah, bahkan relatif stabil, menurunnya inflasi, bahkan sampai sampai negatif<sup>229</sup>. Pemulihan ekonomi ini secara nyata juga diperkuat oleh terjadinya pertumbuhan positif yang berkisar dua persen serta membaiknya kinerja ekspor-impor<sup>230</sup>.

### C. PENELITIAN TERDAHULU

---

<sup>225</sup> A.Makmur Makka, Buku Biografi Bacharuddin Jusuf Habibie “Dari Ilmuwan ke Negarawan sampai Minandito” (Kota Jakarta : PT. THC Mandiri :2012), hal 281.

<sup>226</sup>*Republika*, 22 Juni 1999

<sup>227</sup>*Harian Ekonomi Neraca*, 3 Juni 1999; dan *Republika*, 3 Juni 1999.

<sup>228</sup>*Republika*, 25 Mei 1999

<sup>229</sup>*Ibid*

<sup>230</sup>*Republika*, 17 Mei 1999

Banyak sekali peneliti yang melakukan penelitian terhadap masa kepemimpinan Presiden BJ. Habibie di era reformasi. Pada penelitian yang dilakukan banyak sekali informasi yang didapatkan, diantaranya :

1. Penelitian oleh Ahmad Depri Kurniawan, Didik Sukriono, Rosyid Al Atok dengan judul “Pemikiran Politik Bj. Habibie dalam Demokratisasi di Indonesia”. Metode penelitian yakni dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Penggunaan metode kepustakaan ini juga sering disebut dengan studi pustaka.

Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah Pemikiran politik BJ. Habibie mulai terlihat ketika menjadi Presiden RI yang mana pemikiran itu dituangkan dalam kebijakan-kebijakan yang dilakukannya. Pemikiran BJ. Habibie sebenarnya tidak didasari atas kepentingan politik. Akan tetapi, BJ. Habibie menjadikan dirinya sebagai panutan (role model) dalam setiap kebijakan dan pergerakannya membawa perubahan dari rezim Orde Baru menuju Reformasi. Beberapa kebijakan Presiden BJ. Habibie selama masa pemerintahannya antara lain: (1) reformasi di bidang ekonomi; (2) pemulihan legitimasi politik; (3) amandemen pertama UUD 1945; (4) kebebasan pers; (5) penegakan HAM; dan (6) referendum Timor-Timur. Peranan BJ. Habibie dalam demokratisasi di Indonesia terlihat dari gaya kepemimpinannya yang mengubah gaya kepemimpinan otoriter ala Presiden Soeharto menjadi lebih demokratis. Presiden BJ. Habibie mengembangkan sebuah konsep yang lebih jelas mengenai demokrasi sebagai sebuah mesin politik. Konsep ini kemudian diimplementasikan dalam agenda pemerintahannya yang mencakup reformasi dalam berbagai bidang politik, ekonomi, hukum dan keamanan<sup>231</sup>.

2. Penelitian oleh Agung Mike Wijaya, Marjono, Sugiyanto dengan judul “THE ROLE OF PRESIDENT B.J. HABIBIE IN OVERCOMING ECONOMIC CRISIS IN INDONESIA IN THE

---

<sup>231</sup> Ahmad Depri Kurniawan, dkk, “Pemikiran Politik Bj. Habibie dalam Demokratisasi di Indonesia (2021): <http://repository.um.ac.id/id/eprint/195042>.

1998-1999”. Metode penelitian sejarah yang melalui empat tahap yaitu: heuristik, interpretasi, kritik, dan historiografi.

Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah Krisis ekonomi yang berlangsung sejak tahun 1997 membuat masyarakat Indonesia hidup dalam kesulitan. Muncul permasalahan multikompleks yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Kebijakan- kebijakan yang dilakukan tidak mampu mengatasi krisis, akhirnya membawa B.J. Habibie tampil menjadi presiden. Presiden B.J. Habibie dalam mengembalikan roda perekonomian nasional menekankan pada tiga prinsip pokok yakni kerakyatan, kemartabatan, dan kemandirian. Kebijakan yang dilakukan diantaranya program restrukturisasi perbankan, pelaksanaan program jaring pengaman sosial (JPS), dan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil menengah. Program restrukturisasi perbankan berdampak pada menurunnya laju inflasi sebesar 2,01 persen, nilai tukarrupiah terhadap nilai tukar dolar AS mencapai Rp. 7.000, menurunnya suku bungadeposito sebesar 13 persen. Sehingga menurunnya inflasi, menguatnya rupiah, dan menurunnya suku bunga deposito berdampak pada meningkatnya pelaku ekonomi di dalam negeri. Selain itu, program JPS telah mengurangi beban masyarakat miskin pada masa krisis. Kebijakan yang dilakukan Presiden B.J. Habibie telah membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi, walaupun kebijakannya tidak berjalan secara optimal dan banyak menghadapi kendala<sup>232</sup>.

#### **D. KEBIJAKAN POLITIK YANG DITERAPKAN PADA MASA KEPEMIMPINAN**

Soeharto menyerahkan secara sepihak kekuasaan kepada Habibie. Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden B.J. Habibie mengumumkan susunan kabinet baru, yaitu Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet Pembangunan VII. Akhirnya gerakan Reformasi yang dipelopori

---

<sup>232</sup>Agung Mike Wijaya, dkk, “THE ROLE OF PRESIDENT B.J. HABIBIE IN OVERCOMING ECONOMIC CRISIS IN INDONESIA IN THE 1998-1999” (2020) : <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JHIS/article/view/21307/9004>.

mahasiswa mampu menumbangkan kekuasaan Orde Baru dan Era Reformasi mulai berjalan di Indonesia, di bawah Pemerintahan B.J. Habibie.

Berikut ini beberapa kebijakan politik yang diterapkan pada masa kepemimpinan BJ. Habibie.

#### 1. Pembebasan Tahanan Politik dan Narapidana Politik

Upaya BJ. Habibie menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat terhadap pemerintahan dan upaya mengatasi tekanan dan tuntutan dari masyarakat. Memutuskan untuk membebaskan seluruh tahanan politik pada masa pemerintahan orde baru. Kegiatan tersebut meningkatkan legitimasi BJ.Habibie di dalam negeri maupun luar negeri dalam menjalani masa reformasi yang dikehendaki oleh masyarakat. BJ. Habibie juga membebaskan tahanan mahasiswa dan aktivis reformasi. Selain membebaskan tahanan, presiden BJ. Habibie juga memberikan gelar Pahlawan Reformasi kepada 4 korban mahasiswa Trisakti yang menuntut lengsernya presiden Soeharto pada 12 Mei 1998. Pemberian gelar juga sebagai upaya presiden untuk mengambil kepercayaan dan simpati masyarakat yang kurang mempercayai Habibie dalam menjalankan masa pemeritahan reformasi.

#### 2. Kebebasan PERS

Pers dibungkam dan dipaksa mengikuti opini dari pemerintah apabila jika ada pihak pers yang menentang kebijakan tersebut maka akan mendapatkan hukuman pada masa pemerintahan sebelumnya, Dilansir dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 mengenai Pers pada masa pemerintahan BJ. Habibie menjadikan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan Republik Indonesia. Sehingga undang-undang tersebut menjadi ujung tonggak dari kebebasan

pers yang ada di Indonesia yang sering dibredel pada masa pemerintahan sebelumnya<sup>233</sup>.

### 3. Pembentukan Partai Politik

Presiden BJ. Habibie membuat kebijakan untuk membuat suatu perubahan dalam bidang politik dengan mengeluarkan UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, UU No. 4 Tahun 1999 tentang MPR dan DPR. Pemilihan umum pertama diselenggarakan tanggal 7 Juni 1999 yang diikuti oleh 48 partai, pada saat itu terdaftar hampir 150 partai politik tapi tetap hanya 48 partai politik yang terdaftar. Pemilihan umum Tahun 1998 dilaksanakan secara LUBER yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia dan JURDIL yaitu jujur dan adil yang diakui oleh semua pihak termasuk oleh luar negeri melalui pemantauan secara langsung oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Jimmy Carter.<sup>48</sup> Selanjutnya tanggal 7 Juni 1999 diselenggarakan Pemilihan Umum Multipartai<sup>234</sup>.

### 4. Penyelesaian Masalah Timor Timur

Timor timur ingin merdeka dan lepas dari bangsa Indonesia menjadi salah satu masalah besar negara. setelah berakhirnya masa orde baru dan BJ. Habibie menjadi presiden, BJ. Habibie membuat kebijakan memberikan kemerdekaan bagi Timor Timur. Permasalahan Timor Timur dianggap mengganggu kinerja Kabinet Reformasi Pembangunan yang dipimpinnya menghadapi berbagai macam masalah di reformasi.

BJ. Habibie membebaskan tawanan politik asal Timor Timur dan menjanjikan suatu status istimewa bagi Timor Timur sebelum memutuskan memberikan kemerdekaan bagi Timor Timur. Namun status istimewa yang dijanjikan Presiden B.J.

---

<sup>233</sup> Silmi Nurul Utami, Kebijakan Politik Masa Pemerintahan B. J. Habibie,(2021): <https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/29/144709069/kebijakan-politik-masa-pemerintahan-b-j-habibie?page=all>

<sup>234</sup> M.C. Ricklefs, hlm. 685

Habibie tidak disetujui oleh Ramos-Horta dan para tokoh-tokoh yang menginginkan Timor Timur merdeka. Pada bulan Juni 1998 terjadi demonstran besar-besaran di Timor Timur yang menuntut diadakannya referendum yang menawarkan pilihan kemerdekaan dan menolak status istimewa dalam lingkup Negara Republik Indonesia.

Referendum dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999. Hasilnya sebanyak 446.953 suara masuk, merepresentasikan 98,6% dari seluruh pemilih. Dari 438.968 suara sah, 78,5 % menginginkan kemerdekaan, dan 21,5% sisanya menghendaki otonomi dalam lingkup negara Republik Indonesia. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penduduk Timor Timur ternyata menghendaki kemerdekaan. B.J. Habibie menanggapi hasil referendum dengan menyatakan bahwa Indonesia mulai 1 Januari 2000 akan memusatkan perhatian pada 26 propinsi dan tidak diganggu lagi dengan masalah Timor Timur.

#### 5. Pengusutan Harta Kekayaan Soeharto dan Kroni-kroninya

Salah satu tuntutan reformasi yang dikehendaki rakyat lewat mahasiswa dan aktifis reformasi adalah pengusutan kekayaan Soeharto dan kroni-kroninya. Masalah KKN, terutama yang melibatkan mantan Presiden Soeharto, pemerintah B.J Habibie dinilai tidak serius menangani permasalahan ini karena proses pengadilan Soeharto berjalan sangat lambat. Lambatnya pengusutan kekayaan Soeharto dan kroni-kroninya mengakibatkan ketidakpuasan yang besar diantara pendukung gerakan era reformasi. Presiden Habibie dengan Instruksi Presiden No. 30/1998 tanggal 2 Desember 1998 mengintruksikan Jaksa Agung Baru, Andi Ghalib segera mengambil tindakan hukum memeriksa Mantan Presiden Soeharto yang diduga telah melakukan praktik KKN.

Dugaan kasus KKN Soeharto menyangkut penggunaan uang negara oleh 7 yayasan yang diketuainya, yaitu Yayasan

Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Supersemar, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, Yayasan Trikora, dan Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila. Pada tahun 1995, Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995. Keppres ini menghimbau para pengusaha untuk menyumbang 2 persen dari keuntungannya untuk Yayasan Dana Mandiri. Hasil penyidikan kasus tujuh yayasan Soeharto menghasilkan berkas setebal 2.000-an halaman. Berkas ini berisi hasil pemeriksaan 134 saksi fakta dan 9 saksi ahli, berikut ratusan dokumen otentik hasil penyitaan dua tim yang pernah dibentuk Kejaksaan Agung, sejak tahun 1999.

Uang negara 400 miliar mengalir ke Yayasan Dana Mandiri antara tahun 1996 dan 1998 dari pos Dana Reboisasi Departemen Kehutanan dan pos bantuan presiden. Dalam berkas kasus Soeharto, terungkap bahwa Haryono Suyono yang saat itu menjabat sebagai Menteri Negara Kependudukan dan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, mengalihkan dana tersebut untuk yayasan. Ketika itu, dia masih menjadi wakil ketua di Dana Mandiri. Bambang Trihatmodji yang menjabat bendahara yayasan ini bersama Haryono ternyata telah mengalirkan lagi dana Rp 400 miliar yang telah masuk ke yayasan itu ke dua bank miliknya, Bank Alfa dan Bank Andromeda pada tahun 1996-1997 dalam bentuk deposito. Dari data yang tercatat Bob Hasan paling besar membuat kerugian uang negara yakni mencapai hingga Rp. 3,3 triliun. Pengakuan Ali Affandi sebagai sekretaris Yayasan Supersemar saat diperiksa sebagai saksi kasus Soeharto. Ali Affandi memberikan keterangan bahwa Yayasan Supersemar, Dharmais, dan dan Dakab mempunyai saham pada 27

perusahaan Grup Nasamba milik Bob Hasan dan sebagian saham yang dimiliki atas nama pribadi bukan yayasan<sup>235</sup>.

#### 6. Kebijakan di Bidang Pertahanan dan Keamanan

Pada bidang pertahanan dan kemananan dilakukan pembahuruan dengan memisahkan Polri dan Abri. Setelah reformasi, peran ABRI di Perwakilan Rakyat mulai dikurangi berthapa dari 75 orang menjadi 38 orang. ABRI semula terdiri dari empat angkatan yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan udara serta Kepolisian Republik Indonesia, namun mulai tanggal 5 Mei 1999 BJ. Habibie memisahkan ABRI dan Polri kemudian berganti nama menjadi Kepolisian Negara. Istilah ABRI berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut.

#### 7. Kebijakan di Bidang Hukum

Pada bidang hukum fokus pada HAM (Hak asasi manusia) yaitu dengan melepaskan tahanan politik dan narapidana. BJ. Habibie melakukan reformasi hukum dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang selama pemerintahan Soeharto mengalami kebuntuan dan dikeluarkannya UU No. 26 tentang Pencabutan UU Anti Subversif Kebijakan Habibie dalam bidang penegakan HAM serta mengeluarkan UU tentang pengesahan perangkat Internasional di bidang HAM. Presiden Habibie juga telah mengesahkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

#### 8. Pembentukan Kabinet

Presiden BJ. Habibie membentuk kabinet baru dengan nama Kabinet Reformasi Pembangunan terdiri dari 37 menteri yang meliputi masing-masing perwakilan dari ABRI, Golkar,

---

<sup>235</sup>Sandy Indra Pratama, Anggi Kusumadewi. "Kronologi Kasus Supersemar Rp4,4 Triliun Soeharto" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150811103858-12-71329/kronologi-kasus-supersemar-rp44-triliun-soeharto>. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2022.

PPP, dan PDI serta beberapa menteri departemen, menteri negara, sekretaris negara, dan jaksa agung.

#### 9. Kebebasan Menyampaikan Pendapat

Pada masa pemerintahan Habibie, orang bebas mengemukakan pendapatnya di muka umum. Khusus demonstrasi, setiap organisasi atau lembaga yang ingin melakukan demonstrasi hendaknya mendapatkan izin dari pihak kepolisian dan menentukan tempat untuk melakukan demonstrasi tersebut. 28 tahun 1997 tentang

Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa (untuk kepentingan umum, pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dapat bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri). Kemerdekaan Menyampaikan pendapat di Muka Umum.

#### 10. Bidang Manajemen Internal ABRI

ABRI melakukan kebijakan-kebijakan yang digunakan sebagai langkah perubahan politik internal, kebijakan berlaku sejak tanggal 1 April 1999. Kebijakan tersebut antara lain : pemisahan ABRI dan POLRI, perubahan Staf Sosial Politik menjadi Staf Teritorial, likuidasi staf karyawan, pemutusan hubungan organisatoris dengan partai golkar, pengurangan fraksi ABRI di DPR, DPRD I/II, dan mengambil jarak yang sama dengan partai politik yang ada, komitmen dan netralitas ABRI dalam pemilu serta perubahan staf sosial politik menjadi komnos dan pembubaran bakorstanas dan bakorstanasda.

### **E. DAMPAK KEBIJAKAN (KEKURANGAN DAN KELEBIHAN)**

Dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden BJ. Habibie di masa kepemimpinannya terdapat kekurangan dan kelebihannya yakni :

#### - Kekurangan

Peralihan jabatan kepemimpinan dari Presiden Soeharto kepada wakilnya BJ Habibie tidak sepenuhnya berjalan mulus. Adapun kecaman dari pihak sipil terkait dipilihnya wakil presiden tersebut

untuk menjadi suksesor presiden sebelumnya. Terpilihnya BJ Habibie dianggap masih menjadi kepanjangan tangan dari Orde Baru, sehingga sipil mendesak untuk menyingkirkan militer dari politik serta membersihkan pemerintahan dari orang-orang Orde baru.

Pada November 1998 pemerintah transisi Indonesia menjadwalkan sidang istimewa guna membahas mengenai pemilu selanjutnya dan agenda-agenda pemerintahan selanjutnya. Pada saat itu terjadilah beberapa bentrokan antara masa sipil dengan beberapa aparat terkait masih belum percayanya rakyat terhadap pemerintahan baru yang dipimpin BJ Habibie. Aksi penolakan demonstran yang berujung tewasnya warga sipil itulah yang kemudian dikenal dengan peristiwa Semanggi I.

Tragedi Semanggi I ini yang kemudian menjadi catatan hitam bagi pemerintah transisi Indonesia yang dipimpin BJ Habibie. Bentrokan antara aparat dengan warga sipil hingga menimbulkan korban jiwa ini menjadi salah satu pelanggaran HAM berat yang terjadi di pemerintahan Presiden BJ Habibie. Namun sangat disayangkan hingga lebih dari dua dekade sejak Tragedi Semanggi I ini, upaya untuk penyelesaian kasus masih belum menemui titik terang.

- Kelebihan :

Peralihan kekuasaan masa pemerintahan presiden Soeharto kepada presiden BJ. Habibie membuat negara indonesia mengalami transformasi yang cukup signifikan. Berbagai kebijakan yang dibuat oleh presiden BJ. Habibie juga berdampak pada perubahan aspek sosial dan ekonomi yang cukup baik setelah masyarakat diterpa badai krisis yang cukup hebat. Mulai dari keputusan untuk mengendalikan peredaran uang, menaikkan suku bunga bank sentral BI sampai dengan mengeluarkan kebijakan independensi bank sentral melalui UU no. 23 tahun 1999.

Meskipun masa kepemimpinannya terbilang cukup singkat, namun mampu untuk membawa Indonesia kearah yang lebih baik. Reformasi besar-besaran yang dilakukan pada masa pemerintahannya membuat

negara mampu untuk lebih menghargai perbedaan dan mengedepankan demokratis. Kebijakan untuk menghargai kebebasan pers serta membebaskan eks tapol (tahanan politik) sekian dari banyaknya kebijakan yang beliau ambil demi reformasi pemerintahan yang lebih baik kedepannya.

## BAB XI

### Presiden K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

#### Biografi Gus Dur

Presiden ke-4 Indonesia K.H Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan sapaan Gus Dur lahir di Kabupaten Jombang pada tanggal 4 Agustus 1940 tepatnya di desa miniurban, yaitu Desa Denanyar. Gus Dur memiliki saudara yang begitu banyak, Gus Dur merupakan putra pertama dari enam bersaudara. Ayahanda beliau terkenal sebagai figure besar dalam ormas atau jamiyah diniyah Nahdlatul Ulama (NU) yaitu K.H. Wahid Hasyim, sebagai anak pertama dari enam bersaudara Gus Dur dijadikan tokoh patokan dalam memberikan pelajaran hidup pada saudara-saudaranya, terutama dalam semangat gigih dan tangguh dalam mengejar karir studinya. Sedangkan sosok ibunda dari Gus Dur ialah Hj. Sholehah yang merupakan putri dari pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang yaitu K.H. Bisri Syamsuri<sup>236</sup>.

Perjalanan masa muda Gus Dur banyak dihabiskan untuk menimba ilmu pengetahuan, dengan berpindah tempat ke berbagai daerah, tak lain yaitu Yogyakarta dan Magelang. Dimulai dari kedua tempat itulah Gus Dur muda memulai perjalanannya dengan secara serius untuk mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan, hingga akhirnya beliau mendapatkan panggilan untuk melanjutkan studinya di negeri Piramida, Mesir. Setelah menghabiskan beberapa waktu di Mesir, Gus Dur akhirnya kembali pulang ke Jombang untuk menjadi seorang pengajar. Pada tahun 1971, beliau bergabung di Fakultas Ushuluddin Universitas Tebu Ireng Jombang. Pada tahun yang sama juga, Gus Dur mulai aktif dalam kegiatan menulis dan mulai mengasah kemampuannya kembali dengan menjadi kolumnis<sup>237</sup>. Melalui karya – karyanya tersebut, Gus Dur muda dikenal sebagai sosok pemikir dan penulis yang mendapat banyak perhatian dari banyak kalangan masyarakat.

Pada tahun 1974 Gus Dur mulai ikut membantu kegiatan di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang dengan menjadi sekretaris. Dari situlah kemudian

---

<sup>236</sup>Pemikiran Gus, D U R Dalam, dan Luqman A L Hakim, "KEHIDUPAN PLURALITAS MASYARAKAT INDONESIA," 2021.

<sup>237</sup>Novri Susan, "Tata Kelola Konflik Demokrasi: Kasus Tata Kelola Konflik di Aceh," *Jurnal Global dan Strategis* 5, no. 1 (2011): 15–31.

Gus Dur sering ikut dalam sejumlah forum diskusi keagamaan dan kepesantrenan serta mendapatkan undangan menjadi narasumber pada kegiatan tersebut. Gus Dur juga banyak terlibat dalam kegiatan keilmuan lainnya dengan beberapa kelompok seperti LSM; LP3ES, bersama dengan beberapa tokoh lain yaitu Dawam Rahardjo, Aswab Mahasin dan Adi Sasono sebagai bentuk usaha pengembangan pesantren. Dengan gejolak keilmuan sosok Gus Dur muda saat itu, melalui ciri khasnya yaitu daya pemikiran yang dinamis, beliau kemudian mendirikan P3M dimotori oleh LP3ES. Tepatnya tahun 1979, Gus Dur pindah ke Jakarta dan mendirikan pesantren di Ciganjur. Sementara awal tahun 1980-an, Gus Dur mendapatkan kepercayaan untuk menjadi Wakil Katib Syuriah PBNU. Dari sinilah kemudian Gus Dur mulai banyak terlibat dengan berbagai kelompok-kelompok dengan latar belakang yang berbeda mulai dari suku, agama, etnis bahkan politik. Gus Dur pun semakin semangat dalam menuangkan pemikirannya melalui karya yang ia tulis, dengan topik pembahasan dunia yang telah digelutinya, baik kebudayaan, politik maupun pemikiran keislaman<sup>238</sup>.

Karir Gus Dur kembali berlanjut pada tahun 1984 dengan dipilihnya Gus Dur secara langsung oleh tim ahl hall wa al-‘aqdi menjadikan Gus Dur sebagai ketua umum PBNU, yang diadakan ketika Mukhtar NU yang ke-27 di Situbondo yang diketuai oleh K.H. As’ad Syamsul Arifin. Kedudukan Gus Dur sebagai ketua umum masih terus berlanjut dengan adanya beberapa dukungan jamaah yang sehingga pada kegiatan Mukhtar ke- 28 dan Mukatamar di Cipasung tahun 1994 Gus Dur masih tetap berdiri sebagai Ketua PBNU. Jabatan ketua PBNU berakhir dan kemudian lepas setelah Gus Dur resmi menjabat sebagai presiden RI yang keempat<sup>239</sup>.

Gus Dur merupakan salah satu tokoh yang identik dengan pemikiran pluralismenya. Pemikiran Gus Dur tentang pluralisme tidak terbentuk secara langsung dengan sendirinya, akan tetapi pemikiran tersebut muncul melalui pengalaman hidup dan bantuan dari ayahnya sebagai pendorong yang kemudian berhasil membawa Gus Dur untuk mengenal lebih jauh mengenai keberagaman dan tidak hanya terfokus dalam lingkup ilmu kepesantrenan yang bersifat

---

<sup>238</sup>Muhammad Candra Syahputra, "PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL (STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID DAN NURCHOLISH MADJID) SKRIPSI" (2018).

<sup>239</sup>Maghfur Ahmad Editor, *Gus Dur : Islam, Negara, & Isu-isu Politik*, 2021.

homogen. Dalam perkembangannya, Gus Dur mampu untuk menggabungkan pemikiran khas pesantren mengenai Ahlu Sunnah Wal Jama'ah dengan pemikiran Islam Timur Tengah dan liberalisme dari Eropa lalu menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya pemikiran tersebut juga memberikan dampak pada kepribadian Gus Dur yang lebih cenderung tenang dan tidak kaku dalam memahami dan menyelesaikan suatu permasalahan kontemporer yang ada disekitarnya<sup>240</sup>.

Salah satu kontribusi dari Gus Dur dalam memperkokoh persatuan Indonesia yaitu melalui membakukan kekuatan bersama untuk membangun kesatuan umat, terutama dalam menata pondasi dasar kerukunan dan arti sesungguhnya dari pentingnya sebuah relasi sosial yang bersifat multikultural dan pluralisme sosial pada bangsa ini. Gus Dur merupakan salah satu tokoh yang mampu dan berani dalam mengambil sikap dan berjuang untuk menjadikan pluralisme sebagai media untuk mengajak umat beragama bisa bersatu dan berdamai bersama, tanpa melihat ras, suku, etnis agama ataupun warna kulit, semua setara dalam pandangan pluralisme kemanusiaan<sup>241</sup>. Salah satu konsekuensi yang diterima oleh beliau sebagai pencetus plurarime adalah banyaknya kritikan yang diberikan oleh berbagai kalangan baik itu negatif atau membangun dan bahkan pengecaman yang melewati ambang toleransi.

Gus Dur merupakan intelektual Islam tradisional yang menguasai bidang keilmuan Islam klasik pesantren sebagai basisnya utamanya. Akan tetapi bukan berarti Gus Dur tidak menguasai bidang keilmuan lainnya seperti sosial, budaya, seni dan politik dan agama-agama dunia, Gus Dur juga mampu dalam menguasai bidang – bidang keilmuan tersebut. Sosok Gus Dur begitu sangat konsisten terhadap tujuannya, yaitu menghidupkan dunia kemanusiaan atas dasar keberagaman<sup>242</sup>.

## **E. Teori Dan Strategi Kepemimpinan Presiden Gus Dur**

### **a. Islam Liberal Ala Gus Dur**

---

<sup>240</sup>Nur Fatah A. Nadif Hanan N, Hieronymus P, "Perkembangan Pemikiran Gus Dur (19 71-2001)" 11, no. 2 (2022): 97–112.

<sup>241</sup>M. Hamid, *Gus Gerr Bapak : Pluralisme & Guru Bangsa* (Penerbit Pustaka Marwa (Anggota Ikapi), 2010).

<sup>242</sup>Mahfud MD, *Gus Dur, Islam, dan Kebangsaan*, 2010.

Islam liberal merupakan sebuah pemikiran yang sudah menjadi wacana dikalangan intelektual muslim dari dulu hingga kini. Pengertian Islam Liberal secara etimologis dalam kamus Bahasa Indonesia terdiri dari dua kata yang saling bertolak belakang, Islam yang merupakan agama yang dibawa serta diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, memiliki pedoman yaitu kitab suci Al-Qur'an yang merupakan wahyu Allah SWT diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Liberal sendiri memiliki pengertian yaitu bebas, dalam arti lebih spesifik berfikir atau berpandangan (luas dan terbuka). Sehingga bila kedua kata tersebut digabung maka dapat diartikan bahwa Islam liberal adalah suatu pemikiran atau pemahaman terhadap Islam secara bebas (luas dan terbuka)<sup>243</sup>.

Pencetus adanya pemahaman Islam Liberal pertama di Indonesia terdiri dari empat tokoh yang diantaranya Nurcholis Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, Dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Jika pengertian Islam Liberal hanya dipahami secara literal, maka Islam liberal akan dianggap sebagai suatu pemikiran separatis terhadap Islam yang akan berdampak pada perubahan paradigma yang ada khususnya bagi kalangan Islam tradisional dan radikal. Pemikiran Islam Liberal yang diklaim buruk seperti itu didasarkan atas karya-karya yang dipublikasikan oleh kalangan Islam liberal, berupa artikel, opini, argumentasi, dan karya tulis baik dalam bentuk buku maupun karya-karya ilmiah lainnya.

Adanya peran seorang Gus Dur dalam dunia Islam dan perpolitikan di Indonesia yang menyatu menjadi Islam Liberal banyak menimbulkan tanda tanya serta kebingungan di kalangan masyarakat, sebagian besar berasal dari banyaknya peran dan wajah yang dimainkannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Lebih tepatnya, kebingungan itu muncul karena didasari pada perbedaan sisi – sisi yang dimiliki oleh Gus Dur, satu sisi Gus Dur dikenal sebagai seorang figur religius sementara pada sisi lain yang ditafsirkan oleh orang – orang khususnya di pusat-pusat metropolitan kelas menengah di Indonesia Gus Dur dikenal sebagai politisi yang sekular dengan intelektual yang liberal. Salah satu hal yang sudah menjadi ciri khas Gus Dur adalah Gus Dur adalah seorang tokoh penyeru pluralisme dan toleransi, pembela kelompok minoritas, khususnya Cina

---

<sup>243</sup>Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia : Pemikiran Noe-modernisme Nurcholis Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid, 1968-1980*, 1999.

Indonesia, juga penganut agama kristen dan kelompok-kelompok lain yang mengalami diskriminasi dan tidak diuntungkan pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto<sup>244</sup>.

## **b. Humanisme Gus Dur**

Prinsip humanisme ala Gus Dur merupakan humanisme Islam yang terdiri dari ajaran Islam tentang keharmonisan dan toleransi. Menurut pendapat Gus Dur umat Islam seharusnya tidak boleh takut pada kondisi plural yang ada pada masyarakat modern saat ini. Hal yang harus dilakukan oleh umat Islam yaitu harus merespon positif terhadap kondisi plural<sup>245</sup>. Humanisme yang ditekankan oleh Gus Dur adalah praktek pluralisme dalam bertindak dan berpikir bukan tentang aqidah tiap agama, sebab hal ini yang akan melahirkan bentuk toleransi. Sikap toleran tidak boleh bergantung pada apapun, tetapi pengakuan atas pluralitas merupakan persoalan hati dan perilaku. Dalam perkembangannya Gus Dur mencoba untuk mengembangkan pandangan anti eksklusivisme agama. Hal ini didasari oleh fenomena berbagai peristiwa kerusuhan, kekerasan dan radikalisasi yang menggunakan kedok agama di beberapa tempat, hal itu merupakan akibat adanya eksklusivisme agama. Konsep humanisme dalam pemikiran Gus Dur dapat dipahami sebagai wacana pemikiran yang akan digunakan untuk memberikan apresiasi secara luas dalam menyebarkan segala hal yang baik dalam kehidupan manusia sekaligus memberikan perhatian pada kesejahteraan setiap individu. Pandangan humanisme ini berasal dari nilai universalisme Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap kehidupan sosial setiap manusia<sup>246</sup>.

Walaupun humanisme Gus Dur merupakan humanisme religius yang didasari universalisme Islam, akan tetapi dalam aktualisasinya humanisme yang tersebut bukan hanya menyentuh bidang keagamaan saja. Akan tetapi humanisme religius yang sesuai dengan konsep universalisme Islam ini juga mampu merangkul berbagai bidang lain yang berkaitan dengan problem kemanusiaan

---

<sup>244</sup>K.H. Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, 2000.

<sup>245</sup>Muhammad Aqil, "Nilai-nilai humanisme dalam dialog antar agama perspektif gus dur," *Al-Adyan, Journal Of Religious Studies*, 2020, 52–66.

<sup>246</sup>Djohar Effendi, *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi : Wacana Keagamaan Di kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur*, 2010.

seperti ekonomi, pendidikan dan politik. Adanya banyak problem kemanusiaan yang terjadi saat itu, tentunya akan sejalan dengan konsep dalam humanisme Gus Dur, agama memiliki peran besar untuk ikut berkontribusi dalam menyelesaikan problem-problem kemanusiaan yang terjadi saat itu, bukan malah sebaliknya yang mana masalah yang bersifat SARA seperti intoleransi, deskriminasi, persekusi terhadap ritual ibadah, dan pengrusakan rumah ibadah menjadi menjadi salah satu penyumbang dari sekian banyak masalah kemanusiaan yang ada<sup>247</sup>. Selain permasalahan yang bersifat SARA masih banyak kasus kemanusiaan lain yang perlu diperhatikan seperti kelaparan, kemiskinan, eksploitasi alam dan lain sebagainya. Belajar dari masalah-masalah ini, seharusnya perlu dilakukan urgensi dialog antar agama dengan tujuan menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam pelaksanaannya bukan berarti dialog antar agama tersebut harus mengabaikan permasalahan yang ada khususnya permasalahan bersifat SARA, sesuai dengan arti sesungguhnya dari humanisme religius Gus Dur yang universal, Artinya dialog antar agama tidak hanya sekedar membicarakan tentang topik agama, akan tetapi dialog agama juga harus membicarakan ekonomi, politik, kesehatan, HAM bahkan sampai isu lingkungan sekalipun. Akan tetapi sangat disayangkan jika dilihat kembali dalam sejarah dialog antar agama yang diusulkan pertama kali oleh Paus Yohanes XXIII tahun 1958 dan baru bisa terwujud oleh paus selanjutnya yaitu Paus Paulus. Dalam pelaksanaannya justru terjadi dialog yang sifatnya sangat teologis dan doktriner. Sebagai contoh Paus Paulus menerbitkan lima dokumen penting yang berisi dialog antar agama terkait hubungan agama Kristen dengan agama Islam dan agama-agama lainnya. Sebenarnya hal yang dilakukan oleh Paus Paulus tentunya sangat positif untuk mengurangi sifat eksklusivisme dari setiap pemeluk agama. Akan tetapi, sangat disayangkan masih banyak problem seputar keadilan dan HAM bahkan ekologi yang justru luput dari topik perhatian para partisipator dialog.

### **c. Kabinet Kompromi**

Kembalinya Negara Indonesia kepada sistem multipartai berpengaruh pada hubungan politik-birokrasi yang terjadi di Indonesia. Hal itu dikarenakan

---

<sup>247</sup>Muhammad Aqil, 'Nilai-Nilai Humanisme Dalam Dialog Antar Agama Perspektif Gus Dur', *Al-Adyan, Journal Of Religious Studies*, 2020, 52–66.

partai politik mempunyai posisi dalam sistem politik yang cukup kuat. Posisi partai politik yang semakin menguat dapat dilihat dalam susunan kabinet yang disusun oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang mana cabinet tersebut dipilih oleh parlemen melalui hasil multipartai pada tahun 1999.

Kabinet Gus Dur yang dikenal dengan nama Kabinet Persatuan Pembangunan terlihat lebih banyak mengedepankan kepentingan-kepentingan kelompok partai politik yang telah memilihnya, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas pemerintahannya<sup>248</sup>. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Gus Dur untuk menjaga kinerja pemerintahannya yaitu dengan melakukan beberapa kali reshuffle cabinet tersebut. Akan tetapi, usaha tersebut tidak kunjung membuahkan hasil hingga pada akhirnya saat anggota kabinet yang ada tidak lagi bisa mengakomodasi kepentingan partai politik masing-masing yang telah mendukungnya, berakhir pada pencabutan mandat Gus Dur sebagai presiden yang dilakukan oleh MPR dan pada tanggal 23 Juli 2001. Yang kemudian pada tanggal 23 Juli 2001 Megawati Soekarnoputri dikukuhkan serta dilantik sebagai presiden dan sehari setelahnya Hamzah Haz terpilih sebagai wakil presiden berikutnya. Namun, jika dibandingkan maka Presiden Megawati sedikit lebih mendapatkan keberuntungan karena dapat menjalankan pemerintahannya hingga akhir masa jabatannya. Akan tetapi, satu hal yang perlu diperhatikan yaitu bahwa pola politisasi birokrasi masih tetap mewarnai masa pemerintahan Presiden Megawati.

Presiden Megawati banyak belajar dari pengalaman pendahulunya (Gus Dur), beliau lebih berhati-hati dalam penyusunan kabinetnya. Meskipun politik akomodatif masih tetap dipertahankan guna menghindari adanya kepemimpinan yang mengedepankan kepentingan-kepentingan partai politik yang ada. Dampak dari strategi Presiden Megawati tersebut adalah sistem politik Indonesia menjadi lebih mengkolaborasikan sistem presidensial dan sistem parlementer hal itu dikarenakan Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) parlemen (politik) telah mengintervensi presiden dalam proses menetapkan susunan kabinetnya (birokrasi).

---

<sup>248</sup>Ichwan Arifin, "KIAI DAN POLITIK STUDI KASUS PERILAKU POLITIK KIAI DALAM KONFLIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) PASCA MUKTAMAR II SEMARANG" (2008).

## 1. Kebijakan Politik Yang Diterapkan Oleh Gus Dur Dalam Menyelesaikan Permasalahan Politik Indonesia

- Konflik Maluku Utara

Adanya konflik Maluku Utara diselesaikan oleh Gus Dur melalui Keppres Nomor 88 Tahun 2000 tentang darurat sipil di Provinsi Maluku dan Maluku Utara menyatakan bahwa, terhadap Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku ketentuan keadaan Darurat Sipil yang juga ada dalam Undang-undang Nomor 23/Prp/Tahun 1959 serta telah diubah dua kali terakhir dengan adanya Undang-undang Nomor 52/Prp/Tahun 1960<sup>249</sup>. Dalam beberapa kebijakan publik tersebut menyatakan bahwa isi Keppres yang dikeluarkan hanya memberikan ketegasan kepada para pemangku kekuasaan untuk menyatakan darurat sipil daerah, dalam hal ini yaitu seorang Gubernur sebagai penguasa yang bertugas melaksanakan Keppres tersebut dengan mengacu kepada Undang-undang nomor 23/prp/tahun 1959, tanpa harus merinci hal-hal mana yang harus dilakukan sebagai prioritas dan juga hal – hal sebagai sub prioritas. Sehingga saat pelaksanaan kebijakan tersebut muncul dilapangan penguasa darurat sipil daerah dapat menerjemahkannya dengan mengeluarkan petunjuk pelaksanaan (juklak) ataupun petunjuk teknis (juknis). Untuk memperjelas dinamika yang terjadi selama pemberlakuan kebijakan darurat sipil tersebut, hal-hal itu dapat dikuti oleh masyarakat dengan memahami peran dan posisi penting gubernur selaku penanggungjawab kebijakan darurat sipil daerah.

Saat terjadi konflik Maluku Utara satu-satunya cara agar masalah tersebut dapat diatasi yaitu menggunakan kekuatan militer. Akan tetapi, di lain pihak kerusuhan di Maluku Utara juga berkaitan dengan kehadiran tokoh-tokoh militer tertentu. Namun karena militer tidak homogen, memang Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) berpeluang menjalin kerja sama dengan faksi militer yang tidak terlibat dalam kerusuhan-kerusuhan di berbagai daerah. Beberapa ahli berpendapat bahwa strategi Gus Dur dalam menangani konflik di Maluku dan Maluku Utara sudah berada dalam jalur yang tepat dengan penolakan Gus Dur terhadap pemberlakuan penerapan darurat sipil atau

---

<sup>249</sup>Saiful Ahmad, "KEBIJAKAN POLITIK PRESIDEN ABDURAHMAN WAHID: UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK HORIZONTAL DI MALUKU UTARA Saiful" 2, no. 3 (2021): 409–31.

darurat militer disaat itu, akan tetapi Gus Dur lebih memilih cara penanganan militer secara terbatas<sup>250</sup>.

Saat Keppres Nomor 88 Tahun 2000 dikeluarkan maka dengan otomatis Presiden memerintahkan Gubernur untuk mewakili Presiden di daerah sebagai pengendali tertinggi serta penanggung jawab darurat sipil daerah. Ini berarti darurat sipil sangat mengandalkan wibawa dan kharismatik seorang gubernur untuk berjalan. Dalam penerapannya justru hal itulah yang menjadi masalah utama kebijakan tersebut, hal itu karena Gubernur yang ada di dua provinsi ini, wibawa dan dasar akseptabilitas kepemimpinan beserta semua jajaran pemerintah daerahnya sesungguhnya telah hancur dan porak-poranda. Wibawa dan kepemimpinan efektif di lapangan ada di tangan para "kapitan lapangan" yang dikomandani oleh para pemimpin komunitas. Oleh karena itu, setiap upaya yang didasari dan disokong oleh wibawa dan efektivitas dari gubernur maka kecil kemungkinannya akan berhasil.

Disisi lain DPR sendiri yang terdiri dari beberapa fraksi antara lain fraksi PDI P, fraksi Poros Tengah, fraksi PKB, fraksi Golkar dan beberapa fraksi lain, masing-masing telah memperhitungkan kekuatan-kekuatan politik dan implikasi-implikasi politik yang terjadi jika mereka mengambil inisiatif dalam menyelesaikan konflik di Maluku dan Maluku Utara, perhitungan yang mereka lakukan akhirnya menjadi komoditi politik, sehingga konflik yang terjadi di Maluku dan Maluku Utara ini menyebabkan banyak tragedi nyawa manusia yang terus menerus melayang, sedangkan DPR hanya sibuk menghitung konflik tersebut sebagai komoditi politik, dan pada akhirnya yang memiliki kepentingan dibelakang adalah Golkar, PDIP dan kelompok Poros Tengah dan beberapa parpol lain, karena itulah Gus Dur bergerak sendiri dengan mengeluarkan Keppres Nomor 88 Tahun 2000<sup>251</sup>.

- Konflik Etnis Tionghoa

Sejak Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjabat etnis Tionghoa mulai mendapatkan haknya sebagai warga negara di Indonesia. Gus Dur menghapus salah satu keputusan presiden sebelumnya yang melarang etnis

<sup>250</sup>Yastri Rustina, "SEBAGAI PRESIDEN RI KE-4 TERHADAP," 2008.

<sup>251</sup>A Muhaimin Iskandar, *Melanjutkan Pemikiran dan Perjuangan Gus Dur*, 2010.

Tionghoa untuk merayakan hari-hari besar terutama hari raya mereka, Gus dur bahkan ikut langsung secara simbolis bertahun baru Imlek bersama masyarakat Tionghoa setempat<sup>252</sup>. Sebelum menjabat sebagai presiden, Gus Dur memang sudah pernah mencetuskan suatu konsep bangsa Indonesia baru, yaitu bangsa Indonesia yang terdiri berbagai ras, salah satunya adalah "ras Cina", ketika Gus Dur menjadi Presiden dikeluarkanlah kebijakan anti diskriminasi yang merupakan sebuah momentum untuk terwujudnya bangsa Indonesia yang baru, dengan dikeluarkannya Inpres no. 6/2000 yang isinya mengenai pencabutan Inpres no. 14/1967 tentang larangan bagi etnis Tionghoa untuk menjalankan adat istiadat, kebudayaan, dan agama Konghucu.

Pluralisme yang terjadi di Indonesia tentunya tidak mungkin terlepas dari peran penting sosok Presiden KH. Abdurrahman Wahid atau sering disapa Gus Dur. Pemerintahan Indonesia pasca era kepemimpinan presiden Soeharto mulai berbenah, sedikit demi sedikit menjalankan kebijakan yang bersifat multikulturalisme, sementara kebijakan yang bersifat asimilasi telah ditinggalkan dan hanya digunakan secara teori bukan secara praktis. Maka dari itu, etnis Tionghoa di Indonesia sudah tidak lagi mendapatkan paksaan untuk berasimilasi total dengan masyarakat pribumi. Bahkan media massa Tionghoa, organisasi Tionghoa dan sekolah "bahasa Tionghoa" telah di buka kembali dan izinkan untuk beroperasi. Masyarakat etnis Tionghoa sangat senang dengan sikap pluralisme Gus Dur, hal itu karena bagi mereka mendapatkan pengakuan identitas adalah hal yang paling mereka inginkan selama kehidupannya di Indonesia, dengan begitu eksistensi budaya Tionghoa tak lagi terpisahkan dari budaya lain yang ada di Indonesia<sup>253</sup>.

- Konflik Aceh

Pada periode kedua transisi *democratic conflict governance*, Gus Dur mencoba mengurangi tensi politik di Aceh dengan menjanjikan referendum untuk Aceh<sup>254</sup>. Wacana tersebut akhirnya mendapatkan banyak kritik dari para tokoh

---

<sup>252</sup>Ali Mustajab, "KEBIJAKAN POLITIK GUS DUR TERHADAP CHINA TIONGHOA DI INDONESIA" 5, no. 1 (2015).

<sup>253</sup>Faur Rased, "Gus dur dan agama khonghucu di indonesia" (2017).

<sup>254</sup>Novri Susan, "Tata Kelola Konflik Demokrasi: Kasus Tata Kelola Konflik di Aceh," 2011.

politik nasional yang berpendapat bahwa kebijakan Gus Dur tersebut dapat menjadi ancaman disintegrasi bangsa, sehingga wacana kebijakan itu tidak pernah dapat terealisasi karena banyaknya desakan dari para tokoh politik nasional ini. Kendati demikian, Gus Dur masih ingin menyelesaikan masalah konflik Aceh melalui jalan lain yang damai yaitu negosiasi. Dalam negosiasinya Gus Dur mengundang Hendry Dunant Centre (HDC) sebagai pihak penengah konflik (*third party*). HDC merupakan sebuah organisasi berbasis di Swiss yang memiliki perhatian terhadap resolusi konflik. Setelah mendapatkan undangan dan izin dari Pemerintah Indonesia, HDC mengajukan sebuah proposal perdamaian pada Pemerintah Indonesia dan GAM.

Pada pertengahan tahun 2000, Pemerintah Indonesia dan GAM akhirnya sepakat untuk menandatangani jeda kemanusiaan yang secara teoritis merupakan upaya untuk mencegah dan mereduksi perang melalui conflict containment dengan cara memasukkan bantuan kemanusiaan. Akan tetapi, kesepakatan ini tidak berjalan efektif karena kedua belah pihak masih memiliki rasa curigan dan ketidakpercayaan satu sama lain. Pada awal 2001 perjanjian jeda kemanusiaan ini mengalami kegagalan dengan adanya kasus penyerangan ke perusahaan gas alam Exxon Mobil (LNG) dengan GAM yang dicurigai sebagai pelaku utamanya. Insiden penyerangan tersebut membuat TNI berpendapat bahwa kesepakatan jeda kemanusiaan ini hanya dimanfaatkan oleh pihak GAM untuk mereorganisasi dan merencanakan strategi mereka. Setelah kegagalan pelaksanaan kesepakatan jeda kemanusiaan, Gus Dur akhirnya tidak dapat lagi menghentikan ambisi TNI untuk melaksanakan kembali operasi militer di Aceh.

Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri akhirnya naik menjadi pengganti Gus Dur setelah ditetapkan oleh DPR RI pada pertengahan 2001. Setelah pergantian kekuasaan ini, konflik aceh inipun memasuki periode ketiga yaitu transisi tata kelola penyelesaian konflik demokratis di Indonesia<sup>255</sup>. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati salah satunya melanjutkan upaya perdamaian dengan memberikan kebijakan otonomi khusus pada Aceh dan merubah kembali Aceh menjadi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). NAD akan mendapatkan 70% hasil pendapatan dari eksplotiasi gas cair di daerahnya sendiri

---

<sup>255</sup>Denny J.A, *Melewati Perubahan : Sebuah Catstan Atas Transisi Demokrasi Indonesia*, 2006.

dan diperbaharui delapan tahun kedepan menjadi 50%. Dengan sebagai daerah dengan status otonomi khusus, NAD juga memiliki hak untuk mengimplementasikan hukum dan syariah sesuai agama Islam. Walaupun demikian, otonomi khusus tentunya tidak selamanya bisa terlaksana secara konsisten pasti ada beberapa masalah yang bisa muncul lagi di masa depan.

- Konflik Papua

Salah satu konflik yang juga terjadi di era kepemimpinan Gus Dur adalah konflik Papua, Pendekatan dalam penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Gus Dur berbeda dengan saat masa rezim Habibie, yang mana Gus Dur lebih mengedepankan keterbukaan dan keleluasaan kepada orang Papua dalam bertindak melalui interaksi langsung dengan masyarakat setempat. Misalnya Gus Dur pernah menghabiskan malam tahun baru di Papua untuk menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat pada pemimpinnya, hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Sejak saat itu muncul rasa saling percaya antara pemerintah dengan masyarakat Papua dengan diberikannya kebebasan bagi Papua dalam melaksanakan apa yang mereka kehendaki seperti upacara pengibaran bendera Bintang Fajar/Kejora tetapi tentunya masih dibawah bendera Merah Putih<sup>256</sup>.

Kebebasan lain yang diperoleh oleh orang-orang Papua pada masa pemerintahan Gus Dur pengadaan musyawarah besar (mubes) yang diadakan pada 23 – 26 Februari 2000, musyawarah tersebut dihadiri ribuan masyarakat dari seluruh wilayah Papua. Mubes yang dilaksanakan di Papua tersebut membahas tiga ide utama selain itu juga ditetapkan bahwa akan dilaksanakannya Kongres Rakyat Papua. Gus Dur akhirnya memutuskan satu kebijakan sebagai *generous donation*, yang juga dilakukan oleh Freeport, yaitu Gus Dur menyumbang dana sebesar satu milyar rupiah untuk biaya penyelenggaraan Kongres Rakyat Papua ini. Dalam sejarahnya kongres ini lebih dikenal dengan sebutan sebagai Kongres Rakyat Papua ke dua yang diadakan di Jayapura pada tanggal 29 Mei – 4 Jun 2000, Kongres Rakyat Papua dihadiri oleh semua kalangan pimpinan rakyat Papua sebagai wakil-wakil dari masing-masing wilayah ataupun elemen

---

<sup>256</sup>Sri Muryantini, "Konflik Otonomi Khusus Papua dan Dampaknya Terhadap Hubungan Pusat dan Daerah di Indonesia," *Icosh2019* 19, no. 1 (2019): 55–59.

masyarakat di Papua sama seperti kongres pertama yang diadakan pada Oktober 1961 tepatnya pada masa pemerintahan Belanda<sup>257</sup>.

Hasil akhir dari kongres ini menyatakan bahwa rakyat Papua siap untuk menjadi negara yang independent dengan membentuk pemerintahan sendiri serta meminta kepada Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, dan PBB untuk bertanggungjawab atas hak politik mereka. Kongres juga mengumumkan untuk membentuk lembaga eksekutif yang disebut sebagai Presidium Dewan Papua (PDP). Theys Hiyo Eluay terpilih sebagai ketua dan Tom Beanal sebagai wakil ketua dan Muhammad Thaha Al Hamid sebagai sekretaris jenderal. Akan tetapi demi menjaga integritas Papua dengan Indonesia maka diberikan jalan tengah berupa pemberian otonomi khusus pada Papua<sup>258</sup>.

Selain itu, Gus Dur juga setuju untuk mengubah nama provinsi Irian Jaya menjadi Papua dimulai pada 25 Desember 2000, salah satu langkah yang baik Gus Dur yang menjadikannya dihormati dan disayangi dari banyak masyarakat Papua. Gus Dur berjanji bahwa Papua (dan juga Aceh) akan diberi otonomi yang luas dalam sistem pemerintahan Indonesia. Walaupun beberapa pihak berpikir bahwa keputusan Gus Dur ini benar-benar meresahkan terutama bagi kalangan elit politik di Jakarta dan juga militer. Akibatnya, Gus Dur akhirnya diturunkan dari kursi kepresidenan oleh DPR RI melalui mosi tidak percaya<sup>259</sup>.

## **2. Kelebihan Dan Kekurangan Kebijakan Politik Gus Dur**

Gus Dur adalah sosok seorang pemimpin yang berasal dari tokoh besar, sehingga dari awal kepemimpinannya sudah menjadi nilai tersendiri bagi para pengikutnya. Dalam proses perkembangan politik di Indonesia, Gus Dur memiliki peran penting didalamnya, sosok Gus Dur yang bisa dikatakan sebagai tokoh politik yang transformasional. Hal ini bisa dilihat pada perubahan-perubahan yang sudah diimplementasikan oleh Gus Dur dalam bentuk kebijakan-kebijakan politiknya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tipe kepemimpinan politik Gus Dur adalah Transformasional, kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya :

### **1. Pembubaran Departemen Penerangan dan Departemen Sosial**

---

<sup>257</sup>Syafuan Rozi, *POLITIK IDENTITAS : Problematika dan Paradigma Solusi Keetnisan Versus Keindonesiaan di Aceh, Riau, Bali dan Papua*, 2019.

<sup>258</sup>M.Si. Dr. Stepanus Malak dan OTONOMI, *Otonomi khusus papua*, 2012.

<sup>259</sup>Al-Zastrouw Ng., *Gus Dur, Siapa Sih Sampean ? Tafsir Teoritik atas Tindakan dan Pernyataan Gus Dur*, 1999.

2. Membuka Hubungan Dagang Dengan Israel Kebijakan
3. Pemisahan TNI-POLRI
4. Seringnya melakukan reshuffle cabinet
5. Mengeluarkan Dekrit Presiden
6. Kunjungan Kerja ke Luar Negeri
7. Konflik Internal PKB Konflik

- Kelebihan

Kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur memiliki kelebihan dan menjadi ciri khas tersendiri seperti menjunjung tinggi demokrasi hal itu bisa kita lihat dari Irian Jaya yang diperbolehkan untuk merubah namanya menjadi Papua serta pemberian otonomi khusus untuk Daerah Aceh dan Papua tersebut. Gus Dur juga melakukan reformasi pada pemerintahan saat itu dengan kebijakan seperti pembubaran departemen penemerangan dan departemen sosial serta kebijakan yang tegas dengan melakukan penggantian para pejabat yang dianggap melakukan korupsi dan tidak bekerja dengan baik. Selain itu, kebijakan Gus Dur untuk bepergian ke luar negeri bukanlah tanpa maksud yang tidak jelas, Gus Dur membentuk suatu hubungan baik dengan Negara lain yang beliau kunjungi baik itu di Benua Asia, Afrika, Amerika ataupun Eropa dengan cara menunjukkan eksistensi Negara Indonesia dikancah Internasional. Gus Dur juga berfokus pada perlindungan dan pengakuan terhadap kaum minoritas sebagai bentuk humanisme dengan mengeluarkan PP No. 6 Tahun 2000 mengenai pemulian hak sipil menganut agama Konghucu dan menetapkan tahun baru China (Imlek) sebagai libur fakultatif. Beragam kebijakan politik Gus Dur lebih mengedepankan pluralisme bagi semua kalangan masyarakat di Indonesia<sup>260</sup>.

- Kelemahan

Dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tentunya juga terdapat beberapa kekurangan dalam implementasinya, seperti pencopotan menteri dan pejabat secara tiba-tiba yang menimbulkan perbedaan pendapat dan tanda tanya besar dikalangan masyarakat,

---

<sup>260</sup>Waris Wisnu W dkk., "Kepemimpinan Abdurrahman Wahid," no. June (2019).

diperbolehkannya bendera bintang kejora berkibar di Papua yang dianggap sebagai bentuk pro terhadap kalangan radikal, serta kebijakan yang kontroversial lainnya seperti pengumuman dekrit pada 23 Juli 2001, yang berisi (1) membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. (2) mengembalikan kedulatan ketangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilu dalam waktu satu tahun. (3) menyelamatkan gerakan reformasi total dari unsur-unsur orde baru dengan membekukan Partai Golongan Karya sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung, untuk itu kami memerintahkan seluruh jajaran TNI dan Polri untuk mengamankan langkah penyelamatan NKRI dan menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang serta menjalankan kehidupan sosial ekonomi seperti biasa.

Setidaknya, ada tiga kekurangan atau kelemahan dari kebijakan politik yang dilakukan oleh Gus Dur, tiga hal tersebut disampaikan oleh Mahfud MD yang juga pernah menjabat sebagai salah satu menterinya<sup>261</sup>. Tiga kelemahan kepemimpinan Gus Dur itu diantaranya yaitu pertama, Gus Dur tidak terlalu memperhatikan detail dan teknis dari persoalan yang sedang diselesaikan, begitu memerintahkan sesuatu, Gus Dur tidak lagi mengurus kelanjutan dan masalah teknis dari masalah tersebut. Kedua, Gus Dur seringkali suatu persoalan sekalipun persoalan tersebut rumit. Ucapan-ucapannya yang sangat populer yaitu, “begitu saja kok repot”, menjadi bukti dari kebiasaannya untuk menyederhanakan dan bersikap enteng terhadap suatu masalah. Padahal, banyak sekali masalah yang terlihat enteng dan sederhana akan tetapi di dalam dunia politik bisa berkembang menjadi masalah yang besar. Ketiga, Gus Dur merupakan sosok yang mempunyai pendirian yang tegas, beliau tidak mau melakukan kompromi jika dirasa bahwa kompromi itu dapat merugikan dirinya sendiri dalam dunia politik. Padahal kompromi dan pendekatan terhadap lawan merupakan salah satu bagian penting di dalam strategi di dunia politik.

Selain itu, Gus Dur memiliki watak atau sikap terlalu cepat percaya pada informasi dari bawahannya. Bukan itu saja, setelah mendapat informasi tersebut sebagian kalangan berpendapat bahwa Gus Dur tidak melakukan validasi terlebih

---

<sup>261</sup>Ahmad Suaedy, *Gus Dur, Islam Nusantara & Kewarganegaraan Bineka*, 2018.

dahulu terhadap informasi tersebut dan kerap kali langsung melemparkannya kepada publik dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang kontroversial<sup>262</sup>. Akibatnya, publik pun heboh dan menjadikan pernyataan yang dilempar Gus Dur sebagai isu publik yang baru. Melalui hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengambilan keputusan Gus Dur cenderung terlihat personal, yang pada akhirnya menganggap bahwa Gus Dur secara *personality* sebagai pemimpin bangsa. Orang-orang yang berada dalam sekeliling Gus Dur tentunya dapat memanfaatkan hal ini, karena mereka memiliki posisi yang tidak terlihat, dan sulit untuk diidentifikasi.

---

<sup>262</sup>Tjipta Lesmana, *Dari Soekarno Sampai SBY : Intrik & Lobi Politik Para Penguasa*, 2008.

## BAB XII

### MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

#### **Biografi Megawati Soekarnoputri**

Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati Soekarnoputri lahir di Yogyakarta, 23 Januari 1947. Sebelum diangkat sebagai Presiden, ia adalah Wakil Presiden ke-8 Republik Indonesia di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid. Megawati adalah putri sulung dari presiden pertama Republik Indonesia yang juga proklamator, Soekarno dan Fatmawati. Megawati.

Wanita bernama lengkap Dyah Permata Megawati Soekarnoputri ini memulai pendidikannya dari SD hingga SMA di Perguruan Cikini Jakarta. Selama itu, ia kuliah di dua universitas, yaitu Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung (1965-1967) dan Jurusan Psikologi Universitas Indonesia (1970-1972). Meski terlahir dari keluarga politikus terkemuka, Mbak Mega, demikian para pendukungnya menyebutnya, bukanlah pakar politik. Bahkan, Megawati diremehkan oleh kawan dan lawan politiknya. Dia bahkan dianggap sebagai pemula politik, terutama pada tahun 1987. Saat itu, Partai Demokrat Indonesia (PDI) menempatkannya di antara calon anggota legislatif daerah pemilihan Jawa Tengah, guna meningkatkan perolehan suara.

Keterlibatan Megawati dalam politik berarti menolak persetujuan keluarganya untuk tidak terjun ke dunia politik. Trauma politik keluarga telah memukulnya. Megawati tampaknya menjadi yang pertama kampanye PDI, meskipun dia tidak banyak bicara. Itu berhasil. Jumlah suara untuk PDI meningkat. Dan terpilih menjadi anggota DPR/MPR. Pada tahun yang sama, Megawati terpilih sebagai Ketua DPC PDI Pusat Jakarta Pusat.<sup>263</sup>

Namun, kehadiran Mega di gedung DPR/MPR sepertinya tidak terasa. Rupanya, Megawati tahu dirinya masih dalam tekanan. Selain diam, ia juga memilih untuk tidak menjauh dari kondisi politik saat itu. Alhasil, ia lebih memilih melakukan lobi politik di luar kediaman lembaga yang mewakili rakyat.

---

<sup>263</sup> 'Biografi Presiden Megawati Soekarnoputri- Situs Web Kepustakaan Presiden'  
<[https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/biography/?box=detail&presiden\\_id=5&presiden=megawati](https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/biography/?box=detail&presiden_id=5&presiden=megawati)> [accessed 25 October 2022].

Lobi politiknya, yang merupakan kegiatan *silent operations*, langsung atau tidak langsung, menyebabkan munculnya bintang-bintang besar di dunia politik. Pada tahun 1993, ia terpilih sebagai presiden DPP PDI. Hal ini membuat pemerintah terkejut saat itu.

Kenaikan Mega juga merupakan cerita yang menarik. Saat itu, Kongres PDI di Medan berakhir tanpa keputusan. Pemerintah mendukung Budi Hardjono menggantikan Soerjadi. Kemudian dilanjutkan dengan mengadakan kongres luar biasa di Surabaya. Dalam kongres ini, nama Mega muncul dan mengalahkan Budi Hardjono, calon yang didukung pemerintah. Mega terpilih sebagai presiden PDI. Setelah itu, status Mega sebagai Ketua Umum PDI semakin ditingkatkan dengan Musyawarah Nasional PDI di Jakarta.

Mega terus berjuang. PDI terbelah menjadi dua. Secara khusus, PDI dipimpin oleh Megawati dan PDI dipimpin oleh Soerjadi. Massa PDI lebih memihak Mega. Namun, pemerintah telah mengakui Soerjadi sebagai ketua sah PDI. Akibatnya, PDI yang dipimpin Mega tidak bisa mengikuti pemilihan umum 1997. Setelah rezim Orde Baru runtuh, PDI Mega berubah nama menjadi PDI-P. Partai politik berlambang banteng besar bermulut putih itu memenangkan pemilihan umum 1999 dengan meraih lebih dari tiga puluh persen suara. Kemenangan PDIP menempatkan Mega pada posisi paling cocok menjadi presiden dibandingkan kader partai lainnya. Namun, dalam SU-MPR 1999, Mega kalah.<sup>264</sup>

Namun, posisi kedua tampaknya menjadi panggung untuk kemudian memantapkan posisi nomor satu untuk Mega di tanah air. Kurang dari dua tahun, pada 23 Juli 2001, anggota MPR secara aklamasi mengangkat Megawati sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia menggantikan KH Abdurrahman Wahid. Megawati menjabat sebagai presiden hingga 20 Oktober 2003. Setelah masa jabatannya berakhir, Megawati kembali mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan presiden langsung tahun 2004. Namun, dia tidak menjadi presiden

---

<sup>264</sup> 'Biografi Presiden Megawati Soekarnoputri- Situs Web Kepustakaan Presiden'.

setelah itu. ketika dia dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, yang akhirnya menjadi presiden Presiden Republik Indonesia ke-6<sup>265</sup>.

### **Masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri**

Pasangan Megawati – Hamzah Haz mengumumkan kabinetnya pada tanggal 9 Agustus 2001. Kabinetnya bernama “*Kabinet Gotong Royong*”. Program Kerja Kabinet tersebut di antaranya sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan otonomi yang tangguh.
- 2) Menyehatkan bank.
- 3) Memantapkan fungsi dan peran TNI dan Polri.
- 4) Mewujudkan supremasi hukum.

Pada masa pemerintahan Megawati, banyak sekali hal yang sudah dicapai. Diantaranya mampu menekan angka jumlah kemiskinan tahun 2003, devisa stabil, tingkat inflasi rendah, dan lain sebagainya. Bidang politik, pemerintahan Megawati dinilai mampu meletakkan dasar-dasar demokrasi dengan benar, perjuangan dan cita-cita reformasi mampu diapresiasi Megawati dalam masa pemerintahannya. Amendemen UUD 45 mampu diselesaikan dengan lancar. Selain itu, pada masa Megawati pertamakalinya sistem pemilihan langsung diselenggarakan, tonggak-tonggak demokrasi perlahan mulai ditegakkan, salah satunya dengan kebebasan pers. Dalam hal politik, Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi, baik teritorial, sosial, maupun wawasan.

Di bidang penegakan hukum, cita-cita penegakan hukum dan tekad untuk menuntut para pelaku KKN masih jauh dari harapan. Selama hampir 3 tahun berkuasa, Megawati tidak mampu memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) secara tuntas. Sementara itu, kewibawaan hukum dan penegakan hukum di mata masyarakat semakin hari semakin berkurang. Di bidang pertahanan dan keamanan, penguatan fungsi dan peran TNI dan Polri belum dapat

---

<sup>265</sup>“Biografi Presiden - Situs Web Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Biografi Presiden - Situs Web Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia. (n.d.). Retrieved October 25, 2022, from <https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/biography/?box=detai>,” t.t.

dipisahkan secara utuh<sup>266</sup>. Ini karena Megawati kurang kooperatif dan berkoordinasi dengan kabinet yang berfungsi mengatur gas rumah kaca. Masa kepresidenan Megawati tidak terlepas dari politik luar negeri. Adanya kebijakan politik baru dalam pemerintahan Megawati yang mulai berani menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara di luar Amerika<sup>267</sup>.

Dalam konteks politik luar negeri, prioritasnya adalah menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga, terutama dengan kawasan ASEAN dan Leste Timur yang pernah menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Tiongkok Republik Indonesia. Megawati keluar masuk negara lain hanya untuk menyelesaikan masalah kerjasama/perselisihan yang timbul. Kunjungan tersebut merupakan keniscayaan dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Megawati mengikuti kebijakan luar negeri yang liberal dan aktif dari para *founding fathers*, yang telah diupayakan sejak puluhan tahun lalu. Banyak momentum yang terjadi saat Megawati menjadi presiden, namun Megawati menunjukkan kepada bangsa Indonesia bahwa dia memiliki kemampuan untuk menjadikan Indonesia negara yang lebih baik.

Setiap kebijakan yang diterapkan Megawati berdampak negatif bagi Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan outsourcing. Megawati telah mengeluarkan kebijakan berupa penetapan rencana *outsourcing* bagi karyawan<sup>268</sup>. Sistem ini merugikan karyawan dan pekerja di seluruh Indonesia. Sistem tersebut merupakan sistem tenaga kerja tidak kontrak, namun pekerja dapat diberhentikan sewaktu-waktu jika sudah tidak dibutuhkan lagi. Kebijakan *outsourcing* ini banyak diminati para sarjana, karena ironisnya Menteri Tenaga Kerja RI saat itu adalah Jacob Nuawea dari PDI-P, yang sebelum menjadi Menteri dikenal sebagai pejuang buruh.

Mirip dengan Presiden sebelumnya, banyak pro dan kontra. Meski banyak pihak menentangnya, Megawati tetap memimpin pemerintahan yang dianggapnya benar. Perjalanan Megawati menjadi presiden, Megawati memiliki banyak ide

---

<sup>266</sup>Syamsu Hadi, "Melawan Politik Orde Baru," dalam *Presiden Megawati Liku-Liku Kehidupan*, 8 ed. (Jakarta: Pustaka Simponi, 2004).

<sup>267</sup>Kumolo, *Megawati Soekarnoputri Presiden Pilihan Rakyat* (Jakarta: Global Publika, 2004).

<sup>268</sup>A Soebachman, "Spirit 7 Presiden RI," dalam *Spirit 7 Presiden RI* (Yogyakarta, 2015), 154.

bagus namun tidak semua ide tersebut diwujudkan oleh Megawati. Banyak orang mengkritiknya karena mengeluhkan pekerjaannya<sup>269</sup>. Namun Megawati tetap bersabar, Megawati lebih memilih diam sambil terus bekerja, karena diam adalah jalan politik dan hak Megawati.

Sejak awal, Presiden Megawati memilih untuk tidak terlalu banyak bicara soal politik. Sebab, menurutnya, itu merupakan strategi untuk menghadapi dunia politik Indonesia yang suram, yang sarat dengan permainan dan intrik politik. Menurutnya, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan selain menyelesaikan masalah sebenarnya yang disebabkan oleh kesalahpahamannya<sup>270</sup>. Sikapnya yang sangat bijak dalam menyikapi segala persoalan yang dihadapinya itulah yang membuat citra Megawati di mata masyarakat Indonesia. Sosok perempuan yang membangun partai politik PDI Perjuangan yang memenangkan dua pemilihan umum dan menjadi salah satu partai utama di Indonesia.

### **Kebijakan Presiden Megawati Soekarnoputri**

Pada masa pemerintahannya, Indonesia masih menghadapi krisis di beberapa daerah. Salah satunya adalah isu yang sangat penting, yaitu pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Oleh karena itu, berbagai kebijakan telah dikembangkan untuk mengatasinya. Berikut adalah kebijakan-kebijakan yang diberlakukan pada masa pemerintahan Megawati:

#### **A. Kebijakan Bidang Politik**

Salah satu masalah yang harus dihadapi Presiden Megawati adalah situasi di Indonesia yang masih labil dengan perkembangan multidimensi. Inilah sisa-sisa krisis ekonomi, moneter, politik, dan keamanan multidimensi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri telah menganjurkan mengatasi krisis ekonomi dan politik dengan upaya keras, mencoba membangun tatanan politik baru dengan mengubah undang-undang UUD 1945. Pemerintah kemudian memperkenalkan undang-undang dan peraturan yang belum dimiliki Indonesia agar dapat menjalankan tugas konstitusionalnya dengan baik.

---

<sup>269</sup>Ade Ma'ruf, *Megawati Soekarnoputri Riwayat Pribadi Dan Politik Putri Bung Karno* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013).

<sup>270</sup>Syamsu Hadi, "Menempa Diri Di Kebagusan," dalam *Presiden Megawati Liku-Liku Kehidupan* (Jakarta: Pustaka Simponi, 2004), 16.

Selanjutnya, Perubahan UUD 1945 juga memasukkan upaya pemerataan lembaga negara untuk mendorong demokratisasi lembaga negara. Berbagai implementasi orde baru dalam politik politik di bawah pemerintahan Megawati adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem partai baru
- 2) Sistem pemungutan suara baru
- 3) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung
- 4) Mengatur mekanisme
- 5) Penggantian atau pemberhentian sementara (hak partai untuk memberhentikan anggota DPR atau DPR)

#### B. Kebijakan Di Bidang Ekonomi

Di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, kondisi ekonomi di Indonesia semakin membaik. Meski belum sepenuhnya pulih, beberapa indikator ekonomi makro telah menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Hal ini disebabkan kebijakan ekonomi di bawah pemerintahan Megawati bertujuan untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Misalnya dengan melakukan langkah-langkah stabilisasi fiskal, memulihkan intermediasi perbankan, dan memperbaiki ekonomi makro. Selain itu, Megawati juga menerapkan kebijakan moneter Bank Indonesia untuk mengatasi inflasi dengan mengendalikan jumlah uang beredar. Selain itu, kebijakan Megawati pada era Reformasi juga mendorong investasi asing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.<sup>271</sup>

Investasi diyakini dapat membuka lapangan kerja baru dan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Untuk mendorong peningkatan investasi, Megawati mendirikan Kelompok Penanaman Modal Nasional yang dipimpinnya langsung. Pemerintah juga meningkatkan kepastian regulasi melalui program reformasi regulasi, sehingga investor tidak perlu khawatir berinvestasi di Indonesia. Upaya lain yang juga dilakukan Megawati adalah menerapkan kebijakan *counter-buying* yang bertujuan untuk mendorong peningkatan ekspor nonmigas ke Indonesia. Berkat strategi tersebut, volume ekspor non-migas terus meningkat hingga mencapai 6% atau USD 50,7 miliar.

---

<sup>271</sup> B A B li, Gus Dur, and Megawati Di, 'Bab II Kebijakan Ekonomi Pasar Sebelum Masa Semerintahan SBY', 1999, 17–35.

### C. Kebijakan Di Bidang Sosial

Pada masa pemerintahannya, Megawati masih menghadapi kemiskinan di Indonesia, sehingga diberlakukan Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan. Pemerintah telah membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) yang bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Megawati juga telah meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Program lain yang digemari masyarakat adalah beras miskin (raskin) yang dijual Rp 1.000/kg. Sementara itu, di bidang kesehatan, pemerintah mengeluarkan kartu sehat, yaitu program pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin. Di bidang pendidikan, Megawati mengalokasikan dana untuk bidang pendidikan dan pendidikan nonformal. Dana ini selanjutnya akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan dan pemerataan kesempatan, serta meningkatkan kualitas lembaga pendidikan. Pemerintah juga mendirikan Education for All (EFA), untuk mempercepat wajib belajar menjadi 9 tahun di Indonesia.<sup>272</sup>

### D. Kebijakan Hukum

Pada masa Megawati, sistem hukum Indonesia masih belum berfungsi optimal. Banyak hakim dan pejabat pengadilan yang korup sehingga sulit menemukan pejabat yang jujur. Untuk itu, Megawati berusaha membangun pemerintahan yang telah direformasi, bertujuan untuk mewujudkan Indonesia yang berkeadilan. Beberapa kebijakan yang dilakukan Megawati untuk mengatasi gejala hukum di Indonesia saat itu adalah sebagai berikut:

- 1) Membentuk konsep reformasi hukum yang komprehensif
- 2) Meninjau undang-undang yang ada, mengubah dan memperbaruinya
- 3) Mengumumkan sejumlah peraturan hukum baru
- 4) Pemutakhiran peraturan hukum untuk mengoptimalkan peran dan fungsi badan hukum
- 5) Menyelesaikan masalah hukum di masa lalu

---

<sup>272</sup> 'Kebijakan Megawati Soekarnoputri Pada Masa Reformasi Halaman All - Kompas.Com' <<https://www.kompas.com/stori/read/2022/03/31/080000179/kebijakan-megawati-soekarnoputri-pada-masa-reformasi?page=all>> [accessed 5 December 2022].

- 6) Peningkatan kapasitas peradilan
- 7) Mensosialisasikan peraturan hukum tentang hak asasi manusia (HAM)

#### E. Kebijakan Anti Korupsi

Sejak era Orde Lama, korupsi sudah mengakar di Indonesia dan terus berlanjut. Beberapa kebijakan yang digagas Megawati untuk memberantas korupsi adalah sebagai berikut:

- 1) Mengubah kebijakan untuk mendorong masyarakat agar tidak korupsi
- 2) Menata kembali struktur dan insentif yang ada
- 3) Reformasi Lembaga Peradilan
- 4) UU Emisi No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- 5) Menerbitkan keputusan presiden tentang pembentukan panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Selain itu, di bawah pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri juga banyak persoalan yang harus dihadapi. Antara lain, ada tiga masalah utama di negeri ini, yaitu:

- 1) Adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
- 2) Pengangguran menurun dan tingkat ekonomi menurun.
- 3) Penolakan otoritas hukum.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, Megawati telah meluncurkan 6 kebijakan, dengan rincian sebagai berikut:

##### a. Penundaan pembayaran utang luar negeri

Soeharto mewarisi utang luar negeri (publik dan swasta) sebesar US\$ 150,80 miliar. Kebijakan Presiden Megawati mencoba memperbaiki hal ini dengan meminta penundaan pembayaran utang luar negeri pada pertemuan ke-3 Club of Paris pada 12 April 2002. Pada tahun 2003, subsidi pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116,3 triliun. Melalui kebijakan ini, utang luar negeri Indonesia telah berkurang menjadi \$134 miliar. Salah satu keputusan terpenting Presiden Megawati adalah mengakhiri hubungan kerjasama antara Indonesia dan IMF.<sup>273</sup>

##### b) Meningkatkan pendapatan per kapita

---

<sup>273</sup> Zulkifli 2020 andi ika, *PEREKONOMIAN INDONESIA SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA*, 2020.

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1997 telah menyebabkan turunnya pendapatan per kapita. Pada tahun 1997, pendapatan per kapita Indonesia hanya US\$465. Berkat kebijakan pemulihan keamanan, situasi di Indonesia menjadi tenang dan Presiden Megawati telah meningkatkan pendapatan per kapita cukup signifikan, yakni sekitar US\$930.

c) Indeks Harga Saham Gabungan naik

Ketenangan Megawati diterima pasar dengan baik. Dalam sebulan setelah dilantik, nilai tukarnya meroket menjadi Rp 8.500 per dolar AS. Indeks saham gabungan juga terus membaik hingga mencapai 800.

d) Pemerataan badan usaha milik negara

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menekan inflasi, Presiden Megawati mengambil langkah kontroversial dengan memprivatisasi BUMN. Indosat dijual oleh pemerintah pada tahun 2003. Hasil penjualan tersebut berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1% meski menghadapi inflasi yang hanya sebesar 5,06%.

e) Meningkatkan ekspor

Berpotensi meningkatkan kinerja ekspor. Pada tahun 2002, nilai ekspor sebesar USD 57,158 miliar dan nilai impor sebesar USD 31,229 miliar. Pada tahun 2003, ekspor juga meningkat menjadi USD 61,02 miliar dan impor menjadi USD 32,39 miliar.

Kebijakan antikorupsi Presiden Megawati mengkonkretkan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masih eksis hingga saat ini. Meski sudah berdiri, KPK belum melakukan langkah konkrit yang signifikan. Peringkat Indonesia sebagai negara terkorup terus merosot.

Pada tahun 2002, dari 102 negara menduduki peringkat ke-4. Pada tahun 2003, Indonesia menduduki peringkat ke-6 dari 113 negara. Penunjukan MA Rachman sebagai Jaksa Agung juga tidak terlalu penting bagi penegakan hukum, karena tidak ada retorika antikorupsi yang kuat.<sup>274</sup> Presiden Megawati adalah

---

<sup>274</sup> 'Evaluasi Satu Tahun Komisi Pemberantasan Korupsi (2020) | ICW'  
<<https://antikorupsi.org/id/article/evaluasi-satu-tahun-komisi-pemberantasan-korupsi-2020>>  
[accessed 5 December 2022].

presiden yang meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi. Hal itu ditandai dengan keberhasilannya menyelenggarakan Pemilu 2004 dengan aman dan damai. Untuk pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan dua kali pemilu, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden secara langsung.<sup>275</sup>

f) Pemilu 2004

Pemilu 2004 yang diselenggarakan pada 5 April 2004 mempertemukan 24 partai politik. Adapun nama masing-masing partai politik adalah sebagai berikut:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2. Partai Golkar
3. Partai Persatuan pembangunan
4. Partai Kebangkitan Bangsa
5. Partai Amanat Nasional
6. Partai Bulan Bintang
7. Partai Bintang Reformasi
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
10. Partai Demokrat
11. Partai Karya Peduli Bangsa
12. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan
13. PNI Marhaenisme
14. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan
15. Partai Sarikat Indonesia
16. Partai Perhimpunan Indonesia Baru
17. Partai Damai Sejahtera
18. Partai Patriot Pancasila
19. Partai Buruh Sosial Demokrasi
20. Partai Merdeka
21. Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia
22. Partai Persatuan Daerah

---

<sup>275</sup> 'Pilpres 2004: Pertama Dalam Sejarah Pemilihan Presiden Digelar Langsung'  
<<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/06050031/pilpres-2004--pertama-dalam-sejarah-pemilihan-presiden-digelar-langsung->> [accessed 5 December 2022].

23. Partai Penegak Demokrasi Indonesia

24. Partai Pelopor

Setelah berhasil memilih anggota legislatif, pemerintah melanjutkan agenda pemilu kedua, yaitu pemilihan presiden langsung oleh rakyat. Calon presiden dan wakil presiden yang maju adalah:

- a) Megawati – Hasyim Muzadi, didukung oleh partai politik PDIP.
- b) Wiranto – Sholahudin Wahid, didukung oleh partai Golkar.
- c) Amien Rais – Siswono Yudhohusodo, didukung oleh Partai Amanat Nasional.
- d) Hamzah Haz – Agum Gumelar, didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan.
- e) Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla, didukung oleh Partai Demokrat.

Pemilihan presiden dan wakil presiden putaran pertama dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004. Pemilihan putaran pertama jatuh pada pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla dan pasangan Megawati - Hasyim. Calon presiden dan wakil presiden lainnya didiskualifikasi karena gagal memperoleh jumlah suara yang signifikan sebagaimana diharuskan oleh undang-undang.<sup>276</sup>

Pemilihan putaran kedua harus dilakukan, mengingat tidak ada satu pun pemenang pemilihan presiden dan wakil presiden putaran pertama yang mendapatkan 50% suara. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada tanggal 20 September 2004.

Dalam pemilihan tersebut, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla akhirnya mengalahkan pasangan Megawati - Hasyim. Kemenangan ini menjadi babak baru bagi Indonesia di bawah kepemimpinan presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat

### **Kelebihan Dan Kekurangan Dari Kebijakan Presiden Megawati Soekarnoputri**

---

<sup>276</sup> 'Pilpres 2004: Pertama Dalam Sejarah Pemilihan Presiden Digelar Langsung'.

Di antara berbagai kebijakan di bawah pemerintahan Presiden Megawati, terdapat berbagai pro dan kontra. Inilah pro dan kontra<sup>277</sup>.

#### Kelebihan

- Mampu menstabilkan fundamental (fundamental) ekonomi makro antara lain BI rate, inflasi, nilai rupiah terhadap dollar, pertumbuhan ekonomi dan rate poor.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai ditugaskan untuk memberantas KKN, termasuk menangkap dan memenjarakan pejabat koruptor di bawah Presiden Soeharto dan menangkap korporasi bermasalah, seperti Nurdin Halid.
- Indonesia berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003, menandai berakhirnya krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1998.
- Berhasil menghidupkan kembali sistem perbankan nasional yang mengalami krisis pasca krisis ekonomi tahun 1998.

#### Kekurangan

- Dianggap gagal melaksanakan program reformasi serta tidak mampu mengatasi krisis yang menimpa Indonesia.
- Ada dugaan kepentingan ekonomi dan politik di balik pemerintahan Presiden Megawati.
- Kurangnya pemahaman bidang ekonomi, sehingga kebijakan yang dikeluarkan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

---

<sup>277</sup>Aruma Nurjannah, "Megawati Presidential Political Policy In 2001-2004" 2, no. 2252 (2018): 52-64.

## **BAB XII**

### **SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

#### **A. BIOGRAFI**

Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dilahirkan pada tanggal 9 September 1949 di dusun Tremas, desa Arjosari, Pacitan Jawa Timur. SBY atau dalam keluarganya dipanggil “Sus” dilahirkan dari pasangan orang tua Raden Soekotjo (ayah) dan Siti Habibah (ibu). Jika ditelusuri silsilahnya dari pihak ayah maka masih ada hubungan darah dengan Pakubuwana II<sup>278</sup>.

SBY menghabiskan masa kecil dan remajanya di Pacitan. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Akademi Militer Indonesia atau Akabri dan lulus tahun 1973 menjadilulusan terbaik dan mendapat penghargaan Adhi Makayasa dan Tri Sakti Wiratama yang berarti memiliki prestasi gabungan tertinggi yaitu meliputi mental, fisik dan intelektual.

Setelah lulus dari Akabri, tahun 1974 sampai 1976, SBY memulai karir di Dan Tonpan Yonif LINUD 330 Kostrad.

Tahun 1976, SBY mengambil kuliah di Airborne School dan US Army Rangers, American Language Course (Lackland-Texas), Airborne and Ranger Course (Fort Benning) Amerika Serikat.

Berikut ini adalah rangkuman pendidikan yang ditempuh oleh Susilo Bambang Yudhoyono<sup>279</sup>

- Akademi Angkatan Bersenjata RI (Akabri) tahun 1973
- American Language Course, Lackland, Texas AS, 1976
- Airborne and Ranger Course, Fort Benning, AS, 1976
- Infantry Officer Advanced Course, Fort Benning, AS, 1982-1983
- On the job training di 82-nd Airborne Division, Fort Bragg, AS, 1983

---

<sup>278</sup> '(DOC) Biografi Susilo Bambang Yudhoyono | Anisa Dwi Budiarti - Academia.Edu' <[https://www.academia.edu/8541195/Biografi\\_Susilo\\_Bambang\\_Yudhoyono](https://www.academia.edu/8541195/Biografi_Susilo_Bambang_Yudhoyono)> [accessed 30 November 2022].

<sup>279</sup> Anisa Dwi Budiarti, 'Biografi Susilo Bambang Yudhoyono' <[https://www.academia.edu/8541195/Biografi\\_Susilo\\_Bambang\\_Yudhoyono](https://www.academia.edu/8541195/Biografi_Susilo_Bambang_Yudhoyono)> [accessed 30 November 2022].

- Jungle Warfare School, Panama, 1983
- Kursus Senjata Antitank di Belgia dan Jerman, 1984
- Kursus Komando Batalyon, 1985
- Sekolah Komando Angkatan Darat, 1988-1989
- Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas, AS
- Master of Art (MA) dari Management Webster University, Missouri, AS
- Doktor dalam bidang Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), tahun 2004

### **Biografi SBY Dalam Karir Politik**

Sepak terjang SBY dalam bidang politik dimulai ketika ia ditunjuk oleh fraksi ABRI dalam sidang umum MPR 1998 sebagai pembicara. Kemudian pada bulan Oktober 1999, SBY diangkat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi dalam kabinet Presiden Abdurrahman Wachid atau GusDur. Kemudian setelah menjabat selama setahun, Susilo Bambang Yudhoyono diangkat menjadi Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan atau disingkat Menko Poldis. Saat beliau menjabat sebagai Menko Poldis, beliau ditugasi untuk menertibkan kembali kondisi politik yang juga mempengaruhi kondisi keamanan bangsa akibat gejolak 1998.

Akan tetapi hal itu hanya berlangsung selama lima hari. Kemudian Abdurrahman Wachid menggantinya menjadi Menteri Dalam Negeri atau Menteri Perhubungan. Namun posisi itu ditolak oleh SBY karena bukan disitunya keahlian beliau.

Kemudian saat Megawati Soekarno putri meninggal sebagai pengganti Presiden Abdurrahman Wachid, beliau ditunjuk menjadi Menko Polkam namun jabatan itu juga ditolaknya. Akhirnya beliau berinisiatif untuk mendirikan partai Politik yaitu Partai Demokrat. Partai Demokrat yang berdiri pada tanggal 9 September 2002 semakin membuat jalur politiknya sebagai Calon Presiden menjadi lancar.

Pada Pemilu tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono Bersama Jusuf Kalla menang atas Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi. Dan SBY adalah Presiden RI pertama yang terpilih langsung oleh rakyat dengan perolehan suara mencapai 60,9%. SBY-JK menduduki kursi sebagai Presiden dan Wakil pada periode 2004-2009. Pada pemilu 2009 SBY kembali terpilih sebagai Presiden dengan menggandeng Budi Yono yang merupakan orang luar partai politik sebagai wakilnya. Dalam pemulihannya sebagai Presiden RI, banyak program-program beliau yang telah dilahirkan. Seperti layanan SMS Presiden yang dicetuskan pada bulan Juni 2005 dimana rakyat bisa langsung ber SMS dengan Presidennya ke nomor 0811109949, namun hanya sehari nomor beliau mengalami eror karena banyaknya sms yang masuk sehingga layanan sms diganti ke nomor 9949 dimana itu adalah nomor dari tanggal kelahirannya.

#### **Ringkasan Karir Susilo Bambang Yudhoyono**

- Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad (1974-1976)
- Dan Tonpan Yonif 305 Kostrad (1976-1977)
- Dan Tn Mo 81 Yonif Linud 330 Kostrad (1977)
- Pasi-2/Ops Mabrigif Linud 17 Kujang I Kostrad (1977-1978)
- Dan Kipan Yonif Linud 330 Kostrad (1979-1981)
- Paban Muda Sops SUAD (1981-1982)
- Komandan Sekolah Pelatih Infanteri (1983-1985)
- Dan Yonif 744 Bendungan IX/Udayana (1986-1988)
- Bendungan Paban Madyalat Sops IX/Udayana (1988)
- Dosen Seskoad (1989-1992)
- Korpri Pangab (1993)
- Dan Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad (1993-1994)
- Asops Kodam Jaya (1994-1995)
- Danrem 072/Pamongkas Kodam IV/Diponegoro (1995)
- Chief Military Observer United Nation Peace Forces (UNPF) di Bosnia-Herzegovina (sejak awal Nopember 1995)
- Kasdam Jaya (1996-hanya lima bulan)

- Pangdam II/Sriwijaya (1996-1997) sekaligus Ketua Bakorstanasda
- Asospol Kassospol ABRI/wakil Ketua Fraksi ABRI MPR (Sidang Umum MPR 1998)
- Kassospol ABRI/ Ketua Fraksi ABRI MPR (Sidang Istimewa MPR 1998)
- Kepala Staf Teritorial (Kaster ABRI (1998-1999)Menteri Pertambangan dan Energi (sejak 26 Oktober 1999)
- Menteri Koordinator Politik Sosial Keamanan (Pemerintahan Presiden KH AbdurrahmanWahid)Menteri Koordinator Politik Dan Keamanan (Pemerintahan Presiden MegawatiSoekarnoputri) Penyesalan Diri 11 Maret 2004Presiden Republik Indonesia (2004-2014)

### **Karya Tulis SBY**

Selain sebagai musisi dan politikus, SBY juga senang menulis. Berikut ini adalah hasil karyatulis beliau :

Yudhoyono, Susilo Bambang (2000). Di Nuh, Munawar Fuad; Mustofa, Kurdi. MengatasiKrisis, Menyelamatkan Reformasi (ed. 2nd). Jakarta: PusatPengkajian Etika Politik dan Pemerintahan.ISBN 979-9357-00-4.

Yudhoyono, Susilo Bambang (2004). Taman Kehidupan: Kumpulan Puisi (dalam bahasaIndonesia) (ed. 2nd). Jakarta: Iyayasan Nida Utama. ISBN 979-96431-8-X.

Yudhoyono, Susilo Bambang (2004). Revitalisasi Perekonomian Indonesia: Bisnis, Politik,dan Pemerintahan yang Baik. Bogor: Mencerahkan Pers. ISBN 979-96431-5-5.

Yudhoyono, Susilo Bambang (2005). Mentransformasi Indonesia: Internasional TerpilihPidato (ed. 2). Jakarta: Kantor Staf Khusus Presiden Bidang Internasionalbekerja sama dengan PT BuanaIlmu Populer. ISBN 979-694-876-1.

### **Keluarga SBY**

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau Presiden SBY menikah dengan Ibu Kristiani Herrawati atau Ibu Ani Yudhoyono yang merupakan anak perempuan ketiga Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo (alm). Dari pernikahan ini beliau dikaruniai dua orang putera yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (lahir 1978) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (lahir 1980).

Agus adalah lulusan dari SMA Taruna Nusantara tahun 1997 dan Akademi Militer Indonesia tahun 2000. Seperti ayahnya, ia juga mendapatkan penghargaan Adhi Mekayasa dan seorang prajurit dengan pangkat Letnan Satu TNI Angkatan Darat yang tugas disebuah batalion infanteri di Bandung, Jawa Barat.

Agus menikahi Anissa Larasati Pohan, seorang aktris yang juga anak dari mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia. Sejak pertengahan 2005, Agus menjalani pendidikan untuk gelarmaster-nya di Strategic Studies at Institut Studi Pertahanan dan Strategis, Singapura.

Anak bungsu, Edhie Baskoro lulus dengan gelar ganda dalam Financial Commerce dan Electrical Commerce tahun 2005 dari Curtin University of Technology di Perth, Australia Barat. Agus Harimurti dan Annisa Pohan dikaruniai seorang puteri cantik bernama Almira Tungadewi Yudhoyono.

Sedangkan Edhie Baskoro Yudhoyono menikahi puteri dari Hatta Rajasa yang merupakan ketua umum PAN yaitu Siti Rubi Aliya Rajasa yang kemudian dikaruniai putera yang bernama Airlangga Satriadhi Yudhoyono<sup>280</sup>.

## **B. TEORI KEPEMIMPINAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

### **a. Militeristik**

Tipe pemimpin yang mempunyai gaya militer adalah pemimpin yang dapat menjadi teladan dalam menjunjung tinggi norma-norma militer, dan kesalahan dalam moral serta perilaku adalah kesalahan besar yang tak boleh mendapat tempat sedikitpun dalam sebuah kepemimpinan

---

<sup>280</sup> Anisa Dwi Budiarti, "Biografi Susilo Bambang Yudhoyono," diakses 29 November 2022, [https://www.academia.edu/8541195/Biografi\\_Susilo\\_Bambang\\_Yudhoyono](https://www.academia.edu/8541195/Biografi_Susilo_Bambang_Yudhoyono).

militer. Di sisi lain, moral dan perilaku pemimpin adalah perekat yang mempersatukan orang-orang yang dipimpinnya, sehingga mereka akan selalu berada di jalan yang sama dengan si pemimpin dalam mencapai tujuan (*accomplishing the mission*). Dari segi pendidikan dan pengalaman inilah yang mengindikasikan bahwa SBY memiliki gaya militeristik karena SBY merupakan lulusan AKABRI terbaik dan mengabdikan sebagai perwira TNI selama 27 tahun, serta meraih pangkat Jendral TNI tahun 2000. Gaya militeristik SBY tergambar dari tindakan-tindakannya SBY dalam pelaksanaan administrasi negara yang formalitas dan kaku. Ini merupakan salah satu karakteristik dari gaya kepemimpinan militeristik yaitu segala sesuatu bersifat formal. Terlihat dari pelaksanaan pemerintahan SBY yang berjalan dengan prinsip bahwa segala sesuatunya sesuai dengan peraturan artinya setiap pikiran baru harus bersabar untuk menunggu sampai peraturannya berubah dulu, terobosan menjadi barang langka<sup>281</sup>.

**b. Karismatik**

Tipe pemimpin yang kharismatik adalah seseorang yang dikagumi oleh banyak pengikut meskipun para pengikut tersebut tidak selalu dapat menjelaskan secara konkret mengapa orang tersebut dikagumi. Karisma merupakan sebuah atribusi yang berasal dari proses interaktif antara pemimpin dan para pengikut. Atribut-atribut karisma antara lain rasa percaya diri, keyakinan yang kuat, sikap tenang, kemampuan berbicara dan yang lebih penting adalah bahwa atribut-atribut dan visi pemimpin tersebut relevan dengan kebutuhan para pengikut. SBY memiliki kharisma yang berkarakter. Karakter seorang pemimpin masa depan yang mampu memimpin rakyatnya dengan baik. Karisma beliau bukan hanya tebar pesona seperti apa yang pernah disampaikan lawan politiknya. Karisma yang ada dalam diri beliau adalah karisma yang telah menyatu karena memiliki kepribadian yang unggul. Unggul

---

<sup>281</sup> 'TEORI KEPEMIMPINAN DAN TOKOH PEMIMPIN - ADELEYID LAKORO - UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO'  
<<https://mahasiswa.ung.ac.id/561419042/home/2022/10/3/teori-kepemimpinan-dan-tokoh-pemimpin.html>> [accessed 30 November 2022].

dalam segala bidang. Baik bidang ideologi, politik, ekonomi, budaya, sosial, ataupun pendidikan.

c. Demokratis

Kepemimpinan dengan gaya demokratis dalam mengambil keputusan sangat mementingkan musyawarah, yang diwujudkan pada setiap jenjang dan di dalam unit masing-masing. Dengan demikian dalam pelaksanaan setiap keputusan tidak dirasakan sebagai kegiatan yang dipaksakan, justru sebaliknya semua merasa terdorong mensukseskannya sebagai tanggung jawab bersama. Setiap anggota kelompok/organisasi merasa perlu aktif bukan untuk kepentingan sendiri atau beberapa orang tertentu, tetapi untuk kepentingan bersama. Aktivitas dirasakan sebagai kebutuhan dalam mewujudkan partisipasi, yang berdampak pada perkembangan dan kemajuan kelompok/organisasi secara keseluruhan. Tidak ada perasaan tertekan dan takut, namun pemimpin selalu dihormati dan disegani secara wajar. Kepemimpinan SBY juga masuk dalam tipe demokratik mungkin disebabkan karena tuntutan reformasi, situasi dan kondisi saat ini yang semakin liberal. Dimana tipe pemimpin dengan gaya ini dalam mengambil keputusan selalu mengajak beberapa perwakilan bawahan, namun keputusan tetap berada di tangannya. Selain itu pemimpin yang demokratis berusaha mendengar berbagai pendapat, menghimpun dan menganalisa pendapat-pendapat tersebut untuk kemudian mengambil keputusan yang tepat. Tidak jarang hal ini menimbulkan persepsi bahwa SBY seorang yang lambat dalam mengambil keputusan dan tidak jarang mengurangi tingkat determinasi dalam mengambil keputusan. Pemimpin ini kadang tidak kokoh ketika melaksanakan keputusan karena ia kadang goyah memperoleh begitu banyak masukan dalam proses implementasi kebijakan<sup>282</sup>.

### **C. KEBIJAKAN PUBLIK YANG DI TERAPKAN PADA MASA PEMERINTAHAN SBY**

---

<sup>282</sup> 'TEORI KEPEMIMPINAN DAN TOKOH PEMIMPIN - ADELEYID LAKORO - UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO'.

## a. Kebijakan Ekonomi

### 1. Adanya Kebijakan Balance Budget

Pembuatan kebijakan tersebut merupakan komitmen dari tim ekuin Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) untuk bekerja sesuai white paper dan APBN White paper dan APBN 2005 merupakan dua dokumen ekonomi-politik yang telah disusun oleh pemerintah dan parlemen era pemerintahan Megawati. White paper mengharuskan pemerintah untuk menghapus subsidi, divestasi perbankan, dan privatisasi BUMN. Setidaknya termasuk keharusan mematuhi UU Program Pembangunan Nasional (Propenas) hingga akhir 2007 untuk menciptakan balance budget.

### 2. Kebijakan Para Menteri Ekonomi Yang Lebih Mengusung Prinsip Privatisasi.

Konsep ekonomi neoliberal sudah diterapkan dan dijadikan rujukan untuk dasar pembangunan ekonomi Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya proses pengalihan kepemilikan perusahaan Negara (BUMN) ke pihak swasta baik nasional maupun asing. Menteri BUMN yang didukung oleh Menko Perekonomian Aburizal Bakrie melaksanakan kebijakan privatisasi meskipun kebijakan tersebut sebenarnya mendapat tentangan yang keras dari Wakil Presiden Yusuf Kalla. Kebijakan tersebut tetap dilakukan dengan dalih untuk memenuhi target pendapatan APBN

### 3. Kebijakan Liberalisasi

Dalam konteks riil, liberalisasi dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan menerapkan hasil perundingan WTO, APEC, ASEM, ASEAN serta membuka kesempatan seluas-luasnya bagi para investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia. Bukti lainnya adalah 'konsensus bersama' antara Menteri Perdagangan (Mendag) dan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) untuk menjadikan pendidikan sebagai

bagian dari sektor jasa yang akan diliberalkan dalam rangka General Agreement on Tariffs and Services (GATS). Padahal, jauh sebelum pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), kebijakan yang dimotori oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) itu telah ditolak Forum Rektor sebagai wakil dari dunia pendidikan. Arah kebijakan ekonomi pemerintahan SBY dapat diduga semakin neoliberal jika dilihat dari kebijakan yang diberlakukan dan komposisi menteri ekonomi yang telah disebut sebelumnya, sehingga penyelenggaraan ekonomi yang berbasis Esbeyenomics menjadi sulit dilaksanakan meskipun pemegang kendali ada di SBY sendiri. Sebenarnya hal tersebut tidak terlepas dari peranan partai politik dan SBY yang menetapkan komunikasi politik dan pengakomodiran kepentingan kepentingan partai politik sebagai dasar pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu.

**b. Kebijakan Politik**

**a. Dibentuknya Detasemen Khusus**

Unit ini selanjutnya disebut dengan Densus 88. Unit ini adalah bagian dari POLRI untuk menanggulangi dan menangani tindakan teroris. Sesuai dengan Undang-Undang, Densus 88 berwenang untuk menanggulangi teroris sehingga ketertiban dan keamanan dalam negeri.

**b. Dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)**

Lembaga ini telah diatur di Perpres No 46 Tahun 2010 yang berdiri sendiri non-kementrian. Akan tetapi, pelaksanaannya dilakukan bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (MenkoPolhukam).

**c. Dibentuknya Dewan Keamanan Nasional**

Diawali dengan diaktifkannya Desk Anti-teror dari Kodam, Kodim, dan Koramil. Hal ini bertujuan untuk menuntaskan pemberantasan terorisme di Indonesia. Selain itu, dewan ini juga

dilengkapi dengan penanganan masalah-masalah keamanan seperti konflik politik dalam negeri dan daerah lain<sup>283</sup>.

### **Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Masa Susilo Bambang Yudhoyono**

Kebijakan adalah suatu kumpulan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok dalam usaha memiliki tujuan, kebijaksanaan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksakannya berarti kebijakan luar negeri memiliki tujuan dalam pelaksanaannya.

Politik luar negeri untuk melindungi kepentingan nasional, khususnya rencana pembangunan nasional. Di tengah perkembangan dunia yang ditandai oleh saratnya kepentingan nasional masing-masing negara dalam proses negosiasi ditingkat bilateral, regional maupun multilateral makin semakin penting bagi Indonesia untuk menentukan sikap dan menempatkan posisi yang tepat dan jelas. Jika tidak, kita akan terombang-ambing di antara pergumulan kepentingan yang saling bertolak belakang. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana mengkaitkan strategi dan kebijakan pembangunan ekonomio nasional dengan langkah-langkah yang ditempuh di tingkat Internasional. Politik luar negeri yang menonjol pada masa Susilo Bambang Yudhoyono yakni mengenai isi pemanasan global, HAM, adanya ancaman integritas bangsa dan terorisme. Indonesia dibawah pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono turut membrantas aksi terorisme dan perdamaian di negara-negara Afrika dan Timur Tengah Upaya yang dilalukan Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu dengan membantu mengirim pasukan perdamaian di bawah kendali Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)<sup>284</sup>

---

<sup>283</sup> ALEX Prasetyo, 'Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2004-2009', 2019  
<<https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/91785>> [accessed 30 November 2022].

<sup>284</sup> *KEPEMIMPINAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO MENJADI PRESIDEN NEGARA REPUBLIK INDONESIA*

Politik luar negeri pada masa Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2009 mengalami banyak kondisi yaitu terbatasnya kemampuan nasional dalam mengatasi krisis ekonomi yang telah menyulut dan mempertajam konflik sosial dan politik diberbagai wilayah di Indonesia, Indonesia harus mencegah mispersepsi internasional tentang gerakan terorisme internasional yang belakang ini marak di Indonesia dan terus mengupayakan dukungan dari dunia luar demi keutuhan negara dan bangsa dari berbagai anacam separatism dan masalah otonomi daerah, posisi kuat di Indonesia di Kawasan dalam memaikan peran di ASEAN dipertahankan demi tetap mempertahankan posisi tawar dan meningkatkan kerja serta dukungan internasional. Kepiawaian berdiplomasi dalam era globalisasi tidak akan mampu meningkatkan citra suatu negara apabila kondisi dalam negeri tidak kondusif. Karena itu, penyusunan skala prioritas untuk mengoptimalkan sumber daya yang terbatas, terutama upaya pemulihan ekonomi dan pemeliharaan lingkungan nasional dan regional yang aman dan stabil sangat diperlukan pada pemerintahan ini.

Indonesia di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menampilkan luar negeri yang pro aktif dan high profile. Hal ini ditandai dengan safari politik internasional yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka meningkatkan citra positif Indonesia di kancah internasional. Dengan menggunakan jargon “thousand friends zero enemy” Susilo Bambang Yudhoyono ingin menunjukkan posisi penting Indonesia didunia internasional.

Pola politik luar negeri Susilo Bambang Yudhoyono adalah untuk merangkul banyak pihak dalam kerja sama yang

---

<[https://www.researchgate.net/profile/Indah-Asih/publication/352477700\\_KEPEMIMPINAN\\_SUSILO\\_BAMBANG\\_YUDHOYONO\\_MENJADI\\_PRESIDEN\\_NEGARA\\_REPUBLIK\\_INDONESIA/links/60caf366458515dc17897370/KEPEMIMPINAN-SUSILO-BAMBANG-YUDHOYONO-MENJADI-PRESIDEN-NEGARA-REPUBLIK-INDONESIA.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Indah-Asih/publication/352477700_KEPEMIMPINAN_SUSILO_BAMBANG_YUDHOYONO_MENJADI_PRESIDEN_NEGARA_REPUBLIK_INDONESIA/links/60caf366458515dc17897370/KEPEMIMPINAN-SUSILO-BAMBANG-YUDHOYONO-MENJADI-PRESIDEN-NEGARA-REPUBLIK-INDONESIA.pdf)> [accessed 30 November 2022].

menguntungkan melalui diplomasi internasional<sup>285</sup>. Menurut Susilo Bambang Yudhoyono langkah tersebut dapat memberikan tempat bagi Indonesia dapat turut serta menentukan dan berkontribusi untuk membuat tatanan global. Kebijakan luar negeri SBY bukanlah tanpa kritik. Susilo Bambang Yudhoyono di anggap terlalu antusias pada forum-forum multilateral tanpa memberikan efek yang semestinya bagi kepentingan nasional. Susilo Bambang Yudhoyono juga dianggap gagal untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi WNI/TKI Indonesia yang berada di luar negeri<sup>286</sup>.

### c. Kebijakan Pendidikan

Untuk merealisasikan hak pendidikan warga negara, pemerintahan SBY telah membuat banyak kebijakan strategis, beberapa diantaranya adalah<sup>287</sup>;

#### 1. Pendidikan untuk daerah terpencil

Kita tidak bisa menutup mata, bahwa pendidikan di kota-kota besar berbeda jauh dengan pendidikan di daerah-daerah terpencil. Tahun 2009 penulis pernah mengajar di Sangatta, Kalimantan Timur. Dengan mata telanjang, penulis melihat banyaknya kendala untuk mencapai target pendidikan. Sarana prasarana dan infrastruktur yang serba kurang adalah fakta yang harus dihadapi. Selain itu, ketersediaan guru dan rendahnya tingkat pendidikan guru menjadi kendala lainnya.

---

<sup>285</sup> Aji Widiatmaja and Ulul Albab, 'Indonesia Di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Dan Joko Widodo: Kebijakan Luar Negeri Di Tengah Dinamika Lingkungan [Indonesia under Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) and Joko Widodo: Foreign Policy in the Middle of Regional Strategic Environment Dynamics]', *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 10.1 (2019), 77–93 <<https://doi.org/10.22212/JP.V10I1.1313>>.

<sup>286</sup> AHMAD FAHRI HUSEINSYAH, "PERSEPSI PERAN NASIONAL INDONESIA DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI ERA SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 2004-2014" (skripsi, UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2015). <http://lib.unair.ac.id>.

<sup>287</sup> Jurnal Manajemen and Pendidikan Islam, 'Menakar Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Islam Di Indonesia Era Reformasi (Presiden Habibie Sampai Presiden Jokowi Jilid I)', *Al-Fahim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2.2 (2020), 13–38 <<https://doi.org/10.54396/ALFAHIM.V2I2.89>>.

Pemerintah tidak tinggal diam. Selain dana BOS, pemerintah menggelontorkan bantuan-bantuan khusus untuk daerah terpencil. Untuk memberikan motivasi para guru dalam pengabdianya, pemerintah membuat kebijakan tentang tunjangan khusus bagi guru-guru yang bertugas di daerah terpencil. Bahkan demi terwujudnya pemerataan pendidikan, pada tahun 2011 pemerintah melahirkan program Sarjana Mengajar di daerah Terluar, Tertinggal dan Terdepan (SM3T).

## 2. Pendidikan untuk anak-anak TKI di Sabah-Malaysia

Program ini tidak akan bisa terwujud tanpa ada political will dari pemimpin negara. Untuk mewujudkan program ini, bahkan presiden SBY yang turun tangan untuk melakukan kesepakatan dengan PM Malaysia. Tanpa ada kesepakatan antara kedua pemimpin negara tentunya anak-anak TKI tidak akan mendapatkan pendidikan.

Di Sabah, banyak warga Indonesia (anak-anak TKI) yang tidak mendapatkan haknya; pendidikan. Konsekuensinya mereka menjadi masyarakat yang tuna; tuna baca, tuna tulis, tuna agama, dan tuna kebangsaan. Banyak warga Indonesia yang tidak pernah menghirup udara Indonesia. Banyak diantara mereka yang tidak pernah menginjak tanah airnya. Turun temurun mereka menjadi buruh kasar dan pelayan untuk kemakmuran negara lain.

Untuk merealisasikan amanat UUD 1945 tentang anggaran pendidikan yang minimalnya 20% dari APBN dan APBD. Maka pemerintahan SBY menelurkan beberapa kebijakan, diantaranya<sup>288</sup>;

### 1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Salah satu kompensasi dari pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun 2005 pemerintah merealokasi sebagian anggarannya untuk bidang pendidikan. Salah satu program di bidang pendidikan adalah BOS. Dalam

---

<sup>288</sup> Manajemen and Islam.

buku petunjuk pelaksanaan tahun 2005 dituliskan bahwa Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa, tetapi sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

## 2. Sertifikasi

Program sertifikasi pendidik dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat UU nomor 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional, UU no 14/2005 tentang guru dan dosen dan PP no 74/2008 tentang guru. Program sertifikasi pendidik merupakan kebijakan yang baik untuk meningkatkan kualitas guru-guru Indonesia. Dengan meningkatnya mutu dan profesionalitas para guru diharapkan pendidikan Indonesia bisa maju.

## 3. Bantuan-bantuan pemerintah dan tunjangan-tunjangan

Untuk siswa dan operasional pendidikan, ada bantuan beasiswa untuk siswa miskin (BSM), ada Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan yang lainnya. Untuk gurunya ada tunjangan kabupaten, tunjangan provinsi, ada tunjangan daerah terpencil dan yang lainnya.

# **D. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PADA MASA PEMERINTAHAN SBY**

## **1. KELEBIHAN**

Susilo Bambang Yudhoyono berhasil menampilkan keberhasilannya pada masa pemerintahannya diantaranya adalah keadaman dalam negeri yang makin membaik, penghormatan terhadap HAM lebih diperhatikan, kondisi politik semakin stabil, kerukunan sosial yang semakin membaik dan ekonomi yang semakin bertumbuh serta peran internasional yang terus menguat hal ini dibuktikan dengan adanya safari politik internasional yang dilakukan oleh SBY dalam rangka meningkatkan citra positif

Indonesia di ranah internasional sehingga ini menjadi kebijakan luar negeri yang pro dan aktif dan high profile. SBY menunjukkan posisi penting Indonesia di ranah internasional dengan menggunakan jargon “thousand friends zero enemy” sehingga dengan hal ini SBY sudah mengunjungi beberapa negara seperti Singapura dan Malaysia sebagai tanda awal perkenalan serta sebagai awal dari upaya diplomasi di masa yang akan mendatang. Kebijakan luar negeri Indonesia SBY mampu mendorong pemerintah untuk mendukung keputusan dan strategi politiknya dalam permasalahan spionase sebagai pemimpin dan aktor utama sebagai penentu, dengan menanggulangi tiga kerjasama dalam bidang politik dan militer, kerjasama patroli laut untuk mengawasi para pecara suka yang menuju Australia, pertukaran informasi intelijen terkait terorisme, Presiden SBY menyatakan akan mengkaji ulang dan melakukan beberapa penanggulangan dari tiga kerjasama di atas. SBY memainkan peran penting sebagai pemimpin dalam kebijakan luar negeri Indonesia, dengan adanya bukti pada masa kepemimpinannya ada beberapa peran yang diambil Presiden SBY didalam melakukan pendekatan dengan mitra dialog untuk mendapatkan kepercayaan mereka kepada komitmennya.

## **2. KEKURANGAN**

- a) Belum selesainya kasus korupsi yang terjadi
- b) Masih kurang memadainya infrastruktur
- c) Ketidaktransparan pemerintah terhadap publik, sistem hukum yang tidak pasti, pemberantasan KKN dan reformasi birokrasi yang belum mendapatkan titik terang yang menjadi masalah, sampai berakhirnya masa jabatannya pada 2014

- d) Berdiplomasinya kepegawaian dalam era globalisasi tidak mampu meningkatkan citra suatu negara jika kondisi dalam negeri tidak kondusif<sup>289</sup>.

---

<sup>289</sup> Aji Widiatmaja dan Ulul Albab, "Indonesia di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo: Kebijakan Luar Negeri di Tengah Dinamika Lingkungan [Indonesia under Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) and Joko Widodo: Foreign Policy in the Middle of Regional Strategic Environment Dynamics]," *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 10, no. 1 (31 Mei 2019): 77–93, <https://doi.org/10.22212/jp.v10i1.1313>.

## **BAB XVI**

### **JOKO WIDODO**

#### **Biografi**

Lahir pada 21 Juni 1961 bertempat di Rumah Sakit Brayat Minulyo, dari pasangan Widjiatno Notomihardjo dan Sudjiatmi. Joko Widodo atau biasa dikenal sebagai Jokowi merupakan anak sulung dari empat bersaudara, memiliki tiga adik perempuan bernama Iit Sriyantini, Ida Yati, dan Titik Relawati. Sebelum dikenal sebagai Joko Widodo, presiden RI ke-7 tersebut memiliki nama kecil Mulyono. Hidup dari rumah yang keluarganya sewa, Jokowi dimasa kecil telah merasakan bagaimana keluarganya digusur 3 kali. Hidup sebagai masyarakat dalam kategori menengah kebawah membuat Jokowi sudah terbiasa bekerja demi membiayai keperluan sekolahnya. Menikah dengan perempuan bernama Iriana 24 desember 1986 dan dikaruniai 3 anak yakni Gibran Rakabuming Raka (1987), Kahiyang Ayu (1991), dan Kaesang Pangarep (1994)<sup>290</sup>.

#### **a. Pendidikan dan Karir**

Diawali dengan masa kecilnya, Jokowi merupakan salah satu siswa di sekolah di SD Negeri 111 Tirtoyoso yang merupakan sekolah bagi kalangan menengah kebawah. Masa sekolah dasar Jokowi diisi dengan bekerja mulai dari berdagang hingga sebagai kuli panggul, itu semua dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya. Setelah lulus sekolah dasar ia lalu melanjutkannya di SMP Negeri 1 Surakarta, dan dilanjutkan di SMA Negeri 6 Surakarta<sup>291</sup>.

Berhasil melanjutkan jenjang pendidikan hingga memiliki gelar Insinyur, Jokowi merupakan alumni Fakultas Kehutanan, Universitas Gajah Mada angkatan 1980-1985. Lulus sebagai Insinyur Kehutanan membuat Jokowi diterima bekerja di PT. Kertas Kraft Aceh milik BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan ditempatkan di area hutan pinus Merkusii, Aceh Tengah. Berhenti dari pekerjaan sebelumnya, ia pulang dan bekerja dibawah perusahaan milik pamannya yang bergerak di sektor

---

<sup>290</sup> B A B li, "Bab ii biografi dan rekam jejak karier politik Jokowi," 1961, 20–29.

<sup>291</sup> B A B li, 'Bab li Biografi Dan Rekam Jejak Karier Politik Jokowi', 1961, 20–29.

perkayuan. Ditahun 1988, Jokowi memberanikan diri untuk membuka sebuah bisnis yang tidak jauh dari keahliannya, dengan nama CV RAKABU dengan mengambil inspirasi dari nama anak pertamanya. Dunia bisnis yang Jokowi geluti tidak selalu berada di masa jayanya, Jokowi juga pernah merasakan naik turun dalam bisnisnya hingga pernah ditipu dengan kerugian yang cukup besar.

Ketekunan Jokowi dalam mengatur bisnis usahanya yang mulanya hanya berupa bisnis mebel sederhana lambat laun mulai meningkat menjadi bisnis regional dan tumbuh dalam pasar nasional bahkan masuk dalam pasar mancanegara. Kesuksesan bisnis mebel tersebut membuat ia dilirik oleh mitra usahanya yang merupakan orang Perancis bernama Bernard Chene. Perkenalan ia dengan Bernard membuat Jokowi dipercaya untuk berkeliling eropa yang pada saat itu dalam konteks bekerja, pengalaman selama ia berkeliling eropa membuat Jokowi terinspirasi dalam pengelolaan dan pengaturan kota, hal tersebutlah membuat Jokowi mulai memberanikan diri untuk terjun dalam dunia politik di Indonesia.

## **b. Rekam Jejak Politik**

### **a. Wali Kota Surakarta**

Kiprah politik yang terjadi dalam hidup Jokowi diawali saat ia terinspirasi dari pengelolaan dan pengaturan kota-kota di Eropa, terjun di dunia politik sebagai anggota dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Diusung oleh PDI-P dan PKB, Jokowi berhasil menang sebagai Walikota Surakarta ke-16 periode 2005-2010 berdampingan bersama F.X Hadi Rudyatmo sebagai wakilnya<sup>292</sup>. Dibawah masa kepemimpinannya beberapa peristiwa atau kebijakan yang berhasil menjadi sorotan bagi masyarakat seperti, diperkenalkannya Bus Batik Solo Trans, peremajaan berbagai kawasan baik jalan maupun wilayah PKL, berbagai acara internasional berhasil diadakan di Solo. Banyaknya pencapaian di era

---

<sup>292</sup> li.

pemerintahan Jokowi membuat ia berhasil kembali terpilih sebagai Walikota Surakarta dengan perolehan suara sebanyak 90%<sup>293</sup>.

Jokowi mulai dikenal masyarakat secara nasional sejak ia mulai meresmikan dan mengeluarkan kebijakan dengan mengganti mobil dinas menjadi mobil listrik yang merupakan hasil karya para pelajar SMK 2 dan SMK Warga Surakarta, pada Januari 2012 yang dikenal dengan nama mobil Esemka. Gebrakan tersebut berhasil menjadi perbincangan semua media massa saat itu, karena Jokowi dinilai sebagai pemimpin yang mampu mengapresiasi karya anak bangsanya secara langsung tidak hanya dalam bentuk perkataan.

b. Gubernur DKI Jakarta

Pemberitaan seputar gebrakan Jokowi dalam mengganti mobil dinas menggunakan hasil karya anak bangsa terus menerus menjadi buah bibir ditengah masyarakat sehingga Jokowi mulai dikenal secara nasional. Kinerja Jokowi yang dinilai baik pada saat ini membuat partai PDI-P dan Gerindra mulai mengusung Jokowi yang didampingi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jokowi kembali menjadi buah perbincangan masyarakat umum tak kala gaya kampanye yang ia usung. “Blusukan” yang diambil dari bahasa Jawa yang memiliki arti terjun langsung ke suatu tempat dengan tujuan untuk mengetahui sesuatu, blusukan merupakan kata kunci yang populer di era kampanye Jokowi<sup>294</sup>.

Terjun langsung di tengah masyarakat untuk mencari permasalahan yang dialami menjadi dasar dari visi misi yang diusung oleh pasangan Jokowi-Ahok, mendapat perhatian lebih dari masyarakat Jakarta dan luar Jakarta membuat image calon gubernur Jakarta tersebut meningkat pesat. Meningkatnya perhatian masyarakat

---

<sup>293</sup> Aziz Rahardyan, 'Jokowi Pernah Raup Suara 90% Di Solo, Wali Kota FX Hadi Yakin Surakarta Dikuasai', *Bisnis.Com*, 2019  
<<https://kabar24.bisnis.com/read/20190212/15/887967/jokowi-pernah-raup-suara-90-di-solo-wali-kota-fx-hadi-yakin-surakarta-dikuasai>>.

<sup>294</sup> 'Adu Pendapat Seputar Pilpres Resmi Jadi Capres, Kampanye Jokowi Tak Lagi Blusukan - DetikPemilu'  
<<https://news.detik.com/berita/d-2527192/resmi-jadi-capres-kampanye-jokowi-tak-lagi-blusukan>> [accessed 30 November 2022].

terhadap Jokowi-Ahok membuatnya menang dalam Pemilu PILKADA DKI Jakarta di tahun 2012 dengan perolehan suara 42,60% mengalahkan pasangan Fauzi Bowo dan Nacrowi Ramli yang lebih dulu diunggulkan oleh masyarakat Jakarta<sup>295</sup>. Menjabatnya ia sebagai Gubernur DKI Jakarta diawali dengan dikeluarkannya kebijakan terkait program bantuan social dalam bentuk Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar, peremajaan fasilitas-fasilitas umum juga dilakukan sebagai bentuk program dimasa kepemimpinannya seperti pembenahan saluran air yang sejak dahulu menjadi problem Jakarta di kala musim hujan melanda, pembenahan dan penambahan transportasi umum demi mengurangi intensitas kemacetan, serta pengambil alihan sumber daya air melalui akusisi aetra dan palyja, dan yang paling menjadi perbincangan masyarakat yakni tak kala saat jokowi mendeklarasikan kebijakan pelarangan adanya atraksi topeng monyet di wilayah Jakarta. Selain proyek pembenahan fasilitas-fasilitas umum dan pengeluaran kebijakan-kebijakan baru, di era ini juga banyak diadakan event-event yang berbasis ekonomi, social, dan budaya seperti Jakarta Night Festival, Pesta Rakyat, dan Festival Keraton Sedunia.

c. Presiden Indonesia

Melejitnya nama Jokowi sebagi pemimpin daerah menjadi penilaian tersendiri bagi masyarakat dalam memandang kinerja Jokowi sebagi pemimpin daerah. Gaya “blusukan” yang tetap digunakan denga pembawaan yang sederhana dan pragmatis membuat ia merajai survei-survei calon presiden. Belum genap masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta di lakukan, Jokowi kembali dicalonkan PDI-P selaku partai yang membawahnya untuk maju pada Pemilihan Presiden di tahun 2014. Gaya kampanye sebelumnya yang membuatnya menjadi perbincangan juga dibawa saat ia berkampanye pencalonan Presiden.

---

<sup>295</sup> Riana Afifah, 'Jokowi-Ahok Pemenang Pilkada Putaran Pertama', *Kompas.Com*, 2012.

Perhatian lebih masyarakat nasional kepada pembawaan kampanye Jokowi yang dinilai membumi, membuat Jokowi dan Jusuf Kalla berhasil menang pada Pilpres 2014 mengalahkan Prabowo-Hatta Rajasa dengan perolehan suara yang ditetapkan KPU 53,15%<sup>296</sup>. Sepak terjang kinerja Jokowi sebagai Presiden Indonesia periode 2014-2019 yang dinilai cukup memuaskan membuat ia kembali mencalonkan diri sebagai Presiden untuk kedua kalinya. Bersanding dengan Prof. Dr. (H.C).K. H. Ma'ruf Amin sebagai calon presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 melawan kembali Prabowo-Sandiaga Uno. Perolehan tipis dengan suara mayoritas didapatkan Jokowi membuatnya kembali menjabat sebagai presiden kedua kalinya.

### **Teori Kepemimpinan ( tipe dan strategi )**

Lahir dan besar dari keluarga kurang mampu dengan merintis usaha dari nol hingga sukses mempengaruhi bagaimana gaya kepemimpinan Jokowi di implementasikan selama 2 periode sebagai seorang presiden. *Re-branding* yang selalu melekat pada diri seorang Joko Widodo sejak ia menjabat sebagai bupati hingga presiden yakni kesederhanaan, kewibawaan, serta pembawaannya yang santai dengan karismatik yang dapat dilihat dari gaya kampanye yang ia usung yakni “blusukan” yang secara langsung mencerminkan bahwasannya ia merupakan pemimpin yang merakyat yang pragmatis sebagai wujud dari penerapan “relationship motivation” yang merupakan salah satu motivasi dari teori ini. Relationship motivation tersebut mengacu dimana pemimpin fokus untuk membangun relasi dengan pengikut-pengikutnya. Namun, Jokowi juga tidak luput untuk memperhatikan “task motivation” yang merupakan bentuk motivasi pemimpin untuk fokus pada tugas dan hasil yang dicapainya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan berbagai sikap yang diambil Jokowi dalam mengemban tanggung jawab kenegaraan, diantaranya memperhatikan berbagai aspek yang perlu didahulukan. Sebagai contoh seperti di bidang infrastruktur, dimana Jokowi

---

<sup>296</sup> Deytri Robekka Aritonang Dian Maharani, “Ini Hasil Resmi Rekapitulasi Suara Pilpres 2014”, *Kompas.Com*, 2014  
<<https://nasional.kompas.com/read/2014/07/22/20574751/Ini.Hasil.Resmi.Rekapitulasi.Suara.Pilpres.2014>>.

membangun 19.000 km jalan tol dimana hal tersebut merupakan capaian yang melampaui prestasi 5 presiden sebelumnya<sup>297</sup>. Dilihat dari kinerja Jokowi dalam dua periode nampak jelas ia mengunggulkan pembangunan infrastruktur yang merata dari Sabang sampai Merauke. Secara garis besar dapat dilihat bahwasannya arah kepemimpinan Jokowi lebih condong pada gaya berbisnis seperti peningkatan kerja sama bilateral utamanya membuka kesempatan pada pihak asing (investor) untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

### **Kebijakan Politik**

Perjalanan kepemimpinan Jokowi sebagai presiden yang menjabat selama 2 periode memiliki berbagai warna yang menghiasi masa-masa sejauh 8 tahun menjabat. Banyak kebijakan pro dan kontra yang menjadi polemik dan kontroversial baik dari kebijakan yang murni diambil Jokowi maupun usulan-usulan dari para menteri-menteri pemerintahannya. Terlepas dari pro dan kontranya kebijakan yang dikeluarkannya, banyak perubahan-perubahan serta hal-hal yang baru yang secara signifikan terlihat pada era pemerintahannya. Berbagai kebijakan-kebijakan era pemerintahan Jokowi yang menjadi perbincangan hangat ditengah masyarakat

Jokowi Periode Pertama :

#### **a. Program Kartu Sakti**

Sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, salah satu program kerja yang terealisasi yakni penggunaan kartu sakti yang pada saat itu bernama Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar, program kartu sakti ini dilanjutkannya sampai ia menjabat sebagai presiden yang mana lingkupnya bukan hanya daerah melainkan hingga berbasis nasional. Adapula macam-macam kartu sakti yang Jokowi perkenalkan yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu keluarga Sejahtera (KKS)<sup>298</sup>. Sesuai dengan nama masing-masing kartu, kartu ini

---

<sup>297</sup> Fitria CHusna Farisa, 'Jokowi Pamer Bangun 1.900 Km Jalan Tol Dalam 7 Tahun, Ini Perbandingannya Dari Masa Ke Masa', *Kompas.Com*, 2022  
<<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/16/10334961/jokowi-pamer-bangun-1900-km-jalan-tol-dalam-7-tahun-ini-perbandingannya-dari>>.

<sup>298</sup> JurnalNews, "Kartu Sakti Jokowi Sarat Politis," 2022.

berisi bantuan social bagi masyarakat utamanya menengah kebawah, sehingga masyarakat khusus tersebut dapat merasakan fasilitas baik kesehatan maupu pendidikan tanpa memikirkan beban biaya yang harus ditanggung.

Di dalam pidatonya, Jokowi juga bertekad meningkatkan dana abadi pendidikan dari sebelumnya Rp 66 triliun menjadi Rp 100 triliun, serta dana abadi penelitian dan pengembangan dari Rp 1 triliun menjadi Rp 50 triliun dalam lima tahun ke depan<sup>299</sup>.

#### **b. Sistem Zonasi Sekolah**

Ketimpangan sosial terkait pendidikan di Indonesia sejak dulu masih belum memiliki jalan keluar yang dinilai efisien dalam menghilangkan ketimpangan tersebut. Berbagai cara yang dituangkan dalam berbagai peraturan belum mampu menyamaratakan kondisi pendidikan disetiap wilayah suatu daerah. Selain kebijakan kurikulum yang terus mengalami perkembangan mengikuti system yang ada, salah satu kebijakan yang di ambil pemerintah dengan tujuan reformasi dalam dunia pendidikan sehingga ketimpangan tersebut diharapkan dapat diminimalisir salah satunya yakni dikeluarkannya kebijakan zonasi pada sekoah-sekolah negeri di Indonesia. Tertuang dalam Permendikbud RI nomor 17 tahun 2017 pasal 15 ayat (1) berbunyi, “Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau dikenal sebagai sekolah negeri untuk wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima”. Dan pada ayat (2) dijelaskan perihal “Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB”<sup>300</sup>. Pemetaan dalam mengatur jumlah peserta didik ini mencakup keseluruhan pendidikan dasar mulai dari SD hingga SMA,

---

<sup>299</sup>Muhammad Hendartyo, “Pro Kontra Tiga Kartu Sakti Jokowi,” t.t.

<sup>300</sup>Puji Suryanti dan Dkk, “Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Serta Pengaruhnya Terhadap Upaya Manajemen Mutu Pendidikan Berdasarkan Asas Keadilan DI SMA Negeri Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2016-2018,” *Jurnal CANDI* 20, no. 1 (2020): 111–26.

sesuai UU Permendikbud no 17 tahun 2017 pasal 17 yang mana menyatakan bahwasannya jenjang SMK mendapat pengecualian dalam ketentuan zonasi ini.

Program zonasi ini diharapkan menjadi awal bagi pemerataan dalam ketimpangan social di dunia pendidikan Indonesia, seperti yang diketahui sebelum dikeluarkannya Permen ini banyak peserta didik dengan kualifikasi akademik yang tinggi maupun peserta didik dengan kondisi ekonomi yang mampu akan lebih memilih untuk bersekolah yang memiliki akreditasi baik atau biasa kita sebut dengan sekolah favorite meski lokasinya sangat jauh dari tempat tinggal mereka. Namun dalam hal ini pemerintah tidak semerta-merta memikirkan dari sudut pandang social, keinginan orang tua dalam menyekolahkan anak mereka disekolah-sekolah dengan kondisi dan mutu yang baik dan dengan fasilitas yang memadai oleh pemerintah diberikan pengecualian seperti yang dijelaskan pada Permendikbud no 17 tahun 2017 pasal 15 ayat (5a) yang menyatakan bahwa bagi peserta didik “jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima”<sup>301</sup>. Adanya sistem zonasi yang mengatur penempatan sekolah peserta didik ini diharapkan tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti sekolah yang kekurangan murid, sekolah tidak favorite, maupun sekolah dengan akreditasi rendah.

### **c. Pembangunan Infrastruktur**

Komitmen Jokowi dalam membangun daerah sejalan dengan poin ketiga Nawacita, yakni “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.” Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping menyepakati kerjasama bilateral demi mensinergikan gagasan poros maritime dunia dan inisiatif jalur sutera baru abad 21 (21st Century maritime silk road). Gagasan poros maritime dunia sendiri disepakati untuk merealisasikan konektivitas maritime dikawasan melalui pembangunan infrastruktur.

---

<sup>301</sup>Kemendikbud, “Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat,” *Jdih Bpk Ri*, no. 660 (2018): 5–7.

Kemajuan infrastruktur di Indonesia saat ini mengalami perkembangan pesat tahun 2019 seperti yang dilansir oleh lembaga riset IMD World World Competitiveness Center dimana Indonesia naik dari sebelumnya peringkat 43 pada tahun 2018 kini menjadi 32, dari riset tersebut yang menjadi indikator dalam melakukan riset yakni berdasarkan ekonomi efisiensi bisnis, birokrasi dan tentunya infrastruktur<sup>302</sup>. Bentuk pembangunan infrastruktur yang dibenahi maupun dibangun meliputi infrastruktur Jalan utamanya proyek jalan tol diberbagai pulau di Indonesia utamanya di pulau Jawa; Ketahanan air dan pangan Indonesia meliputi pembangunan bendungan-bendungan; Pembangunan-pembangunan lainnya seperti jembatan, sanitasi, system penyedia air, venue Asian Games, perumahan, rumah susun, Pos Lintas Batas Negara.

#### **d. Pelarangan Ekspor Benih Lobster**

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang dijabat oleh Susi Pudjiastuti kerap kali mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang nyeleneh namun diapresiasi oleh masyarakat Indonesia, salah satu kebijakan yang dia keluarkan pelarangan penjualan benih Lobster yang dinilai mengganggu bahkan membahayakan populasi lobster di Indonesia. Ekspor benih lobster Indonesia dari tahun 2011-2014 mengalami peningkatan secara konstan dan tajam. Ini tentu saja menguntungkan bagi Negara karena mendatangkan devisa yang cukup besar. Aktifitas penangkapan terjadi secara massal dan tanpa terkendali serta tidak adanya batasan untuk ekspor benih lobster, telah mengancam populasi biota bernilai ekonomi tinggi tersebut<sup>303</sup>. Sebagaimana dijelaskan pada PERMEN-KP nomor 1 tahun 2015 tepatnya pada pasal 2 yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus*

---

<sup>302</sup>Deva Eky Wijaya, “Kemajuan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Era Kepimpinan Jokowi,” no. June (2021): 1–13.

<sup>303</sup>Khairani Hilal, “KEPENTINGAN INDONESIA MELARANG EKSPOR BENIH LOBSTER KE VIETNAM TAHUN 2015,” *Teaching and Teacher Education* 12, no. 1 (2015): 1–17.

pelagicus spp.) dalam kondisi bertelur”<sup>304</sup>. Lobster termasuk dalam salah satu produk dengan penjual tertinggi, Dalam setahun, dihasilkan 78,5 ton lobster senilai Rp 55,25 miliar dan nilai ekonomi penjualan benih lobster mencapai Rp 16 miliar per tahun membuatnya menjadi target utama para pengeksploitasi untuk memburu dan menjualnya<sup>305</sup>. Pelarangan pengambilan lobster dimasa bertelur jelas memiliki tujuan untuk menjaga populasi keberadaan lobster di perairan laut Indonesia, sehingga lobster dapat berkembang secara alami tanpa campur tangan manusia sehingga menghasilkan produk yang baik. Sebagai bentuk perlindungan bagi komoditas kekayaan hasil laut, pemerintah melalui menteri perikanan ikut turun langsung dalam mengatur serta memantau persyaratan-persyaratan bagi lobster-lobster yang diperbolehkan untuk di ekspor.

**e. Kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)**

Reformasi dalam system kepegawaian di Indonesia era Jokowi diwarnai dengan munculnya program baru yakni pengangkatan pegawai pemerintahan non ASN namun tingkatannya menyerupai ASN atau PNS dengan sistim perjanjian kerja. Pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa “Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan”<sup>306</sup>. Pengaturan terkait perjanjian kerja dijelaskan pada pasal 37 ayat (1) menyatakan “Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja”.

**f. Penguasaan PT.FREEPORT**

Berdasarkan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara,

---

<sup>304</sup>MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, “PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus spp.), KEPITING (Scylla spp.), DAN RAJUNGAN (Portunus pelagicus spp.),” *Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia*, 2015.

<sup>305</sup>Hilal, “KEPENTINGAN INDONESIA MELARANG EKSPOR BENIH LOBSTER KE VIETNAM TAHUN 2015.”

<sup>306</sup>Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja,” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*, no. Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (2018): 1–64.

perusahaan tambang penanaman modal asing setelah lima tahun produksi wajib melakukan divestasi saham secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit sebesar 51% dimiliki peserta Indonesia<sup>307</sup>. Pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, CEO PTFI, Richard Adkerson, menandatangani Sales and Purchase Agreement (SPA) terkait peralihan sebesar 51% saham PTFI. Richard Adkerson mengatakan peralihan sebanyak 51,23% saham PTFI merupakan win-win solution yang bisa dicapai oleh perusahaannya dengan Pemerintah Indonesia.

Jokowi Periode Kedua :

**a. Pelemahan Undang-Undang KPK**

Membahas masa-masa periode kedua kepemimpinan Jokowi, tidak akan terlepas bagaimana kondisi jalanan menuju arah gedung DPR RI yang dipenuhi para pendemo, berbagai element masyarakat utamanya para mahasiswa se-Indonesia menyuarakan aspirasi terkait pengesahan Undang-Undang revisi KPK, masyarakat melihat adanya kejanggalan-kejanggalan dalam pasal-pasal dalam UU KPK yang diindikasikan merusak independensi dari lembaga pemberantasan korupsi yang memang hakikatnya harus berdiri sendiri tanpa ada campur tangan kekuasaan manapun. Adapun point-point penting dalam UU nomor 19 tahun 2019 terkait perubahan kedua atas UU nomor 30 tahun 2002 yang mana diduga dapat melemahkan independensi lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan sebagai berikut<sup>308</sup>:

- Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan bahwasannya Pegawai “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil Negara”.

---

<sup>307</sup>Ricky Tandy Japutra, “STATUS KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN PT. FREEPORT INDONESIA SETELAH TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Diajukan,” 2019.

<sup>308</sup> PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ‘Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi’, *NATIONAL JOURNAL of LAW*, 3.2 (2020) <<https://doi.org/10.47313/njl.v3i2.919>>.

- Pasal 10A ayat (1) berbunyi bahwa ”Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan”korelasi dengan pasal 43 ayat (1) “Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi”.
- Pasal 21 ayat (3) menyebutkan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pejabat negara.
- Pasal 12B ayat (1) berbunyi “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas”. Yang dikorelasikan dengan pasal 37E ayat (1) yang berbunyi “Ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia”.
- Pasal 37B ayat (2) berbunyi “Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun” dan ayat (3) “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia<sup>309</sup>”.

#### **b. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja**

Pembukaan peluang investasi menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kemajuan ekonomi suatu negara sehingga UU Ciptaker yang mengatur tentang investasi sangat dibutuhkan sebagai payung hukum bagi penanam modal untuk melakukan aktifitas investasi<sup>310</sup>. Polemic terkait UU cipker menjadi perdebatan ditengah masyarakat khususnya bagi

---

<sup>309</sup>Tigor Einstein dan Ahmad Ramzy, “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *NATIONAL JOURNAL of LAW* 3, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.47313/njl.v3i2.919>.

<sup>310</sup>N Fibrianti dkk., “Undang Undang Cipta Kerja Klaster Investasi Telaah Paradigma Participatory,” *Pandecta Research ...* 16, no. 2 (2021): 345–52.

masyarakat yang bekerja sebagai karyawan yang bekerja di sector swasta seperti pabrik, yang mana UU ciptaker ini memiliki indikasi tidak memberi perlindungan hukum bagi para pekerja.

### c. Kebijakan Darurat Pandemi

Masa Jokowi yang baru saja terpilih kedua kalinya, disambut dengan datang masa-masa krisis yang menerjang seluruh Negara di dunia. Tidak lengkap rasanya jika membicarakan kebijakan Jokowi saat menjadi Presiden RI kalau tidak menyebutkan masa-masa pandemi covid-19. Pandemi covid-19 yang menyebabkan tersendatnya berbagai aktifitas manusia utamanya yang mengacu pada aktifitas social secara langsung. Seluruh aspek bidang baik ekonomi, social, pendidikan, keagamaan, utamanya kesehatan mengalami gangguan yang sangat meresahkan masyarakat pada saat itu. Walaupun dikatakan bahwasannya pemerintahan pada saat itu tidak ambil pusing bahkan menganggap enteng adanya pandemi yang lebih dulu menyerang Negara tetangga. Diawal kasus terdeteksinya covid di Indonesia yang pada saat itu secara drastis melonjak tinggi hanya dalam waktu 3 hari membuat Presiden Jokowi membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sayangnya kebijakan ini tidak dibarengi pemaparan strategi yang komprehensif dan transparan untuk membangun kepercayaan dan optimisme warga. Kepada pers, Presiden Jokowi justru mengakui bahwa pemerintah tidak menyampaikan semua data kepada masyarakat agar tidak terjadi kepanikan<sup>311</sup>.

Kebijakan satu atap yang dipimpin Jokowi langsung menjadi patokan arah pergerakan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini. Kebijakan *lockdown* diberlakukan di setiap wilayah di Indonesia, pelimpahan wewenang yang diberikan Jokowi selaku pemimpin Negara kepada para pemimpin daerah untuk menjaga wilayahnya masing-masing yang tetap dilakukan tidak melawan kebijakan dari pemerintah pusat (kebijakan langsung presiden).

---

<sup>311</sup>Woro Harkandi Kencana Kencana, "Analisis Ilustrasi Sosok Jokowi Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Pada Sampul Majalah Tempo," *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 2 (2020): 52–64, <https://doi.org/10.35326/medialog.v3i2.786>.

Pemerintah juga mengambil kebijakan untuk mengeluarkan dana lebih dalam penanganan pandemic. Salah satu pengalokasian dana diberlakukan untuk bidang kesehatan, Dana senilai Rp. 75 triliun dialokasikan diantaranya khusus pengadaan alat tes corona, alat pelindung diri tenaga medis, dan sarana-sarana kesehatan lainnya<sup>312</sup>.

Transformasi dan reformasi dilakukan di tengah segala keterbatasan. Refocusing dan realokasi anggaran diprioritaskan pada penanganan kesehatan, pemulihan sosial dan ekonomi. Untuk kebijakan fiskal, opsi pelebaran defisit anggaran melebihi batas yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara diperlukan di tengah semakin banyaknya kebutuhan belanja negara untuk memberikan insentif kepada perekonomian<sup>313</sup>. Menurut Jokowi, setelah berbicara dengan Gubernur Bank Indonesia, Ketua Komisioner OJK, dan Kepala LPS, PERPPU yang akan dikeluarkan Pemerintah berisikan tiga hal penting. Pertama, kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (extraordinary) dalam menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Kedua, melalui berbagai relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN 2020, dan terakhir memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan<sup>314</sup>.

Di bidang ekonomi, usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi menjadi prioritas untuk didorong lebih maju, dengan transformasi digital. Juga Kartu Prakerja untukantisipasi pengangguran baru dan yang terkena PHK. Jangka panjang adalah pelaksanaan UU Cipta Kerja yang didesain untuk mengantisipasi pengangguran yang selalu bertumbuh dengan penciptaan lapangan kerja<sup>315</sup>. Alokasi dana yang diperuntukan untuk bantuan-bantuan social bagi masyarakat utamanya menengah yang

---

<sup>312</sup>Kencana.

<sup>313</sup>Cornelia Evelin Cabui, "Refleksi Kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi Selama Tiga Tahun Pada Periode Kedua Pemerintahan," *Jurnal Adhikari* 1, no. 4 (2022): 221–25, <https://doi.org/10.53968/ja.v1i4.51>.

<sup>314</sup>Saleha Mufida, F G Cempaka Timur, dan Surryanto Djoko Waluyo, "Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19 Dari Perspektif Ekonomi," *Independen (Jurnal Politik Indonesia dan Global)* 1, no. 2 (2020): 121–30, <https://doi.org/10.24853/independen.1.2.121-130>.

<sup>315</sup>Kencana, "Analisis Ilustrasi Sosok Jokowi Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Pada Sampul Majalah Tempo."

merasakan langsung dampak krisis ekonomi yang diakibatkan pandemic ini salah satunya memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

**d. Pemindahan Ibu Kota Negara**

Pertimbangan untuk memindahkan ibu kota sendiri sudah dimulai sejak lama, sejak masa pemerintahan soekarno (1957), kemudian baru belakangan ini, muncul kembali rencana pemindahan IKN ini tepatnya di periode kepemimpinan Jokowi yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 pada poin arah kebijakan pokok pembangunan berbasis kewilayahan, yaitu pengembangan rencana pemindahan ibu kota ke luar pulau Jawa ke posisi yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi. Dari perspektif kebencanaan, Pulau Jawa rawan bencana gempa bumi dan Banjir, terlebih Jakarta yang berada dalam ring of fire.

Pemindahan IKN juga mendorong investasi yang lebih luas, dengan perkiraan peningkatan real GDP nasional sebesar 0,1-0,2 persen, seiring dengan terjadinya penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan. Kenaikan price of capital ditargetkan sebesar 0,23 persen dan kenaikan price of labour 1,37 persen. Investasi riil diperkirakan akan meningkat 47,7 % di Kalimantan Timur<sup>316</sup>.

**e. Bantuan Subsidi BBM**

Polemik kenaikan BBM setiap era pasti tidak luput dari penolakan serta kritik masyarakat terhadap pemerintahan, tetapi dilihat bagaimana cara pemerintah menanggulangi hal-hal tersebut. Pemerintah telah mengumumkan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 3 September 2022 yang lalu agar subsidi yang diberikan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran. Anggaran subsidi tersebut dialihkan ke dalam bentuk bantalan sosial, yakni BLT BBM dengan alokasi anggaran Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat sebesar Rp150 ribu per bulan selama empat bulan, serta BSU dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun diperuntukkan bagi 16 juta pekerja. Dalam

---

<sup>316</sup> Surya Dwi Saputra, Thomas Gabriel J, and Mhd Halkis, 'Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara Dari DKI Jakarta Ke Kutai Kartanegara Dan Penajam Paser Utara) Strategy Analysis Relocation Of The Capital Cit', *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, 7 (2021), 192.

kesempatan tersebut, Mensos Tri Rismaharini menjelaskan bahwa hingga 16 September 2022, PT Pos Indonesia telah menyalurkan BLT BBM kepada 12.701.985 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 482 kabupaten dan kota<sup>317</sup>.

Kenaikan harga BBM yang diakibatkan pemutusan subsidi BBM menyebabkan kenaikan juga di berbagai sektor kehidupan masyarakat utamanya pada sektor ekonomi mengalami kenaikan pada bahan-bahan di pasaran. Pemutusan subsidi ini dilakukan pemerintah karena berbagai factor utamanya kerugian yang dialami oleh PT. Pertamina, pengalihan dana subsidi untuk dialihkan menjadi BLT BBM untuk dianggarkan kepada masyarakat utamanya masyarakat menengah kebawah yang diharapkan pengeluaran dana yang awalnya untuk subsidi BBM menjadi lebih tepat sasaran karena hanya beberapa masyarakat dengan kriteria tertentu yang mendapatkannya.

### **Dampak Kebijakan**

Dampak-dampak yang dapat dilihat dari kepemimpinan antara periode pertama dengan periode kedua secara spesifik sangat jauh perbedaan dilihat dari banyaknya peristiwa yang terjadi di masa kepemimpinan Jokowi. Pada periode pertama kepemimpinan Jokowi-JK, kondisi politik, ekonomi, social masyarakat dinilai harmonis keadaannya. Gencarnya pemerataan pembangunan infrastruktur dari sabang sampai merauke serta berbagai kebijakan bantuan social menjadi ikon kinerja Jokowi yang sangat terlihat pada 5 tahun pertama kepemimpinannya dengan tetap mengusung gaya blusukannya. Di akhir-akhir masa pemerintahan Jokowi periode pertama, pemerintah berhasil mengakuisisi 51,23% saham salah satu kekayaan alam Indonesia yang paling potensial yang sejak dulu dikelola dan dikuasai oleh asing yang tidak lain yakni PT. Freeport Indonesia yang merupakan tambang emas terbesar di dunia. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi dinilai cukup tinggi, berdasarkan survei litbang Kompas pada Oktober 2019, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi - JK adalah sebesar

---

<sup>317</sup>Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Presiden: BLT BBM dan BSU Lakukan secara Mudah, Cepat, dan Tepat Sasaran," t.t.

58,8 %. Tingkat kepuasan itu naik turun sejak pertama kali survei pada april 2015<sup>318</sup>. Melihat hasil survei tersebut, Jokowi dianggap masih mampu menjaga harmonisasi relasi politik antara publik dan kekuasaan negara.

Namun berbanding terbalik diperiode kedua kepemimpinan Jokowi sebagai presiden, sejak ditetapkannya sebagai presiden untuk kedua kalinya banyak kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak lagi pro pada rakyat utamanya kondisi hukum di Indonesia yang mulai muncul bau-bau rezim otoriter sehingga memunculkan krisis demokrasi. Beberapa bulan sejak ditetapkan sebagai presiden kedua kalinya, Jokowi di sambut dengan peristiwa yang mana seluruh elemen masyarakat turun kejalan dalam rangka menolak RKUHP omnibuslaw yang disahkan oleh Jokowi sebagai bentuk reformasi peraturan dalam cipta kerja yang dinilai lebih pro pada pengusaha. Selain permasalahan terkait UU Cipta Kerja, muncul pula revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi yang diindikasikan banyak kecacatan hukum yang mana melemahkan posisi KPK selaku badan independen dalam pemberantasan korupsi, tak hanya itu UU pemasyarakatan juga memiliki point-point kecacatan, dan banyak lagi kasus-kasus terkait berubah arah undang-undang Negara yang dinilai banyak jebakan dan kecacatan. Meski peresmian sebuah undang-undang merupakan hasil dari kolaborasi antara badan legislative, eksekutif, serta yudikatif namun dalam hal ini presiden memiliki kendali penuh atas diresmikannya RUU sehingga menjadi acuan apakah presiden yang saat ini menjabat pro pada rakyat atau pro pada pejabat.

Tidak berhenti dengan penolakan kebijakan yang ia resmikan, era ini kepemimpinan Jokowi juga mendapat tantangan dalam penanganan pandemic yang menyerang dunia global sehingga menyebabkan krisis diberbagai bidang kehidupan masyarakat utamanya ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Banyak peristiwa terjadi di masa ini yang menjadi sorotan masyarakat seperti cara menteri kesehatan dalam merespon serta menginformasikan kondisi pandemic covid di Indonesia, terbongkarnya korupsi bantuan social (BANSOS) yang menjerat langsung menteri sosial pada saat itu Juliari Batubara sebagai tersangka kasus

---

<sup>318</sup> Venticardea, 'Gaya Kepemimpinan Jokowi Dalam Memimpin Indonesia', *Kompasiana*, 2019 <[https://www.kompasiana.com/venticardea4526/5de74e97097f362ce125d8c2/gaya-kepemimpinan-jokowi-dalam-memimpin-indonesia?page=1&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/venticardea4526/5de74e97097f362ce125d8c2/gaya-kepemimpinan-jokowi-dalam-memimpin-indonesia?page=1&page_images=1)>.

dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 senilai 17 miliar rupiah yang sangat-sangat membuktikan bagaimana bobroknya kinerja pemerintah pada masa-masa krisis<sup>319</sup>. Terbongkarnya kasus korupsi bansos yang dilakukan langsung oleh menterinya membuat jokowi marah dan memperingatkan dengan tegas para menterinya. Emosi jokowi pada saat itu menjadi sorotan masyarakat tak kala pembawaannya yang biasanya santai dan kalem berubah menjadi kemarahan. Tidak hanya dalam situasi pandemic, kepemimpinan jokowi juga dilihat masyarakat bagaimana dan apa kebijakan yang akan diambil sebagai langkah dalam pemulihan pasca pandemic.

Dari segi pembangunan infrastruktur yang dilakukan jokowi utamanya yang paling terlihat yakni pembangunan jalan tol tans-jawa, trans-sumatera, dan trans-papua dapat dirasakan langsung hasilnya oleh masyarakat dalam menunjang kegiatan distribusi yang secara otomatis berdampak pada ekonomi ,meski diawal pembangunannya banyak pro kontra yang terjadi karena proyek tersebut menyebabkan meningkatnya hutang Indonesia kepada asing, menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan kebutuhan pendanaan infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mencapai Rp6.445 triliun<sup>320</sup>. Tidak berhenti dalam pembangunan jaringan tol, skema hutang Indonesia juga muncul tak kala presiden jokowi mendeklarasikan proyek pemindahan Ibukota Negara ke pulau Kalimantan yang mau tidak mau Indonesia harus berhutang atau mengambil pinjaman atau kerjasama investasi dengan asing, pemerintah menganggarkan proyek IKN mencapai US\$33 miliar atau Rp487,31 triliun (kurs Rp14.767). Anggaran tersebut bisa berubah, jika pembangunan *financial center* di IKN menjadi lebih besar dari rencana semula. Membayar hutang negara menjadi salah satu cara masyarakat dalam menilai

---

<sup>319</sup> Wahyuni Sahara, 'Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 Yang Menjerat Juliari Hingga Divonis 12 Tahun Penjara', *Kompas.Com*, 2021  
<<https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis>>.

<sup>320</sup> BBC, 'Jokowi Bangun Jalan Tol 1.900 Kilometer, Dibiayai Utang Dan Dituduh "Kebijakan Ugal-Ugalan"', *BBC NEWS INDONESIA*, 2022  
<<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60384149>>.

kebijakan apa yang akan dikeluarkan pemerintah utamanya presiden untuk mengurangi beban Negara tersebut<sup>321</sup>.

Dalam bidang social pun dapat dilihat banyaknya program bantuan yang pemerintahan jokowi keluarkan seperti proyek kartu sakti (KIP, KIP KKS), kebijakan Bantuan Tunai Langsung (BLT), serta bantuan sembako lainnya. Krisis yang terjadi saat pandemic membuat pemerintah mengeluarkan berbagai bentuk bantuan social untuk menunjang ekonomi keluarga masyarakat utamanya masyarakat menengah kebawah mendapatkan bantuan tersebut, yang terbaru yakni alokasi dana yang semula digunakan untuk subsidi BBM diubah alurnya agar lebih tepat sasaran lagi untuk masyarakat sehingga dikeluarkan program BLT BBM. Dampak yang dirasakan masyarakat yakni secara langsung masyarakat tertolong dengan adanya bantuan langsung tersebut. Namun dalam implementasinya proyek ini banyak tindak penyelewengannya seperti pendistribusiannya yang tidak tepat sasaran maupun penggunaannya yang tidak sesuai dengan proyeknya.

## **LIST PENELITIAN TERDAHULU**

### **1. Penelitian Terdahulu**

(Tamar Djaya, Soekarno Hatta Ada Persamaan dan Perbedaannya, (Jakarta : Sastra Hudaya : 1983)

(Sagimun, Perlawanan dan Pengasingan Pejuang Nasioal,

(Bernard Dahm, Bernard Dahm, Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan,

(John D. Legge, *Soekarno, Sebuah Geografi Politik*,

(Herbert Feith, *Pemikiran Politik Indonesia 1945 – 1965*, (J

(A. K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*,

(L. Stoddard, *Pasang Naik Kulit Berwarna*,

---

<sup>321</sup> Chandra Gian Asmara, 'Jokowi Ungkap Ancaman Saat Ambil Saham Freeport: Papua Lepas!' <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20211222163313-4-301240/jokowi-ungkap-ancaman-sa-at-ambil-saham-freeport-papua-lepas>> [accessed 24 October 2022].

(Sagimun MD, *Perjuangan dan Pengasingan Pejuang Indonesia*,

. (Iqbal Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*, Medan: Prenada Media Grup, 2009, hal 285-286)

(Maurice Duverger, *Partai-Partai Politik dan Kelompok-kelompok Kepentingan*, terjemahan Laila Hasyim, Jakarta: Rajawali, 1981, hal. 134).

( Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum. 2011, hal. 102)

Ahmad Syafii Ma'arif, *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante: Islam dan Masalah Kenegaraan*

#### **F. Penelitian Terdahulu Mengenai Gus Dur**

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai masa kepemimpinan Gus Dur Dapat ditemui melalui karya – karya buku dari penulis lokal maupun asing yang kagum pada cara kepemimpinan Gus Dur mulai dari kebijakan politik, komunikasi politik, gaya kepemimpinan, dan sejarah dari Gus Dur itu sendiri, berikut beberapa karya tulis ilmiah yang membahas tentang Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur<sup>322</sup> :

1. Biografi Gus Dur The Authorized Biography of ABDURRAHMAN WAHID Karya Greg Barton
2. Teologi Politik Gus Dur Karya Listiyono Santoso
3. Jejak Sang Guru Bangsa Karya M. Hamid
4. Gus Dur, Islam Nusantara, Kewarganegaraan Bineka Karya Ahmad Suaedy
5. Celoteh Gus Dur Karya Ahmad Nurcholish
6. Ijtihad Politik Gus Dur Karya Dr. Munawar Ahmad
7. Karya Tjipta Lesmana tentang Komunikasi Politik Presiden-presiden RI: Dari Sukarno Sampai SBY?terbitan Gramedia.
8. Karya Moh. Mahfud MD yang menulis tentang ?Setahun bersama Gus Dur (Kenangan menjadi menteri di saat sulit)?

---

<sup>322</sup>Abu Naim, "Tipologi Kepemimpinan Politik Gus Dur," *Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam* VI, no. 1 (2014): 1–20.

9. Karya Muhammad Syafi'i Antonio yang menulis buku berjudul ?  
Muhammad SAW The Super Leader Super Manager?
10. Karya M Alfian Alfian yang menulis buku berjudul? Menjadi Pemimpin Politik? Artikel karya Sismanto yang berjudul? Tipologi Kepemimpinan Gus Dur? (Primagama Educational Trendsetter)

## KESIMPULAN

Kebijakan politik di setiap era kepemimpinan mempunyai pola kebijakan dalam bentuk kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti pada era Soekarno dengan kebijakan yang mendorong orang lain ke arah transformatif dan mempunyai komitmen yang kuat dan positif walaupun tidak adanya regenerasi. Pada era kepemimpinan Soeharto yang mempunyai kebijakan politik dengan visi yang jelas akan tetapi minimnya kebebasan berpendapat. Era kepemimpinan B.J. Habibie dengan pemulihan ekonomi sosial dan politiknya akan tetapi masih adanya pengaruh dari kepemimpinan sebelumnya. Era kepemimpinan Gusdur dengan kelebihan kebijakan politik yang menjunjung tinggi demokrasi dan pluralisme sosial, akan tetapi mempunyai kekuatan kebijakan yang rentan dan sensitif. Pada era kepemimpinan Megawati mampu mengakhiri krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1998, lewat menstabilkan fundamental ekonomi makro. Keadaan dalam negeri yang makin membaik, penghormatan terhadap HAM lebih diperhatikan, kondisi politik semakin stabil, kerukunan sosial yang semakin membaik dan ekonomi yang semakin bertumbuh serta peran internasional yang terus menguat hal ini dibuktikan dengan adanya safari politik internasional yang dilakukan oleh SBY dalam rangka meningkatkan citra positif Indonesia di ranah internasional sehingga ini menjadi kebijakan luar negeri yang pro dan aktif dan high profile. Pada era kepemimpinan Jokowi kepemimpinan yang kerap ia tunjukkan yakni pembawaannya yang berkarisma dengan ketegasan yang dinilai kalem serta pembawaan yang sederhana yang ia tampilkan pada public. Kesederhanaan ini ia tunjukkan sejak ia menjabat sebagai walikota Surakarta hingga menjadi orang nomor satu di Indonesia selama dua periode. Jargon paling ikonik dari diri seorang Jokowi tak lain yakni gaya *'BLUSUKAN'* yang mana ia turun langsung di tengah masyarakat untuk mencari permasalahan atau polemic apa yang terjadi di masyarakat.

Setiap kebijakan politik yang diambil oleh tiap presiden tentunya mempunyai tujuan yang sama yaitu membangun Indonesia menuju kearah yang lebih baik dan mampu bersaing dengan negara lain. Kebijakan politik dari presiden selanjutnya pun tentunya memiliki pola yang berbeda dengan kebijakan politik sebelumnya, diperlukan elemen masyarakat sebagai pengawas pemerintah menjalankan kebijakan politik yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘(DOC) Biografi Susilo Bambang Yudhoyono | Anisa Dwi Budiarti - Academia.Edu’  
<[https://www.academia.edu/8541195/Biografi\\_Susilo\\_Bambang\\_Yudhoyono](https://www.academia.edu/8541195/Biografi_Susilo_Bambang_Yudhoyono)> [accessed 30 November 2022]
- Adams, Cindy, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*
- Adm.fisip.unpatti, ‘Bahan Ajar Kebijakan Pemerintah Dikonversi BAB I PENGERTIAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN -’, *Article*, 2019 (2019), 1–88
- ‘Adu Pendapat Seputar Pilpres Resmi Jadi Capres, Kampanye Jokowi Tak Lagi Blusukan - DetikPemilu’  
<<https://news.detik.com/berita/d-2527192/resmi-jadi-capres-kampanye-jokowi-tak-lagi-blusukan>> [accessed 30 November 2022]
- Afifah, Riana, ‘Jokowi-Ahok Pemenang Pilkada Putaran Pertama’, *Kompas.Com*, 2012
- Akib, Haedar, ‘Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa Bagaimana’, *Jurnal Adminstrasi Publik*, 1.1 (2010), 1–100
- Akib, Haedar, and Antonius Tarigan, ‘Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya’, *Jurnal*, 1.8 (2008), 1–19
- Alfani, H., A. M. Putra, A. Zubair, A. Sumarkidjo, D. K. S. Putra, and Et Al., *Media Dan Komunikasi Politik*, 2011
- Amalia, Nur, Diah Nur Amaliah, M Duratun Nasihin, and Nusantara Batanghari, ‘Wawasan Dalam Pendidikan’, 155–67
- andi ika, Zulkifli 2020, *PEREKONOMIAN INDONESIA SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA*, 2020
- Apriandi, Iwan, ‘Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun Tahun 2002 Tentang Syariat Islam Di Kota Langsa’, *Implementasi*

*Kebijakan; Sosialisasi; Kepatuhan Masyarakat*, 2017, 11–35

Asmara, Chandra Gian, 'Jokowi Ungkap Ancaman Saat Ambil Saham Freeport: Papua Lepas!'

<<https://www.cnbcindonesia.com/news/20211222163313-4-301240/jokowi-ungkap-ancaman-saat-ambil-saham-freeport-papua-lepas>> [accessed 24 October 2022]

Atik, Rusdiani, 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DOSEN (Studi Dampak Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Dosen PAI Terhadap Peningkatan Kinerja Dosen PAI Di Perguruan Tinggi Umum Se Bandar Lampung)', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), 1689–99

Ayuni, Dewi Riasty, 'Teori Kepemimpinan', p. 2022

Aziz Rahardyan, 'Jokowi Pernah Raup Suara 90% Di Solo, Wali Kota FX Hadi Yakin Surakarta Dikuasai', *Bisnis.Com*, 2019  
<<https://kabar24.bisnis.com/read/20190212/15/887967/jokowi-pernah-raup-suara-90-di-solo-wali-kota-fx-hadi-yakin-surakarta-dikuasai>>

BBC, 'Jokowi Bangun Jalan Tol 1.900 Kilometer, Dibiayai Utang Dan Dituduh "Kebijakan Ugal-Ugalan"', *BBC NEWS INDONESIA*, 2022  
<<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60384149>>

'Biografi Presiden Megawati Soekarnoputri- Situs Web Kepustakaan Presiden'  
<[https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/biography/?box=detail&presiden\\_id=5&presiden=megawati](https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/biography/?box=detail&presiden_id=5&presiden=megawati)> [accessed 25 October 2022]

Budiarti, Anisa Dwi, 'Biografi Susilo Bambang Yudhoyono'  
<[https://www.academia.edu/8541195/Biografi\\_Susilo\\_Bambang\\_Yudhoyono](https://www.academia.edu/8541195/Biografi_Susilo_Bambang_Yudhoyono)> [accessed 30 November 2022]

CNN Indonesia, 'Sejarah Singkat Orde Lama Di Bawah Pemerintahan Soekarno', *CNN Indonesia*, 2022

Dian Maharani, Deytri Robekka Aritonang, "'Ini Hasil Resmi Rekapitulasi Suara Pilpres 2014'", *Kompas.Com*, 2014

<<https://nasional.kompas.com/read/2014/07/22/20574751/Ini.Hasil.Resmi.Rekapitulasi.Suara.Pilpres.2014>>

Djaya, Tamar, *Soekarno Hatta Ada Persamaan Dan Perbedaannya*, 1983

Djelantik, Sukawarsini, Ratih Indraswari, Albert Triwibowo, and Stanislaus Risadi Apresian, 'Komunikasi Internasional Dalam Era Informasi Dan Perubahan Sosial Di Indonesia', *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 12.7 (2016), 105–6

Drs. Hery Noer Aly, MA, 'Bab II Landasan Teori', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2018), 1689–99

Engel, *Gabungan Teori Administrasi, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2014

'Evaluasi Satu Tahun Komisi Pemberantasan Korupsi (2020) | ICW' <<https://antikorupsi.org/id/article/evaluasi-satu-tahun-komisi-pemberantasan-korupsi-2020>> [accessed 5 December 2022]

Fabiana Meijon Fadul, 'BIOGRAFI DAN PERJUANGAN SOEKARNO', 2019

———, 'KEBIJAKAN PUBLIK', 2019, 11–45

Fitria CHusna Farisa, 'Jokowi Pamer Bangun 1.900 Km Jalan Tol Dalam 7 Tahun, Ini Perbandingannya Dari Masa Ke Masa', *Kompas.Com*, 2022 <<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/16/10334961/jokowi-pamer-bangun-1900-km-jalan-tol-dalam-7-tahun-ini-perbandingannya-dari>>

Hermawan, Sigit, and Amirullah, 'Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif', *Metode Penelitian Bisnis Bandung*, 2021, 264

'[Http://www.gentasuararevolusi.com/index.php/biografi.html](http://www.gentasuararevolusi.com/index.php/biografi.html)'

Hutabarat, Delvira, 'Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Mengakhiri Sistem Pemerintahan Liberal Indonesia', *Liputan6.Com*, 2021

Ii, B A B, 'Bab Ii Biografi Dan Rekam Jejak Karier Politik Jokowi', 1961, 20–29

Ii, B A B, Gus Dur, and Megawati Di, 'Bab II Kebijakan Ekonomi Pasar Sebelum

Masa Semerintahan SBY’, 1999, 17–35

Ii, B A B, and A Kebijakan Publik, ‘Bab II Landasan Teori Kebijakan Publik (Evaluasi Kaki Lima Di Kabupaten Kampar)’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2017, 9–35

Ii, B A B, A Kebijakan Publik, and Pengertian Kebijakan, ‘Amri Marzali, Antropologi Dan Kebijakan Publik (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 20. 13’, 13–57

INDONESIA, PRESIDEN REPUBLIK, ‘Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi’, *NATIONAL JOURNAL of LAW*, 3.2 (2020) <<https://doi.org/10.47313/njl.v3i2.919>>

Junaidi Robert, *Gaya Kepemimpinan Para Tokoh Dunia*, 2014

Kasenda, Peter, *Soekarno Muda: Biografi Pemikiran 1926-1933*

‘Kebijakan Megawati Soekarnoputri Pada Masa Reformasi Halaman All - Kompas.Com’  
<<https://www.kompas.com/stori/read/2022/03/31/080000179/kebijakan-megawati-soekarnoputri-pada-masa-reformasi?page=all>> [accessed 5 December 2022]

‘Kebijakan Publik - Ravyansah, Sukarman Purba, Bambang Irawan, Alfansyah Fathur, Putu Eka Purnamaningsih, Kadek Wiwin Dwi Wismayanti, Ni Wayan Ari Sudiartini, Abd Haris, Suwardi, M Doddy SA, Dian Sari - Google Buku’  
<[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=eC93EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA23&dq=%09Kewenangan/+Struktur+Birokrasi++Kewenangan+merupakan+otoritas/+legitimasi+bagi+para+pelaksana+dalam+melaksanaka n+kebijakan+yang+ditetapkan+secara+politik+\(Afandi+%26+Warjio,+2015\) .+Kewenangan+ini+berkaitan+dengan+struktur+birokrasi+yang+melekat+pa da+posi&ots=sqNMAvL3yi&sig=K59JnyNFbCqXGke40hLqZSZexzY&redir\\_esc=y#v=onepage&q=%09Kewenangan%2F Struktur Birokrasi Kewenangan merupakan otoritas%2F legitimasi bagi para pelaksana dalam](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=eC93EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA23&dq=%09Kewenangan/+Struktur+Birokrasi++Kewenangan+merupakan+otoritas/+legitimasi+bagi+para+pelaksana+dalam+melaksanaka n+kebijakan+yang+ditetapkan+secara+politik+(Afandi+%26+Warjio,+2015) .+Kewenangan+ini+berkaitan+dengan+struktur+birokrasi+yang+melekat+pa da+posi&ots=sqNMAvL3yi&sig=K59JnyNFbCqXGke40hLqZSZexzY&redir_esc=y#v=onepage&q=%09Kewenangan%2F Struktur Birokrasi Kewenangan merupakan otoritas%2F legitimasi bagi para pelaksana dalam)>

melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik (Afandi %26 Warjio%2C 2015). Kewenangan ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat pada posisi [accessed 30 November 2022]

*KEPEMIMPINAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO MENJADI PRESIDEN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA*

<[https://www.researchgate.net/profile/Indah-Asih/publication/352477700\\_KEPEMIMPINAN\\_SUSILO\\_BAMBANG\\_YUDHOYONO\\_MENJADI\\_PRESIDEN\\_NEGARA\\_REPUBLIK\\_INDONESIA/links/60caf366458515dc17897370/KEPEMIMPINAN-SUSILO-BAMBANG-YUDHOYONO-MENJADI-PRESIDEN-NEGARA-REPUBLIK-INDONESIA.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Indah-Asih/publication/352477700_KEPEMIMPINAN_SUSILO_BAMBANG_YUDHOYONO_MENJADI_PRESIDEN_NEGARA_REPUBLIK_INDONESIA/links/60caf366458515dc17897370/KEPEMIMPINAN-SUSILO-BAMBANG-YUDHOYONO-MENJADI-PRESIDEN-NEGARA-REPUBLIK-INDONESIA.pdf)> [accessed 30 November 2022]

Korupsi, Cegah, 'Korupsi Era Orde Lama', *Cegahkorupsi.Com*, 2015

Legge, J. D., *Soekarno, Sebuah Geografi Politik*

Manajemen, Jurnal, and Pendidikan Islam, 'Menakar Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Islam Di Indonesia Era Reformasi (Presiden Habibie Sampai Presiden Jokowi Jilid I)', *Al-Fahim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2.2 (2020), 13–38  
<<https://doi.org/10.54396/ALFAHIM.V2I2.89>>

Mansur, Jumria, 'Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik', *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6.2 (2021), 324–34  
<<https://doi.org/10.30829/AJEI.V6I2.7713>>

Mustari, Nuryanti, 'Pemahaman Kebijakan Publik( Formulasi,Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik)', *Kebijakan Publik Deliberatif*, 1 (2015), 286

Mutia Anggraini, 'Tujuan Kebijakan Publik Hingga Tahapan Pembentukannya, Ketahui Secara Lengkap', *Merdaka.Com*, 2020

Nawawi, 'Pearch. Robinson, Manajemen Startegik: Formulasi, Impilmentasi, Dan Pengendalian. Binarupa Aksara: Jakarta. 1997. Hal 47-48 1', *Strategic Management*, 1997

Nur Rohim Yunus, 'Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi

Penyebaran Corona Virus Covid-19'  
<[https://www.researchgate.net/profile/Nur-Yunus/publication/340103987\\_Kebijakan\\_Pemberlakuan\\_Lock\\_Down\\_Sebagai\\_Antisipasi\\_Penyebaran\\_Corona\\_Virus\\_Covid-19/links/5e8734ce4585150839ba0cce/Kebijakan-Pemberlakuan-Lock-Down-Sebagai-Antisipasi-Penyebaran-Corona-Virus-Covid-19.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Nur-Yunus/publication/340103987_Kebijakan_Pemberlakuan_Lock_Down_Sebagai_Antisipasi_Penyebaran_Corona_Virus_Covid-19/links/5e8734ce4585150839ba0cce/Kebijakan-Pemberlakuan-Lock-Down-Sebagai-Antisipasi-Penyebaran-Corona-Virus-Covid-19.pdf)>  
[accessed 30 November 2022]

'Pilpres 2004: Pertama Dalam Sejarah Pemilihan Presiden Digelar Langsung'  
<<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/06050031/pilpres-2004--pertama-dalam-sejarah-pemilihan-presiden-digelar-langsung->> [accessed 5 December 2022]

Pramono, Joko, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik, Kebijakan Publik*, 2020

Prasetyo, ALEX, 'Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2004-2009', 2019  
<<https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/91785>> [accessed 30 November 2022]

Pringgodigjo, A. K., *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia* (Dia Rakyat, 1991)

Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani, 'Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik', 2016, 1–12

Rangga, Aditya, 'Perbedaan Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Parlementer', *Cerdika.Com*, 2020

Regita, Selsya Billa, 'Kepemimpinan Indonesia Dari Masa Ke Masa', *Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 2021

Roring, Franky P., 'Retorika Soekarno Dalam komunikasi Internasional Anti Imprealisme Dan Kapitalisme', *Jurnal Oratio Directa*, 1.1 (2018), 44–62

Saleh, Nurdin, 'Gelora Senayan Siap Berubah Menjadi Gelora Bung Karno', *Tempo.Co*, 2003

Saputra, Surya Dwi, Thomas Gabriel J, and Mhd Halkis, 'Analisis Strategi

Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara Dari DKI Jakarta Ke Kutai Kartanegara Dan Penajam Paser Utara) Strategy Analysis Relocation Of The Capital Cit', *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, 7 (2021), 192

Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*

Suaib, Muhamad Ridha, 'Pengantar Kebijakan Publik', 2016

Subianto, Agus, *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan < Implementasi Dan Evaluasi, Brilliant an Imprint of MIC Publishing COPYRIGHT, 2020*

Sudin, Idris, 'Jurnal Implementasi Kebijakan Idris Sudin', 2008

Sulfachriadi, 'Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Pemerintahan Soekarno (1949-1966)', *Skripsi*, 2015, 21–23

Syarifudin, Encep, 'Teori Kepemimpinan', *Alqalam*, 21.102 (2004), 459  
<<https://doi.org/10.32678/alqalam.v21i102.1644>>

Tahir, Arifin, 'Kebijakan Publik Dan Good Governancy', 2018, 1–174

'TEORI KEPEMIMPINAN DAN TOKOH PEMIMPIN - ADELEYID LAKORO - UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO'  
<<https://mahasiswa.ung.ac.id/561419042/home/2022/10/3/teori-kepemimpin-an-dan-tokoh-pemimpin.html>> [accessed 30 November 2022]

Trisnawati, Rina, 'Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada DPRD Provinsi Jawa Tengah Dan DPRD Kabupaten Karanganyar)', *Seminar Nasional Dan Call For Paper*, October, 2014, 27–32  
<<http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/4600>> [accessed 30 November 2022]

Ventica Cardea, 'Gaya Kepemimpinan Jokowi Dalam Memimpin Indonesia', *Kompasiana*, 2019  
<<https://www.kompasiana.com/venticacardea4526/5de74e97097f362ce125d8c2/gaya-kepemimpinan-jokowi-dalam-memimpin-indonesia?page=1&page>>

\_images=1>

Wahyuni Sahara, 'Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 Yang Menjerat Juliari Hingga Divonis 12 Tahun Penjara', *Kompas.Com*, 2021 <<https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis>>

Widiatmaja, Aji, and Ulul Albab, 'Indonesia Di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Dan Joko Widodo: Kebijakan Luar Negeri Di Tengah Dinamika Lingkungan [Indonesia under Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) and Joko Widodo: Foreign Policy in the Middle of Regional Strategic Environment Dynamics]', *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 10.1 (2019), 77–93 <<https://doi.org/10.22212/JP.V10I1.1313>>

Yayat, Rukayat, 'Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Gamping', *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)*, 2, 2017, 56–65